



SEJARAH REVOLUSI KEMERDEKAAN DAERAH SULAWESI UTARA



ektorat
ayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Milik Dep. P dan K
Tidak diperdagangkan.

959.892

LAU

**SEJARAH
REVOLUSI KEMERDEKAAN
DAERAH
SULAWESI UTARA**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
JAKARTA 1983**

**PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT MUSEUM**

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT MUSEUM

TANGGAL: 7 Maret 1984

ASAL-USUL No: 116/84 JN

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah di antaranya ialah naskah Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Utara tahun 1979/1980

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih.

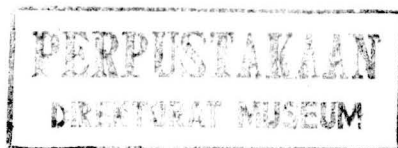
Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari Drs. Laurens TH. Manus, Drs. Anthon Sigarlaki, Drs. Robert Tandi, Drs. Albert E. Rompas dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari Sutrisno Kutoyo, Drs. A.B. Lopian.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya. —

Jakarta, April 1983. —

Pemimpin Proyek,


Drs. H. Bambang Suwondo
NIP. 130 117 589



SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1979/1980 telah berhasil menyusun naskah Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Utara.

Selesainya naskah ini disebabkan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara, serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, April 1983

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130 119 123.

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	iii
KATA SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vii
I. PENDAHULUAN	1
II. Masa Pemerintahan Penduduk Jepang (1942-1945) ..	8
A. Bidang Pemerintahan	8
B. Bidang Sosial Ekonomi	22
C. Kegiatan Organisasi Politik Dan Sosial	42
III. Keadaan Sesudah Proklamasi Kemerdekaan	65
A. Kegiatan Masyarakat	65
B. Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia Di Daerah	77
C. Pembentukan Organisasi Kemiliteran (Perjuangan Bersenjata) Di Daerah	87
D. Kedatangan Tentara Sekutu dan Tentara Nica ...	102
IV. Perjuangan Di Daerah	115
A. Masa Aksi Militer Belanda I	148
B. Masa Aksi Militer Belanda II Perang Gerilya	154
C. Interaksi Dengan Berbagai Kejadian Tingkat Na- sional	159
D. Perjuangan Masyarakat Pada Berbagai Bidang Po- litik	166
V. Keadaan Menjelang Akhir Revolusi	184
A. Masa Menjelang Persetujuan KMB	184
B. Konperensi Antar Indonesia	188
C. Cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia ...	189
D. Kegiatan Pada Berbagai Bidang Kehidupan	192
E. Pelaksanaan Hasil KMB	198
VI. Penutup	225
Glossarium	228
Index	234

I. PENDAHULUAN

Wilayah yang menjadi obyek dalam tulisan ini meliputi seluruh daerah yang sekarang ini dikenal sebagai Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, yang dipimpin oleh seorang Gubernur/Kepala Daerah. Propinsi Sulawesi Utara terdiri dari tujuh daerah yang lebih kecil dengan statusnya masing-masing sebagai berikut :

1. Kotamadya Daerah Tingkat II Manado, yang menjadi tempat kedudukan ibukota propinsi;
2. Kotamadya Daerah Tingkat II Gorontalo;
3. Kabupaten Daerah Tingkat II Sangir Talaud dengan ibukota Tahuna;
4. Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa dengan ibukota Tondano;
5. Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dengan ibukota Limboto;
6. Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow dengan ibukota Kotamobagu; dan
7. Kota Administratip Bitung.

Kotamadya dipimpin oleh seorang Walikotamadya sedangkan Kabupaten oleh seorang Bupati/Kepala Daerah. Kota Administratip dipimpin oleh seorang Walikota Administratip.

Dalam menjalankan tugasnya, Gubernur/Kepala Daerah didampingi oleh sebuah dewan yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I Sulawesi Utara, dan bersama-sama dewan itu merupakan Pemerintah Daerah. Hal inipun berlaku untuk daerah tingkat II kecuali untuk Kota Administratip. Masing-masing pejabat mulai Gubernur, Walikota, Bupati dan Walikota Administratip, memiliki stafnya yang bekerja demi kelancaran tugas rutin dan tugas pembangunan masing-masing pejabat itu.

Menilik sejarahnya, daerah ini sebagai suatu kesatuan administratif dimulai ketika pemerintah kolonial Belanda tahun 1824 membentuk Keresidenan Manado yang merupakan pecahan dari Keresidenan Ternate. Wilayah Keresidenan Manado ini meliputi wilayah yang luasnya sama dengan luas wilayah yang sekarang ini merupakan Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Sulawesi Tengah, kecuali Sangir Talaud. Baru setahun kemudian (1825) daerah Sangir Talaud dilepaskan dari Keresidenan Ternate dan dimasukkan ke Keresidenan Manado. Hal ini diatur antara lain dalam Surat

Keputusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 14 Juni 1824 Nomor 10 (Staatsblad 1824/28a). Sejak waktu itu maka wilayah Sulawesi Utara/Tengah tidak lagi di bawah Keresidenan Ternate, tetapi langsung di bawah Gubernur Maluku yang berkedudukan di Ambon (Arsip Nasional, 1971 : 45, 156–157; Manus dkk, 1978 : 19,21).

Wilayah Sulawesi Utara/Tengah yang tergabung dalam Keresidenan Manado ini bertahan terus sampai akhir pemerintahan Hindia Belanda 1942, digantikan oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Dengan menyerahnya Residen Manado 11 Januari 1942 kepada Jepang, maka praktis seluruh Sulawesi Utara/Tengah berada di bawah penguasaan tentara pendudukan yang kemudian mendirikan pemerintahan pendudukan. Dalam masa ini Keresidenan Manado disebut Menado-Syucosyo, mulai September 1942 disebut Menado-Sibu, dan sejak 1943 disebut Menado-Syu sampai akhir masa pendudukan Jepang (Manus dkk, 1978 : 198–199; Watusseke, 1968 : 57; Palit, 1978: 47).

Setelah Jepang menyerah kalah, maka Belanda kembali dan berhasil menguasai serta mendirikan kembali Keresidenan Manado. Tahun 1946 terjadi pemberontakan terhadap Belanda menyebabkan wilayah ini berhasil dibebaskan selama 24 hari (14 Pebruari – 11 Maret 1946) digabungkan kepada RI yang berpusat di Yogyakarta. Sesudah itu Belanda kembali berkuasa dan sejak 24 Desember 1946 digabungkan ke dalam Negara Indonesia Timur (NIT). Sampai akhir 1949, pemerintahan dipegang dan dijalankan oleh seorang Residen. Ketika NIT akhir 1949 membentuk tiga Komisariat Negara, maka wilayah ini diperintah oleh seorang Komisaris Negara yang kedudukannya dapat disamakan dengan Gubernur. Wilayah Komisariat Negara waktu itu disebut Komisariat Negara Sulawesi Utara dan Maluku Utara dengan Ibukota Manado.

Dengan demikian maka sebuah Komisariat Negara dapat disamakan statusnya dengan sebuah Propinsi sehingga jabatan Komisaris Negara dapat disamakan dengan Gubernur. Wilayah Komisariat Negara ini lebih kecil dari Keresidenan Manado dahulu yang sampai ke Sulawesi Tengah. Walaupun sudah dikurangi dengan Sulawesi Tengah tetapi ditambahkan dengan daerah Maluku Utara, sehingga dapat dikatakan meliputi daerah Minahasa, Sangir Talaud, Gabungan Sulawesi Utara (Gorontalo, Bolaang Mongondow dan Buol) serta Maluku Utara. Setelah terwujudnya RI tahun 1950, Komisariat Negara Sulawesi Utara Maluku Utara dihapuskan dan

dikembalikan ke status Keresidenan Manado seperti semula (Watu-seke, 1968 : 63).

Perlu ditekankan bahwa daerah Sulawesi Utara tidak dapat dipisahkan dari Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada tahun itu tercatat pembentukan Propinsi Sulawesi di mana Sulawesi Utara termasuk di dalamnya. Gubernur yang pertama adalah DR. G.S.S.J. Ratulangi yang berkedudukan di Makasar sebagai Ibukota. Namun karena dihalang-halangi oleh politik Belanda di bawah DR. H.J. van Mook, maka beliau tidak dapat secara efektif menjalankan tugasnya bahkan kemudian ditangkap dan dibuang ke Irian Jaya, setelah bertugas hanya 9 bulan lamanya (Kempen, 1953 : 176-177; Manus dkk, 1978 : 1).

Propinsi Sulawesi sebagai bagian dari RI nanti diaktipkan lagi mulai 17 Agustus 1950 dengan diangkatnya Acting Gubernur B.W. Lapien, kemudian mulai 1 Juli 1951 di bawah Gubernur Sudiro. Status pulau Sulawesi sebagai satu propinsi berakhir tahun 1960 dengan dibentuknya dua propinsi administratif, yaitu Propinsi Sulawesi Selatan/Tenggara dengan ibukota Makasar dan Propinsi Sulawesi Utara/Tengah dengan ibukota Manado. Masing-masing propinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Gubernur Propinsi Sulawesi Utara/Tengah yang pertama adalah A. Baramuli SH yang diangkat dengan Surat Keputusan Presiden No. 122/M tanggal 31 Maret 1961, mulai 1 Juni 1961.

Sesuai UU No. 47/1960 dan Perpres No. 5/1960 maka wilayah Propinsi Sulawesi Utara/Tengah meliputi Kotapraja Manado, Kotapraja Gorontalo, Dati II Sangir Talaud, Dati II Minahasa, Dati II Bolaang Mongondow, Dati II Gorontalo, Dati II Buol/Tolitoli, Dati II Donggala, Dati II Poso dan Dati II Luwuk/Banggai. Bila dibandingkan maka wilayah ini sama dengan luas wilayah Keresidenan Manado dahulu.

Dalam tahun 1964 terjadi lagi perobahan wilayah di mana Sulawesi Tengah dilepaskan dari Sulawesi Utara. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/1964. Berdasarkan peraturan itu maka terbentuklah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Gubernur. Wilayah Sulawesi Utara terdiri dari Kotapraja Manado, Kotapraja Gorontalo, Dati II Sangir Talaud, Dati II Minahasa, Dati II Bolaang Mongondow dan Dati II Gorontalo.

Dengan berlakunya UU No. 18/1955 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan Daerah maka sebutan Kotapraja diubah menjadi Kotamadya dan Dati II (Daerah Tingkat II) menjadi Kabupaten. Kemudian berdasarkan UU No. 5/1974 maka Propinsi menjadi Propinsi Daerah Tingkat I, Kotamadya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II dan Kabupaten menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II. Sebutan dan status yang mengikutinya tetap berlaku sampai sekarang ini sebagaimana sudah dikemukakan di depan.

Yang menduduki jabatan sebagai Gubernur sejak tahun 1961 ketika berstatus Propinsi Sulawesi Utara/Tengah ialah A. Baramuli SH (1 Juni 1961 – 15 Juni 1962), F.J. Tumbelaka (15 Juni 1962 – 19 Maret 1965), dan Sunandar Prijosudarmo (pejabat, 19 Maret 1965 – 27 April 1966). Sejak terbentuknya Propinsi Sulawesi Utara, yang menjadi Gubernur yakni Abdullah Amu (27 April 1966 – 2 Maret 1967, pejabat), H.V. Worang (2 Maret 1967 – 2 Maret 1972; pejabat 2 Maret 1972 – 12 Maret 1973; 12 Maret 1973 – 2 Maret 1977; pejabat 12 Maret 1977 – 21 Juni 1978), Willy G.A. Lasut, (21 Juni 1978 – 20 Oktober 1979), Erman Harirustaman, pejabat sejak 20 Oktober 1979 –), dan G.J. Mantik (sejak

Jumlah penduduk Sulawesi Utara dari hasil sensus penduduk yakni 748.000 (1930), 1.351.534 (1961), 1.717.223 (1971), 1.822.960 (1975) dan 1.932.899 (1976). Pertambahan penduduk rata-rata sejak 1930–1961 adalah 2½% dan dalam periode berikutnya rata-rata 1,8% (sampai 1976). Mengenai jumlah penduduk menurut golongan agama per daerah, dapat dilihat dalam tabel berikut.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA
SE-SULAWESI UTARA TAHUN 1975

D A E R A H	Islam	Kristen	Katolik	Hindu/ Budha	Jumlah
1	2	3	4	5	6
Kotamadya Manado	46.953	98.815	29.196	6.818	181.782
Kotamadya Gorontalo	82.525	1.946	95	734	85.300
Kabupaten Sangir Talaud	32.500	193.612	3.090	—	229.202
Kabupaten Minahasa	124.769	543.350	49.149	1.250	718.518
Kabupaten B. Mongondow	180.807	39.403	1.829	2.776	224.815
Kabupaten Gorontalo	379.512	2.962	116	753	383.343
J U M L A H :	847.066	880.088	83.475	12.331	1.822.960

Sampai tahun 1977 penduduk Sulawesi Utara meningkat jumlahnya menjadi 1.953.824. Persebarannya per daerah yaitu Kota-

madya Manado 188.148, Kotamadya Gorontalo 89.619, Kabupaten Sangir Talaud 243.611, Kabupaten Minahasa 623.991, Kabupaten Bolaang Mongondow 263.871, Kabupaten Gorontalo 472.626. Untuk Kota Administratif Bitung terdapat jumlah penduduk sebesar 73.018 jiwa.

Luas seluruh daerah Sulawesi Utara adalah 25.786 Km² yang meliputi 83 kecamatan dan 1.159 desa. Untuk jelasnya, dapat dilihat dalam tabel berikut.

PERINCIAN JUMLAH KECAMATAN, DESA DAN LUASNYA
SE-PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 1977

D A E R A H	Penduduk	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Luas/ Km ²
1	2	3	4	5
Kotamadya Manado	188.148	3	24	117
Kotamadya Gorontalo	89.619	3	39	66
Kabupaten Sangir Talaud	243.611	16	211	2.273
Kabupaten Minahasa	623.991	27	434	4.403
Kabupaten B. Mongondow	263.871	15	203	7.600
Kabupaten Gorontalo	472.626	16	213	11.030
Kota Administratif Bitung	73.018	3	35	297
J U M L A H :	1.953.824	83	1.159	25.786

Di daerah Sulawesi Utara sampai tahun 1976 terdapat sebanyak 1.839 buah Sekolah Dasar (SD) baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta. Mengenai jumlah dan status SD tersebut adalah sebagai berikut.

JUMLAH DAN STATUS SD SE-PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 1976

D A E R A H	Status SD				Jumlah
	Negeri	Subsidi	Berbantuan	Swasta	
1	2	3	4	5	6
Kotamadya Manado	46	51	17	7	121
Kotamadya Gorontalo	101	—	3	1	105
Kabupaten Sangir Talaud	67	114	69	—	250
Kabupaten Minahasa	194	391	9	41	635
Kabupaten B. Mongondow	213	2	30	3	248
Kabupaten Gorontalo	410	1	3	14	428
J U M L A H :	1.042	593	135	69	1.839

Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di daerah Sulawesi Utara serta jumlah guru dan muridnya adalah sebagai berikut.

JUMLAH DAN JENIS SLTP, GURU DAN MURID
SE-PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 1976

Jenis Sekolah	Jumlah	Guru	Murid
1	2	3	4
S M P	240	2.497	44.016
S M E P	36	509	6.642
S K K P	15	184	1.719
S T	10	139	1.852
J U M L A H :	301	3.329	53.229

Mengenai jumlah dan jenis Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta jumlah guru dan murid adalah sebagai berikut.

JUMLAH DAN JENIS SLTA, GURU DAN MURID
SE-PROPINSI SULAWESI UTARA, TAHUN 1976

Jenis Sekolah	Jumlah	Guru	Murid
1	2	3	4
S M A	41	723	11.348
S M E A	26	445	6.005
S K K A	62	101	828
S T M	4	126	1.406
S P G	4	175	3.026
S G O	3	36	295
J U M L A H :	140	1.606	22.908

Perkembangan dalam bidang ekonomi, khususnya sektor pertanian, di daerah Sulawesi Utara adalah sebagai berikut (khususnya kopra, cengkeh, padi dan jagung): Hasil kopra pada awal PELITA I adalah 170.387 ton (1969). Produksi Kopra sesudah itu berturut-turut sampai tahun 1977 adalah : 188.135 ton, 171.894 ton, 171.874 ton, 151.104 ton, 153.540 ton, 175.508 ton, 180.104 ton dan 181.000 ton (angka sementara 1977). Hasil produksi cengkeh 1969 adalah 2.007 ton, 1970: 2.103 ton, 1971: 2.002 ton, 1973: 3.000 ton, 1975: 2.800 ton sedangkan untuk tahun 1979/1980 diperkirakan akan mencapai 20.000 ton. Produksi cengkeh ini bersifat musiman sehingga jumlah produksi

tidak tetap.

Luas sawah pada tahun 1969 adalah 37.996 Ha, luas ladang padi 17.238 Ha, dan luas ladang jagung 59.569 Ha pada tahun 1969. Untuk tahun 1976, perinciannya adalah sebagai berikut:

**LUAS DAN PRODUKSI PADI SAWAH, PADI LADANG DAN JAGUNG
SE-PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 1976
(Ha/Ton)**

D A E R A H	Padi Sawah		Padi Ladang		Jagung	
	Luas	Produksi	Luas	Produksi	Luas	Produksi
1	2	3	4	5	6	7
Kotamadya Manado	110	232	—	—	173	131
Kotamadya Gorontalo	1.760	9.220	—	—	4.387	362
Kabupaten Sangir Talaud	—	—	—	—	361	2.562
Kabupaten Minahasa	32.016	128.831	19.575	19.575	56.969	67.997
Kabupaten B. Mongondow	19.665	73.542	9.601	9.601	16.409	22.057
Kabupaten Gorontalo	19.746	86.743	10.020	10.020	39.812	38.689
J U M L A H :	73.297	298.568	39.196	39.196	118.111	121.798

Dalam sektor industri yang terpenting adalah industri pengolahan kopra menjadi minyak kelapa. Perusahaan-perusahaan minyak kelapa di Sulawesi Utara yang terutama adalah : PT. Bimoli (81 ribu ton/tahun), PT Inimexintra (72 ribu ton/tahun), PT Bukt (54 ribu ton/tahun), PT KVO (36 ribu ton/tahun) dan PT Unicotin Ltd (81 ton tepung kelapa/tahun). Selain itu terdapat beraneka ragam perusahaan industri antara lain industri penggilingan biji-bijian, industri makanan, percetakan/penerbitan, barang-barang kimia, dan sebagainya.

II. MASA PEMERINTAHAN PENDUDUKAN JEPANG (1942 – 1945)

A. BIDANG PEMERINTAHAN

Sejalan dengan ofensif militernya dalam Perang Dunia II, maka awal 1942, tepatnya 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya untuk merebut Keresidenan Manado. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Keresidenan Manado meliputi wilayah yang sekarang ini telah menjadi Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Sulawesi Tengah. Untuk mempertahankan keresidenan ini, pemerintah kolonial hanya memusatkan kekuatan militer di Minahasa saja. Hal ini telah lebih dahulu diketahui Jepang yang banyak memiliki mata-mata orang Jepang sebelum pendaratan dilakukan. Dengan demikian maka sasaran militer Jepang hanyalah dipusatkan di Minahasa (Manus dkk, 1978 : 193 – 194).

Pendaratan pasukan Jepang di Minahasa dilakukan pada tiga lokasi yaitu di Kema, Manado dan Kalawiran. Kema dan Manado terletak di tepi pantai dan dilakukan oleh puluhan kapal perang dan kapal pengangkut pasukan. Pendaratan di Kalawiran dilakukan melalui udara, yaitu dengan menerjunkan pasukan payung. Baik pasukan yang didaratkan melalui laut maupun yang diterjunkan dari udara, adalah bagian dari Kaigun (Angkatan Laut). Pendaratan melalui laut dipimpin oleh Letnan Kolonel Hashimoto, sedangkan melalui udara dipimpin oleh Letnan Kolonel Horiuchi dibantu Letnan Kolonel Horinte. Dalam satu hari saja, pemusatan pertahanan Belanda di Kema, Airmadidi, Manado, Tinoor, Kakaskasen dan Kalawiran serta tempat-tempat lainnya, berhasil dihancurkan Jepang (Marunduh, 1978: 54; Manus dkk, 1978 : 195; Palit, 1978 : 27–28; Wowor, 1977 : 18).

Sebelum pendaratan itu dilakukan, Keresidenan Manado dikepalai oleh Residen Hirschman. Ia membawahi beberapa Asisten Residen sedangkan Asisten Residen membawahi Controleur. Pada masa itu Keresidenan Manado terdiri dari empat afdeeling, 10 onderafdeeling dan lebih dari 20 kerajaan berstatus landschap. Sebagian dari keresidenan yang sekarang ini termasuk wilayah Sulawesi Utara, terdiri dari dua afdeeling, tiga onderafdeeling serta 10 kerajaan yang berstatus landschap (Rhijn, 1941 : 267; Manus dkk, 1978 : 64–65). Asisten Residen mengepalai onder-

afdeeling, sedangkan Controleur mengepalai Onderafdeeling. Kedua afdeeling itu adalah Afdeeling Manado dan Afdeeling Gorontalo. Ketiga Onderafdeeling adalah Onderafdeeling Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangir dan Bolaang Mongondow.

Lebih jauh lagi, Afdeeling Manado yang dipimpin oleh Asisten Residen sejak 1911 membawahi kota Manado dan daerah Minahasa serta berkedudukan di Manado sebagai ibukota dari Afdeeling itu. Afdeeling Gorontalo membawahi kota Gorontalo dan daerah Gorontalo di mana Asisten Residen berkedudukan di kota Gorontalo. Onderafdeeling Talaud membawahi seluruh kepulauan Talaud dan Controleur berkedudukan di Beo. Onderafdeeling Sangir membawahi seluruh kepulauan Sangir dan Controleur berkedudukan di Tahuna. Onderafdeeling Bolaang Mongondow membawahi wilayah empat kerajaan di sana dan Controleur berkedudukan di Kotamobagu (Sigarlaki dkk, 1977 : 105; Manus dkk, 1978 : 21-23; Parengkuan, 1978 : 1).

Minahasa

Dengan berhasilnya Jepang menduduki Minahasa, maka langkah pertama yang dilakukan Jepang ialah memerintahkan seluruh personil militer Belanda agar menyerahkan diri. Kemudian dikeluarkan instruksi agar seluruh pejabat sipil dari seluruh Keresidenan Manado datang melaporkan diri kepada Komandan Pasukan Pendudukan, Letnan Kolonel Horiuchi yang berkedudukan di Langowan (Minahasa). (Marunduh, 1978 : 60, 62; Manus dkk, 1978 : 197). Instruksi kepada para pejabat sipil itu dikeluarkan sekitar akhir Januari 1942.

Sulawesi Utara pada masa itu bersama-sama dengan wilayah Indonesia Timur lainnya diduduki oleh pasukan-pasukan Angkatan Laut (Kaigun). Pusat pemerintahan militer Jepang untuk Indonesia Timur berkedudukan di Makasar (sekarang Ujung Pandang). Organisasi pemerintahannya untuk Indonesia Timur disebut Minseifu yang dipimpin oleh pejabat yang disebut Soka. Minseifu Indonesia Timur ini membawahi tiga wilayah yang lebih kecil yang disebut Minsei, yaitu Minsei Kalimantan, Minsei Sulawesi dan Minsei Seram (Sihombing, 1962 : 71; Manus dkk, 1978 : 198). Sulawesi Utara dengan sendirinya termasuk dalam Minsei Sulawesi.

"Keresidenan Manado" diganti dengan istilah Jepang hingga namanya menjadi Menado Syu. Kepala Pemerintahan Menado

Syu mula-mula disebut Menado Syucosyoco. Mulai September 1942 disebut Menado Sibuco tetapi sejak 1943 sampai berakhirnya pendudukan Jepang, disebut Menado Syuciji. Kantor pusat pemerintahan Menado Syu disebut Minseibu (Manus dkk, 1978 : 198-199; Palit, 1978 : 47; Watuseke, 1968 : 57).

Mengenai susunan tata pemerintahan daerah tidak diadakan perubahan yang berarti, dengan pengertian bahwa hanya istilah jabatan Belanda diganti dengan istilah Jepang. Dengan demikian maka susunan pemerintahan masa itu lengkapnya adalah sebagai berikut (Marunduh, 1978 : 64; Manus dkk, 1978 : 199) :

1. Keresidenan Manado disebut Menado Syu, kepalanya disebut Mendao Syucosyoco, kemudian Menado Sibuco akhirnya disebut Menado Syuciji;
2. Afdeeling disebut Ken dan kepalanya disebut Kenkanrikan;
3. Onderafdeeling disebut Bunkan dan kepalanya disebut Bukenkanrikan;
4. Kerajaan disebut Su dan raja disebut Suco;
5. Distrik disebut Gun dan kepalanya disebut Gunco;
6. Onderdistrik disebut Fukugun dan kepalanya Fukugunco;
7. Desa disebut Son dan kepala desa disebut Sonco.

Dapat ditambahkan bahwa di Minahasa, wilayah administratif desa masih dibagi lagi atas beberapa bagian yang lebih kecil yang disebut "Jaga", dikepalai oleh "Kepala Jaga". Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Jaga dibantu oleh pamong desa yang disebut "Meweteng". Masa Jepang, Kepala Jaga disebut Kuco dan Meweteng disebut Kumico.

Dengan lari atau ditangkanya para pejabat Belanda maka akibatnya banyak jabatan sipil yang lowong. Lowongan jabatan itu kemudian diisi oleh orang-orang Jepang dan banyak pula yang diisi oleh pejabat-pejabat pribumi. Para pejabat pribumi yang datang melaporkan diri ke Langowan diperintahkan oleh Komandan Tentara Pendudukan, Letnan Kolonel Horiuchi, agar kembali ke posnya dan bertugas seperti biasa sampai ada ketentuan lebih lanjut. Mulai bulan Mei 1942 ditetapkanlah para pejabat sipil mulai tingkat Kepala Distrik ke atas lengkap dengan istilah jabatan Jepang di atas (Sigarlaki dkk, 1977 : 211). Namun dalam banyak hal mereka harus selalu menaati petunjuk atau perintah yang dikeluarkan oleh para komandan militer yang mendampinginya.

Sejak waktu itu maka Minahasa Ken (Afdeeling Minahasa) adalah terdiri dari enam Gun (Distrik) yakni Manado, Tonsea, Toulour, Kawangkoan, Amurang dan Ratahan. Kemudian dibentuk Langowan Gun yang merupakan pecahan dari sebagian Toulour Gun dan Kawangkoan Gun. Bulan Mei 1942 dibentuk lagi sebuah Gun baru, yakni Tomohon Gun, yang merupakan pecahan dari Manado Gun (Sigarlaki dkk, 1977 : 208). Jadi sampai pada akhir masa pendudukan Jepang, Minahasa Ken terdiri atas delapan Gun, yakni Manado, Tonsea, Tondano, Tomohon, Kawangkoan, Langowan, Amurang dan Ratahan.

Para Gunco (Kepala Distrik) yang diketahui antara lain Tomohon Gunco R.C.L. Lasut, Langowan Gunco Mogot, Amurang Gunco Dotulong. Dalam bulan Mei 1942 diangkatlah A.B.H. Waworuntu sebagai Manado Sico (Walikota Manado), sedangkan dr. A.B. Andu sebagai Minahasa Hyogikai Gico (Ketua Dewan Minahasa). Setelah Jepang mendatangkan para pegawai sipil sendiri, maka jabatan Walikota dan Ketua Dewan diambil alih oleh orang-orang Jepang sehingga A.B.H. Waworuntu diturunkan jabatannya menjadi Manado Fuku Sico (Wakil Walikota) sedangkan dr. A.B. Andu menjadi Minahasa Fuku Gico (Wakil Ketua Dewan Minahasa) (Palit, 1978 : 60–61; Taulu, 1950 : 74 – 75).

Setelah Letnan Kolonel Horiuchi mengakhiri masa tugasnya sebagai Komandan Tentara Pendudukan bekas Keresidenan Manado, maka ia diganti oleh Letnan Kolonel Hashimoto selaku Kepala Pemerintahan Militer (Menado Syucosyoco). September 1942 Hashimoto diganti oleh Panglima Yunomura selaku Menado Sibuco dan akhirnya dipegang oleh Laksamana Muda K. Hamanaka selaku Menado Syuciji sampai penyerahan kepada Sekutu tahun 1945. (Palit, 1978 : 60; Wowor, 1977 : 25; Watuseke, 1968 : 57–58; Taulu, 1950 : 74–75).

Sangir Talaud

Di daerah Sangir Talaud, sebelum kedatangan tentara Jepang telah dibentuk sebuah badan yang disebut "Komite Nasional" pada kira-kira bulan Maret 1942. Sangat menyesal bahwa susunan pengurus (pimpinan) badan ini tidak diketahui lagi, selain beberapa orang yang pernah menjadi pimpinan ataupun anggotanya seperti, antara lain : Eddy Sanger, Anton Liotohe, Nulus Liotohe, Willem Aer, Maniku dan lain-lain (Makahanap, wawancara 18 September 1979).

Sebelumnya yaitu pada tanggal 11 Desember 1941 di Siau juga telah didirikan sebuah badan yang disebut Komite Nasional Siau (KNS) dengan pimpinan sebagai berikut :

Ketua	: W.A. Kansil
Wakil Ketua	: M. Hermanses
Panitera I	: H.B. Elias
Panitera II	: C. Ponto
Anggota	: J. Mangary, P. Bogar, H. Bawana.

Maksud Komite ini adalah :

- a. melikwidasi semua kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Sangir Talaud serta menangkap semua orang Belanda dan menyerahkannya kepada Jepang;
- b. membentuk pemerintah darurat dan menjaga semua inventaris dari pemerintah lama.
- c. menjemput Jepang dan merundingkan persoalan kemerdekaan Indonesia selanjutnya, sesuai dengan keinginan kaum pergerakan semula (Elias, 1973 : 145-146).

Badan inilah yang dapat dikatakan telah mempersiapkan dan menyambut kedatangan Jepang di daerah Sangir Talaud dengan menangkap pembesar-pembesar pemerintah Hindia Belanda di sana, termasuk kepala pemerintahannya yaitu Controleur Krams. Juga pejabat-pejabat kulit putih penting lainnya seperti Direktur HIS, beberapa orang pendeta, semua dengan isterinya masing-masing, serta dr. G. Czesco. Mula-mula mereka ditampung di Asrama HIS di Tahuna. Kemudian bulan April 1942 bersama dengan beberapa anggota pemerintahan pribumi lainnya yang masih setia kepada Belanda, mereka diangkut dengan kapal motor ke Manado untuk diserahkan kepada Jepang, yang telah mendarat di sana sejak 11 Januari 1942. Hal ini dilakukan oleh anggota-anggota KNS di atas dengan didampingi oleh Raja Tahuna waktu itu ialah Engelhard Bastian (Makahanap, wawancara 18 September 1979; Tatimu, 1975 : 15).

Bulan Mei 1942, Raja Tahuna Engelhard Bastian bersama para anggota KNS di atas kembali dari Manado ke Tahuna dengan membawa surat penunjukan pemerintah Jepang untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan di daerah Sangir Talaud atas nama pemerintah pendudukan Jepang. Dengan ini maka mulailah pemerintahan Jepang di daerah Sangir Talaud, walaupun mula-mula belum secara langsung.

Pemerintahan darurat oleh Jepang yang dikuasakan kepada Engelhard Bastian ini hanya berlangsung selama setahun lebih, dan pada kira-kira bulan Juli 1943 telah mendarat di pelabuhan Tahuna sepasukan tentara Jepang sebanyak kira-kira dua kompi. Sejak saat inilah terus ditempatkan di Tahuna seorang kepala pemerintahan daerah Sangir Talaud yang dijabat oleh seorang perwira Jepang bernama Hirano dengan gelar Kenkanrikan. Di samping Kenkanrikan terdapat pula beberapa pejabat Jepang lainnya sebagai staf dari Kenkanrikan. Sebagai Kepala Kepolisian ditempatkan seorang perwira Jepang bernama Simiyo. Tugasnya adalah menjaga keamanan dan mengurus perkara-perkara pidana biasa. Sedangkan untuk mengurus dan memeriksa para tahanan politik, maka di Tahuna ditempatkan seorang Kempeitaico yang beranggotakan lima orang Kempei.

Di samping itu sebagai pemegang kekuasaan umum pemerintahan militer Jepang diserahkan kepada seorang perwira berpangkat Kolonel dengan gelar Butaico dan dibantu oleh beberapa perwira Jepang berpangkat Anggeo. Di Tahuna ditempatkan seorang kepala bagian ekonomi ialah Azakawa sedang di Gunung (kecamatan Tabukan Tengah) ditempatkan pula seorang kepala bagian pertanian ialah Humuro. Demikianlah sekilas lintas tentang pemerintahan militer Jepang di daerah Sangir Talaud. (Makahanap, wawancara 18 September 1979; Madonsa, wawancara 18 September 1979).

Keadaan pemerintahan sipil pada masa itu pada hakekatnya tidak jauh berbeda dengan keadaan pada masa pemerintahan Belanda. Hal ini ditinjau dari struktur pemerintahannya, di mana pada masa pemerintahan Belanda pucuk pimpinan tertinggi dipegang oleh seorang Belanda dengan gelar Controleur dan di bawahnya adalah pemerintahan oleh raja-raja yang di daerah Sangir Talaud ini berjumlah enam raja. Keenam kerajaan masa itu ialah Kerajaan Pulau-pulau Talaud, Kerajaan Tabukan, Kerajaan Kendahe-Tahuna, Kerajaan Manganitu Tamako, Kerajaan Siau dan Kerajaan Tagulandang (Madonsa, wawancara 18 September 1979; Sigarlaki dkk, 162, 210). Di bawah para raja ini terdapatlah kekuasaan oleh kepala distrik dengan gelar Jogugu dan di bawahnya para kepala kampung dengan gelar Kapten Laut. Struktur pemerintahan ini ternyata tetap dipertahankan Jepang, hanya istilah jabatan diganti dengan istilah Jepang. Dalam hal ini Controleur diganti Bunkenkanrikan, Raja diganti Suco, Jogugu diganti

Gunco dan Kapten Laut diganti Sonco (Monografi Daerah 1979 : 128).

Dengan demikian sebagai Bunkenkanrikan adalah Hirano, sedangkan Suco-suco (Raja-raja) yang berkuasa pada masa itu adalah (Monografi Daerah, 1979 : 130, Binilang, : 1) :

Suco Tahuna	: Engelhard Bastian (1942–1944)
Suco Tamako	: W.K.P. Mokodompis (1942–1944) diganti W. Kansil (1945)
Suco Tabukan	: K.J.L. Macpal (1942–1944) diganti Umar Muhamad (1945)
Suco Siau	: P.F. Parengkuan (1942–1945)
Suco Tagulandang	: W.Ph. Jacobs (1942–1944) diganti oleh Paul A. Tindas (1945)
Suco Talaud	: P.G. Koagouw (1942–1944) diganti oleh Th. Binilang (1944–1949)

Gorontalo

Sebelum masuknya Jepang di Gorontalo, atas perintah Residen di Manado telah dibentuk Vernielings Corps (VC) atau destroyer-groups (pasukan penghancur) yang bertugas untuk merusak atau menghancurkan bangunan-bangunan seperti jembatan, irigasi dan bahan-bahan yang dapat dipakai oleh Jepang apabila mereka memasuki Gorontalo. Rencana ini menimbulkan reaksi yang hebat dari tokoh masyarakat Gorontalo, antara lain Nani Wartabone yang berusaha menunda tindakan yang merugikan rakyat itu (Polontalo, 1977 : 6).

Di saat-saat situasi agak memburuk akibat pembumihangusan pertama terhadap gudang kopra dan gudang minyak di pelabuhan Gorontalo oleh Belanda, maka pada hari Jumat malam 16 Januari 1942, kaum nasionalis bergerak secara rahasia untuk menghadapi tindakan Belanda. Mereka mengadakan rapat dengan pemimpin-pemimpin rakyat bertempat di rumah kediaman dari R.M. Kusno Dhanupoyo di kampung Ipilo kota Gorontalo. Rapat itu menghasilkan keputusan pembentukan suatu badan perjuangan yang disebut "Komite Dua Belas". Susunannya adalah sebagai berikut :

Ketua	: Nani Wartabone
Wakil Ketua	: R.M. Kusno Dhanupoyo
Sekretaris I	: M.H. Buluati
Sekretaris II	: A.R. Ointu
Anggota	: Usman Monoarfa, Usman Hadju, Usman

Tumu, A.G. Usu, M. Sugondo, R.M. Dhanuwatijo, Sagaf Alhasni, Hasan Badjeber.

Tugas Komite Dua Belas ialah menjaga dan melindungi keselamatan rakyat dan daerah dari segala tindakan yang merugikan rakyat, baik yang dilakukan oleh Belanda maupun oleh Jepang (Nani Wartabone, wawancara 3 September 1979).

Akibat dari pembumihangusan oleh VC, pemimpin-pemimpin rakyat antara lain Nani Wartabone, R.M. Kusno Dhanupojo, J.A. Pendang Kalengkongan, memulai gerakannya untuk menguasai situasi, misalnya menjaga tempat-tempat yang akan dirusak oleh VC seperti jembatan Talumolo, irigasi Lomaya di Tapa, gedung Kantor Pos dan penimbunan bahan bakar di WSG. Semangat patriotisme secara otomatis timbul dari dalam lubuk hati rakyat yang datang berbondong-bondong dari segala penjuru untuk mengusir kaum penjajah Belanda. Kegiatan selanjutnya yang dijalankan adalah penangkapan dan penawanan para pejabat pemerintahan kolonial Belanda antara lain Controleur Dancona, Asisten Residen J. Korn, Hoofd Agent Stadspolitie (Komandan Polisi Kota) R. Couper.

Peristiwa penangkapan dan penawanan di atas adalah merupakan kudeta yang berhasil menggulingkan pemerintahan Belanda di daerah Gorontalo di bawah pimpinan Nani Wartabone.

Pada tanggal 23 Januari 1942 terjadilah suatu peristiwa bersejarah dengan dikibarkannya bendera Merah Putih menggantikan bendera Belanda untuk pertama kalinya di Gorontalo. Pengibaran itu diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya di depan ribuan massa rakyat bertempat di lapangan tenis Gorontalo (di muka rumah Asisten Residen).

Selesai menyanyikan Indonesia Raya, diucapkan pidato sambutan kemerdekaan oleh Nani Wartabone. Ia mengatakan antara lain bahwa mulai hari ini tanggal 23 Januari 1942, kita sudah bebas dari penjajahan Belanda, bendera kita yaitu Merah Putih, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya (Nani Wartabone, 1977 : 3). Selanjutnya Nani Wartabone berpesan kepada rakyat agar menjaga keamanan, dilarang merampok, mencuri dan merusak.

Staf pemerintahannya disebut PPPG (Pucuk Pimpinan Pemerintahan Gorontalo) yang terdiri dari :

Nani Wartabone : Komandan Komando PPPG
J.A. Pendang Kalengkongan : Wakil Komando PPPG.

R.M. Kusno Dhanupojo : Bagian Sipil

A.B. Dauhan : Pembantu

Pusat kegiatan pemerintahan sipil dan militer menempati gedung perkantoran NV KIM atau gedung PELNI sekarang.

Untuk konsolidasi pemerintahan maka PPPG diperluas keanggotaannya dan merupakan badan eksekutif yang sempurna sesuai dengan keadaan. Susunan PPPG yang diperluas ini terdiri dari :

1. Pemerintahan sipil militer : Nani Wartabone,
J.A. Pendang Kalengkongan
R.M. Kusno Dhanupojo,
Jogugu-jogugu dan Marsaoleh-marsaoleh
2. Sekretaris, Keuangan dan Bendahara : Ibrahim Ilahude,
H. Katili,
Ibrahim Poee,
A.W. Siwy,
R. Sugondo.
3. Ekonomi : Hamzah Ilahude
4. BOW (PU) : A.B. Usman
5. Duane : Mohamad Ali
6. Kepolisian : J.A. Pendang Kalengkongan
7. Kehewanan : drh. R. Wardoyo
8. Kehutanan : A. Uno
9. Kantor Pos (Telepon) : A. Ilahude
10. Penilik Sekolah : A.L. Tamalawe
D. Lumunon
11. Keamanan : Ibrahim Muhamad.

Untuk memelihara jalannya pemerintahan di daerah-daerah, PPPG segera mengatur personalia untuk lima distrik sebagai berikut :

- | | |
|--------------|--------------------|
| R. Monoarfa | : Jogugu Gorontalo |
| K. Datau | : Jogugu Kwandang |
| A. Wartabone | : Jogugu Limboto |
| I. Usman | : Jogugu Suwawa |
| M. Hippy | : Jogugu Tilamuta. |

Selanjutnya PPPG mengangkat sembilan Marsaoleh untuk kesembilan Onderdistrik yang ada, masing-masing :

- | | |
|---------------|--------------------|
| Ismail Datau | : Marsaoleh Kabila |
| Kadir Habibie | : Marsaoleh Tapa |

Abdurrachman Nento	: Marsaoleh Telaga
A. Tahir	: Marsaoleh Sumalata
B. Hadju	: Marsaoleh Paguyaman
S. Bija	: Marsaoleh Bumbulan
Junus Olii	: Marsaoleh Atinggola
Abudi Ilahude	: Marsaoleh Batudaa
AH. Tangahu	: Marsaoleh Bone Pantai

Lembaga legislatip segera dibentuk dengan pertimbangan agar pemerintahan militer dapat seiring dengan pemerintahan sipil yang diketuai oleh Nani Wartabone.

Pemerintahan Nasional di Gorontalo yang dilahirkan oleh Peristiwa 23 Januari 1942, hanya berlangsung sampai 5 Juni 1942, diakhiri setelah adanya perampasan kekuasaan pemerintahan oleh Jepang. Untuk memperingati peristiwa yang bersejarah tersebut, pada bulan Juni 1972, Komando Daerah Militer (KODAM) XIII/ Merdeka, melalui KODIM 1304 Gorontalo, telah menyerahkan penghargaan kepada masyarakat Gorontalo berupa didirikannya Tugu Peringatan di pusat peristiwa, yakni di halaman Kantor Pos Kotamadya Dati II Gorontalo.

Pada awal Juni 1942, datanglah perutusan Jepang ke Gorontalo di bawah pimpinan Yanai. Terjdilah perobahan di mana PPPG diganti dengan Gunco Kaigi, pimpinannya tetap dipegang oleh Nani Wartabone. Akan tetapi kekuasaan Gunco Kaigi hanya berlangsung selama sembilan hari, yakni antara tanggal 6 – 14 Juni 1942. Pada awal Juli 1942, ketika tentara Jepang tiba di Gorontalo, Gunco Kaigi tidak berfungsi lagi, diganti dengan Kenkanrikan. Mulai saat itu pemerintahan seluruhnya jatuh ke tangan Jepang sedangkan Nani Wartabone dijadikan sebagai penasihat saja.

Setelah sekutu mulai melancarkan pemboman, pusat Gunco Kaigi dipindahkan ke pedalaman ke Kabila, di mana terjadi suatu peristiwa yang mengharukan. Hal ini karena bendera Merah Putih diperintahkan turun oleh pemerintah Jepang, yang dilakukan melalui suatu upacara. Dengan disaksikan oleh umum nampak Nani Wartabone mencururkan air mata menyaksikan penurunan bendera Merah Putih oleh Jepang.

Selanjutnya untuk memantapkan kekuasaan pemerintah sipil, maka Jepang mengatur susunan pemerintahan sebagai berikut: Wilayah bekas Asisten Residen disebut Ken dan kepalanya disebut Bunkenkanrikan. Wilayah Distrik disebut Gun dan kepalanya disebut Gunco. Wilayah Distrik Bawahan disebut kepala desa

Sonco. Di bawah Sonco ada pamongdesa yang disebut Kuno (Sun Bone, wawancara 10 September 1979).

Bolaang Mongondow

Dengan dikeluarkannya instruksi agar semua pejabat sipil datang melaporkan diri ke Langowan (Minahasa), maka semua pejabat yang dahulunya bekerja pada pemerintah Hindia Belanda di Bolaang Mongondow pergi menghadap memenuhi instruksi tersebut. Kepada para pejabat sipil itu diperintahkan agar menyerahkan semua kontrak politik (Korte Verklaring) yang pernah dibuat dengan pemerintah kolonial Belanda. Semua tanda jasa yang pernah diberikan oleh Belanda harus diserahkan juga. Setelah itu mereka harus menyatakan sumpah setia kepada Tenno Heika. Selesai melaporkan diri maka semua pejabat sipil yang bukan orang Belanda, diperintahkan kembali menjalankan tugas seperti biasa. Gelar raja diganti istilahnya menjadi Suco dengan tanda pengenalan Suco yang dilekatkan di tangan kiri (A.H. Gobol, wawancara 12 September 1979).

Pemerintahan Jepang di Bolaang Mongondow dimulai tanggal 9 Maret 1942 yakni saat tibanya Matsuda selaku pembesar Jepang yang dikirimkan oleh Komandan Tentara Pendudukan di Minahasa. Matsuda ditugaskan mengepalai pemerintahan bekas Onderafdeeling Bolaang Mongondow (Bolaang Mongondow Bunken) dengan jabatan sebagai Bunkenkanrikan. Ia memulainya dengan memperbaiki bekas kantor pemerintahan Onderafdeeling di Kotamobagu (Monografi Daerah BM, 1978 :). Pemerintah Jepang tidak menempatkan pasukan tentara di daerah Bolaang Mongondow. Daerah itu hanya dijadikan sebagai tempat persinggahan/peristirahatan pasukan-pasukan yang menempuh jalan darat dari Sulawesi Tengah ke Minahasa.

Pemerintah pendudukan Jepang tidak mengadakan perubahan dalam batas wilayah administrasi bekas Onderafdeeling Bolaang Mongondow, sama halnya dengan di daerah-daerah lainnya dalam wilayah Sulawesi Utara ini, bahkan sampai ke Sulawesi Tengah. Selain itu, tidak diadakan pula perubahan dalam struktur organisasi pemerintahan kecuali digunakannya istilah-istilah Jepang bagi jabatan-jabatan yang ada. Untuk jelasnya maka :

1. Onderafdeeling Bolaang Mongondow disebut Bolaang Mongondow Bunken;
2. Controleur disebut Bunkenkanrikan;

3. Raja disebut Suco;
4. Presiden Raja disebut Renrakuin;
5. Kepala Distrik atau Penghulu disebut Gunco;
6. Kepala Onder Distrik atau Mayor Kadato disebut Fuku-gunco;
7. Kepala Desa atau Sangadi disebut Sonco (Manus, dkk, 1979 : 34).

Adapun pelaksanaan di Bolaang Mongondow Bunken dipimpin oleh kepala pemerintahan yang disebut Bukananrikan di mana jabatan itu selama pendudukan berlangsung dijabat oleh Matsuda. Ia dibantu oleh seorang Sekretaris yang disebut Syokutaku, yang pada waktu itu dijabat oleh Raden Abdulkadir Surjodirdjo. Bun-kenanrikan Matsuda ini membawahi empat kerajaan, yakni Kerajaan Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, Bintauna dan Kaidipang Besar.

Sebelum pendudukan Jepang, Kerajaan Bolaang Mongondow diperintah oleh Zelfbestuurs Commissie yakni M. Mokodompit dan H.D. Manoppo. M. Mokodompit juga merangkap jabatan Kepala Distrik (kemudian menjadi Gunco) Mongondow), sedangkan H.D. Manoppo merangkap jabatan Kepala Distrik (kemudian Gunco) Bolaang. Kedua Zelfbestuurs Commissie ini memerintahkan Kerajaan Bolaang Mongondow sejak diberhentikannya Raja Laurens Cornelis Manoppo oleh Belanda tahun 1938, karena dianggap tidak dapat mempertanggung jawabkan soal keuangan kerajaan itu.

Kerajaan Bolaang Mongondow dengan Ibukota Kotobangon, membawahi beberapa distrik dan onder-distrik yang terdiri atas :

1. Distrik Mongondow, dengan pusat pemerintahan di Koto-bangon di bawah Gunco, Max Mokodompit. Distrik ini terdiri atas dua onder distrik, yakni Pasi dan Lolayan.

Onder distrik Pasi terletak di dataran tinggi Mongondow, terdiri dari 20 desa yakni desa Kotamobagu, Pasi, Biga, Pontodon, Mogolaing, Kotobangon, Bilalang, Pangian, Popo Mongondow, Modayag, Moyag, Komangaan, Muntoi, Bintau, Bulud, Otam, Wulud, Lobong, Manembo dan Gogagoman. Pusat pemerintahan di Pasi di bawah Fuku-gonco J.W. Manoppo;

Onder distrik Lolayan terdiri dari 15 desa yakni Molinow, Mongkonai, Mongondow, Poyowa Kecil, Poyowa Besar, Kobo Kecil, Kobo Besar, Matali, Sinindian, Pobundayan,

Kopandakan, Bungko, Mopait, Tumobui dan Tungoi. Pusat pemerintahan terletak di desa Motobi Besar di bawah Fukugunco A.B. Damopolii;

2. Hulu Distrik Bolaang dengan pusat pemerintahannya di Inobonto di bawah Gunco H.D. Manoppo. Distrik terdiri dari desa-desa yakni Bolaang, Ambang, Pantik, Lolan, Mariri, Solimandungan. Distrik ini membawahi Onder distrik Lolak dengan pusat pemerintahan di Lolak di bawah Fukugunco O. Dilapanga. Onder distrik terdiri dari desa-desa yakni Lolak, Solok, Tandu, Mongkoinit, Mota-bang, Buntalo, Ayong, Maelang, Domisik, Sangkub dan Sauk;
3. Onder Distrik Dumoga adalah onder distrik yang langsung diperintah Kerajaan Bolaang Mongondow dengan pusat pemerintahannya di Kinolontagan di bawah Fukugunco B.G. Manoppo; Onder distrik terdiri dari desa-desa yakni Kinolontagan, Dumoga, Tapao, Doloduo, Tobayogan, Torosit, Dumagin dan Unggunoi;
4. Onder Distrik Kotabunan pusat pemerintahannya di Kotabunan, langsung di bawah Kerajaan Bolaang Mongondow, di bawah Fukugunco M.J. Manoppo; terdiri atas beberapa desa yakni Kotabunan, Buyat, Tutuyan, Nuangan, Molobok dan Matabulu.

Tahun 1943, pemerintahan Zelfbestuurs Commissie dibubarkan oleh Jepang di mana H.J.C. Manoppo (anak raja L.C. Manoppo) diangkat sebagai raja (Suco). Demikian pula beberapa Gunco, diganti oleh Jepang. Gunco Bolaang H.D. Manoppo diganti oleh J.W. Manoppo. Fugunco Pasi J.W. Manoppo, diganti oleh K.C. Mokoginta. Fukugunco Lolayan Arsjad B. Damopolii diganti oleh F.J.K. Damopolii. Arsjad B. Damopolii diangkat jadi Gunco Mongondow. Max Mokodompit diangkat jadi Fuku-suco (Wakil Raja) Kerajaan Bolaang Mongondow (S.A. Sugeha, wawancara 11 September 1979).

Kerajaan Bolaang Uki di Bolaang Mongondow Bunken pada waktu Jepang masuk, diperintah oleh Raja A.H. Gobol, dengan ibukota Molibagu. Kerajaan ini tidak terbagi atas distrik-distrik karena dianggap terlalu kecil. Dalam melaksanakan pemerintahan, Raja (Suco) dibantu oleh pejabat kerajaan yang disebut Jogugu atau Raja Muda. Istilah Jogugu ini kemudian diganti dengan Fuku-suco (Wakil Raja) pada waktu pendudukan Jepang. Pada masa itu

Fukusuco dijabat oleh W.A. Zulhadji (A.H. Gobol, wawancara 12 September 1979).

Kerajaan Bintauna di Bolaang Mongondow Bunken ketika Jepang masuk diperintah oleh Raja Muhamad Tarudju Datunsolang, dengan pusat pemerintahan di Pimpi. Dalam pelaksanaan pemerintahan, Raja dibantu oleh Presiden Raja atau Raja Muda yang disebut Fukusuco (Wakil Raja), yang pada masa itu dijabat oleh J.A.M. Datunsolang. Pejabat-pejabat kerajaan Bintauna lainnya ialah Jurutulis Kepala yang dijabat oleh C.D. Mokodenseho, dibantu dua stafnya yakni A.M. Datunsolang dan M.A. Tinumbia. Tugas dari Jurutulis ini adalah pemegang keuangan dan mengatur administrasi pemerintahan kerajaan. Di samping itu ada pengurus pertanian yang disebut mantri pertanian dijabat oleh R.M. Datunsolang. Untuk urusan kesehatan disebut mantri kesehatan, dijabat oleh H. Kolintamu. Untuk urusan jalan disebut Mandor, dijabat oleh Daeng Toleba. Pegawai-pegawai yang bekerja dalam pemerintahan ini diangkat oleh Raja. Kerajaan Bintauna tidak dibagi atas distrik dan onder distrik karena terlalu kecil, hanya meliputi desa-desa yakni Pimpi, Bintauna, Padang, Talaga, Bunia, Batulinti, Bintauna Pante, Kuhanga, Mome dan Huntuk (A.M. Datunsolang, wawancara 15 September 1979).

Kerajaan Kaidipang Besar di Bolaang Mongondow Bunken, diperintah oleh Raja Ram Suit Pontoh dengan Ibukota di Boroko. Raja dibantu oleh Jogugu atau Presiden Raja yang diganti dengan istilah Renrakuin atau Fukusuco (Wakil Raja). Fukusuco adalah penanggung jawab pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari yang pada waktu itu dijabat oleh H.R. Pontoh. Ia diberhentikan tahun 1944 karena dituduh sebagai mata-mata musuh dan diganti oleh J.R. Pontoh. Selain itu terdapat pegawai-pegawai kerajaan yang terdiri Jurutulis Kerajaan, Pembantu Jurutulis dan Magang. Jurutulis Kerajaan waktu itu ialah N.J. Rauma, yang bertanggung jawab atas administrasi dan keuangan. Ia dibantu oleh dua Pembantu Jurutulis yakni Djailolo Pomolango dan Male Buhang serta tiga orang magang yakni L.D. Korompot, H. Buhang dan Lati Detu Kramat.

Pada waktu itu Kerajaan Kaidipang Besar terdiri atas dua distrik (Gun) yakni Kaidipang dan Bolaang Itang. Distrik Kaidipang berpusat di Boroko di bawah Fukugunco (Jogugu) H. Buhang. Pada bulan Desember 1944 Fukugunco H. Buhang mengundurkan diri karena alasan telah lanjut usia lalu diganti oleh L.D.

Korompot. Distrik Kaidipang masa itu terdiri dari beberapa desa yakni Boroko, Kuala, Bigo, Pontak, Inomunga, Sokoputa, Kumu I, Kumu II, Tuntung, Batutajam, Dolapuli, Buho, Tuntulon dan Kayuogu.

Distrik Bolaang Itang berpusat di Bolaang Itang dengan Kepala Distrik yang disebut Marsaoleh atau Fukugunco yang dijabat oleh S.M. Pontoh. Pada waktu itu distrik ini terdiri atas beberapa desa yaitu Bolaang Itang, Talaga, Tomuagu, Jambusarang, Sonuo, Olot, Pahu, Langi, Iyok, Tote, Nunuka, Mokoditek, Saleo, Bohabak, Binjeita dan Biontong (L.D. Korompot, wawancara 14 September 1979).

Ketika Belanda masih berkuasa, kerajaan-kerajaan yang ada di Bolaang Mongondow berstatus landschap, di mana setiap kerajaan:

1. mempunyai pemerintahan otonom menurut hukum adat masing-masing;
2. mengatur keuangan dan anggaran belanja sendiri;
3. mengatur lembaga-lembaga pemerintahan sendiri;
4. menetapkan dan menjalankan peraturan yang berlaku di seluruh wilayah onderafdeeling;
5. menetapkan anggaran belanja dari onderafdeeling;
6. wajib membayar pajak yang ditentukan dalam onderafdeeling;
7. bertanggung jawab kepada Hoofd van Plaatselijk Bestuur di Kotamobagu, dalam hal ini kepada Controleur sebagai kepala Onderafdeeling Bolaang Mongondow.

Dengan masuknya Jepang, maka seluruh peraturan di atas tetap dijalankan untuk daerah-daerah swapraja, sepanjang tidak bertentangan dengan kebutuhan pemerintah militer Jepang. (Bupati KDH, 1979 :).

B. BIDANG SOSIAL EKONOMI

Daerah Keresidenan Manado terkenal sebagai daerah penghasil kopra sejak zaman kolonial Belanda. Menjelang masuknya tentara Jepang, hasil kopra Keresidenan Manado adalah sebagai berikut : Sangir Talaud 35 ribu ton, Minahasa dan Bolaang Mongondow 63 ribu ton, Gorontalo 12 ribu ton, Teluk Tomini dan Kepulauan Togean 60 ribu ton, Luwuk-Banggai 12 ribu ton, Donggala dan sekitarnya 16 ribu ton, sedangkan Toli-toli dan Kwandang 16 ribu ton (Rhijn, 1941 : 36).

Dalam masa malaiese harga kopra merosot sekali sehingga mengakibatkan penderitaan di kalangan rakyat. Penderitaan itu lebih diperhebat lagi akibat masuknya tentara pendudukan Jepang, terutama karena kopra sama sekali tidak berharga di pasaran. Banyak areal tanaman kelapa, terutama di daerah-daerah dataran rendah, dijadikan areal persawahan sehingga kelapa yang ada harus ditebang atau dibiarkan mati. Demikian pula halnya dengan hasil perkebunan lainnya seperti pala, fuli, cengkhi, kopi dan sebagainya. Perdagangan dapat dikatakan mati sama sekali karena semua kegiatan diarahkan kepada penyediaan bahan makanan bagi kepentingan perang oleh Jepang.

Sebaliknya penanaman padi semakin diintensipkan di mana padi ditanam khusus untuk keperluan perbekalan oleh Jepang. Dengan demikian persediaan beras untuk rakyat berkurang. Sebagai gantinya, rakyat diwajibkan menanam tanaman pangan pengganti seperti ketela pohon, ketela rambat, pisang dan lain-lain. Di semua areal yang memungkinkan, padi wajib ditanam dua kali setahun. Hutan dan semak belukar dirombak untuk dijadikan ladang-ladang. Untuk mengamankan ekonomi perang, maka Jepang membentuk suatu organisasi yang disebut Nantaku. Tugas Nantaku ini ialah mengawasi pelaksanaan instruksi-instruksi di sektor pertanian, mengajarkan rakyat teknik-teknik pertanian ala Jepang, mengumpulkan hasil-hasil pertanian untuk keperluan perang ke gudang-gudang, serta menyalurkan bahan makanan yang tersedia untuk rakyat.

Di daerah Sangir Talaud, sebelum kedatangan tentara Jepang keadaan ekonominya dapat dikatakan telah lumpuh akibat berkecamuknya Perang Pasifik di mana daerah ini tidak luput dari serangan pemboman. Di samping itu, pemerintah Belanda di bawah pimpinan Controleur Krams dan pembantu-pembantunya dalam rangka perang Pasifik ini, telah menjalankan aksi bumi hangus dengan membakar gudang-gudang yang penuh berisi kopra untuk mencegah agar semua hasil produksi itu tidak jatuh ke tangan musuh (A. Rompas, wawancara 17 September 1979).

Setelah Jepang masuk maka mula-mula keadaan ekonomi rakyat agak baik, karena Jepang mau membujuk hati rakyat dengan kemenangannya yang gilang gemilang, sehingga pada waktu itu diadakanlah pembagian distribusi bahan makanan berupa beras, kain, sabun, garam, dan sebagainya. Akan tetapi setelah Jepang di sana sini mengalami kekalahan dalam perang melawan

Sekutu, menghilangkan bahan-bahan distribusi itu dan mulailah kehidupan yang serba sulit. Bahan makanan pokok berupa beras tidak ada lagi karena menunggu didatangkannya dari Manado, sedangkan daerah ini pun tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya sendiri. Terpaksalah dianjurkan kepada penduduk untuk menanam ubi, pisang dan lain-lain yang kemudian dijadikan sebagai bahan makanan pengganti beras. Di samping itu diolah sagu, terutama di Sangir Besar yang terdapat di berbagai tempat. Juga kacang-kacangan terutama di Talaud seperti kacang tanah, kacang hijau, dipergiat penanamannya. Hal ini berlaku pula untuk jenis umbi-umbian. Pada masa itu dikenal adanya sejenis ketela yang lazim disebut "bete talaud". Mata pencaharian rakyat Sangir Talaud lainnya adalah nelayan, tetapi hanya khusus untuk keperluan sendiri (tidak diekspor).

Di daerah itu usaha perkebunan seperti halnya di Minahasa dikatakan tidak ada. Produksi uama sebenarnya adalah kopra dan pala, tetapi waktu itu tidak berarti apa-apa karena tidak laku di pasaran. Sementara itu di tempat-tempat yang dianggap berbahaya rakyat disuruh mengungsi. Rakyat harus pula dapat menyediakan dan menyerahkan bahan makanan kepada Jepang. Selain itu rakyat harus menyediakan tenaganya untuk bekerja paksa seperti romusya. Untuk keperluan itu maka Jepang membentuk sebuah Komite Tenaga Rakyat atau KTR dengan tugas :

1. mengumpulkan bahan makanan;
2. mengumpulkan romusya-romusya (pekerja-pekerja kasar) untuk dipekerjakan baik di daerahnya sendiri maupun ke daerah-daerah lain;
3. membuat benteng-benteng pertahanan.

Penderitaan rakyat semakin parah akibat menghilangnya kain sebagai bahan pakaian. Terpaksalah ada rakyat yang harus memakai karung goni dan lain-lain sebagai pengganti pakaian (Sigarlaki dkk, 1977 : 220-222).

Rakyat benar-benar sangat kekurangan sandang (pakaian) akibat tidak adanya perdagangan. Semua keperluan sehari-hari seperti kain, sabun, tembakau/rokok, minyak tanah, garam, gula dan lain-lain serba tidak ada. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di atas, tidak ada jalan lain selain berusaha sendiri atau memanfaatkan apa saja yang ada dengan cara tradisional. Untuk mendapatkan pakaian mereka menenun kain dari benang kofo, benang nenas dan memintal kapas untuk dijadikan benang. Sebagai

bahan penerangan untuk lampu, dipakai minyak kelapa atau getah kenari dan biji jarak, bahkan biji sejenis tanaman yang disebut "balacae".

Gula dibuat dari tebu yang diperas dengan alat buatan rakyat secara tradisional. Untuk tembakau (rokok), ada yang menanam tanaman tembakau dan ada yang mempergunakan daun pepaya atau daun-daunan lain yang cocok. Sabun cuci dibuat sendiri atau menggunakan kulit sejenis kayu yang disebut "langika", bahkan ada yang mempergunakan buah jeruk untuk mencuci pakaian. Sebagai selimut ada yang mempergunakan karung (kalau ada) atau tikar daun. Garam dibuat sendiri dari air laut. Hewan peliharaan seperti kambing, babi, sapi, ayam dan lain-lain sering diambil begitu saja oleh Jepang untuk keperluan mereka, bahkan rakyat dilarang membantai atau memakannya. Demikian pula hasil-hasil pertanian, di mana sebagian harus diserahkan kepada Jepang (Lumeling, : 2).

Demikianlah gambaran kehidupan ekonomi rakyat di daerah Sangir Talaud. Kopra dan pala sebagai sumber keuangan rakyat tidak laku di pasaran karena sarana pengangkutan laut tidak ada. Hasil ikan para nelayan sebagai sumber penghasilan nomor dua hanya dipergunakan untuk kepentingan Jepang. Ekspor dan impor macet sama sekali sehingga rakyat pada masa itu menderita sekali, terutama soal sandang dan obat-obatan. Namun hal-hal di atas diimbangi oleh rakyat dengan berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh kebutuhannya sendiri (Manatar, wawancara 16 September 1979).

Penderitaan rakyat di bidang ekonomi seperti yang diuraikan di atas ditambah lagi dengan kekejaman Jepang yang melampaui batas peri kemanusiaan. Banyak pemimpin rakyat yang dicurigai dan oleh karena itu tidak luput dari pengintaian Kempeitai Jepang. Apabila telah di tangan Kempeitai ini, maka jarang yang bisa lolos dengan selamat. Hukuman mati dengan kepala dipancung adalah jenis hukuman yang lumrah pada masa itu. Hampir semua raja, termasuk kepala kampung, bahkan para pemimpin agama sekalipun, tidak luput dihukum pancung kepala oleh Kempeitai. Seorang pemimpin agama, yakni G. Tatenkeng serta seorang dokter bangsa Hongaria bernama dr. Cesko, bersama para pemimpin rakyat, ditangkap Kempeitai, mula-mula sebagai tahanan, kemudian dipancung kepalanya. Menurut catatan, terdapat kurang lebih 50 orang tahanan Kempeitai yang menjalani hukuman tersebut,

antara lain (Rompas, wawancara 17 September 1979; Ponto, wawancara 13 September 1979) :

1. Raja Tagulandang Jacobs
2. Raja Tabukan L.P. Macpal
3. Raja Manganitu W.M.P. Mokodompis
4. Raja Kendahe Tahuna E. Bastian
5. Bekas Raja Kendahe Tahuna Ch. Ponto
6. Raja Talaud Koagouw
7. Jogugu Tagulandang B. Jacobus
8. Jogugu Ondong E. Marthing
9. Jogugu Tamako Taidi
10. Jogugu Manganitu Macakecum
11. Jogugu Kendahe Anthonie
12. Jogugu Manalu L.P. Macpal
13. Sejumlah Kapten Laut dan pejabat-pejabat lainnya.

Kuburan para korban ini sampai sekarang terdapat di Bungala-wang (Tahuna) di mana dalam satu lobang sampai terdapat lima orang yang dikuburkan. Korban-korban perang lainnya terdapat juga di beberapa tempat di daerah Sangir Talaud, misalnya di Ondong Siau, pulau Para dan lain-lain (Makahanap, wawancara 19 September 1979).

Keganasan Jepang ini ternyata telah menimbulkan kebencian rakyat, sehingga beberapa orang menggabungkan diri dengan Sekutu dengan jalan berperahu menuju lautan bebas. Kemudian setelah terlihat oleh pesawat-pesawat Sekutu, mereka diselamatkan lalu dijadikan alat Sekutu untuk menghancurkan pertahanan Jepang di daerah Sangir Talaud, di antaranya adalah Lekangpondang (Rompas, wawancara 17 September 1979).

Rasa antipati bahkan kebencian terhadap Jepang telah menimbulkan perlawanan terhadap Jepang. Rakyat yang diancam bahaya kelaparan di pulau Makalehi akhirnya mengadakan perlawanan terhadap Jepang yang terkenal dengan Pemberontakan Rakyat Makalehi pada awal tahun 1945, di bawah pimpinan Salmon Labaeng yang gugur dalam pertempuran sebagai pahlawan bangsa (Elias, 1973 : 147-152; Sigarlaki dkk, 1977 : 215-217; Manus ddkk, 1978 : 202).

Kedaaan ekonomi pada masa pendudukan Jepang di Bolaang Mongondow ditujukan pula untuk kepentingan perang oleh Jepang. Rakyat diperintahkan mengolah sawah dan ladang untuk menanam padi. Karena itu banyak areal perkebunan rakyat yang

telah ditanami kelapa dan kopi, diolah untuk ditanami dengan tanaman untuk kepentingan perang seperti padi, kapas, yute, jagung dan lain-lain. Penanaman tanaman-tanaman ini diperintahkan oleh Bunkenkanrikan Matsuda melalui pemerintahan swapraja yang harus dilaksanakan oleh seluruh kerajaan di daerah Bolaang Mongondow. Rakyat juga dilarang untuk menjual hasil pertaniannya di pasaran, kecuali kepada suatu badan yang ditentukan, yakni Nantaku dan Toyobo yang dibentuk oleh Jepang. Kedua badan ini dipimpin oleh orang-orang Jepang.

Kedua badan ini mempunyai cabangnya sampai ke tingkat Onder distrik (Fukugun) yang dikepalai oleh Fukugunco. Pusatnya adalah di Kotamobagu sebagai tempat kedudukan dari Bunkenkanrikan. Selain kewajiban-kewajiban di sektor pertanian di atas, rakyat setiap tahunnya diwajibkan menyerahkan 100 Kg beras yaitu pada saat-saat pemetikan padi. Penagihan beras ini menjadi kewajiban kepala desa (Sonco) dan kemudian diserahkan kepada Nantaku yang ada di setiap Onder distrik. Kepala yang menyerahkan 100 Kg beras, diberikan imbalan setiap keluarga sebanyak enam meter kain blacu dan kain "strep Jepang", ditambah uang sebanyak 15 yen. Semua hasil pertanian termasuk sayur-sayuran, hewan-hewan piaraan seperti ayam, kambing, sapi, babi, kerbau dan sebagainya harus diserahkan kepada petugas-petugas Nantaku. Hasil-hasil pertanian dan peternakan itu dijual kepada Nantaku dengan harga yang sudah ditentukan. Kambing misalnya dibayar harganya sampai 10 yen, sapi yang besar sampai 50 yen. Ternak itu dipotong dan dibagikan sebagian kepada petugas-petugas pemerintah Jepang dan sebagian dijual di pasar kepada rakyat. Bahan-bahan kebutuhan rakyat lainnya disalurkan melalui perusahaan-perusahaan Jepang seperti gula, garam, termasuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya.

Apabila rakyat mempunyai kelebihan beras dan jagung, maka dapat dijual di pasar dengan izin dari Nantaku, Toyobo atau Nantaibo. Penduduk di wilayah Kerajaan Kaidipang Besar dan Kerajaan Bintauna, sering menjual beras dan jagung di pasar-pasar Bintauna, Buha, Bolaang Itang dan Boroko sedangkan rakyat di Kerajaan Bolaang Uki menjualnya di pasar Pinolosian dan Molibagu. Pasar yang terdapat di ketiga kerajaan di atas, ramai dikunjungi oleh penduduk yang kekurangan bahan makanan dari daerah Gorontalo yang diam di dekat perbatasan dengan daerah Bolaang

Mongondow. Demikian juga halnya dengan rakyat di Kerajaan Bolaang Mongondow yang mendapat izin menjual, dapat menjual beras dan jagung di pasar Kotamobagu dan Inobonto. Tempat-tempat itu ramai dikunjungi oleh rakyat yang diam di Minahasa Selatan yang juga membawa dan menjual minuman keras, dan gula merah (gula aren) untuk dijual di pasar Kotamobagu dan Inobonto.

Karena daerah Bolaang Mongondow waktu itu dijadikan oleh Jepang sebagai daerah sumber produksi bahan makanan, maka semua gudang besar di Kotamobagu dan tempat-tempat lainnya di sana yang menjadi milik pedagang, diambil alih oleh pemerintah pendudukan. Gudang-gudang itu kemudian dijadikan tempat penampungan bahan-bahan makanan yang dapat dikumpulkan. Pada waktu itu ternak banyak terdapat di Longagon, Kotamobagu, Lolak, Bintauna, Boroko dan Kotabunan, yang diusahakan oleh Nantaku, sehingga rakyat hanya terletak pada kekurangan bahan pakaian dan alat-alat rumah tangga. Rakyat banyak yang dipekerjakan di pabrik-pabrik yang memproduksi kain putih, memintal benang yang terdapat di Kotamobagu dan Boroko.

Rakyat yang berada di pesisir pantai mengadakan usaha penangkapan ikan dan dijual kepada Nantaku yang juga berusaha di sektor perikanan di seluruh daerah pesisir Bolaang Mongondow. Untuk usaha perikanan itu ada yang diberikan gaji sekedarnya untuk mencukupi kebutuhan rakyat. Mengenai kopra dan hasil-hasil hutan, mulai tahun 1944 Jepang mengadakan pembelian melalui Nantaibo. Kopra dibeli dengan harga 7½ yen per kuintal ditambah hadiah satu meter kain putih. Hasil hutan seperti damar, rotan dan kayu, diusahakan dan dibayar dengan secukupnya. Hasil-hasil ini semuanya diekspor ke luar Bolaang Mongondow melalui pelabuhan Bolaang Itang. Demikianlah kehidupan di bidang ekonomi rakyat di Bolaang Mongondow yang pada kenyataannya adalah mencukupi, khusus untuk bahan-bahan makanan sebagai hasil kerja keras di sawah dan ladang, bekerja di pabrik yang didirikan oleh Jepang, penangkapan ikan, serta pengumpulan hasil hutan walaupun dengan pembayaran upah atau harga sekedarnya saja bagi kehidupan rakyat (Piet Manoppo, wawancara 15 September 1979).

Pada saat-saat pertama Jepang memasuki daerah Gorontalo mereka menunjukkan sikap ramah tamah terhadap rakyat untuk memberikan kesan bahwa mereka datang sebagai pembebas

melawan penjajah Belanda dengan semboyan "Asia untuk Bangsa Asia". Akan tetapi lama kelamaan sikap mereka berubah, bukan lagi sebagai pembebas tetapi dalam tindak tanduknya sebagai penjajah (Muh. Djibrin, wawancara 10 September 1979).

Yang paling berat dirasakan dan menyakitkan hati rakyat ialah diberlakukannya pembatasan-pembatasan bagi rakyat untuk menikmati hasil jerih payahnya sendiri dalam mengolah tanah-tanah pertanian. Hal ini karena hasilnya harus diserahkan seluruhnya untuk kepentingan ekonomi Jepang, terutama hasil beras. Jepang mengeluarkan peraturan yang melarang mengeluarkan beras dari suatu daerah ke daerah lainnya tanpa mendapat izin. Di daerah Gorontalo tahun 1943 terjadi suatu peristiwa yang menyedihkan di mana Palaloe bersama empat orang anaknya ditangkap dan dipancung kepala akibat terkena peraturan itu. Mereka diwajibkan menyerahkan 80 liter beras yang diperoleh sebagai upah memotong padi di Kwandang. Mereka menolak menyerahkan beras itu ketika diperintahkan oleh kepala polisi Jepang di Limboto yang bertugas mengawasi lalu lintas bahan makanan. Akibatnya mereka ditangkap lalu dihukum pancung kepala (Nani War-tabone, : 3).

Untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan makanan, maka rakyat diharuskan menanam bahan-bahan makanan, antara lain pisang, jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan dan sebagainya. Dengan demikian pada masa pendudukan Jepang dapat dikatakan di daerah Gorontalo tidak pernah terjadi kelaparan (Ointu, wawancara 12 September 1979). Di samping itu rakyat diharuskan menanam kapas untuk dijadikan bahan pakaian karena pada waktu itu sangat sulit memperoleh pakaian. Penanaman kapas ini dikoordinir oleh Nantaku.

Sistem perekonomian rakyat di daerah Gorontalo pada masa itu berada di bawah pengawasan yang keras dari Jepang di mana rakyat diharuskan memproduksi hasil-hasil pertanian, tetapi hasilnya hanya sebagian kecil dapat dinikmati oleh rakyat, sebagian besar adalah untuk kepentingan Jepang. Perekonomian dikuasai dan diatur oleh Jepang misalnya soal penyaluran bahan-bahan pokok kebutuhan rakyat. Untuk itu pada setiap desa didirikan suatu badan yang disebut Beikokubu yang tugasnya melakukan penjualan bahan makanan yang disalurkan untuk rakyat. Untuk sandang didirikan Shikiobu sebagai badan penyalur bahan pakaian dan untuk perikanan didirikan Nantoibo.

Hubungan perekonomian antara daerah yang satu dengan daerah lainnya boleh dikatakan tidak berjalan lancar, karena di samping prasarana hubungan lalu lintas kurang lancar, juga karena kondisi jalan yang buruk. Tambahan lagi yang paling menyakitkan hati rakyat ialah adanya peraturan yang melarang pengangkutan bahan makanan dari desa ke desa dengan penjagaan yang ketat oleh Jepang. Untuk sarana komunikasi antara desa ke desa dipergunakan gerobak yang ditarik oleh kuda atau sapi serta truck tetapi khusus dipergunakan untuk kepentingan Jepang. Untuk kepentingan militer, Jepang membuat jalan dari pesisir utara Gorontalo menembus ke daerah Bolaang Mongondow yaitu di Boroko. Untuk mengerjakannya maka Jepang banyak mengerahkan tenaga rakyat secara kerja paksa dengan sistem bergilir (U. Monoarfa, wawancara 7 September 1979). Demikian pula dengan pembuatan lapangan terbang Tolotio (sekarang dinamakan Jalaluddin di mana Jepang banyak pula mempergunakan tenaga rakyat. Hal ini rupanya karena Jepang bermaksud mempertahankan daerah Gorontalo dan untuk mempercepat gerakan bantuan militer melalui udara.

Sama halnya dengan di daerah-daerah lainnya, di daerah Minahasa yang menguasai sektor perekonomian adalah badan-badan yang dibentuk oleh Jepang. Kalau dalam urutan pangan adalah tugas dari Nantaku, maka untuk urusan sandang menjadi tugas dari Toyobo. Organisasi Toyobo ini bergerak sampai di desa-desa dan mengkoordinir kegiatan rakyat dalam hal penanaman kapas. Setiap tempat yang kosong seperti di halaman rumah, tepi jalanan, halaman sekolah dan gedung-gedung lain dipenuhi dengan tanaman kapas. Petugas-petugas Toyobo menyediakan bibit, mengajarkan cara-cara menanam serta mengawasi pelaksanaannya. Ketika panen kapas, maka hasilnya harus dipungut oleh yang menanam dan harus langsung diserahkan kepada petugas Toyobo setempat.

Sarana perhubungan hampir lumpuh sama sekali. Bahan bakar untuk kendaraan bermotor sangat langka sehingga hanyalah kendaraan militer dan petugas sipil saja yang berkeliaran di jalan raya. Sarana angkutan umum bagi rakyat Minahasa adalah gerobak dan pedati, baik yang ditarik oleh kuda maupun oleh sapi. Gerobak dan pedati ini menjadi alat angkut utama antar desa dan antar kota Minahasa. Dengan mempergunakan gerobak dan pedati ini, rakyat mengangkut hasil-hasil kebun ke rumah-

nya atau untuk dijual di pasar-pasar.

Untuk menjamin pertahanannya, Jepang membangun tiga lapangan terbang di Minahasa yakni Mapanget, Tawaang dan Kalawiran. Juga mereka meneruskan pekerjaan membuat Pembangkit Tenaga Air (PLTA) di Tonsealama (dekat Tondano) Manus dkk, 1978 : 203). Untuk merampungkan semua proyek di atas maka Jepang mengerahkan rakyat dengan sistem semacam romusya yang disebut "giliran". Rakyat yang hampir tak punya cukup waktu untuk mengerjakan sawah ladang, diharuskan pula ikut giliran. Yang ikut giliran bukan saja rakyat tetapi juga dikerahkan sarana angkutan seperti gerobak dan pedati. Dengan demikian maka hal ini turut pula melumpuhkan mobilitas perhubungan dan kegiatan perekonomian rakyat Minahasa.

A g a m a

Ketika Jepang masuk banyak rohaniawan Belanda/Eropa ditangkap dan ditawan, termasuk Ds. Locher dan Uskup Panis. (Palit, 1978 : 36–37). Untuk menertibkan kehidupan keagamaan, maka pemerintah Jepang (Menado Syucosyoco) pada bulan Juni 1943 mengeluarkan peraturan sebagai berikut (Taulu, 1950 : 78–79) :

Pasal 1

Minseibu Manado memberi perluasan kepada pemimpin-pemimpin agama membuka semua geredja dan tempat ibadat

- Melakukan ibadat yaitu sadja pada hari Minggu, hal mana untuk agama Islam ditentukan pada hari Djumat.
- Akan tetapi terlarang berpidato dan membentangkan hal-hal yang bukan mengenai agama didalam dan diluar geredja, yang diluaskan jaitu bertahlil, bersembahyang dan berkaul.

Pasal 2

- Dilarang memaksa orang-orang memberi derma dalam Geredja.
- Dilarang membuat kebaktian pada hari Sabtu.
- Semua harus indahkan kesehatan dan talkukkan diri dibawah pemeriksaan dokter.

Pasal 3

- Urusan-urusan tiap agama haruslah seperti urusan sebelum petjah perang.
- Dilarang berbantah-bantah tentang agama.
- Maksud, jaitulah supaja ada persatuan antara agama-agama.

- Pada Sekalian pemimpin agama akan diberi satu peraturan baru oleh Minseibu tentang hal melakukan pekerjaan agama.

Dengan ditangkapnya Ds. Locher dan Uskup Panis di atas maka Ketua Sinode GMIM diambil alih oleh Ds. A.Z.R. Wenas sejak 1942 yang kemudian disahkan dalam sidang Sinode tahun 1945 (Lintong, 1978 : 52). Semenjak Uskup Panis ditangkap maka tugas-tugas kegerejaan dilanjutkan oleh H.J.D. Tinangon. Wenas dan Tinangon ini berusaha keras agar pemerintah pendudukan mengizinkan dibukanya semua gedung gereja yang dinyatakan ditutup. Akhirnya keluarlah peraturan tersebut di atas dan mulai 18 Juni 1942, semua gedung gereja dibuka kembali untuk kebaktian umat. Namun jika isi peraturan di atas dilanggar, maka semua gedung gereja akan ditutup kembali (Palit, 1978 : 53).

Pemerintah pendudukan di bulan itu pula mengundang semua pimpinan agama Kristen seluruh Menado Syu untuk mengadakan pertemuan di Manado. Yang hadir waktu itu adalah para rohaniawan pribumi dari organisasi Adventis, Bala Keselamatan, GMIM, KGPM, Pinkster Beweging, Pinkster Gemeente, dan RI. Pada tanggal 26 Juni 1942 pertemuan itu menghasilkan terbentuknya Majelis Agama-agama Kristen (MAK) (DGW Sulutteng, 1969 : 24; Palit, 1978 : 54; Lintong, 1978 : 54). Setahun kemudian MAK dibubarkan bersamaan dengan tibanya beberapa pendeta dan pastor orang Jepang antara 1943 dan awal 1944. Pada tanggal 12 Januari 1944 diadakan pertemuan para rohaniawan seluruh Menado Syu yang dihadiri oleh para rohaniawan orang-orang Jepang. Pada akhir pertemuan 30 Januari 1944, terbentuklah satu organisasi persatuan pengganti MAK yang disebut Menado Syu Kirisutokyo Kyookai (MSKK) atau Persatuan Agama Kristen Sulawesi Utara (PAKSU). Sebagai Ketua PAKSU ialah seorang pendeta Jepang bernama Ds. Hamazaki (Palit, 1978 : 68-69; Taulu, 1950 : 79).

PAKSU melaksanakan program usaha-usaha bersama yang sifatnya persatuan agama, misalnya Rensei Koosyuukai atau latihan kilat bagi para pemimpin agama-agama, yang diselenggarakan dari satu distrik (Gun) ke distrik yang lain. Berturut-turut diadakan rensai di Manado (September 1944), Tondano (September 1944), Motoling (Maret 1945), Papakelan Tondano (19-26 Maret 1945), Ranolambot (Mei 1945), serta di beberapa tempat lainnya (Taulu, 1950 : 79).

Menjelang masuknya Jepang, di Kotamobagu dibentuk suatu

badan yang disebut Badan Proto Sinode yang bermaksud untuk mendirikan gereja yang berdiri sendiri lepas dari Gereja Protestan Indonesia (GPI) atau Indische Kerk. Badan yang diketuai oleh J. Pandegiroet itu didirikan tahun 1940. Ketika J. Pandegiroet mengundurkan diri, ia diganti oleh Guru E. Tampemawa yang bertugas sampai masuknya Jepang. Badan ini dibantu oleh seorang rohaniawan Belanda yang bekerja di Zending di Bolaang Mongondow, yakni Pendeta H.J. Nijenhuis. Pendeta Belanda ini ditangkap Jepang bersama isterinya pada tanggal 12 Januari 1942 dan ditawan di penjara Manado. Dengan demikian selama masa pendudukan Jepang, Zending di Bolaang Mongondow dipimpin oleh pendeta-pendeta pribumi, antara lain Pendeta Luther Kolopita dan Pendeta P. Kolopita (Rumagit, 1979 : 44-46).

Pimpinan Badan Pekerja Proto Sinode kemudian dijabat oleh H. Lumanauw dan kemudian kembali dipegang oleh J. Pandegirat. Kebaktian-kebaktian berjalan seperti biasa walaupun Jepang melarang mengadakan khotbah. Banyak inventaris dan sebagian uang kas gereja dirampas oleh Jepang. Dalam masa pendudukan Jepang, pemeluk agama Kristen di Bolaang Mongondow tercatat 16 ribu orang, terdiri dari 7.000 orang Minahasa, 5.000 orang Sangir Talaud dan 4.000 orang asli Bolaang Mongondow (Manus, 1978 : 120-121; Rumagit, 1979 : 46-47; A.E. Lewu, wawancara 19 September 1979).

Pendidikan

Dalam masa pemerintah kolonial Belanda, di daerah Sulawesi Utara banyak didirikan sekolah-sekolah, ada yang didirikan oleh pemerintah kolonial dan ada pula atas usaha swasta. Menjelang masuknya Jepang, di Keresidenan Manado tercatat kira-kira 555 lembaga pendidikan yang terdiri dari 437 Volksscholen (Sekolah Rakyat), 93 Vervolgscholen (Sekolah Lanjutan, tingkat sekolah dasar), satu Keinhandelsschool (Sekolah Dagang), satu Normaalschool (Sekolah Guru), 7 Cursussen tot Opleiding van Volksonderwijzers (Kursus Pendidikan Guru Sekolah Rakyat), 3 MULO (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama berbahasa Belanda), dan 13 HIS (Sekolah Dasar berbahasa Belanda). Khusus untuk wilayah Sulawesi Utara, badan-badan swasta yang mengusahakan pendidikan tingkat Sekolah Rakyat yaitu (Manus dkk, 1978 : 187) :

1. Sangir en Talaud Commite sebanyak 123 sekolah di daerah Sangir Talaud;
2. Minahassische Protestanse Kerk 165 sekolah di Minahasa;
3. RK Missie 30 sekolah di Minahasa;
4. Ned. Zend. Gen. Noord Celebes 24 sekolah di Bolaang Mongondow;
5. Belum termasuk yang diusahakan oleh Muhammadiyah, Badan Pendidikan Rekso Suryo, BPPI (PSII) dan yang diselenggarakan atas usaha perorangan lainnya.

Sumber lainnya mengatakan bahwa di Minahasa sudah terdapat hampir 170 sekolah yang dikelola oleh Zending menjelang berdirinya GMIM (Gereja Masehi Injil Minahasa) tahun 1934. Semua sekolah itu dikelola oleh GMIM dengan memperoleh subsidi (bantuan keuangan) dari Zending yang berpusat di Nederland. Hal ini karena beban keuangan untuk menjamin kelangsungan hidup semua sekolah itu terasa sangat berat bagi GMIM (Lintong, 1978 : 30). GMIM juga mendapat bantuan keuangan dari pemerintah f. 11.000,— setiap bulan, sedang para pendeta dan guru-gurunya digaji dan dipensiun oleh pemerintah (Lintong, 1978 : 31, 56).

Dengan masuknya Jepang, semua sekolah yang ada diambil alih dan menjadi sekolah pemerintah (Manus dkk, 1978 : 200; Lintong, 1978 : 31). Mulanya semua sekolah lanjutan dibubarkan Jepang tetapi kemudian dibuka kembali dengan status dan kurikulum yang dikehendaki Jepang, termasuk dimasukkannya bahasa Jepang sebagai mata pelajaran wajib mulai tingkat Sekolah Dasar di samping adanya mata pelajaran Nippon Seishing. Semua sekolah dibuka mulai 5 Pebruari 1942.

Pada tanggal 5 Maret 1942 di Manado dibuka Menado Nippon Go Gakko I, pada 28 Maret 1942 dibuka Menado Nippon Go Gakko II, bulan April di Kakaskasen didirikan Noomin Doo-yoo, 3 Nopember 1942 didirikan di Manado satu Menado Gaku En. Tahun 1943 di Manado didirikan Menado Cuu Gakko, Tomohon Cuu Gakko, Tomohon Syihan Gakko dan Tondano Kyooiin Yoosei Syo. SR zaman Belanda disebut Koo Gakko (Sompie, 1979 : 1).

Tanggal 3 Nopember 1942 didirikan Kyooiin Kanri Yooseisyo atau Sekolah Kanri sebagai tempat mendidik kader guru dan pegawai Jepang yang kelak dijadikan alat propaganda dalam masyarakat. Lamanya pendidikan Sekolah Kanri enam bulan di mana

pendaftaran pertama diikuti oleh seribu orang, umur antara 18 – 34 tahun, dibagi setiap kelas 50 siswa, dipisahkan antara yang lelaki dan wanita (Marunduh, 1978 : 72). Sekolah Kanri ini ditutup 5 Mei 1943 dengan satu angkatan saja yang para lulusannya langsung dipekerjakan pada sekolah dan kantor di seluruh karesidenan (Menado Syu). Mereka sangat dipercaya oleh Jepang sebagai kader dalam mempropagandakan semangat pro Jepang dengan semboyan Tiga A. Tenaga pengajarnya antara lain Kanamori dan Hoshi ditambah para guru Indonesia antaranya dua guru musik yakni Ny. Z. Kawet-Kandou dan K.H.E. Sompie (Marunduh, 1978 : 73).

Di daerah Bolaang Mongondow, sebelum Jepang masuk, terdapat sekolah-sekolah baik yang diusahakan oleh pemerintah, landschap (kerajaan), maupun swasta. Yang termasuk diusahakan oleh pemerintah disebut sekolah gubernemen. Jenis sekolah ini terdapat di seluruh Onderafdeeling di empat kerajaan yang ada, yakni Kerajaan Bolaang Mongondow, Kerajaan Bolaang Uki, Kerajaan Bintauna dan Kerajaan Kaidipang Besar. Yang termasuk sekolah gubernemen yakni BVS (Bestuurs Volksschool) 3 tahun, Vervolgschool 4 dan 5 tahun, dan Vervolg Onderwijzers 2 tahun. Sekolah landschap yaitu sekolah yang dikelola oleh kerajaan dan dibiayai oleh kerajaan. Jenis-jenis sekolah seperti ini terdapat di empat kerajaan tersebut.

Yang termasuk sekolah swasta yaitu yang dikelola oleh Zending (Sekolah Zending), yang dikelola oleh BPPI, dan yang dikelola oleh Neutrale Particuliere School (NPS). Sekolah Zending umumnya 3 sampai 5 tahun, diasuh oleh Nederlandse Zendings Genovtschap (NZG) dan memperoleh subsidi dari kas landschap maupun kas Onderafdeeling. Sekolah Islamiyah diasuh oleh BPPI (Balai Pendidikan dan Pengajaran Islamiyah) yang dibentuk oleh PSII (Partai Serikat Islam Indonesia) Cabang Bolaang Mongondow. Neutrale Particuliere School (NPS) diasuh oleh badan swasta yang dipimpin oleh A.E. Lewu.

Dengan didudukinya Bolaang Mongondow oleh Jepang, maka semua sekolah baik yang dulunya dikelola oleh pemerintah kolonial (sekolah gubernemen), landschap, maupun swasta diambil alih menjadi sekolah pemerintah Jepang. Semua sekolah itu memberikan pelajaran bahasa dan kebudayaan Jepang sebagai mata pelajaran wajib. HIS yang didirikan Zending tahun 1911 diambil alih oleh landschap menjadi HIS Landschap dan pada masa pendu-

dukan Jepang dijadikan sekolah menengah yang disebut Cogo Cugakko dipimpin oleh Hara Si Seikan, dengan para gurunya antara lain Warouw, E.P. Suling dan E. Wagey. Pada masa itu di Kotamobagu terdapat sebuah sekolah Cina yang bernama Yok Chae School pimpinan Min Ho. Bahasa Belanda dilarang diberikan di semua sekolah. Penilik sekolah atau Shigakuin yang diangkat Jepang masa itu bernama Cons Senduk.

Di daerah Gorontalo, pada masa pendudukan Jepang, sekolah-sekolah berjalan seperti biasa, hanya setiap sekolah wajib memberikan pelajaran bahasa dan kebudayaan Jepang. Bahasa Indonesia tetap dijadikan bahasa pengantar, sebaliknya dilarang mempergunakan bahasa Belanda. Dengan demikian maka kedudukan bahasa Indonesia menjadi penting dan karenanya semakin berkembang.

Semua sekolah tingkat SR diinstruksikan berjalan seperti biasa. Kemudian Jepang membuka sekolah-sekolah lanjutan, di antaranya yang dinamakan Sho Gakko (Sekolah menengah pertama umum) dan sekolah menengah kejuruan. Sekolah lanjutan satu-satunya di Gorontalo didirikan di kota Gorontalo di tahun 1942 yang disebut Tooko Gakkuen (Taman Pelajaran Cahaya Timur). Gedungnya menempati gedung sekolah milik HCS atau SMA Negeri sekarang. Sekolah itu kira-kira setingkat dengan SMP dengan mata pelajaran dipusatkan pada ekonomi (Polontalo, 1977 : 12).

Tahun 1943 didirikan Sekolah Ekonomi Pertanian atau Noomin Doojoo 3 tahun bertempat di desa Bongoime kecamatan Kabila. Sekolah ini sebagai tempat mendidik penyuluh pertanian yang akan ditempatkan di desa-desa untuk mengajarkan cara-cara pengolahan pertanian secara intensip (pemakaian pupuk, teknik pengolahan tanah dua kali setahun untuk mempertinggi produksi pertanian, dan sebagainya). Pada tahun itu juga didirikan sebuah sekolah uru yang disebut Yoo Seijoo. Juga sekolah pertukangan atau Ko Ngio untuk mendidik tenaga-tenaga yang trampil di bidang pertukangan. Sekolah Kasei (kira-kira setingkat SKKP) didirikan untuk mendidik wanita dalam berbagai ketrampilan rumah tangga. Sekolah milik swasta, misalnya Sekolah Islam, tetap ada, antara lain, Madrasah Muhammadiyah di Potanga dan Wongkaditi, juga Taman Pendidikan Az-Zakirat di Heledulaa (Tonio Po Oe, wawancara, 7 September 1979).

Di daerah Sangir Talaud, keadaan pendidikan pada masa pen-

dudukan Jepang berjalan seperti biasa. Hanya saja sudah tentu tidak luput dari beberapa perubahan seperti antara lain semua Sekolah Rakyat, baik sekolah gubernemen 5 kelas, sekolah gubernemen 3 kelas dan sekolah Zending diganti namanya menjadi Sekolah Rakyat. Sebagian dari SR itu ada yang terutama terdapat di Ibukota Kejoguguan (Fukugun = kecamatan sekarang), dijadikan Sekolah Rakyat 6 kelas. Demikianlah terdapat beberapa perubahan yaitu :

- a. SR yang tadinya sebagai sekolah gubernemen 5 kelas jadi SR Negeri 6 kelas;
- b. SR yang tadinya sekolah gubernemen 3 kelas menjadi SR Negeri 6 kelas;
- c. SR yang tadinya sebagai sekolah Zending menjadi SR Masehi 6 kelas.

Semua SR Negeri tersebut urusan pembiayaannya, termasuk gaji guru, ditangani oleh pemerintah pendudukan. SR Masehi pengurusannya ditangani oleh Pengurus Umum Sekolah Masehi (PUSM) dengan mendapat bantuan berupa subsidi dari pemerintah pendudukan, antara lain gaji guru-gurunya (Monografi Daerah, 1979 : 47).

Perubahan lain terdapat pula di bidang kurikulum. Jika pada masa kolonial Belanda, sekolah berorientasi untuk kepentingan penjajahan Belanda melalui mata pelajaran yang diajarkan, maka pada masa pendudukan Jepang ditujukan kepada kepentingan Jepang. Selain "tiga M" (membaca, menulis, menggambar), juga diajarkan bahasa dan huruf Jepang, baik Katakana maupun Hiragana. Di samping itu ada pembinaan mental yang sangat diutamakan sebagai latihan dasar kemiliteran Jepang (Monografi Daerah, 1979 : 47; Manatar, : 2).

Tujuan pendidikan pada masa itu tidak lain adalah untuk membudayakan dan memenangkan tujuan perang Jepang. Sehubungan dengan tujuan tersebut maka khusus di bidang pendidikan, Jepang mengambil langkah-langkah antara lain (Tingginehe, wawancara, 18 September 1979; Lumeling, : 2-3):

1. Murid-murid diajarkan berbahasa Jepang;
2. Sebagian besar pendidikan jasmani diberikan secara militer (bersifat militer);
3. Lagu kebangsaan Jepang juga diajarkan di sekolah-sekolah di samping kepada masyarakat;
4. Pendidikan yang diberikan oleh Jepang terutama adalah

Seinendan dan Seinentai, seperti misalnya Seinendan di Beo dan Seinentai di Lirung.

Keadaan pendidikan pada masa itu dikatakan sangat menyedihkan karena alat tulis tidak ada. Karena buku tulis tidak ada, maka murid-murid terpaksa menulis di batu tulis dengan pecahan batu tulis. Guru-guru yang mengajar adalah guru-guru yang dulunya bertugas pada pemerintahan Belanda ditambah guru-guru hasil pendidikan Jepang. Sekolah-sekolah juga hanya terbatas pada Sekolah Rakyat sedangkan sekolah lanjutan belum ada sama sekali (Lumeling, : 2-3).

Kemudian ketika Jepang mulai mengalami pukulan akibat kekalahannya dalam perang ($\pm$ 1942/1943) maka keadaan dalam bidang pendidikan inipun mulai mengalami kemunduran di sana-sini. Sekolah-sekolah tidak lagi berjalan seperti biasa. Rakyat disuruh menyingkir (mengungsi) ke hutan-hutan sehingga anak-anak di sana terpaksa ditampung di tempat-tempat yang terlindung di mana mungkin untuk menerima pendidikan.

Jumlah sekolah di waktu itu tidak bertambah dibandingkan dengan zaman Belanda, malah ada yang terpaksa harus ditutup karena kesulitan dan tekanan ekonomi. Hal ini karena hasil bumi berupa kopra dan pala yang merupakan sumber penghasilan rakyat tidak ada harganya di pasaran. Tambahan lagi adanya gangguan kesehatan akibat ketiadaan obat-obatan. Bahan-bahan kebutuhan pokok terutama sandang pangan yang sukar diperoleh, sangat mempengaruhi kehidupan pendidikan. Dengan demikian tidaklah heran jika jumlah murid mulai berkurang, guru-guru banyak yang berhenti mengajar terutama karena tiadanya jaminan sosial baik dari pemerintah pendudukan maupun dari badan penyelenggara sekolah yang bersangkutan. Terhentinya jaminan sosial berupa gaji menyebabkan ada sekolah yang menggantinya dengan bahan-bahan hasil bumi seperti ubi, pisang, dan lain-lain. Namun ada juga yang tetap bertahan karena didorong atau merasa terpanggil sebagai guru yang merasa cinta akan bangsa sendiri. Dengan berhentinya guru-guru yang berijazah guru maka lowongannya diisi oleh mereka yang bukan berijazah guru karena juga merasa terpanggil untuk mendidik bangsanya sendiri, sama halnya dengan guru-guru yang tidak mau ikut berhenti. Bersama-sama mereka hanya memperoleh jaminan sosial berupa bahan makanan yang diberikan oleh para orang tua murid secara suka rela pula (Monografi Daerah, 1979 : 47; Madonsa, wawancara 18 September

1979, Sigarlaki dkk, 1979 : 224).

Komunikasi

Seperti sudah diuraikan di depan, komunikasi laut dan udara seluruhnya dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan Jepang. Hanya para petugas sipil dan militer saja yang dibolehkan mempergunakan sarana komunikasi laut dan udara sesuai perintah Jepang.

Alat komunikasi antar pulau hanya dipakai perahu layar, perahu londe, perahu pelang (jenis-jenis perahu bercadik), sedangkan motor laut tidak ada. Pembuatan perahu-perahu makin digiatkan sejak dilakukannya pemboman-pemboman oleh pihak Sekutu, di mana setiap Fukugun (kejoguguan = kecamatan) diusahakan pembuatannya atas perintah Jepang. Surat menyurat tidak ada, kecuali surat menyurat khusus untuk kepentingan Jepang. Perintah-perintah di bidang pemerintahan sipil hanya disampaikan kepada rakyat secara lisan saja dengan memakai bahasa Jepang (Lumeling, : 3).

Walaupun demikian Pemerintah pendudukan masih memberikan kesempatan adanya perhubungan melalui pos. Sejak masa penjajahan Belanda, organisasi GMIM telah membuka daerah pekabaran Injil di luar Minahasa, yaitu di Sulawesi Tengah. Selama masa pendudukan Jepang, tetap ada hubungan melalui pos dengan pendeta N.S. Tirie yang memimpin daerah pengutusan Injil Sulawesi Tengah. Tambahan lagi GMIM mendapat kunjungan dari Ds. Myahara dari Jepang pada 16–23 Juni 1942 yang mengakibatkan dimantapkannya kembali GMIM sebagai organisasi gereja di Minahasa (Lintong, 1978 : 54).

Mengenai surat kabar yang pernah terbit di Minahasa ada yang ditutup menjelang kedatangan tentara Jepang dan ada yang tetap terbit atau diterbitkan selama masa pendudukan berlangsung. Yang ditutup menjelang kedatangan Jepang antara lain (Manus, dkk, 1978 : 132–133) :

1. Keng Hoa Poo, mingguan, 1923–1941, pimpinan Liem dan Hermanse;
2. Pedoman Tani, bulanan, 1925–1941, pimpinan Ch Manarinsong;
3. Suara Pikat, bulanan, 1925–1942, pimpinan Ny. Ling Kalangi, Nn. Waworuntu, Ny. Pelengkahu, Ny. Wenas, Ny. Winter-Dengah, Nn. Sumolang, Ny. Moningka-Singal;

4. Omhoog, majalah pemuda berbahasa Belanda, 1928–1941, pimpinan E. Katoppo;
5. Menara, mingguan, 1934–1941, pimpinan DR. G.S.S.J. Ratulangi dan O.H. Pantouw;
6. Taman Ibu, majalah wanita suara PKIKM–GMIM, 1937–1941, pimpinan Ny. Wenas, Ny. Moningga;
7. Weekblad Manguni, majalah mingguan, 1939–1941, pimpinan dr. Ch. Singal;
8. Utusan, bulanan, 1940–1941, pimpinan W. Kandou.

Yang tetap terbit dan yang diterbitkan dalam masa pendudukan Jepang adalah sebagai berikut :

1. Berita Gereja, 1935–1955, oleh Sinode GMIM;
2. Sinar Baru; 1941–1956, pimpinan Henk Lumanauw dan Jan Torar;
3. Matahari Terbit, harian, 1942–1943, sebagai suara pemerintah pendudukan Jepang di Menado Syu.

Dalam bidang komunikasi massa, khususnya surat kabar, terdapat beberapa yang diterbitkan di daerah Gorontalo. Antaranya harian Kesatuan di bawah asuhan Sjarifuddin Panigoro; Persaudaraan di bawah asuhan Karel Panamon; juga suara Pemuda dipimpin oleh M.S. Ointu George Bokings dan Azis Hipy (Anwar Haras, wawancara 7 September 1979).

Para langganan surat kabar tersebut pada umumnya adalah guru-guru serta mereka yang tahu dan mengikuti tingkat perjuangan kemerdekaan di masa itu. Untuk mengantarkan surat kabar kepada para langganan yang tersebar di desa-desa dipakai kuda sehingga disebut pos kuda. Hal ini karena kondisi jalan yang kurang baik untuk jenis angkutan lainnya sehingga hanya cocok dengan berkuda. Kalau sebelumnya kaum nasionalis sudah puas dengan berlangganan surat kabar dari Jawa, Medan dan Aceh, maka adanya surat kabar daerah dirasa sangat perlu untuk menyampaikan kepada rekan-rekan mereka yang tersebar di desa-desa, walaupun dalam format atau ukuran yang sangat sederhana sekalipun. Dengan masuknya Jepang maka semua surat kabar di atas masih diperkenankan untuk terbit beberapa kali lagi. Akhirnya dilarang terbit dan pemerintah pendudukan menggantinya dengan Kodomo Shinbun yang merupakan majalah untuk anak-anak berbahasa Jepang dan bahasa Indonesia.

Seni budaya

Warisan seni budaya daerah Gorontalo sejak zaman dahulu tetap tumbuh, berkembang dan dipelihara oleh masyarakat. Pada masa pendudukan Jepang seni budaya daerah tetap berkembang dalam masyarakat, terutama dalam hal adat istiadat *Uduwo lo Limo lo Pohalaa* (Dari dua hingga jadi lima kerajaan yang berserikat), maksudnya menjelaskan tentang adat istiadat kerajaan-kerajaan di Gorontalo, dimulai dari waktu jumlahnya hanya dua kemudian berkembang menjadi lima kerajaan (hingga masuknya Belanda). Walaupun kerajaan sudah dihapuskan sejak tahun 1889 (sesuai Staatsblad 1889 No. 96 dan No. 250), namun adat istiadat tetap dipertahankan, bahkan menjadi sendi kehidupan masyarakat di daerah Gorontalo (Manus, dkk, 1978 : 24; Liputo XII, 1949 : 57; Haga, 1931 : 197).

Kegiatan-kegiatan sosial budaya, khususnya dalam kegiatan gotong royong seperti *motutulungia* (tolong menolong sesama manusia) dan *dembulo* (bantuan atau sumbangan bagi keluarga yang berduka), tetap berlangsung seperti biasa. Demikian pula halnya dengan seni budaya seperti mobarajanji, momalebohu, pakadanga, mojongge, tonggobi dan molinggolo (Hintulangi Nadjamuddin, wawancara 3 September 1979). Dapat ditambahkan bahwa hampir 100% penduduk Gorontalo beragama Islam. Namun kepercayaan lama seperti kepada makhluk halus (*moto-lohuta*), kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan gaib dan sakti (*hulobalangi*), tetap dimiliki oleh masyarakat Gorontalo (Tumenggung Sis dkk, 1977 : 39; Manus dkk, 1978 : 52).

Di daerah Bolaang Mongondow Jepang mewajibkan kesenian dansa dalam setiap pesta. Kesenian dansa menjadi salah satu acara dalam setiap pesta waktu itu. Rakyat yang menghadiri pesta-pesta wajib ikut acara dansa dan bagi mereka yang tidak mau ikut dianggap sebagai mata-mata musuh. Pada setiap pesta, tarian yang juga sering dibawakan adalah tari dana-dana, termasuk pula dalam pesta perkawinan, mengadakan selamatannya menaiki rumah baru, atau selesai memetik padi.

Di kepulauan Sangir Talaud di bidang kesenian, maka di samping cabang-cabang kesenian asli yang sudah ada sebelumnya (seperti tari gunde, salo, bengko, upase, alabadiri, ransasahabe dan lain-lain), muncul pula jenis kesenian baru di bidang seni tari, yakni tari masiroki, tari ampa wayer dan tari ronggeng. Tari ampa wayer adalah tarian yang memakai komando diiringi gerakan

seperti pesawat terbang jenis B-29 (milik Sekutu) yang sering terlihat pada waktu itu. Nama "ampa wayer" (atau empat baling-baling, bhs. Belanda : waaier!) diambil dari bentuk pesawat udara Sekutu yang mempunyai empat baling-baling. Tari ronggeng sejenis tari ampa wayer juga hanya diiringi oleh komando-komando yang disebut "ronggeng" (terutama di daerah Talaud). Sedangkan tari masiroki ditarikan dengan memakai tongkat diiringi sebuah nyanyian bahasa Jepang yakni nyanyian "Masiroki" (dari lagu Jepang "Aikoku no hana" yang mulai dengan kata-kata : "Masiroki Fuji no . . .). Tarian-tarian ini kemudian sering dipertandingkan antar sekolah-sekolah maupun muda-mudi dan anggota kelompok-kelompok masyarakat lainnya (Tatimu, 1975 : 18; Sigarlaki Jkk, 1977 : 227; Amiman, wawancara 14 September 1978, Madonsa, wawancara 18 September 1979; Tingginehe, wawancara 18 September 1979).

Khusus di daerah Talaud, pada waktu itu telah dikenal tarian adat Talaud berupa tari kipas, tanam padi, lenso dan lain-lain. Di bidang seni kriya, masyarakat waktu itu telah dapat membuat pakaian dari serat manila (manila henep) dicampur dengan serat nenas dan benang kapas dari Jepang. Pakaian adat hasil kombinasi serat ini oleh masyarakat Talaud dinamakan "lologga" (Bini-lang, wawancara 20 September 1979).

C. KEGIATAN ORGANISASI POLITIK DAN SOSIAL

Sebelum pendaratan dilakukan, Jepang aktif menyiarkan propaganda politik melalui Radio Tokyo yang dapat ditangkap sampai di daerah ini. Dikatakan bahwa Jepang hendak memerdekakan bangsa-bangsa Asia dari tangan penjajah Barat, termasuk bangsa Belanda. Oleh karena itu dianjurkan hendaknya rakyat Indonesia menyambut kedatangan Jepang sebagai sesama bangsa Asia dengan Jepang sebagai "saudara tua". Dan dengan pimpinan Jepang hendak diwujudkan "Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya".

Ketika Jepang mendarat di daerah ini, berkumandangnya propaganda "Jepang-Indonesia sama-sama, ne" yang maksudnya hendak menerangkan bahwa Jepang dan Indonesia adalah berkulit sama dan telah datang sebagai pembebas dari bangsa yang berkulit putih, dalam hal ini Belanda. Juga ada semboyan "Nippon-Indonesia joto" maksudnya persekutuan bangsa-bangsa Asia khususnya

bangsa Indonesia, serta semboyan-semboyan lainnya yang dikumandangkan di mana-mana. Tidak sedikit rakyat Indonesia di Sulawesi Utara ini yang segera termakan oleh propaganda/semboyan di atas dan menganggap bahwa Jepang membang bersungguh-sungguh untuk melepaskan Indonesia dari tangan penjajah Belanda.

Toko-toko asing dibuka dengan paksa dan rakyat disuruh mengambil isinya (Palit, 1978 : 35) sedangkan bendera Merah Putih diizinkan berkibar di samping bendera Hinomaru. Bendera Merah Putih berturut-turut dikibarkan di Tahuna 10 Januari 1942, di Gorontalo 23 Januari 1942, bahkan juga sampai di Sulawesi Tengah (Manus, 1978 : 196). Di Minahasa para tokoh nasionalis membentuk "Komite Sembilan" untuk mengambil alih pemerintahan dari tangan Belanda, tetapi kemudian dibubarkan Jepang dan kepada para pegawai sipil masa Belanda diperintahkan untuk tetap bekerja seperti biasa. Para tawanan politik masa Belanda dibebaskan oleh Jepang, antaranya ialah G.E. Dauhan, O.H. Pantouw, M.B. Tumbel dan J.U. Mangowal yang kemudian menggerakkan rakyat untuk membantu Jepang (Taulu, 1950 : 74, Wowor, 1977 : 19).

Ketika Pemerintahan Pendudukan mulai mantap, maka rakyat mulai lagi hidup seperti sebelum adanya pemerintahan Jepang. Kegiatan olah raga diaktifkan lagi dan tidak dihalang-halangi oleh pemerintah pendudukan, bahkan pemerintah mendorong dilakukannya kegiatan-kegiatan seperti itu termasuk kesenian.

Dalam bulan Juni 1942, lapangan sepak bola di Tikala, Manado, menjadi ramai lagi dengan pemuda-pemuda pria dan wanita yang mengadakan kegiatan-kegiatan olah raga secara sendiri-sendiri. Kegiatan para pemuda ini menarik perhatian para pembesar Jepang, seperti Kodama dan Kato, yang kemudian turut terjun dan langsung turut melatih para pemuda di sana. Untuk menyalurkan minat para pemuda dalam bidang olah raga, maka kedua orang Jepang itu mengambil inisiatif untuk membentuk organisasi olah raga pemuda, bersama-sama seorang tokoh masyarakat bernama Mononutu. Dengan pimpinan Kodama, Kato dan Mononutu, maka pada 15 Juli 1942, terbentuklah di Manado suatu badan keolahragaan. Hadir dalam pertemuan pembentukan itu kira-kira 30 tokoh pemuda dari seluruh Minahasa.

Tahun 1943 wadah keolahragaan itu diperluas lagi dengan mencakup juga bidang kesenian. Wadah inilah yang mengadakan

Pekan Olah Raga dan Kesenian pada 1–14 Oktober 1943. Pekan tersebut diadakan di lapangan Sparta, Tikala (Manado) dan juga mempergunakan gedung pemerintahan kota (Menado Si) di bagian Timur lapangan tersebut. Pekan tersebut turut diikuti oleh kontingen-kontingen yang datang dari seluruh Keresidenan (Menado Syu). Mereka datang untuk mengikuti pertandingan catur, sepak bola, basket, tinju, brigde, yudo, kendo, silat, bilyard dan sebagainya. Pertandingan kesenian meliputi seni lukis, menyanyi, orkes keroncong, dansa, dan pertandingan kecantikan. Direncanakan akan diadakan pula Pekan Olah Rata dan Kesenian tahun 1944, tetapi tidak dapat terlaksana berhubung semakin gentingnya situasi peperangan, di mana Manado dan kota-kota lainnya di Minahasa mendapat serangan pemboman dari pihak Sekutu (Taulu, 1950 : 81).

Usaha-usaha menanamkan semangat pro Jepang dilakukan pada semua tingkat pendidikan di seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengimbangnya, maka tokoh-tokoh nasionalis di Minahasa, antaranya Arnold Mononutu, B.W. Lapien, G.E. Dauhan, O.H. Pantouw dan A.B.H. Waworuntu, senantiasa mengingatkan rakyat terutama para pemuda, agar tidak sampai terpengaruh sedemikian rupa sehingga melupakan sasaran perjuangan nasional mencapai kemerdekaan. Usaha-usaha mereka telah menghasilkan terbentuknya AMI (Angkatan Muda Indonesia) di Manado sekitar 1943–1944. Untuk menyelubungi maksud AMI yang hendak memperjuangkan kemerdekaan, maka AMI mengadakan kegiatan-kegiatan olah raga dan secara diam-diam para tokoh di atas membina semangat kemerdekaan kepada para anggotanya. Keanggotaan AMI terbatas di sekolah saja, yakni pada Menado Nippon Go Gakko I dan II. Mereka yang menjadi anggota antara lain Els Dauhan, Kitty Dauhan, Ida Pantouw, Eddy Gagola, John Rahasia, Fried Parengkuan, Filip Parengkuan, Bert Salaki, Net Raming, Dee Raming, Kari Lolong dan lain-lain di mana beberapa anggota AMI ini kemudian menjadi unsur utama dalam organisasi BPNI yang dibentuk akhir Agustus 1945 (Sompie, 1979 : 1; Wowor, 1977 : 27; Bujung, 1971 : 8).

1. GERAKAN TIGA A

Di tingkat nasional, Gerakan Tiga A dipimpin oleh Mr. Raden Samsudin. Gerakan Tiga A dibentuk 29 April 1942 di Jakarta bertepatan dengan hari lahir Kaisar Hirohito. Gerakan ini bekerja

dengan satu semboyan yakni "Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia". Propaganda utama dari Gerakan Tiga A yaitu "Melepaskan bangsa Asia dari genggaman Barat" (Sihombing, 1962 : 81, 83).

Di daerah Sulawesi Utara, propaganda Gerakan Tiga A ini dikumandangkan di mana-mana. Semboyan gerakan ini selalu menjadi bahan pidato para pemimpin tentara pendudukan maupun aparatur pemerintahan sipilnya. Namun di Minahasa sendiri, sebagai pusat pemerintahan pendudukan, tidak pernah diketahui dibentuknya organisasi Gerakan Tiga A tersebut.

Di daerah Gorontalo, setelah masuknya tentara Jepang 6 Juni 1942, tidak lama kemudian dibentuk organisasi Gerakan Tiga A yang dengan semboyan-semboyannya berusaha untuk membangkitkan tekad rakyat agar mendukung dan berdiri sepenuhnya di belakang pemerintahan pendudukan. Nani Wartabone, seorang tokoh nasionalis di sana, diajak Jepang bekerja sama mempropagandakan Gerakan Tiga A. Namun ajakan itu ditolaknyanya berhubungan ternyata Jepang melakukan tindakan sangat merugikan rakyat Gorontalo, antara lain penurunan bendera Merah Putih awal Juli 1942. Tetapi Jepang tetap melaksanakan propaganda gerakan ini melalui setiap pertemuan kelompok masyarakat, terutama dalam rapat-rapat terbuka yang diadakan oleh pemerintah Jepang.

Di dua daerah lainnya, yakni Bolaang Mongondow dan Sangir Talaud, tidak terdengar berita dibentuknya gerakan ini oleh rakyat setempat. Untuk daerah Sangir Talaud, sejak Jepang menguasai daerah ini, mereka melakukan tindakan-tindakan yang demikian kejamnya sehingga mematikan kemauan rakyat dalam berorganisasi dan berpolitik. Di bawah kekejaman Jepang itu, rakyat tunduk dan tidak berani berbuat sesuatu untuk menghindarkan kecurigaan pihak Jepang. Tidaklah mengherankan bahwa meskipun Jepang menggembargemborkan politiknya melalui Gerakan Tiga A, namun kurang mendapat sambutan di sana. Demikian pula halnya dengan organisasi-organisasi yang dibentuk kemudian, seperti PUTERA, Keimin Bunka Syidosyo, dan sebagainya (Madonsa, wawancara 18 September 1979).

2. GERAKAN PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat)

Latar belakang pembentukan PUTERA ini ialah mengarahkan segala kekuatan dan tenaga rakyat untuk memberi bantuan kepada

usaha-usaha mencapai kemenangan terakhir bagi Jepang dalam peperangannya melawan Sekutu. Melalui PUTERA maka Jepang hendak mengajak para pemimpin dan rakyat Indonesia memikul kewajiban bersama untuk melaksanakan maksud dan tujuan pemerintahan militer Jepang di Indonesia sampai ke daerah-daerah.

Organisasi Gerakan PUTERA didirikan 1 Maret 1943 dan diresmikan dalam upacara peringatan setahun jatuhnya Hindia-Belanda, 9 Maret 1943, di Jakarta. Gerakan PUTERA dipimpin oleh tokoh-tokoh nasionalis Indonesia tetapi berada di bawah penilikan yang keras dari Jepang. Para tokoh itu dikenal sebagai "Empat Serangkai", yakni Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, Ki Hadjar Dewantoro dan Kiyai Hadji Mas Mansur (Sihombing, 1962 : 106, 108).

Di daerah Sulawesi Utara gerakan PUTERA hanya ada di daerah Gorontalo. Dua tokoh nasionalis, yakni Nani Wartabone dan A.J. Usman, diajak oleh Jepang untuk turut memegang pimpinan Gerakan PUTERA tetapi ditolak oleh keduanya yang mengakibatkan Gerakan ini kurang mendapat sambutan dari rakyat setempat. Oleh karena itu Gerakan PUTERA tidak lama kemudian dibubarkan oleh Jepang.

3. KEIMIN BUNKA SYIDOSYO (BADAN PUSAT KEBUDAYAAN)

Di daerah Sulawesi Utara, khususnya Gorontalo, Badan Pusat Kebudayaan ini lebih menonjol pelaksanaannya melalui bidang pendidikan. Di mana-mana murid sekolah menerima gemblengan sedemikian rupa agar mereka memiliki dan bersemangat Jepang. Tradisi lainnya yang harus dilakukn oleh para pelajar itu ialah wajib mempelajari dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang "Kimigayo" dan lagu-lagu lainnya. Di samping itu mereka harus melakukan gerak badan (pendidikan jasmani) yang disebut taïso.

Murid-murid diharuskan melakukan Kinrohosi (kerja bakti) misalnya memperbaiki dan membersihkan jalan-jalan, sekolah, asrama, mengumpulkan bahan-bahan keperluan peperangan berupa makanan, dan di samping itu melakukan latihan jasmani serta latihan kemiliteran. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah di samping mempelajari dan menggunakan bahasa Jepang sebagai mata pelajaran wajib. Para pelajar diharuskan menghormati adat kebiasaan Jepang.

4. ORGANISASI KEPEMUDAAN SEINENDAN DAN SEINENTAI

Di tingkat nasional, gerakan Seinendan diresmikan berdirinya pada 9 Maret 1943 (Sihombing, 1962 : 109). Gerakan ini dimulai di pulau Jawa dengan dibentuknya Jawa Seinendan di kota Semarang, lalu menyebar ke setiap kota dan desa di sana. Di daerah Sulaesi Utara juga, sejalan dengan politik pemerintah pendudukan dalam hal penggemblengan pemuda, telah dibentuk barisan-barisan Seinendan di setiap desa. Yang didaftarkan sebagai anggota Seinendan adalah para pemuda yang putus sekolah dan diberikan latihan berbaris oleh Jepang (Palit, 1978 : 64). Dengan demikian maka khususnya di Minahasa, pada waktu itu terlihat adanya kegiatan-kegiatan organisasi Seinendan di bawah pimpinan Sonco (kepala desa) masing-masing. Tugas Seinendan itu adalah membantu Sonco di dalam tugas keamanan di desa.

Di daerah Sangir Talaud, walaupun diduduki oleh pasukan-pasukan Kaigun (Angkatan Laut), dijumpai pula pasukan-pasukan Rikugun (Angkatan Darat). Pasukan Kaigun membentuk Seinendan sedangkan pasukan Rikugun membentuk Seinentai di daerah ini untuk menampung para pemuda. Usaha pertama pembentukan Seinendan dan Seinentai itu dimulai dengan meminta para Sonco agar mengirimkan dua orang pemuda yang akan dilatih oleh Jepang. Mereka kemudian memperoleh latihan baris berbaris, menjaga keamanan, pertahanan, menembak, pertolongan palang merah, pertanian (membuka kebun), dan lain-lain. Di kemudian hari ternyata bahwa latihan-latihan yang diberikan kepada para pemuda melalui Seinendan dan Seinentai ini, dimanfaatkan untuk perjuangan menentang Belanda. Hal tersebut nyata di bulan Juni 1948 di mana beberapa anggota bekas Seinendan dan Seinentai pimpinan Gotfried Ontorael disertai beberapa anggota, antaranya Wando Ontorael, Johan Ontorael, Julius Majore, Encauras Majore, Abdon Maninggolan dan Ebsan Unsong, berhasil mengibarkan bendera Merah Putih. Kejadian itu berlangsung di Talaud, yaitu di rumahnya Jafet Amiman di Esang (Kecamatan Esang). Mereka merebut bendera Belanda lalu merobek warna birunya, kemudian mengibarkan bendera Merah Putih di sana (Amiman, wawancara 14 September 1979).

Ketika Jepang masuk di daerah Gorontalo maka semua organisasi kepanduan yang ada dibubarkan, kecuali organisasi Pandu SIAP (milik PSII) dan Pandu Hizbul Wathon (milik Muhammadi-

yah) yang masih diperkenankan berdiri. Akan tetapi kemudian sekaliannya dibubarkan dan semua pemuda ditampung ke dalam organisasi Seinendan. Para tokoh yang aktif dalam Seinendan bentukan Jepang ini antaranya H. Hipy, Ibrahim Mahmud dan A.J. Usman (Wantogia, wawancara 6 September 1979). Di Gorontalo Seinendan didirikan di setiap desa di mana para pemuda diberikan latihan baris berbaris dan juga latihan dasar kemiliteran lainnya. Mereka merupakan barisan cadangan yang bertugas mengamankan garis belakang apabila peperangan berkecamuk di daerah itu.

Di daerah Bolaang Mongondow, Jepang membentuk pula barisan-barisan Seinendan. Komandan Seinendan untuk seluruh Bolaang Mongondow Bunken ialah Bunkiyokan Cous Senduk. Sebagai langkah pertama pembentukannya empat pemuda ditugaskan untuk dididik di Tomohon (Minahasa), masing-masing seorang dari setiap kerajaan, yakni :

1. Abdurrachman Mokobombang dari Kerajaan Bolaang Mongondow;
2. Abdul Rasjad van Gobel dari Kerajaan Bolaang Uki;
3. Raisji Muhamad Datunsolang dari Kerajaan Bintauna;
4. Piet Sompi dari Kerajaan Kaidipang Besar.

Di Tomohon yang menjadi Komandan Latihan Seinendan ialah Sompi (bukan yang dikirim dari Kaidipang Besar) dan sebagai wakil komandan latihan ialah Wangko Remba Talasa (anak raja Poso). Keduanya langsung bertanggung jawab kepada Kepala Pemerintahan Militer Menado Syu.

Selesai mengikuti latihan keempat pemuda itu kembali ke Bolaang Mongondow dan melaporkan diri kepada Cous Senduk selaku Bunkiyokan. Selesai melapor, mereka diperintahkan untuk kembali ke tempatnya masing-masing dan segera membentuk barisan-barisan Seinendan sampai pada tingkat desa.

Keempat pemuda yang telah mengikuti latihan di atas masing-masing menjadi Komandan Seinendan di tingkat kerajaan dari mana mereka berasal. Sebagai komandan mereka disebut Seinendan Kanji dan menjalankan perintah dari kepala perusahaan Jepang (Toyobo) yang ada pada setiap kerajaan tersebut. Kepala Toyobo tingkat kerajaan dan distrik di Bolaang Mongondow langsung bertindak mewakili Bunkenkanrikan Matsuda yang memimpin bekas Onderafdeeling itu.

Kemudian dalam pelaksanaannya Komandan Seinendan

(Seinendan Kanji) untuk kerajaan Bolaang Mongondow, Abdurachman Mokobombang, mendapat perintah dari Bunkyokan Cous Senduk, dan pimpinan Toyobo di Kotamobagu dan Fukugun-fukugun (onderdistrik-onderdistrik). Di Kaidipang Besar, Seinendan Kanji Piet Sompi mendapat perintah dari pimpinan Toyobo setempat yang dipegang oleh seorang Jepang bernama Matsuda. Di Bintauna, Seinendan Kanji Raisji Muhamad Datun-solang mendapat perintah dari pimpinan Toyobo setempat yang dipegang oleh S. Ishida. Demikian pula untuk Seinendan Kanji Bolaang Uki Abdul Rasjad van Gobel yang juga mendapat perintah dari pimpinan Toyobo setempat.

Dengan usaha para Seinendan Kanji di setiap kerajaan, maka pada setiap desa terbentuklah barisan-barisan Seinendan yang dikepalai oleh kepala desa (Sonco) yang bersangkutan. Dengan demikian maka kepala desa di samping tugasnya juga merangkap tugas sebagai komandan Seinendan tingkat desa dan disebut sebagai Seinendanco.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa yang menjadi tugas dari Seinendan Kanji di setiap kerajaan di daerah Bolaang Mongondow yakni :

1. Membentuk barisan Seinendan di setiap desa;
2. Setelah Seinendan desa terbentuk, menggerakkannya untuk usaha-usaha di sektor pertanian antara lain membuat saluran-saluran irigasi;
3. Mengerahkan Seinendan untuk pembuatan jalan dengan membantu pelaksanaan tugas dari dinas pekerjaan umum (Sobukuka); antaranya dalam usaha membuka jalan dari Manado ke Gorontalo melewati daerah Bolaang Mongondow; Pimpinan Sobukuka waktu itu dipimpin oleh Nakamura;
4. Turut membantu rakyat di sektor pertanian, terutama pada waktu menanam dan memetik padi.

Selain tugas-tugas di atas, Seinendan juga ditugaskan untuk membantu kelancaran perpindahan pasukan yang mempergunakan jalan darat dari daerah Bolaang Mongondow ke Gorontalo, yaitu dengan membantu mengangkat kebutuhan-kebutuhan perang serta menyediakan konsumsi untuk pasukan-pasukan Jepang itu.

Para anggota Seinendan bekerja atas dasar suka rela dengan tidak memperoleh gaji dari pemerintah pendudukan, selain hanya memperoleh jaminan berupa rokok, makanan selama bertugas,

serta diberikan pakaian dari bahan kain blacu atau "strep jepang". Berbeda dengan romusya, para anggota Seienndan tidak dikirimkan ke luar wilayah pemerintahan kerajaan masing-masing. Para anggotanya tidak didaftarkan lagi sebagai tenaga kerja paksa di perkebunan-perkebunan kapas dan yute dan juga tidak diberikan tugas turut menjaga keamanan di desanya masing-masing (R.M. Datunsulong, wawancara 12 September 1979).

5. ORGANISASI KEMILITERAN/SEMI MILITER

KEIBODAN

Untuk membantu tugas-tugas keamanan dari kepolisian Jepang, dibentuk suatu barisan pemuda yang pada mulanya di Minahasa disebut Bogodang. Para pemuda yang terdaftar dalam Bogodang kemudian Keibodan ini, diberikan latihan kemiliteran dan kepolisian. Dalam bidang kemiliteran mereka dilatih memegang dan mempergunakan senjata yang selama latihan berlangsung sebagai senjata dipakai sebuah bambu runcing. Dalam bidang kepolisian mereka dilatih menjaga keamanan dalam desa. Latihan-latihan itu dimaksudkan untuk menghasilkan pemuda-pemuda trampil yang bersemangat Jepang untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam menjaga dan meningkatkan keamanan di lingkungan di mana mereka berada. Di Minahasa, Keibodan tingkat desa dikordinir dan dipimpin oleh kepala desa (Sonco), sama halnya dengan pemuda-pemuda yang tergabung dalam Seienndan (Palit, 1978 : 64).

Di daerah Sangir Talaud, Jepang juga mengadakan pendaftaran pemuda-pemuda setiap desa untuk dididik menjadi anggota Keibodan, yaitu sebagai barisan pembantu polisi. Untuk tingkat kejuguguan (Fukugun = kecamatan sekarang), dibentuk oleh Jepang suatu barisan pembantu polisi yang mereka sebut "jum-po" (Madonsa, wawancara 18 September 1979; Binilang, wawancara 20 September 1979; Tompo, wawancara 14 September 1979).

Di daerah Talaud yang menjadi Raja (Suco) pada waktu itu ialah Koagouw. Ketika Jepang memberikan instruksi kepada para Suco di seluruh Sangir Talaud untuk mendaftarkan pemuda-pemuda yang akan memperoleh latihan kemiliteran, Suco Koagouw mempergunakan kesempatan itu untuk memperoleh pemuda-pemuda terlatih militer yang akan dipergunakan melawan Jepang.

Terdaftarlah kira-kira 60 pemuda dari kerajaan Talaud yang akan mengikuti latihan itu. Untuk menyembunyikan maksud yang di-kandung raja itu, maka para pemuda tersebut didaftarkan di bawah kode "MX" yang berarti musuh atau mata-mata musuh. Tapi malang tak dapat ditolak untung tak dapat diraih, kode "MX" itu berhasil diketahui oleh Jepang. Suco Koagouw segera ditangkap, disiksa, diinjak-injak lalu dimasukkan ke dalam penjara karena dituduh mempersiapkan pemuda yang akan melakukan tugas sebagai mata-mata musuh. Setelah lewat beberapa hari, Jepang menyatakan bahwa raja tersebut telah hilang, melarikan diri entah ke mana perginya (Lumeling, : 3; Amiman, wawancara 14 September 1979).

Di daerah Gorontalo, Jepang membentuk pula barisan-barisan pemuda yang tergabung dalam Keibodan. Sebagai pasukan semi militer, para pemuda itu diharapkan turut serta dalam sistem pertahanan Jepang melawan Sekutu. Hal ini ditempuh oleh Jepang berhubung kemunduran-kemunduran yang dialaminya dalam peperangan melawan Sekutu. Para pemuda yang memiliki semangat nasionalisme Indonesia itu kelak nantinya akan turut bersama-sama Jepang mempertahankan tanah air sendiri melawan setiap ancaman yang akan datang.

Di daerah Bolaang Mongondow, organisasi Keibodan yang dibentuk oleh Jepang dengan mempergunakan jalur pemerintahan kerajaan, sama halnya dengan di daerah Sangir Talaud. Para pemuda yang selesai mengikuti latihan-latihan kemiliteran melalui Keibodan, ditugaskan menjaga keamanan di desanya masing-masing. Yang mengkoordinir Keibodan di desa-desa ialah para Sonco masing-masing. Di tingkat Fukugun dan Gun, Keibodan dipimpin oleh Fukugunco atau Gunco yang bersangkutan, yang bertugas membantu polisi di tingkat Fukugun atau Gun tersebut. Untuk tingkat kerajaan, maka Keibodan dipimpin oleh kepala polisi kerajaan yang ditugaskan untuk mengatur pelaksanaan tugas Keibodan di wilayahnya. Polisi Kerajaan ada di setiap kerajaan sejak zaman Belanda yakni Kerajaan Bolaang Mongondow, Kerajaan Bolaang Uki, Kerajaan Bintauna dan Kerajaan Kaidipang Besar. Di tingkat Bunken maka Keibondan dipimpin langsung oleh Bunkenkanrikan yang berkedudukan di Kotamobagu.

Di tingkat desa Keibodan ditugaskan untuk menjaga keamanan dalam desa masing-masing di bawah pimpinan Sonco. Mereka dilatih dan dipersenjatai dengan bambu runcing dan tugasnya

ialah mengatasi kekacauan apabila terjadi dalam desa. Selain itu mereka dijadikan sebagai penghubung antara desa dengan desa, dan antara desa dengan tingkat Fukugun, misalnya dengan mengantarkan surat-surat kepala desa (Sonco). Jadi mereka juga bertugas sebagai sarana komunikasi di samping tugasnya menjaga keamanan (Piet Manoppo, wawancara 16 September 1979).

HEIHO

Pemberitahuan yang pertama di tingkat nasional tentang kesempatan menjadi "serdadu pembantu" dikeluarkan antara bulan April-Mei 1943. Barisan Heiho ini adalah semacam milisi Indonesia, tetapi dari lapisan masyarakat bawah. Barisan Heiho dibentuk dan dibagi sesuai kesatuan tingkat kompi (tsutai) dan tingkat peleton (sotai). Komandan di tingkat tsutai maupun sotai beserta stafnya adalah orang Jepang, sedangkan pasukannya terdiri dari orang Indonesia. Pakaian seragam, tanda pangkat (beda dalam warna), gaji dan jaminan bagi Heiho, sama dengan Heitai (prajurit Jepang). Hanya bagi Heiho tidak diberikan upacara militer. Heiho dimasukkan sebagai bagian yang resmi dalam struktur organisasi angkatan perang Jepang dan terdiri dari Kaigun Heiho dan Rikugun Heiho. (Sihombing, 1962 : 137-141).

Di daerah Sulawesi Utara, pemerintah pendudukan Jepang juga membentuk barisan Heiho. Anggota-anggotanya dipilih di antara mereka yang dipercaya oleh Jepang, misalnya para anggota kepolisian. Sebagaimana diketahui, ketika Jepang masuk maka semua anggota kepolisian Belanda di daerah ini langsung dijadikan anggota kepolisian Jepang, kemudian juga dilatih pemuda-pemuda untuk dijadikan polisi Jepang. Dari antara para anggota kepolisian itu, dipilih sejumlah orang yang akan dilatih sebagai anggota Heiho. Mereka dikumpulkan di Manado dan sekitar bulan Desember 1943 diangkut engan kapal selam menuju ke Surabaya untuk menerima latihan di kota ini. (Rotty, wawancara 20 September 1979).

Di daerah Gorontalo, pada tahap berikutnya diadakan pendaftaran pemuda-pemuda yang akan dilatih sebagai anggota Heiho. Beberapa pemuda yang didaftarkan itu, antara lain, Hasan Bunga, Ishak Salola dan Djamaluddin Sadikin, bersama-sama pemuda lainnya dikirimkan ke Makasar (sekarang Ujung Pandang) untuk menerima latihan Heiho kota tersebut. (Rachman, wawancara, 10 September 1979).

Di daerah Sangir Talaud diadakan juga pendaftaran pemuda-pemuda untuk dididik sebagai anggota Heiho. Ketika Jepang menyerah, maka Belanda mendaftarkan kembali para bekas Heiho di sana untuk dijadikan anggota tentara KNIL, di antaranya Sumurung, sekarang bekas kepala desa Soataloara di Tahuna, dan Ahmad Tompo yang sekarang sebagai Wakil Ketua DPRD—II Sangir Talaud. Para pimpinan Heiho waktu itu antaranya bernama Sinsuw, Lahunduitan, dan lain-lain (Madonsa, wawancara 18 September 1979; Tompo, wawancara 14 September 1979).

PPI (PASUKAN PEMUDA INDONESIA)

Sejak September 1944 Minahasa mendapat serangan pembom-ban oleh pesawat-pesawat Sekutu, sehingga sebagian besar kota, terutama Manado, mengalami kerusakan berat. Akibatnya maka pusat pemerintahan Manado Syu dipindahkan dari Manado ke Tondano di pedalaman. Markas Besar tentara Jepang dipindahkan pula ke sana dan ditempatkan di Tonsealama (dekat Tondano). Tetapi tanggal 10 Pebruari 1945 kota Tondano pun mendapat serangan Sekutu di mana antara lain gedung gereja GMIM Tondano hancur. Serangan dan kehancuran yang dialami Jepang menyebabkan mereka semakin berusaha mendekati rakyat agar mau mendampingi mereka dalam peperangannya melawan Sekutu.

Untuk menjajaki kemungkinan ikut sertanya rakyat, terutama pemuda di Minahasa, dengan rencana mereka mengerahkan tenaga menghadapi Sekutu itu, maka pemerintah pendudukan di Minahasa mengundang beberapa tokoh pemuda untuk mengadakan pertemuan. Pimpinan pertemuan itu ialah Yonomura yang bertindak mewakili pemerintah pendudukan. Para pemuda di Minahasa diwakili oleh Henky M.L. Legoh, Andi Masengi, Victor Adam, Kayang Gosal, dan beberapa tokoh pemuda lainnya. Pertemuan itu diadakan 15 Pebruari 1945 di Seretan, Tondano.

Dalam pertemuan itu lahirlah kata sepakat di mana para pemuda Indonesia bersedia ikut serta membantu Jepang menyusun kekuatan untuk melawan Sekutu. Para pemuda Indonesia itu akan diorganisir dalam suatu barisan semi-militer yang disebut Pasukan Pemuda Indonesia (PPI). Disetujui oleh kedua belah pihak bahwa semua barisan yang dibentuk oleh Jepang selama ini akan dileburkan ke dalam PPI. Barisan-barisan dimaksud adalah Seinendan, Keibodan, Kai In Yooseiso, Mi Hari In, Kaigun Heiho, Rikugun Heiho, dan lainnya, semuanya akan dilebur dan menjadi Pasukan

Pemuda Indonesia. Dengan demikian pada pertemuan itu, lahirlah suatu organisasi semi-militer yang terdiri dari pemuda-pemuda, baik yang belum maupun yang sudah pernah menerima latihan militer dari Jepang. Direncanakan juga akan menggabungkan para pegawai Indonesia yang sementara bekerja pada instansi-instansi pemerintah pendudukan (Legoh, 1973 : 10). Namun sampai beberapa bulan kemudian tindak lanjut kegiatan dalam rangka PPI tidak pernah terdengar. Kegiatan PPI kemudian muncul lagi setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

BOO EI TEISINTAI

Maksud Jepang dengan membentuk PPI rupanya adalah untuk mengetahui apakah para pemuda Indonesia bersedia bekerjasama dengan mereka untuk memerangi pihak Sekutu. Oleh karena itu tindak lanjut peleburan semua organisasi yang dibentuknya (Seinendan, Keibodan dan lain-lain) tidak segera dilaksanakan sesuai janjinya dalam pertemuan 15 Pebruari 1945 itu.

Beberapa bulan kemudian, Jepang secara sepihak membentuk satu organisasi pemuda yang baru yang dinamakan Boo Ei Teisintai. Ke dalam barisan semi militer ini akan digabungkan semua organisasi yang dahulunya, sesuai rencana dan janji mereka, akan digabungkan ke dalam PPI. Dengan demikian maka dapatlah dianggap bahwa Boo Ei Teisintai ini adalah penjelmaan kerjasama antara Jepang dengan rakyat/pemuda untuk bahu membahu melawan Sekutu.

Organisasi semi-militer Boo Ei Teisintai ini dibentuk kira-kira pada pertengahan tahun 1945 di Tondano. Yang menjadi Komandan (Daidanco) ialah Wangko F. Sumanti yang diangkat oleh Jepang. Sebagai satu pasukan, maka markas dari Boo Ei Teisintai berkedudukan di Tondano. Dalam tahap pertama dileburkan Seinendan, Keibodan, Kai In Yooseiso dan Mi Hari In. Untuk tahap kedua sesuai rencana akan dileburkan Kaigun Heiho dan Rikugun Heiho lengkap dengan persenjataannya, yang berada di bawah komando Laksamana Muda K. Hamanaka dengan Kepala Stafnya, Letnan Kolonel Takasaki. Tetapi ternyata kemudian bahwa peleburan tahap kedua tidak dapat dilaksanakan sampai Jepang menyerah kalah. Organisasi Fujinkai (wanita-wanita) tidak dimasukkan ke dalam rencana peleburan tahap pertama dan kedua di atas. Para anggota pasukan yang tergabung dalam Boo Ei Teisintai ini menerima latihan kemiliteran

yang keras sekali dari para instruktur Jepang. (Wowor, 1977 : 23; Sompie, 1979 : 4).

PASUKAN PTA (PEMBELA TANAH AIR)

Sejak dileburnya semua barisan yang dibentuk oleh Jepang ke dalam Boo Ei Teisintai, maka para anggotanya memperoleh latihan militer yang intensip dari Jepang. Kepada mereka dijanjikan senjata-senjata untuk dipergunakan melawan Sekutu bersama-sama tentara Jepang yang memperahankan wilayah Menado Syu (bekas Keresidenan Manado). Namun rencana Jepang itu tidak dapat terlaksana karena didahului oleh penyerahannya kepada Sekutu, 14 Agustus 1945.

Setelah mengetahui bahwa pemerintahnya telah menyerah, maka Laksamana Muda K. Hamanaka selaku Menado Syuciji sekaligus sebagai Panglima tentara Jepang di wilayah ini, segera mengatur rencana penyerahan pemerintahan sipil dan kekuatan militer kepada rakyat Indonesia. Pemerintahan sipil penyerahannya sudah dilakukan di Tondano tanggal 21 Agustus 1945 dan dua hari kemudian diserahkan kekuatan-kekuatan militer, yang kesemuanya dilakukan dalam suatu upacara.

Untuk menerima penyerahan kekuatan militer maka Jepang secara tergesa-gesa membentuk suatu pasukan yang dinamakannya Pasukan Pembela Tanah Air (Pasukan PTA). Panjinya sama dengan bendera Merah Putih dan bergambar seekor banteng menyeruduk dan bertulisan PTA di sudut kanan atas. Pasukan ini adalah pengganti Boo Ei Teisintai yang dipimpin oleh Daidanco W.F. Sumanti. Dengan terbentuknya Pasukan PTA, maka W.F. Sumanti diganti oleh P.A. Tiendas dengan jabatan Hulubalang Besar Pasukan PTA, dibantu oleh seorang Pembantu Utama Hulubalang (kira-kira setingkat Kepala Staf), yang namanya tak diketahui lagi.

Dalam upacara tanggal 23 Agustus 1945 yang diadakan di Tondano, Panglima tentara Jepang yang diwakili oleh Letnan Kolonel Takasaki selaku Kepala Staf, menyerahkan panji dari Pasukan PTA kepada Hulubalang Besar P.A. Tiendas. Dengan upacara itu maka resmiah didirikan Pasukan PTA di mana sebagai pemimpin militer P.A. Tiendas tidak diangkat oleh Jepang, tetapi oleh pemerintah sipil yang sudah mulai memerintah 21 Agustus 1945 di bawah Residen E.H.W. Pelengkahu. Hulubalang Besar P.A. Tiendas ini memiliki staf yang terdiri dari beberapa perwira Indonesia, antaranya G.E. Dauhan, yang menangani urusan politik dari

pasukan itu (Sompie, 1979 : 4).

Bersamaan dengan upacara penyerahan militer tersebut, didirikan pula di Tondano sebuah Akademi Militer sebagai wadah pendidikan perwira-perwira untuk Pasukan PTA. Pimpinan Akademi Militer Tondano itu ialah W.F. Sumanti dengan kedudukan selaku Direktur Akademi. Kepala Staf Akademi dipegang oleh Inspektur Polisi Samsuri, sedangkan Kepala Administrasi ialah K.H.E. Sompie. Para Instruktur terdiri dari orang Indonesia dan orang Jepang. Para pengajar dan instruktur Indonesia, antara lain, Hidajat SH, dr. R.C.L. Senduk, O.H. Pantouw, G.E. Dauhan, E.D. Johannes SH, dan lain-lain (Wowor, 1977 : 23). Dapat ditambahkan bahwa para pengajar dan instruktur Indonesia di atas semuanya adalah tokoh-tokoh nasionalis yang kemudian memegang peranan besar dalam perjuangan menghadapi Belanda yang kembali menjajah wilayah ini. Namun disayangkan bahwa baik Pasukan PTA maupun Akademi Militer Tondano ini hanya dapat aktif kira-kira sebulan saja berhubung adanya instruksi untuk dibubarkan oleh Laksamana Muda K. Hamanaka sepulangnya dari Morotai untuk menghadap Panglima Tentara Sekutu yang akan menerima penyerahan wilayah Keresidenan Manado dari tangan Jepang.

6. PENERAHAN ROMUSYA

Di tingkat nasional pengerahan tenaga Romusya dimulai sekitar tahun 1943. Untuk mengkoordinir urusan romusya maka Departemen Dalam Negeri (Naimubu) di Jakarta, membentuk dinas tersendiri yang disebut Romukyoku. Pada mulanya pengerahan romusya dilakukan secara sukarela, tetapi karena rakyat mulai mengetahui pengalaman dan penderitaan mereka yang sudah lebih dahulu masuk romusya, maka kemudian pengerahannya dilakukan secara paksa melalui jalur pemerintahan sipil yang ada. Untuk menutupi penderitaan para romusya maka Jepang menyebut mereka sebagai "perajurit ekonomi" atau "pahlawan-pahlawan" yang menjalankan "kewajiban suci" terhadap usaha peperangan melawan Sekutu (Sihombing, 1962 : 144-145).

Di daerah Sulaewsi Utara pemerintah pendudukan juga mengerahkan tenaga-tenaga sukarela untuk membangun atau menyelesaikan obyek-obyek militer dan obyek-obyek vital lainnya untuk kepentingan pertahanan. Di Minahasa lapangan terbang Mapanget (sekarang lapangan terbang Sam Ratulangi), yang sudah dimulai

pembuatannya sejak zaman Belanda, dilanjutkan oleh Jepang dengan mengerahkan tenaga-tenaga sukarela. ala romusya ini di Minahasa disebut "giliran", maksudnya para pekerja dikerahkan dari desa-desa secara bergilir mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Jepang.

Selain lapangan terbang Mapanget, romusya juga dikerahkan untuk melanjutkan pembuatan lapangan terbang Kalawiran di dekat danau Tondano, tidak jauh letaknya dengan pangkalan air Tasuka di danau itu. Juga romusya dikerahkan untuk membuat lapangan terbang baru, yaitu lapangan terbang Tawaang di kecamatan Tengah sekarang ini. Selain itu mereka dikerahkan juga untuk meneruskan penyelesaian PLTA Tonsealama, termasuk pembuatan lobang-lobang perlindungan bawah bukit untuk tempat berlindung dan sekaligus sebagai gudang makanan dan mesiu. Lobang perlindungan bawah bukit tersebut di mana-mana di seluruh Minahasa, antaranya dijumpai di Manado, Tonsealama, Tomohon, dan Kawangkoan.

Untuk melaksanakan tugas romusya ("giliran") ini, maka rakyat dikerahkan desa demi desa dan disatukan dalam kelompok distrik di tempat melakukan pekerjaan. Setiap kelompok wajib tinggal di lokasi selama sebulan dan diatur bergilir untuk bekerja siang malam. Sesudah itu mereka dapat kembali ke desa asalnya untuk diganti dengan kelompok yang lain. Pada mulanya bahan makanan untuk kelompok disediakan oleh Jepang, tetapi kemudian harus diusahakan sendiri, dalam hal ini harus disediakan oleh penduduk desa dari mana kelompok itu berasal. Selain tenaga manusia untuk pekerjaan "giliran" atau romusya itu, dikerahkan juga gerobak dan pedati lengkap dengan sapi atau kudanya. Romusya dikerahkan juga untuk membuat garam di pantai-pantai sekitar Minahasa. Karena beratnya pekerjaan dan kurangnya jaminan hidup, maka banyak di antara para romusya itu yang menderita sakit bahkan meninggal dunia di tempat bekerja (Palit, 1978 : 61-63).

Di daerah Bolaang Mongondow pengerahan romusya dilakukan untuk mengerjakan jalan, kebun kapas dan yute, termasuk pula dipekerjakan di kebun bahan-bahan obat. Rakyat dikerahkan per kelompok desa masing-masing dan langsung dipimpin oleh para anggota Seinendan atau Keibodan yang berasal dari desa bersangkutan. Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan di atas diawasi dengan kerasnya oleh anggota-anggota Kempeitai dan Tokeitai. Bagi yang lalai atau menolak bekerja maka ditindaki dengan kejam

oleh orang-orang Jepang tersebut. Lamanya pengerahan tenaga romusya ini antara seminggu sampai sebulan dengan memperoleh upah hanya sebesar lima yen.

Pemerintah pendudukan di Bolaang Mongondow diserahkan tugas untuk membuat jalan yang menghubungkan Minahasa dengan daerah Gorontalo melalui daerah Bolaang Mongondow. Jalan ini berfungsi sebagai sarana untuk kelancaran lalu lintas pasukan dan perbekalan militer antara Manado dan Gorontalo lewat Kotamobagu dan pesisir utara Bolaang Mongondow. Untuk itu maka rakyat Bolaang Mongondow dikerahkan sebagai romusya dan bekerja hanya dalam batas wilayah kerajaan masing-masing sampai ke perbatasan dengan daerah Gorontalo, yaitu di sungai Ayong dan sungai Kayuogu. Untuk jalan yang di daerah Gorontalo dikerjakan oleh romusya yang dikerahkan Jepang di sana ditambah yang berasal dari Buol dan Toli-toli. Jalan darat di Gorontalo itu melalui lapangan terbang di Isimu (Tolotio) sampai ke kota Gorontalo.

Tanggung jawab pelaksanaan pembuatan jalan di Bolaang Mongondow berada di tangan Dobobu (urusan pekerjaan umum) di Kotamobagu. Dengan selesainya jalan yang menghubungkan Minahasa dan Gorontalo melalui Bolaang Mongondow pada tahun 1944, maka gerakan-gerakan pasukan dan perbekalan militer menjadi lancar. Daerah ini merupakan tempat peristirahatan bagi pasukan yang menuju ke maupun yang datang dari Minahasa, antaranya mereka beristirahat atau singgah di Kotamobagu, Inobonto, Bintauna, Bolaang Itang, dan Boroko. Di tempat-tempat itu, sesuai perintah, para anggota Seinendan dan Keibodan mengerahkan tenaga romusya untuk menjamin perbekalan tentara dan mengangkut perlengkapan militer mereka selama mereka di daerah ini sampai berangkat ke tempat tujuannya (R.M. Datun-solang, wawancara 13 September 1979).

Para romusya dikerahkan juga untuk bekerja di perkebunan-perkebunan kapas dan yute yang terdapat di Bolaang Mongondow. Mereka dipimpin oleh orang-orang Jepang yang bekerja untuk Nantaku. Selain kebun kapas dan yute, Nantaku membuka kebun obat-obatan dengan mengerahkan tenaga romusya. Di kebun obat-obatan itu ditanam berjenis-jenis tanaman bahan obat, seperti tali pahit, rumput dukung anak, mayong benua, sambito, kaki kuda, kayu kita (kayu telur), dan sebagainya. Berapa orang Jepang dari Nantaku yang terkenal kejam antara lain bernama Hatori,

Maeda, Cukuda, Marukawa (Tunggali, wawancara 17 September 1979). Beberapa anggota Tokeitai dan Kempeitai yang terkenal kejam dalam pengerahan romusya antara lain Takamoto, Takasi, Fuisaiki, dan lain-lain (R.M. Datunsolang, wawancara 13 September 1979; Tunggali, wawancara 17 September 1979).

Di Gorontalo pengerahan romusya dilakukan untuk mengerjakan lapangan terbang Tolotio dan jalan yang ada di daerah ini. Pada mulanya pengerahan dilakukan secara sukarela yang diambil dari para petani di desa-desa. Hal ini dengan mudah dilakukan berhubung rakyat masih terpengaruh akan propaganda Jepang untuk menciptakan "Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya"

Lama kelamaan pengerahan dilakukan secara paksa di mana bagi mereka yang membangkang diberikan hukuman yang amat berat. Pengerahan tenaga romusya tidak saja terbatas bagi pria dewasa, tetapi juga diharuskan bagi kaum wanita apalagi para pemuda di sana. Karena para petani pada umumnya diwajibkan melaksanakan romusya, maka pengerahan itu amat besar pengaruhnya dalam produksi pertanian. Oleh karena itu masyarakat Gorontalo pada masa itu mengalami penderitaan yang hebat, terutama di kalangan rakyat petani, yang di samping bekerja mengolah tanah-tanah pertanian wajib juga bekerja sebagai romusya.

Sama halnya dengan di daerah lainnya, pemerintah pendudukan di Sangir Talaud juga mengerahkan tenaga rakyat dalam bentuk romusya yang dipilih dari desa-desa. Mereka diangkut ke luar daerah Sangir Talaud dan dibawa ke Labuhan Uki (Bolaang Mongondow), ke Banggai (Sulawesi Tengah) dan ke Kau (Halmahera, Maluku Utara). Sebagian lagi dipekerjakan untuk kepentingan Jepang di dalam daerah sendiri, seperti membuat tempat-tempat perlindungan dan pertahanan, dan mengerjakan ladang untuk produksi bahan makanan tentara. Para romusya ini umumnya sangat menderita di tempat di mana mereka bekerja, karena selain tidak diperhatikan soal jaminan hidup dan jaminan kesehatan, juga diperlakukan secara kejam sekali. Banyak di antara mereka yang tidak pernah kembali dan menemui ajal di tempat bekerja.

Akibat menerima perlakuan yang amat kejam, ditambah kekurangan jaminan hidup dan jaminan kesehatan, maka di antara para romusya itu banyak yang berusaha dan berhasil melarikan diri

dari tempat bekerja. Yang dari luar daerah berhasil meloloskan diri dan kembali ke Sangir Talaud dengan naik perahu. Mereka kemudian menceritakan pengalaman pahit dan mengerikan yang dialami selama dikerahkan sebagai romusya oleh Jepang dan mengajak rakyat yang ada untuk memberontak terhadap Jepang.

Sehubungan dengan larinya para romusya di atas, maka pada masa itu lahirlah jenis tarian rakyat yang dinamakan "tari ampa wayer". Tarian ini digubah berdasarkan ceritera para romusya itu, yaitu ceritera tentang pengalaman yang menyedihkan ketika di tempat kerja mendapat serangan pesawat-pesawat pembom bermesin empat (B-29) milik Sekutu. Ceritera disampaikan sambil meniru-niru gerak-gerik pesawat yang menukik atau oleng ke kiri dan ke kanan, dalam usaha mencapai sasaran bom yang tepat. Dari ceritera dan gerakan-gerakan pesawat tersebut, diciptakanlah tari-ampa-wayer seperti sudah disampaikan di atas. Tarian ini kemudian menjadi populer di kalangan rakyat di masa Jepang bahkan sejak itu dipertandingkan oleh anak-anak sekolah, pemuda-pemudi maupun masyarakat umumnya sampai sekarang (Madonsa, wawancara 16 September 1979).

Kekejaman demi kekejaman yang dilakukan oleh Jepang di daerah Sangir Talaud ini semakin menimbulkan rasa kebencian, dan dibalik itu semakin mempertebal rasa persatuan, patriotisme dan nasionalisme di kalangan rakyat. Perlawanan yang dikobarkan rakyat Makalehi pimpinan Salmon Labaeng misalnya, dapat dike-mukakan sebagai contoh bangkitnya persatuan, patriotisme dan nasionalisme melawan Jepang. Karena melihat bahwa kedudukan mereka di kalangan rakyat semakin lama semakin berbahaya, maka untuk menghindarkan balas dendam, banyak di antara orang-orang Jepang itu yang melarikan diri baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan ke luar daerah Sangir Talaud. Ada yang terang-terangan lari dengan perahu ke Manado atau ke daerah lain (Bolaang Mongondow, Sulawesi Tengah dan lain-lain), dan ada pula yang diam-diam berangkat ke Philipina atau mungkin langsung kembali ke Jepang (Makahanap, wawancara 18 September 1979).

7. ORGANISASI KEWANITAAN (FUJINKAI)

Pada tingkat nasional Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Batas umur terendah untuk menjadi anggota barisan Fujinkai adalah 15 tahun dan tidak ada batas maksimum. Tujuannya

adalah "membantu balatentara Jepang dengan usaha-usaha yang sesuai dengan kedudukan wanita penduduk asli serta mempertinggi derajat kesusilaan wanita". Perincian dari tugas Fujinkai adalah :

- a. Mengutamakan kesederhanaan dan berusaha saling melatih-melatih sambil mempertinggi derajat kesusilaan wanita;
- b. Mengadakan Zigyobu atau bagian usaha yang permanen atau darurat sifatnya, untuk menjalankan pekerjaan yang perlu dalam lapangan memperbaiki kehidupan di belakang garis peperangan dan dalam lapangan usaha menabung, pendidikan, keselamatan umum, dan kesehatan;
- c. Memajukan kesehatan tubuh dengan jalan mengadakan pidato-pidato pada rapat-rapat tentang ilmu tubuh manusia, kesehatan, dan makanan;
- d. Menanam keinsafan kewajiban wanita dalam usaha penja-gaan negeri di waktu peperangan, terutama tentang memberi penerangan pertolongan pertama dengan jalan mengadakan pidato-pidato atau mendirikan kursus-kursus, serta merapatkan hubungan dengan Seinendan dan Keibodan;
- e. Mengadakan hubungan yang erat dengan sekolah-sekolah dan menegaskan pidato-pidato dan latihan tentang pendidikan yang harus diberikan kepada anak-anak dan murid di luar sekolah dan dalam rumah tangga (Sihombing¹1962 : 127-128).

Di wilayah Menado Syu (Keresidenan Manado) pembentukan organisasi wanita yang disebut Fujinkai itu dilaksanakan juga sampai di desa-desa. Para wanita didaftarkan lalu dilatih dalam tugas-tugas tertentu sesuai harkatnya sebagai wanita. Di tingkat desa anggota-anggota Fujinkai dikordinir dan dipimpin oleh kepala desa (Sonco) yang bersangkutan, sama halnya dengan Barisan Seinendan. Anggota Fujinkai di sini tidak diberikan latihan kemiliteran seperti halnya dengan para anggota Seinendan, Keibodan dan sebagainya. Oleh karena itu maka Jepang tidak memasukkan Fujinkai sebagai organisasi yang sedianya akan dileburkan ke dalam PPI, Boo Ei Teisintai, ataupun Pasukan PTA.

8. KOMITE TENAGA RAKYAT (KTR)

Menyadari semakin gentingnya situasi peperangan yang tidak menguntungkan Jepang, maka di Sulawesi Utara mereka berusaha merangkul para tokoh nasionalis untuk bekerja sama dengan

Jepang. Di Tondano sebagai pusat pemerintahan pendudukan Manado Syu dibentuk pada 28 September 1944 sebuah organisasi yang dinamakan Komite Tenaga Rakyat disingkat KTR. Sebagai Ketua ialah G.E. Dauhan. Anggota KTR berjumlah 12 orang, yakni :

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. C.P. Hermanses | 7. O.N. Pakaja |
| 2. F. Intama | 8. J.I. Permata |
| 3. J. Jocom | 9. drh. W.J. Ratulangi |
| 4. F.W. Kumontoy | 10. K.H.E. Sompie |
| 5. J. Lengkong | 11. M.B. Tumbel |
| 6. Lie Beng Tiok | 12. A.J. Walalangi |

Dilihat susunan keanggotaannya, maka KTR dianggap mewakili daerah-daerah Minahasa, Sangir Talaud, Gorontalo, ditambah wakil golongan minoritas Cina dan pemuda (Sompie, 1979 : 2; harian Lensa Utara, 19 April 1978 : I + IV).

Selesai pembentukan KTR dilanjutkan dengan upacara untuk merayakan perwujudan kerjasama antara Jepang dengan para tokoh nasionalis Minahasa. Upacara dipimpin langsung oleh Laksamana Muda K. Hamanaka bertempat di gedung gereja GMIM di Tonsealama, 28 September 1944. Hamanaka didampingi oleh para pembesar sipil dan militer, termasuk dinas Ryoomintai dan Sendenbu. KTR ini berfungsi sebagai lembaga legislatip yang mendampingi Manado Suciji, Laksamana Muda K. Hamanaka, yang memimpin daerah Sulawesi Utara/Tengah.

Sejak pembentukannya maka KTR menggiatkan usaha menggalang persatuan dan kesatuan di kalangan rakyat sebagaimana dimaksudkan Jepang, tetapi dalam kenyataannya melalui pidato para anggotanya selalu membangkit-bangkitkan semangat nasionalisme menentang segala bentuk penjajahan. Seorang tokoh nasional asal Bolaang Mongondow yang dipenjarakan Jepang, A.C. Manoppo, atas usaha KTR telah dilepaskan. KTR dalam usahanya di bidang pertanian membentuk Noogyo Teisintai atau Pasukan Bakti Tani, dipimpin oleh Taico K.H.F. Sompie dibantu Frans Rumokoy dan Robert Wenas. Dalam bidang politik, KTR menolak usaha yang ada sejak zaman Belanda yang hendak menjadikan Minahasa sebagai propinsi ke-12 dari Nederland. Menjelang kekalahan Jepang, maka KTR memberanikan diri mengajukan tuntutan agar Jepang menyerahkan pemerintahan kepada rakyat Indonesia di Sulawesi Utara/Tengah (Sompie, 1979 : 2 – 3).

9. MENADO SYUKAI GI IN

Pada awal tahun 1945, diadakan penambahan 15 anggota baru KTR yakni :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. F. Kairupan | 9. E.H.W. Pelengkahu |
| 2. Koesno Dhanupojo | 10. dr. Ch. Singal |
| 3. J.U. Mangowal | 11. H. Sumarauw |
| 4. J.P. Mongula | 12. H.D. Tinangon |
| 5. Tom Olii | 13. Singo Uno |
| 6. J. Palamani | 14. R. Wantalangi |
| 7. P. Pandeiroth | 15. Nani Wartabone |
| 8. O.H. Pantouw | |

Selain adanya penambahan 15 anggota baru, diadakan penggantian Ketua dari G.E. Dauhan kepada E.H.W. Pelengkahu. Juga fungsi KTR dirobah dari badan penasehat menjadi semacam Badan Perwakilan dan disebut Menado Syukai Gi In. Sekitar bulan April 1945 fungsinya dirobah lagi menjadi Badan Persiapan Pemerintahan Kemerdekaan Indonesia untuk wilayah Menado Syu (Keresidenan Manado) (Sompie, 1979 : 3; Kempen, 1953 : 209; Wowor, 1977 : 22).

Dalam masa jabatan Ketua E.H.W. Pelengkahu ini, dilakukan pernyataan penolakan kedudukan Minahasa sebagai propinsi ke-12 Nederland, menguatkan penolakan yang sudah pernah dikemukakan oleh KTR sebelumnya. Dengan perubahan-perubahan fungsi di atas Badan ini menjadi semakin berani mengajukan tuntutan agar Jepang segera menyelenggarakan penyerahan pemerintahan sipil untuk Menado Syu kepada orang Indonesia. Sumber lainnya menambahkan bahwa keanggotaan Badan Persiapan ini diperluas dengan beberapa anggota lagi, antaranya dr. R.C.L. Senduk, D.A. Th. Gerungan, H.D. Manoppo, B.W. Lapian, dan E.R.S. Warouw. Bulan Agustus 1945 namanya dirobah lagi menjadi Panitia Kemerdekaan Indonesia Sulawesi Utara/Tengah (Wowor, 1977 : 22-23). Panitia inilah yang mempersiapkan diri untuk menerima penyerahan pemerintahan dari tangan Jepang sejak 15 Agustus 1945. Pada hari itu Panitia telah menunjuk calon pemegang jabatan sebagai berikut :

- E.H.W. Pelengkahu sebagai Residen,
- G.B. Kullit sebagai Kepala Bidang Pemerintahan
- E. Katoppo sebagai Kepala Bidang Pendidikan, dan
- H. Manoppo sebagai Kepala Bidang Pertahanan.

Upacara penyerahan pemerintahan sipil dari tangan Laksamana Muda K. Hamanaka dilangsungkan di lapangan olah raga Tondano tanggal 21 Agustus 1945. Dalam upacara itu bendera Merah Putih dinaikkan, dan sebaliknya bendera Hinomaru diturunkan menandakan berakhirnya kekuasaan sipil Jepang di daerah Sulawesi Utara/Tengah (Sompie, 1979 : 3-4; Wowor, 1977 : 24).

III. KEADAAN SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN

A. KEGIATAN MASYARAKAT

1. BERITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DI DAERAH

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya ke seluruh dunia dipimpin oleh dua orang tokoh nasionalis, yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. Proklamasi itu diucapkan tepat jam 10.00 bertempat di rumah kediaman Ir. Soekarno jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Menyusul proklamasi kemerdekaan itu, maka dipergunakanlah berbagai sarana komunikasi yang ada untuk menyebarluaskan kepada rakyat di seluruh Indonesia sampai ke luar negeri.

Berita proklamasi untuk pertama kalinya berhasil ditangkap di Markas Besar Tentara Jepang yang menduduki Keresidenan Manado yang berkedudukan di Tonsealama (Minahasa). Sebelumnya markas itu berkedudukan di Manado tetapi kemudian bersama-sama pusat pemerintahan sipil, bulan September 1944 dipindahkan ke Tondano berhubung kota Manado sudah dihancurkan oleh serangan-serangan Sekutu. Kalau pusat pemerintahan sipil berkedudukan di Tondano, maka Markas tersebut berkedudukan di Tonsealama dekat Tondano. Di markas itu ada fasilitas alat-alat komunikasi radio dan telegraf militer. Dengan fasilitas itu maka setiap harinya selalu ada hubungan dengan Jakarta. Untuk melayani fasilitas-fasilitas tersebut, maka Jepang mempekerjakan tenaga-tenaga Indonesia antaranya A.S. Rombot. Telegrafis-mar-konis A.S. Rombot ini dikirimkan oleh pemerintah Jepang dari Jakarta dan bertugas pada Dinas Perhubungan Markas Besar Tentara di Tonsealama sejak tahun 1944 (Wowor, 1977 : 24, 31).

Hari itu tanggal 18 Agustus 1945, ketika A.S. Rombot sedang bertugas menerima berita Domei dari Tokyo, diterimanya kabar tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang sudah disiarkan ke seluruh penjuru dunia kemarin harinya. Berita tentang proklamasi itu diterimanya bersama-sama berita-berita yang hngat tentang situasi terakhir pada waktu itu, antaranya tentang kapitulasi Jepang, perintah gencatan senjata, akibat-akibat kehe-batan bom atom yang sudah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, dan sebagainya (Wowor, 1977 : 31).

Sementara dua orang perwira Jepang yang mengawasi pelaksanaan tugas dinas tersebut berdiskusi dan bercekcok tentang berita-bertia yang barusaja diterima itu, maka Rombot pun tidak tinggal diam begitu saja. Diketuainya bahwa pada tanggal 15 Agustus 1945 sudah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan untuk Keresidenan Manado, di mana Jepang juga sudah sementara mempersiapkan pelaksanaan penyerahan pemerintahan tanggal 21 Agustus 1945. Dengan demikian maka menurut pemikirannya, berita proklamasi yang baru saja diterimanya, merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh para tokoh nasionalis yang ada di Minahasa. Berita itu akan merupakan alasan yang paling kuat untuk melaksanakan penyerahan pemerintahan kepada Indonesia.

Selesai bertugas, segera ia menghubungi salah seorang kawan dekatnya, yakni W.F. Sumanti yang pada waktu itu menjabat selaku Daidanco (Komandan) Boo Ei Teisintai yang juga bermarkas di Tondano. Kedua tokoh pemuda ini berdiskusi dan kemudian menyampaikannya kepada tokoh-tokoh nasionalis yang lain tentang isi berita itu. Dapat ditambahkan bahwa berita itu disiarkan pula oleh Markas Besar di Tonsealama ke daerah Sangir Talaud, Bolaang Mongondow, dan Gorontalo. Tetapi tentara Jepang tidak menyampaikannya kepada rakyat.

Di daerah Gorontalo, berita proklamasi untuk pertama kalinya baru diketahui oleh orang-orang Jepang dan masih sangat dirahasiakan untuk diketahui oleh umum. Setelah mendengar berita radio dari Markas Tentara di Tonsealama maka kepala pemerintahan daerah Gorontalo, yakni Kinosita selaku Kenkanrikan (setingkat Asisten Residen Belanda), mengundang tokoh nasionalis Nani Wartabone ke tempat kediamannya. Pada waktu itu Kinosita memberitahukan tentang kekalahan Jepang, sambil mengatakan bahwa pada suatu saat, akan diadakan penyerahan kekuasaan pemerintahan daerah Gorontalo kepada Nani Wartabone.

Sepulangnya Nani Wartabone dari rumahnya Kinosita itu, maka pikirannya dikuasai oleh rencana-rencana memikirkan akan persiapan dan tindakan-tindakan apa yang harus dijalankan sehubungan dengan berita itu dan kemungkinan penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada rakyat Gorontalo. Pelaksanaan rencana dan tindakannya itu ialah dikuasainya dinas radio Jepang di Gorontalo. Tindakan penguasaan radio Jepang itu, dilakukan sekitar akhir Agustus 1945. Dengan berhasil dikuasainya dinas

radio itu, maka jelaslah didengar berita-berita bahwasanya proklamasi kemerdekaan Indonesia benar-benar sudah dikumandangkan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 (Sun Bone, wawancara 9 September 1979).

Di daerah Sangir Talaud berita tentang kekalahan Jepang tidak dapat segera diketahui oleh rakyat karena Jepang tidak pernah memberitahukannya, bahkan senantiasa berusaha untuk menyembunyikan dan merahasiakannya. Demikian pula berita-berita melalui radio tidak pernah sampai ke telinga rakyat karena Jepang sudah sejak lama melarang rakyat mendengar siaran-siaran radio apalagi memiliki pesawat radio. Demikian pula dengan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak pernah sampai kepada rakyat. Hal ini juga karena alat-alat komunikasi lainnya seperti surat kabar, majalah dan sebagainya pada waktu itu belum terdapat di daerah Sangir Talaud ini (Madonsa, wawancara 16 September 1979; Yuda, wawancara 15 September 1979).

Berita tentang kekalahan Jepang hanya dapat diduga dari tindak-tanduk dan gelagat orang-orang Jepang sendiri. Pada waktu itu banyak di antara mereka yang menyuruh rakyat mengantarkannya ke Manado walaupun hanya dengan naik perahu milik rakyat setempat. Dalam perjalanan dengan perahu itu kadang-kadang mereka mendapat serangan dari pesawat-pesawat Sekutu di tengah laut. Juga berita kekalahan Jepang akhirnya diketahui rakyat melalui orang-orang yang diselundupkan oleh Sekutu ke daerah ini pada saat-saat terakhir kekalahan Jepang. Di antara mereka yang diselundupkan oleh Sekutu pada waktu itu ialah seorang asal daerah Sangir Talaud yang bernama Barahama (Maluegha, wawancara 24 September 1979). Tetapi akhirnya tidak lama kemudian datanglah pesawat Sekutu yang menyebarkan selebaran yang isinya:

Atas perintahnya Mikado, perang pasifik selesai.

Tentara Jepang menyerah dengan tiada bersyarat dan bertekuk lutut kepada Sekutu.

Ttd.

Mc. Arthur.

Walaupun sudah menerima pamflet tersebut di atas, rakyat menyimpan dan merahasiakan hal itu. Tindakan ini dilakukan karena takut dicurigai oleh Jepang yang dapat mengakibatkan kematian bagi yang menyebarkanluaskannya, termasuk kematian

seluruh sanak keluarganya sendiri (Manatar, wawancara 27 September 1979, Yuda, wawancara 15 September 1979).

Barulah pada bulan September 1945 rakyat di Sangir Talaud dapat mengetahui adanya berita bahwa kemerdekaan Indonesia sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berita itu disampaikan sendiri oleh pimpinan tentara Jepang yang berada di daerah itu. Berita tersebut kemudian lebih diyakini rakyat setelah dapat membacanya sendiri melalui surat kabar "Merdeka" dan "Siasat" yang berhasil tiba di sana (Binilang, wawancara 20 September 1979). Berita proklamasi kemerdekaan yang sudah tersebar luas mulai dari Ibukota Tahuna sampai ke pelosok-pelosok desa itu disambut rakyat dengan penuh kegembiraan. Sejak saat itu maka salam "Merdeka" dengan mengangkat tangan yang dikepalakan ke atas mulai menggema di seluruh kepulauan Sangir Talaud (Rompas, wawancara 17 September 1979).

Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sangat dirahasiakan oleh aparat pemerintah Jepang di daerah Bolaang Mongondow agar jangan sampai diketahui oleh rakyat. Hal ini rupanya dimaksudkan agar jangan sampai timbul balas dendam terhadap orang-orang Jepang yang ada di daerah itu. Seperti diketahui, di daerah tersebut tidak ada pasukan Jepang seperti di daerah-daerah lainnya. Yang ada di sini hanyalah sekelompok kecil polisi militer, yaitu Tokeitai (Polisi Militer Kaigun) dan Kempeitai (Polisi Militer Rikugun). Juga ada sepasukan polisi yang terdiri dari orang-orang Minahasa dan Bolaang Mongondow sendiri yang dahulunya merupakan polisi Belanda yang diaktifkan kembali sebagai polisi Jepang. Kekuatan militer dan polisi Jepang ini dianggap tidak cukup dalam melindungi semua orang Jepang yang berada di daerah ini apabila timbul gerakan balas dendam dari rakyat yang telah mengetahui tentang kekalahan mereka melawan Sekutu.

Namun ada seorang perwira Tokeitai bernama Takamoto yang bersahabat dengan J.F.K. Damopolii dan isterinya. Komandan Tokeitai ini memberitahukan kepada Fukugunco J.F.K. Damopolii bahwa Jepang sudah kalah dan bahwa Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Penyampaian Takamoto yang disampaikan pada awal September 1945 turut didengar pula oleh isteri Damopolii yang bernama Nurtina Gonibala. Tetapi Takamoto berpeasn agar supaya berita itu harus dirahasiakan dahulu. Hal ini adalah untuk menghindarkan timbulnya

gerakan balas dendam dari rakyat padahal Jepang tidak memiliki pasukan yang kuat untuk melindungi semua pejabat dan orang-orang Jepang lainnya yang berada di daerah itu. J.F.K. Damopolii dan isterinya Nurtina Gonibala menyanggupi pesanan Takamoto itu, yaitu agar jangan dahulu segera menyebarluaskan berita tersebut kepada rakyat. Di pihak lain ternyata orang-orang Jepang semakin menunjukkan sikap yang keras untuk menakut-nakuti agar rakyat jangan mendahului mereka mengadakan tindakan yang tidak mereka kehendaki.

Sementara itu pada tanggal 17 September 1945, Fukugunco Lolayan J.F.K. Damopolii, ketika ia sedang berada di rumahnya yang terletak antara desa Motobi Kecil dan desa Molinow, mendapat kunjungan rahasia dari dua orang pemuda. Ternyata mereka adalah para anggota PPI (Pasukan Pemuda Indonesia) yang bermarkas di Tondano (Minahasa). Kedua pemuda anggota PPI itu, yakni John L. Massie dan J. Kolondam, ditugaskan oleh N.P. Somba sebagai salah seorang pimpinan PPI di Tondano, untuk datang menghubunginya. Maksud mereka yaitu agar di Bolaang Mongondow dapat segera dibentuk PPI untuk berjuang membela kemerdekaan Indonesia.

J.F.K. Damopolii meyakini maksud baik dari misi kedua pemuda PPI itu sehingga pada hari itu juga diadakan pertemuan rahasia di rumahnya untuk membentuk pengurus PPI Bolaang Mongondow. Pengurus PPI itu berstatus Komisariat yang susunannya sebagai berikut :

Ketua Komisariat	: J.F.K. Damopolii
Sekretaris	: Nurtina Gonibala
Anggota-anggota	: Abdurrachman Mokobombang S.A. Mokobombang A.H. Raupu S. Daun L. Mokobombang A. Atom M.S. Detu.

Terbentuknya Komsariat PPI Bolaang Mongondow ini masih sangat dirahasiakan kepada Jepang yang dalam pada itu semakin menunjukkan sikap yang lebih keras terhadap rakyat (Nurtina Gonibala, wawancara 17 September 1979).

Sejalan dengan pembentukan Komisariat PPI di atas maka diadakan pula usaha untuk mengaktifkan kembali pengurus

PSII Cabang Bolaang Mongondow yang dibubarkan ketika Jepang menduduki daerah ini. Usaha itu dapat terwujud sehingga pada akhir September 1945, terbentuklah Pengurus PSII Cabang Bolaang Mongondow sebagai berikut :

K e t u a	: J.F.K. Damopolii
Wakil Ketua	: Zakaria Imban
Sekretaris Umum	: F.T. Manoppo
Sekretaris I	: A. Simbala
Sekretaris II	: M. Bambela
Bendahara	: H.M.S. Mustafa
Pembantu-pembantu	: L. Mokobombang
	Hadjir Imban
	M.A. Dolot
	H. Detu
	B. Gilalong.

Walaupun sudah dibentuknya PPI, namun para tokoh PSII (Partai Serikat Islam Indonesia) tersebut sebenarnya belum merasa yakin terhadap berita tentang kemerdekaan Indonesia sebagaimana sudah disampaikan oleh J.F.K. Damopolii dan isterinya lebih dahulu. Oleh karena itu untuk mempertebal keyakinan kebenaran berita itu, maka tokoh-tokoh PSII setempat, seperti Hadjir Imban, Zakaria Imban dan F.T. Manoppo, mengutus beberapa pemuda untuk mengeceknya. Para pemuda yang diutus itu ialah Saleh Mokobombang, Abdurrachman Mokobombang dan Saridin Daun. Ketiganya diperintahkan pergi ke Molibagu (Ibukota Kerajaan Bolaang Ukit) yang letaknya berbatasan dengan daerah Gorontalo (di pantai Selatan). Jalan ini ditempuh karena semua peristiwa yang terjadi di daerah Gorontalo beritanya kebanyakan masuk ke daerah Bolaang Mongondow melalui kota Molibagu yang selalu mengadakan hubungan dengan Gorontalo.

Di Molibagu ketiganya memperoleh kabar bahwa Nani Wartabone di Gorontalo telah menerima berita tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta atas nama rakyat Indonesia di mana masing-masing telah ditunjuk selaku Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan kabar yang dibawa oleh ketiga pemuda tersebut, maka yakinlah kini para tokoh PSII di Bolaang Mongondow bahwa Indonesia sudah merdeka sesuai informasi PPI, John L. Massie dan J. Kolondam yang diutus oleh pimpinan PPI yang bermarkas di Tondano.

Dengan demikian maka semakin giatlah para tokoh nasionalis di Bolaang Mongondow dalam menyusun kekuatan membela kemerdekaan Indonesia. Untuk menghimpun kekuatan pemuda seluruh Bolaang Mongondow maka pimpinan PSII setempat segera membentuk Pemuda Muslimin Indonesia (PMI). Pimpinan PMI Cabang Bolaang Mongondow itu diketuai oleh K. Imban. Dengan diaktipkannya kembali PSII dan PMI, maka di seluruh kerajaan, distri, onderdistrik dan desa dibentuk pula pimpinan PSII lengkap dengan pimpinan PMI setempat yang kemudian ikut serta terjun dalam perjuangan pembela kemerdekaan (Hadjir Imban, wawancara 18 September 1979).

Selain mengaktipkan PSII dan PMI sebagaimana sudah diutarakan di atas, mereka juga meningkatkan perjuangannya melalui wadah PPI. Pimpinan Komisariat PPI Bolaang Mongondow yang diketuai oleh J.F.K. Damopolii, membentuk barisan kelaskaran yang dinamakan "PPI Laskar Banteng Bolaang Mongondow". Sebagai Komandan PPI Laskar Banteng Bolaang Mongondow diangkat Abdurrachman Mokobombang. PPI Laskar Banteng ini terdiri dari pasukan pemuda dan pasukan wanita. Pasukan wanita hanya terdiri dari satu kompi saja, dengan Komandan Nurtina Gonibala (isteri J.F.K. Damopolii). Anggota pasukan wanita PPI Laskar Banteng ini hanya terbatas di desa Motoboi Kecil dan desa Molinow di dekat Kotamobagu (Ibukota daerah Bolaang Mongondow). Mereka hanya bersenjatakan satu pucuk pistol dan selainnya bambu runcing. Seluruhnya baik pasukan pemuda maupun pasukan wanita berada di bawah komando Abdurrachman Mokobombang selaku Komandan PPI Laskar Banteng Bolaang Mongondow.

Selain pasukan wanitanya, PPI Laskar Banteng terdiri dari beberapa kelompok di tempat kedudukan Markas Besarnya yang berlokasi di perkebunan milik J.F.K. Damopolii yang terletak di sekitar desa Motoboi Kecil. Sebagai Komandan masing-masing Kelompok itu ialah S.A. Mokobombang, A.H. Raupu, Saridin Daun, L. Mokobombang, A. Atom, dan M.S. Detu. Pada setiap kerajaan didirikan pula markas PPI Laskar Banteng tingkat kerajaan setempat. Untuk Kerajaan Bolaang Uki yang bermarkas di Molibagu, pasukannya berada di bawah pimpinan Husein Tanta selaku Komandan, dan yang bermarkas di Pinolosian di bawah M. Gonibala selaku Komandan.

Para anggota PPI Laskar Banteng ini diberikan sehelai kain

berwarna Merah Putih sebagai tanda keanggotaan. Selain yang berada di tangan pasukan wanitanya, maka PPI Laskar Banteng yang bermarkas besar di Motoboi Kecil memiliki persenjataan berupa 6 pucuk pistol, beberapa pucuk LE dan satu peti granat, sedangkan selainnya bersenjata bambu runcing. Seluruh senjata yang dimiliki PPI di atas, adalah hasil pemberiannya Takamoto yang pada waktu itu sebagai Komando Tokeitai Bolaang Mongondow. Dengan adanya senjata-senjata yang diberikan oleh Takamoto itu, semakin bersemangatlah para pemuda yang tergabung dalam PPI di atas. Mereka mempropagandakan bahwa Jepang telah menyerah dan telah memberikan senjata-senjatanya kepada para pemuda Indonesia. Dengan propaganda seperti itu maka dengan segera PPI Laskar Banteng berhasil memperluas keanggotaannya sampai ke desa-desa yang sebelumnya belum mempunyai anggota atau ranting PPI desa. Jadi dengan demikian maka PPI Laskar Banteng merupakan pasukan inti kelaskaran di seluruh daerah Bolaang Mongondow pada waktu itu (Nurtina Gonibala, wawancara 17 September 1979).

2. PENGIBARAN BENDERA SANG MERAH PUTIH

Sejalan dengan perkembangan peperangan yang tidak menguntungkan bagi Jepang, maka mereka mulai memberikan konsesi-konsesi kepada rakyat Indonesia. Di tingkat nasional pemerintah pendudukan memperkenalkan pengibaran bendera Merah Putih di samping tetap mempertahankan berkibarnya bendera Hinomaru. Hal ini dilakukan dengan perayaan hari lahir Kaisar Hirohito, yaitu mulai 29 April 1945.

Di wilayah Manado Syu (Keresidenan Manado yang meliputi Sulawesi Utara/Tengah sekarang), pemerintah pendudukan telah membentuk KTR pada bulan September 1945 yang pada awal 1945 dirobah fungsinya menjadi Manado Syukai Gi In diketuai oleh E.H.W. Pelengkahu. Pembentukan KTR dan kemudian Manado Syukai Gi In itu dimaksudkan agar para tokoh nasionalis bersama seluruh rakyat bekerjasama dengan Jepang dalam situasi peperangan yang semakin gawat waktu itu bagi Jepang. Dan sebagai imbalannya maka Jepang memperkenalkan dilakukannya propaganda tentang kemerdekaan Indonesia sejak September 1944. Pada 29 April 1945 bertepatan dengan dibentuknya Badan Persiapan Pemerintahan Kemerdekaan Indonesia (BPPKI) untuk wilayah Manado Syu yang merupakan perobahan fungsi daripada

Menado Syukai Gi In, maka pemerintah pendudukan secara resmi memperkenalkan pengibaran bendera Merah Putih secara serentak oleh seluruh rakyat, dengan dipelopori oleh para tokoh nasionalis yang duduk sebagai anggota BPPKI tersebut di atas.

Pengibaran bendera Merah Putih yang dilakukan sejak 29 April 1945 itu didahului dengan suatu upacara yang resmi diadakan oleh pemerintah pendudukan Menado Syu. Tempat upacara tersebut yaitu di halaman pusat pemerintahan Menado Syu yang berlokasi di desa Wulauan Tondano sejak dipindahkan dari Manado bulan September 1944 akibat serangan Sekutu. Yang bertindak selaku inspektur upacara waktu itu ialah Laksamana Muda K. Hamanaka sendiri, selaku Suciji (Kepala Pemerintahan Menado Syu). Ketika tiba pada titik acara pengibaran bendera Merah Putih, maka seorang pemuda nasionalis bernama Arie Sahelangi menggerek bendera sampai ke puncak tiang diiringi dengan penghormatan bendera oleh seluruh peserta upacara dipimpin oleh inspektur upacara (Sompie, 1979 : 3).

Sejak saat itu maka bendera Merah Putih selalu dipancangkan berdampingan dengan bendera Hinomaru. Hal inipun berlaku dalam segala kegiatan yang diadakan oleh BPPKI, terutama ketika mengadakan propaganda kepada rakyat. Kegiatan propaganda yang dilakukan oleh BPPKI itu, selain dihadiri dan dipimpin oleh anggota-anggotanya, juga turut dihadiri oleh petugas-petugas Jepang. Setiap pembicara dalam acara seperti itu, baik orang Indonesia maupun orang Jepang, sebelum berbicara harus lebih dahulu membungkuk hormat (saikerei) kepada bendera Merah Putih (Sompie, 1979 : 3).

Perubahan fungsi berturut-turut dari KTR menjadi Menado Syukai Gi In kemudian menjadi BPPKI sebagaimana sudah disampaikan di depan, dapat dianggap merupakan langkah maju yang amat berarti bagi rakyat Indonesia di daerah ini. Dengan formal menjadi BPPKI maka setiap usulnya akan sangat diperhatikan oleh Jepang. Hal ini terbukti ketika BPPKI menyampaikan usul mengulangi dan menekankan yang sudah pernah dikemukakan oleh KTR dan Menado Syukai Gi In lebih dahulu, yaitu tentang tuntutan penyerahan pemerintahan kepada rakyat Indonesia. Menanggapi usul itu maka pemerintahan pendudukan mengambil jalan tengah dengan menawarkan bentuk pemerintahan yang disebut "Jiyuu". Ketika diselidiki lebih jauh, ternyata jiyuu berarti pemberian otonomi (Sompie, 1979 : 3), oleh karena itu maka

tawaran tersebut tidak diterima berhubung BPPKI menuntut kemerdekaan sepenuhnya.

Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 1945, BPPKI diroboh fungsinya sehingga menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) wilayah Sulawesi Utara/Tengah, yang sesuai rencana, akan menerima penyerahan pemerintahan sipil untuk wilayah tersebut di atas. Sampai pada saat itu susunan PPKI tersebut adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. E.H.W. Pelengkahu
(Ketua) | 18. O.N. Pakaja |
| 2. G.E. Dauhan | 19. J. Palamani |
| 3. D.A.Th. Gerungan | 20. P. Panderoth |
| 4. C.P. Hermanses | 21. O.H. Pantouw |
| 5. F. Intama | 22. J.I. Permata |
| 6. J. Jocom | 23. Ch. D. Pontoh |
| 7. Furir Kairupan | 24. drh. W.J. Ratulangi |
| 8. Z. Kandou | 25. dr. R.C.L. Senduk |
| 9. RM Koesno Dhanupojo | 26. dr. Ch. Singal |
| 10. F.W. Kumontoy | 27. K.H.E. Sompie |
| 11. B.W. Lapien | 28. H. Sumarauw |
| 12. J. Lengkong | 29. H.D. Tinangon |
| 13. Lie Beng Tiok | 30. M.B. Tumbel |
| 14. J.U. Mangowal | 31. Singo Uno |
| 15. H.D. Manoppo | 32. A.J. Walalangi |
| 16. J.P. Mongula | 33. R. Wantalangi |
| 17. Tom Olii | 34. E.R.S. Warouw |
| | 35. Nani Wartabone |

Sejak dibentuknya PPKI tersebut, maka mereka mengadakan sidang-sidang membahas khusus langkah-langkah persiapan pelaksanaan penyerahan pemerintahan. Kemudian tanggal 21 Agustus 1945, diadakan upacara penyerahan pemerintah sipil dari tangan Jepang ke tangan rakyat Indonesia. Dalam upacara itu bertindak selaku inspektur upacara Laksamana Muda K. Hamanaka. Dalam upacara itu pula dilakukan pengibaran bendera Merah Putih disusul penurunan bendera Hinomaru, yang semuanya dilakukan secara khidmat, menandakan berakhirnya pemerintahan pendudukan di wilayah ini.

Di daerah Sangir Talaud selama masa pendudukan Jepang telah beberapa kali dilakukan pengibaran bendera Merah Putih oleh rakyat. Misalnya pengibaran bendera Merah Putih yang dilakukan oleh rakyat di Makalehi tahun 1944. Kemudian di desa

Kembali Tarorane di Ulu Siau yang dilakukan tanggal 16 Juni 1945. Pengibaran bendera Merah Putih itu dilakukan tepat ketika pulau Siau sedang mengalami serangan tembakan meriam dari kapal perang Sekutu yang melakukan perondaan waktu itu di perairan ini. Sambil memasuki pelabuhan Ulu Siau, kapal perang Sekutu itu melakukan penembakan meriam ke darat, tetapi rakyat tetap bertahan meneruskan upacara pengibaran bendera Merah Putih dan baru bergerak mencari perlindungan setelah upacara yang dipimpin oleh S.K. Salindeho itu selesai dilakukan (Elias, 1973 : 152-153; Sigarlaki dkk, 1977 : 237).

Selanjutnya tepat ketika di Jakarta dikumandangkan tentang proklamasi kemerdekaan dan pengibaran bendera Merah Putih, di Tahuna (Ibukota daerah Sangir Talaud) pada tanggal 17 Agustus 1945 dilakukan pula pengibaran bendera tersebut. Pengibaran bendera itu dipimpin oleh Hirano selaku Kenkanrikan setingkat (Asisten Residen Belanda) Sangir Talaud di mana bendera Merah Putih dikibarkan berdampingan dengan bendera Hinomaru di sebelah kanannya. Upacara itu dihadiri oleh semua raja (Suco) dan kepala distrik (Gunco) yang diundang hadir atas perintah Kenkanrikan Hirano. Selain itu turut pula dihadiri oleh para kepala desa (Sonco) khusus yang berada di pulau Sangir Besar di mana Ibukota Tahuna berkedudukan. Sebelumnya Kenkanrikan Hirano telah mengumumkan kepada rakyat di sana bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Namun karena pada umumnya para pemimpin rakyat yang hadir pada waktu itu dapat dikatakan "buta politik", maka kebanyakan di antara mereka tidak dapat mengetahui arti pengumuman itu dan hubungannya dengan upacara pengibaran bendera Merah Putih pada waktu itu (Makahanap, wawancara 18 September 1979).

Seperti telah dikemukakan di depan, pengibaran bendera Merah Putih di daerah Gorontalo untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 23 Januari 1942. Sekitar tanggal tersebut aparat pemerintah sipil Belanda setempat ditangkap oleh rakyat yang dipimpin oleh Nani Wartabone, R.M. Koesno Dhanupoyo, J.A. Pendang Kalengkongan dan kawan-kawannya. Dengan berhasilnya perebutan kekuasaan 23 Januari 1942 itu, maka langsung diikuti dengan upacara pengibaran bendera Merah Putih di kota Gorontalo yang kemudian meluas sampai ke pelosok-pelosok desa di daerah itu. Setelah Jepang menguasai daerah ini pengibaran

bendera Merah Putih dilarang, kira-kira pertengahan tahun 1942.

Larangan itu dengan sendirinya berakhir ketika Kenkanrikan Kinosita menyerahkan pemerintahan kepada Nani Wartabone pada tanggal 9 September 1945. Pada hari itu diadakan suatu upacara bertempat di lapangan sepak bola kota Gorontalo dan pada kesempatan itu, Kenkanrikan Kinosita secara resmi menyerahkan pemerintahan kepada rakyat Gorontalo yang diterima oleh Nani Wartabone. Pada upacara itu dilakukan pula pengibaran bendera Merah Putih secara khidmat yang diikuti oleh segenap peserta upacara.

Upacara tersebut dihadiri oleh semua aparatatur pemerintahan sipil dan militer Jepang, tokoh-tokoh nasionalis yang telah datang bersama-sama rakyat berjejal-jejal memenuhi lapangan. Untuk kedua kalinya dengan perasaan terharu dan penuh khidmat, rakyat di Gorontalo menyaksikan pengerekan bendera Merah Putih ke angkasa, diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, disusul penurunan bendera Hinomaru. Rangkaian peristiwa tersebut di atas dianggap menandakan berakhirnya pemerintahan pendudukan Jepang yang selama bertahun-tahun menyebabkan kesengsaraan rakyat. Mulai pada saat itu maka Nani Wartabone bertindak selaku Kepala Daerah Gorontalo, sedangkan A.J. Usman selaku pimpinan militer pada waktu itu (Buku Peringatan 35 Tahun, 1977 : 22).

Menyusul penyerahan pemerintahan dan pengibaran bendera Merah Putih pada tanggal 9 September 1945, maka dibentuklah badan yang disebut Dewan Nasional. Yang menjadi anggota dari Dewan Nasional itu ialah semua Kepala Distrik (Jogugu) serta Kepala Onderdistrik (Marsaoleh) ditambah para pemuka masyarakat lainnya, mewakili semua aliran dan golongan yang ada di daerah Gorontalo. Dewan Nasional ini terdiri dari 20 anggota dan merupakan suatu badan legislatip yang mendampingi Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan setempat. Sejak saat itu maka bendera Merah Putih dengan megah berkibar mulai dari pusat pemerintahan di kota Gorontalo sampai ke pelosok-pelosok desa di daerah itu.

Rakyat di daerah Bolaang Mongondow untuk pertama kalinya melihat bendera Merah Putih pada akhir tahun 1939. Pada waktu itu diadakan rapat umum yang diselenggarakan oleh GAPI (Gabungan Politik Indonesia) dalam rangka Gerakan Indonesia Berparlemen (Manus dkk, 1978 : 182-183). Kemudian segera

setelah terbentuknya PPI Laskar Banteng 17 September 1945, maka hari itu juga dilakukan pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran tersebut dilakukan di tempat kedudukan dari Markas Besar PPI Laskar Banteng, yaitu di perkebunan milik J.F.K. Damopolii di sekitar desa Motoboi Kecil. Tempat kedudukan markas besar itu sangat dirahasiakan agar jangan sampai diketahui oleh pemerintah pendudukan Jepang yang masih berkuasa sambil menunggu datangnya tentara Sekutu. Begitu pula dengan upacara pengibaran bendera Merah Putih yang juga dilakukan secara diam-diam, dihadiri oleh rakyat yang bertempat tinggal di sekitar tempat itu.

Upacara pengibaran bendera Merah Putih oleh PPI Bolaang Mongondow tanggal 17 September 1945 itu dipimpin oleh Ketua Komisariat J.F.K. Damopolii yang juga sementara menjabat sebagai Fukugunco Lolayan. Sebagai komandan upacara ialah Abdurrachman Mokobombang yang kemudian diangkat menjadi Komandan PPI Laskar Banteng Bolaang Mongondow. Upacara itu turut disaksikan oleh John L. Massie dan J. Kolondam yang datang sebagai utusan Markas Besar PPI di Tondano (Minahasa). Yang ditugaskan sebagai penggerek bendera waktu itu ialah Hasima Mokobombang dan Chaerani Tongi. Bendera yang dikibarkan adalah bendera Merah Putih yang dibawa oleh kedua utusan dari Tondano.

Sementara itu semua orang Jepang yang berada di daerah Bolaang Mongondow, diangkut oleh tentara Sekutu ke Minahasa sebagai tawanan perang. Kemudian polisi Jepang (yang terdiri dari orang-orang Indonesia) terus diaktifkan menjadi polisi Belanda dengan kekuatan kira-kira satu peleton. Mereka tetap berkedudukan di Kotamobagu sebagai Ibukota daerah Bolaang Mongondow. (Nurtina Gonibala, wawancara 17 September 1979).

B. PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH

1. SIKAP PASUKAN JEPANG

Sebagaimana sudah diuraikan di atas, sejak 29 April 1945 telah dibentuk di Tondano sebuah badan yang dinamakan BPPKI yang diketuai oleh E.H.W. Pelengkahu dengan lebih 30 orang anggotanya. Sejak tanggal tersebut pemerintah pendudukan yang dipimpin oleh Suciji Laksamana Muda K. Hamanaka, memperkenankan secara resmi pengibaran bendera Merah Putih berdamping-

an dengan bendera Hinomaru, dimulai dengan suatu upacara yang khidmat di halaman kantor Minseibu di desa Wulauan Tondano.

Tanggal 15 Agustus 1945, yaitu sehari sesudah penyerahan Jepang kepada Sekutu, diumumkan melalui radio Tokyo oleh Kaisar Hirohito, pemerintah pendudukan di wilayah ini secara tergesa-gesa merubah fungsi BPPKI menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) wilayah Sulawesi Utara/Tengah dengan pimpinan dan anggota yang sama. Menurut keterangan, hal ini dilakukan atas nasehat dan desakan beberapa orang tokoh nasionalis, di antaranya B.W. Lapien, dr. A.B. Andu, dr. R.C.L. Senduk, R.M. Koesno Dhanupojo, dan G.E. Dauhan (Sompie, 1979 : 4; Kempen, 1953 : 212).

Dengan terbentuknya PPKI di atas, maka dengan segera diadakan sidang-sidang yang khusus membahas langkah-langkah persiapan pelaksanaan penyerahan pemerintahan itu. Pada sidang PPKI sesudah tanggal 15 Agustus 1945, tersusunlah aparat pemerintah sipil yang akan mengambil alih pemerintahan dari tangan Jepang, sebagai berikut :

Residen	: E.H.W. Pelengkahu
Kepala Departemen Pemerintahan	: G.B. Kullit
Kepala Departemen Pendidikan	: E. Katoppo
Kepala Departemen Pertahanan	: H.D. Manoppo

Pejabat-pejabat yang ditunjuk tersebut semuanya diambil dari antara para tokoh nasionalis moderat yang selama masa pendudukan bertugas dalam kepomongprajaan (Sompie, 1977 : 4).

Sidang PPKI waktu itu juga memilih tiga orang yang akan mewakili rakyat pada upacara penyerahan yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Ketiga orang itu masing-masing adalah :

E.H.W. Pelengkahu	mewakili golongan pamongpraja
Z. Kandou	mewakili golongan wanita, dan
Ch. D. Pontoh	mewakili golongan pemuda.

Untuk tugas itu maka ketiganya akan diambil sumpahnya oleh PPKI, demikian pula dengan para pejabat yang duduk di dalam struktur pemerintahan sipil di atas (Sompie, 1979 : 4; Wowor, 1977 : 24).

Enam hari kemudian, yaitu tanggal 21 Agustus 1945, diadakanlah upacara yang khidmat tentang penyerahan pemerintahan sipil untuk Keresidenan Manado (Menado Syu) dari tangan Jepang ke tangan rakyat Indonesia dilakukan di kompleks kantor Minseibu di desa Wuluan Tondano. Tiga pokok acara utama dalam upacara itu ialah :

1. Acara penyerahan tampuk pemerintahan sipil dari tangan Laksamana Muda K. Hamanaka selaku Suciji (Residen) dengan protokol orang Jepang dan bahasa Jepang sebagai bahasa pengantar;
2. Acara penerimaan tampuk pemerintahan sipil kepada tiga orang yang mewakili rakyat, masing-masing E.H.W. Pelengkahu, Z. Kandou, dan Ch. D. Pontoh, dipimpin oleh protokol orang Indonesia dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar;
3. Acara penaikan bendera Merah Putih dan penurunan bendera Hinomaru sehingga bendera kita secara tunggal berkibar di angkasa (Sompie, 1979 : 3-4); Wowor, 1977 : 24).

Dua hari kemudian, yaitu tanggal 23 Agustus 1945, diadakan lagi suatu upacara peresmian pembentukan pasukan yang akan mendukung pemerintahan sipil di atas yang di sebut Pasukan Pembela Tanah Air atau Pasukan PTA. Upacara itu diselenggarakan bertempat di lapangan sepak bola kota Tondano dengan disaksikan oleh ribuan rakyat. Upacara itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Takasaki selaku Kepala Staf pasukan Jepang yang menduduki Keresidenan Manado atas nama Suciji Laksamana Muda K. Hamanaka. Selesai upacara diadakan defile oleh Pasukan PTA keliling kota Tondano, diikuti oleh para pemuka masyarakat, aparaturnya pamong praja dan barisan-barisan anak sekolah (Sompie, 1979 : 4; Wowor, 1977 : 24).

Menyusul diserahkan pemerintahan sipil oleh Laksamana Muda K. Hamanaka 21 Agustus 1945, di kota Gorontalo diadakan pula penyerahan pemerintahan oleh Kenkanrikan Kinosita kepada Nani Wartabone. Hal ini diadakan pada tanggal 9 September 1945. Penyerahan pemerintahan tersebut adalah sesuai dengan janji Kinosita sebelumnya, yaitu bahwa pemerintahan kelak akan diserahkan kepada rakyat Indonesia. Hal ini karena menurut pendapat Kinosita sendiri, ia lebih setuju diserahkan kepada rakyat Indonesia daripada dikembalikan kepada Belanda.

Sebagai usaha pertama setelah diambil alihnya pemerintahan dari tangan Jepang itu, maka Nani Wartabone menyusun Dewan Nasional yang beranggotakan 20 pemuka masyarakat. Sesudah bersidang dewan ini menghasilkan suatu keputusan yang disebut "Putusan Dhamua Dua" yang isinya adalah sebagai berikut (Panitia Peringatan 35 Tahun, 1977 : 23) :

Dengan mencabut semua peraturan yang bertentangan dengan putusan ini, maka dengan ini ditetapkan :

1. Pemerintahan di Gorontalo adalah bagian dari pemerintahan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan di Gorontalo dipimpin oleh seorang pegawai yang disebut Kepala Daerah;
3. Dalam melakukan kewajibannya, Kepala Daerah dibantu oleh Dewan Kebangsaan dan segenap pegawai menurut susunan yang sekarang telah berlaku atau yang di kemudian hari akan diadakan perubahan.

Adapun susunan Dewan Nasional atau Dewan Kebangsaan pada waktu itu adalah sebagai berikut :

K e t u a	: Ajuba Wartabone
Badan Harian	: Moh. Ali
Sekretaris	: H.U. Katili
Bagian Perekonomian	: Sun Bone, Abdullah Ismail Datau
Bagian Keamanan	: Abdullah Amu, A. Tumu
Bagian Perguruan/ Kesehatan	: dr. J. Sabu, Idrak Jasim
Bagian Lalu Lintas	: Abubakara Usman, H. Anis

Di samping menghasilkan keputusan di atas, Dewan Nasional telah mengambil keputusan menolak kembalinya kekuasaan NICA sebagai penjajah dan dewan dinyatakan bekerja dan berjuang di bawah bendera kebangsaan Merah Putih dalam lingkungan pemerintahan Republik Indonesia (Sun Bone, wawancara 11 September 1979).

Dari rentetan peristiwa di atas kita melihat bahwa pada kenyataannya peralihan pemerintahan ke tangan Indonesia tidak dihalang-halangi oleh pasukan Jepang di daerah Gorontalo yang menunggu datangnya pasukan Sekutu. Dilakukannya penyerahan pemerintahan tersebut di atas jelas menunjukkan sikap pasukan Jepang yang ingin menghindarkan timbulnya reaksi dan tindakan balas dendam dari rakyat terhadap mereka. Mereka menyadari bahwa tindakan mereka selama berlangsungnya pendudukan Jepang adalah sangat kejam, sehingga dikhawatirkan bahwa setelah rakyat mengetahui penyerahan mereka kepada Sekutu, maka rakyat dapat terdorong untuk membalas kekejaman sebagaimana yang pernah mereka lakukan selama ini. Namun hal itu ternyata tidak dilakukan oleh rakyat yang sementara itu pemerintahan yang dipimpin oleh Nani Wartabone selaku Kepala Daerah terus berjalan

seperti biasa sampai tibanya tentara Sekutu di daerah tersebut.

Di daerah Sangir Talaud, tindak lanjut penyerahan pemerintahan sipil kepada Residen E.H.W. Pelengkahu tidak terasa sama sekali. Hal ini karena pasukan Jepang bersikap menutup-nutupi perkembangan-perkembangan terakhir yang terjadi, baik di Minahasa maupun di tingkat nasional dan internasional, terhadap rakyat setempat. Juga tentang berita bahwa Jepang sudah menyerah kalah kepada Sekutu dan bahwa Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Hanya satu hal yang dilakukan yaitu diadakannya pengibaran bendera Merah Putih dipimpin oleh Kenkanrikan Hirano yang dilakukan bersamaan dengan hari proklamasi, yaitu 17 Agustus 1945 di Tahuna (Ibukota daerah Sangir Talaud). Namun pada waktu itu sama sekali tidak dijelaskan tentang proklamasi dan penyerahan pemerintahan.

Namun walau bagaimanapun ketatnya Jepang menyimpan rahasia perkembangan situasi pada waktu itu, akhirnya rakyat dapat mengetahuinya juga melalui berita dari mulut ke mulut maupun dengan mempelajari tindak tanduk orang-orang Jepang yang dengan diam-diam ataupun terang-terangan telah mulai meninggalkan daerah ini dan pergi ke Minahasa atau ke tempat-tempat lainnya yang mereka kehendaki. Ketika Sekutu tiba pasukan Jepang lainnya ditawan dan diangkut dengan kapal perang El Libertador sebagai kapal Sekutu yang pertama kali berlabuh di sini sejak penyerahan Jepang (Rompas, wawancara 17 September 1979).

Sama halnya dengan di daerah Sangir Talaud, maka di daerah Bolaang Mongondow, pasukan Jepang bersikap sangat merahasiakan tentang situasi terakhir pada masa itu, yakni untuk menghindari tindakan balas dendam dari rakyat terhadap mereka yang sedang menunggu kedatangan tentara Sekutu. Untuk sekedar menutup-nutupi rahasia dan kekhawatiran mereka, maka pasukan Jepang yang hanya terdiri atas sekelompok anggota Tokeitai dan Kempeitai itu melakukan tindakan yang lebih keras kepada rakyat yang dicurigai. Tetapi Komandan Tokeitai Takamoto malah bersikap sebaliknya, yaitu dengan mendekati tokoh nasionalis yang duduk dalam pemerintahan sebagai Fukugunco Lolayan, yakni J.F.K. Damopolii sekeluarga. Kemudian pada bulan September 1945 ia memberikan sejumlah senjata kepada PPI Laskar Banteng yang sudah terbentuk untuk membela kemerdekaan Indonesia (Nurtina Gonibala, wawancara 17 September 1979).

2. HAMBATAN—HAMBATAN

Sebagaimana sudah diutarakan di atas, menyusul penyerahan pemerintahan 21 Agustus 1945, pada tanggal 23 Agustus 1945 dilanjutkan dengan pembentukan suatu pasukan yang disebut Pasukan PTA. Pasukan ini merupakan bentukan baru menggantikan pasukan Boo Ei Teisintai di bawah Komando Daidanco W.F. Sumanti. Sebagai pemimpin dari pasukan PTA ialah P.A. Tiendas dengan jabatan selaku Hulubalang. Daidanco W.F. Sumanti untuk seterusnya ditugaskan sebagai Direktur Akademi Militer Tondano. Akademi ini secara organisatoris berada di bawah Hulubalang Pasukan PTA P.A. Tiendas sebagai wadah pendidikan para perwira untuk pasukan tersebut.

Sementara itu Laksamana Muda K. Hamanaka dipanggil untuk menghadap Panglima Sekutu yang berkedudukan di Morotai. Di sana ia menerima petunjuk-petunjuk seperlunya tentang penyerahan pemerintahan dan tugasnya untuk menjaga keadaan status quo. Ia kembali ke Tondano 5 September 1945, dan keesokan harinya ia mengeluarkan pengumuman bahwa ia mengambil alih pemerintahan sipil yang sudah diserahkan kepada rakyat Indonesia tanggal 21 Agustus 1945, untuk dikembalikan kepada keadaan seperti semula.

Selanjutnya ia memanggil pimpinan pasukan PTA agar datang menghadap kepadanya. Pada waktu itu Hulubalang Pasukan PTA P.A. Tiendas berhalangan hadir dan diwakili oleh Pembantu Utama Hulubalang (setingkat Kepala Staf, namanya tidak diketahui lagi). Melalui Pembantu Utama Hulubalang itu, Suciji Laksamana Muda K. Hamanaka menginstruksikan agar (Sompie, 1979 : 4):

1. Membubarkan Pasukan PTA;
2. Menutup Akademi Militer di Luaan, Tondano;
3. Semua senjata api harus diserahkan kembali;
4. Semua bambu runcing harus dibakar.

Instruksi Hamanaka di atas disampaikan kepada P.A. Tiendas disertai keterangan bahwa Pembantu Utama Hulubalang sudah menyatakan penolakan melaksanakan isi instruksi di atas di depan Hamanaka. Selanjutnya Pembantu Utama Hulubalang juga menjelaskan langkah-langkah yang telah diambilnya terlebih dahulu, yakni (Sompie, 1979 : 4) :

1. Kepada para anggota Pasukan PTA dan calon-calon perwira yang sementara mengikuti Akademi supaya :

- a. Meneruskan perjuangan di hutan (bergerilya); atau
 - b. Menggabungkan diri dengan pasukan di daerah lain jika hal itu memungkinkan, atau
 - c. Berusaha menyusup ke dalam pasukan KNIL/NICA yang akan segera tiba;
2. Bambu runcing jangan dibakar semua, sebagiannya digali dan disimpan di dalam tanah sebagai tanda bahwa perjuangan akan diteruskan dengan gerakan di bawah tanah.

Hulubalang P.A. Tiendas ternyata menyetujui langkah-langkah kebijaksanaan yang ditempuh oleh Pembantu Utama Hulubalang di atas. Kemudian Hulubalang P.A. Tiendas memutuskan bahwa ia akan pergi ke Tagulandang (Sangir Talaud) dan dari sana akan diatur rencana perlawanan selanjutnya.

Hambatan yang lebih besar lagi datang bersamaan dengan mendaratnya pasukan Sekutu dari unsur tentara Australia dengan diboncengi oleh aparaturnya SONICA dan tentara KNIL pada tanggal 8 Oktober 1945. Dua hari kemudian yaitu 10 Oktober 1945, dilaksanakanlah upacara penyerahan pemerintahan Keresidenan Manado dari tangan Jepang kepada pihak Sekutu. Pemerintahan sipil dengan segera diambil alih oleh SONICA. Penyerahan militer diterima oleh Letnan Kolonel Muir dari tentara Australia. Sejak saat itu maka para pejuang kemerdekaan di daerah ini melanjutkan perjuangannya melalui gerakan di bawah tanah untuk melawan pemerintahan NICA (Sompie, 1979 : 4; Palit, 1978 : 94). Setelah mengambil alih pemerintahan dari tangan Jepang, maka NICA pada 12 Oktober 1945 mengeluarkan peraturan pertama. Peraturan itu menyangkut soal ketentuan nilai mata uang di mana satu rupiah Jepang nilainya ditetapkan sebesar 2½ sen uang NICA (Taulu, 1950 : 86; Wowor 1977 : 63).

Pemerintahan nasional pimpinan Nani Wartabone yang telah terbentuk di Gorontalo 9 September 1945 tidak luput pula dari hambatan-hambatan. Hal ini disebabkan karena kenyataannya masih ada kekuatan militer asing, dalam hal ini tentara Jepang di daerah tersebut, yang walaupun pemerintahan sudah diserahkan namun mereka tetap bersikap mengawas-awasi jalannya pemerintahan. Rasa benci dan dendam yang hidup di kalangan rakyat sewaktu-waktu dapat meledak menjadi bentrokan dengan anggota-anggota pasukan Jepang ini. Untuk mencegah terjadinya hal demikian, maka pemerintahan nasional sangat membutuhkan senjata yang sampai pada waktu itu tidak pernah diperoleh. Tam-

bahan lagi tersiar berita bahwa Belanda sedang bersiap-siap untuk kembali mengatur pemerintahan di sini bersama-sama tentara Sekutu yang akan datang untuk melucuti tentara Jepang.

Di daerah Bolaang Mongondow setelah terbentuk PPI Laskar Banteng pada tanggal 17 September 1945, dilanjutkan dengan rencana untuk menaikkan bendera Merah Putih di halaman kantor pemerintahan di Kotamobagu. Perlu diketahui bahwa sejak menyerahnya pasukan Jepang maka anggota-anggota bekas veld-politie (Belanda) yang dijadikan polisi Jepang, telah diaktifkan kembali sebagai polisi Belanda sambil menunggu tibanya aparat pemerintah NICA di tempat ini. Mereka berkekuatan sekitar satu peleton, bersenjata lengkap, dan terdiri dari orang-orang Indonesia yang dipimpin oleh Herry Harun Manoppo yang menggantikan O. Warikki sebagai Buco pada masa Jepang masih berkuasa di daerah itu. Ketika para pemuda yang tergabung dalam PPI Laskar Banteng hendak mengibarkan bendera Merah Putih di halaman kantor pemerintahan daerah, maka mereka diserang oleh anggota-anggota polisi tersebut sehingga maksud itu gagal.

Rencana menaikkan bendera Merah Putih itu termasuk bagian dari rencana mendirikan pemerintahan RI untuk daerah Bolaang Mongondow yang disusun oleh J.F.K. Damopolii pada waktu itu. Rupanya rencana itu bocor sehingga Damopolii ditangkap pada tanggal 27 September 1945. Pada hari itu ia sedang berada di rumahnya di Motoboi Kecil ketika empat orang polisi pimpinan J. van Boychen (?) datang, lalu langsung menangkapnya dan dibawa ke Manado.

Setelah Damopolii ditangkap maka isterinya Nurtina Gonibala langsung mengambil alih kepemimpinan PPI dan PSII di daerah Bolaang Mongondow sebagai pimpinan darurat. Dalam kedudukannya itu maka ia menginstruksikan agar PPI Laskar Banteng meningkatkan perjuangan gerilya melawan Belanda, sambil tetap menyusun kekuatan dan memantapkan latihan-latihan kemiliteran bagi para anggota (Nurtina Gonibala, wawancara 17 September 1979).

Di daerah Sangir Talaud situasi sejak menyerahnya Jepang tidak diikuti dengan usaha membentuk pemerintahan RI untuk daerah itu. Pasukan Jepang masih tetap sangat merahasiakan kekalahan mereka dan berusaha menutup-nutupi hal itu terhadap rakyat. Namun berita itu akhirnya tersebar juga di sana dari

mulut ke mulut, diperkuat dengan sikap pasukan Jepng yang mulai meninggalkan posnya masing-masing baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Barulah setelah berlabuhnya kapal perang El Libertador sekitar bulan Oktober 1945 di Tahuna, yakinlah rakyat bahwa benar-benar Jepang sudah menyerah dan sekarang menjadi tawanan perang Sekutu. Namun hal itu tidak juga disusul dengan usaha mendirikan pemerintahan RI di sana berhubung turut memboncengnya aparat pemerintah SONICA yang mulai berusaha memutar roda pemerintahan, terutama mulai awal tahun 1946 (Yuda, wawancara 15 September 1979).

3. PARTISIPASI MASYARAKAT

Partisipasi masyarakat dalam rangka pembentukan pemerintahan RI di daerah ini diwujudkan dalam berbagai bentuk. Para pemuda yang dahulunya tergabung dalam Boo Ei Teisintai pimpinan Daidanco W.F. Sumanti, serentak ikut meleburkan diri ke dalam Pasukan PTA pimpinan Hulubalang P.A. Tiendas. Latihan militer yang pernah diterimanya dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pasukan di samping siap sedia dalam tugas menjaga keamanan jalannya pemerintahan yang sudah diserahkan oleh Jepang pada tanggal 21 Agustus 1945. Tetapi ketika pemerintahan diambil alih lagi oleh Hamanaka 6 September 1945, maka banyak di antara anggota pasukan ini yang langsung bergerak di bawah tanah. Para pemuda di Tondano mengaktifkan kembali PPI yang dahulunya dibentuk pada tanggal 15 Pebruari 1945 di Seretan, kali ini di bawah pimpinan E.D. Johannes SH, H.M.L. Legoh, Alex Pakasi, J.M.L. Supit, Wim Pangalila, E.A. Parengkuan, G.A. Maengkom, Kayang Gosal, Andi Masengi, Victor Adam, J. Kumaunang, Rachmat Pulukadang dan kawan-kawannya. Para anggota gerilya yang berjuang di hutan-hutan, mendapat dukungan dari rakyat antara lain dengan menyediakan makanan, obat-obatan, pakaian dan sebagainya termasuk merahasiakan kegiatan mereka terhadap Belanda.

Di daerah Gorontalo partisipasi masyarakat menyatakan diri dengan dukungan sepenuhnya terhadap pemerintahan daerah pimpinan Nani Wartabone sejak 9 September 1945. Rakyat dengan taat dan gembira diliputi rasa lega mengibarkan bendera Merah Putih sampai ke desa-desa. Para tokoh masyarakat, tokoh politik, aparat pemerintah sipil bersama-sama menunjukkan partisipasi yang nyata dalam menjalankan roda pemerintahan waktu itu.

Di samping itu dibentuk pula badan perjuangan kelaskaran seperti PKR (Pasukan Keamanan Rakyat), TIM (Tentara Indonesia Merdeka), Laskar Rakyat, yang sebagian besar terdiri dari pada pemuda bekas Keibodan dan Heiho yang pernah dilatih secara militer oleh Jepang. Seluruh barisan kelaskaran tersebut langsung berada di bawah komando A.J. Usman yang ditugaskan membantu urusan keamanan bersama-sama dengan Abdullah Amu dan A. Tumu (Usman, 1972 : 8; Sun Bone, wawancara 11 September 1979).

Di daerah Sangir Talaud, sebagaimana dikemukakan lebih dahulu, partisipasi masyarakat di sana dapat dikatakan bahwa rakyat "buta politik" sebagai akibat tekanan-tekanan Jepang selama masa pendudukan. Jadi sejak kapitulasi Jepang sampai tibanya pasukan Sekutu dan aparaturnya SONICA, rakyat hanya menurut saja apa yang dikatakan atau yang diatur oleh para raja, jogugu maupun kepala desanya masing-masing, yang tetap menjalankan tugas-tugas pemerintahan, baik selama masa pendudukan Jepang maupun sampai pada waktu dimulainya lagi pemerintahan Belanda.

Namun suatu hal yang perlu ditambahkan yakni bahwa rakyat di daerah ini walaupun tidak sempat menunjukkan partisipasinya dalam pembentukan pemerintahan RI, tidak mau menerima begitu saja kembalinya Belanda itu. Memang ada juga yang setuju dengan kembalinya Belanda, tetapi ada pula yang menentangnya. Di antaranya timbul raksi yang tidak setuju dari kaum nasionalis beragama Islam. Mereka di bawah pimpinan Hamzah Adariku, Ali Adariku, Ahmad Tompo dan lain-lain. Sedangkan di pihak lain, kaum nasionalis di bawah pimpinan L.M. Kansil, sudah sejak dahulu senantiasa berusaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia baik dari bangsa Belanda maupun dari bangsa Jepang. Namun karena situasi yang kurang menguntungkan maka gerakan yang dipimpinnya hanya dapat melakukan kegiatan secara tersembunyi saja (Yuda, wawancara 15 September 1979).

Sama halnya dengan di daerah Sangir Talaud demikian jugalah halnya di daerah Bolaang Mongondow. Hanya bedanya di daerah ini sudah ada usaha untuk mendirikan pemerintahan RI bulan September 1945 ketika orang-orang Jepang belum diangkut sebagai tawanan Sekutu. Walaupun polisi Jepang (yang terdiri dari orang-orang Indonesia) sudah menyatakan diri sebagai polisi Belanda, namun hal itu tidaklah merupakan halangan bagi rakyat,

terutama pemudanya yang telah tergabung dalam PPI Laskar Banteng. Ketika usaha mereka digagalkan dengan serangan para polisi Belanda maka dilanjutkan dengan semangat yang lebih berkobar-kobar lagi. Mereka menyusun kekuatan dan mengadakan latihan-latihan militer.

Latihan-latihan militer itu diadakan di desa Molinow dekat Kotamoaagu, di lapangan bola kaki yang terdapat di sini. Seorang bekas anggota Heiho yang dibawa Jepang ketika masih berkuasa menyumbangkan tenaganya untuk melatih para pemuda yang dipersiapkan untuk merebut pemerintahan di daerah itu. Pelatih tersebut bernama Agust Sukarni yang didatangkan Jepang dari pulau Jawa. Para pelatih pemuda lainnya ialah Harun Mamonto (Komandan PPI Laskar Banteng Kecamatan Lolayan), T. Dolot, A.B. Mamonto, dan Nurtina Gonibala (Komandan pasukan wanita PPI Laskar Banteng). Latihan seperti itu dilakukan sejak September sampai Nopember 1945 dan baru dhentikan akibat serangan pasukan KNIL yang langsung ditempatkan Belanda di desa tersebut.

Akibat serangan Belanda maka Markas pasukan yang berkedudukan dalam desa dipindahkan ke perkebunan Tanoyan. Dipindahkannya kedudukan markas mempunyai dua keuntungan, yaitu terhindar dari serangan mendadak, dan kedua, terjamin dukungan logistiknya. Hal ini diperkuat lagi dengan dukungan rakyat yang tetap menyediakan makanan dan sebagainya yang diperlukan oleh pasukan tersebut. Ketika hal ini diketahui oleh Belanda, maka rakyat tidak diperkenankan ke kebun tanpa memiliki surat izin dari komandan KNIL setempat. Tetapi rakyat tetap berusaha sedapat mungkin membantu pasukan tersebut dengan selalu menghindarkan diri dari mata-mata yang banyak disebarkan oleh Belanda untuk mengawasi kegiatan mereka (Hadjir Imban, wawancara 17 September 1979).

C. PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMILITERAN (PERJUANGAN BERSENJATA) DI DAERAH

1. PEREBUTAN KEKUASAN DARI JEPANG DI DAERAH

Sebenarnya Jepang bermaksud menyerahkan kekuatan tempurnya secara damai kepada rakyat Indonesia di daerah Sulawesi Utara/Tengah, sesuai rencana dari Suciji Laksamana Muda K. Hamanaka dan Kepala Staf Letnan Kolonel Takasaki. Mengenai

hal ini sudah cukup diuraikan di depan. Persiapan ke arah penyerahan pemerintahan sudah diatur sejak 15 Agustus 1945 dan penyerahan dilakukan 21 Agustus 1945. Sebagai tindak lanjut penyerahan pemerintahan maka pada tanggal 23 Agustus 1945 diserahkan pasukan tempur yang disebut Pasukan PTA di bawah pimpinan Hulubalang P.A. Tiendas. Hal itu berlangsung secara damai di lapangan bola kaki di Tondano dengan Inspektur Upacara Letnan Kolonel Takasaki mewakili Hamanaka. Hanya saja pada saat itu tidak turut diserahkan pasukan Kaigun Heiho, Rikugun Heiho dan pasukan lain berikut semua persenjataan-nya, berhubung hal itu sesuai rencana akan dilakukan kemudian. Bahkan sudah dibentuk pula Akademi Militer Tondano dipimpin Direktur Daidanco W.F. Sumanti yang sebelumnya ditugaskan memimpin pasukan Boo Ei Teisintai. Bendera Hinomaru tidak berkibar lagi sejak 21 Agustus 1945 dan sebagai gantinya berkibarlah dengan megah bendera Merah Putih. Dalam upacara itu, panji pasukan PTA diserahkan dari tangan Takasaki kepada P.A. Tiendas. Panji itu berwarna Merah Putih dengan gambar "banteng menyeruduk" dan tulisan PTA di sudut kanan atas (Sompie, 1979 : 4; Taulu, 1956 : 1).

Tetapi awal September 1945, Suciji Laksamana Muda K. Hamanaka dipanggil untuk menghadap pimpinan Sekutu yang bemarkas di Morotai. Ia kembali lagi ke Minahasa tanggal 5 September 1945 dan besoknya mengeluarkan instruksi agar Pasukan PTA dibubarkan, Akademi Militer Tondano ditutup, serta pemerintahan sipil yang sudah diserahkannya diambil alihnya kembali. Rupanya ia diperintahkan Sekutu untuk menjaga keamanan status quo di wilayah tugasnya. Aparatur pemerintahan sipil tidak mampu berbuat apa-apa untuk membangkang isi instruksi di atas, sedangkan Pasukan PTA belum sanggup melawan dengan kekuatan senjata berhubung hanya sedikit sekali senjata yang ada dan itupun hanya di tangan para komandan pasukan saja. Jadi dengan demikian walaupun ada dikandung maksud untuk melawan atau merebut senjata Jepang, namun berhubung alat senjata untuk itu dapat dikatakan tidak ada, maka pimpinan Pasukan PTA memilih tindakan lain. Mereka tidak akan membuang tenaga dan jiwa menyerang pasukan Jepang yang masih lengkap persenjataannya, tetapi menyusun kekuatan dalam menghadapi Belanda yang tidak lama lagi akan tiba. Oleh karena itu dilakukanlah persiapan-persiapan yang perlu

untuk melakukan gerakan di bawah tanah dan sebagian lagi pergi masuk hutan untuk bergerilya melawan Belanda.

Untuk maksud melakukan perang gerilya melawan Belanda maka diaktifkan kembali PPI (Pasukan Pemuda Indonesia) yang pernah dibentuk 15 Pebruari di Seretan Tondano ketika Jepang masih berkuasa. Pengaktifan itu dilakukan sekitar awal bulan September 1945 dengan markas besar ditempatkan di Tondano. Pimpinan PPI waktu itu ialah E.D. Johannes SH, H.M.L. Legoh, N.P. Somba, Alex Pakasi, J.M.L. Supit, Wim Pangalila, Engel A. Parengkuan, G.A. Maengkom, Kayang Gosal, Andi Masengi, Victor Adam, J. Kumaunang, Rachmat Pulukadang dan kawan-kawannya. Para penghubung yang terdiri dai para pemuda nasionalis ditugaskan ke beberapa daerah, antaranya ke Bolaang Mongondow untuk mengaktifkan PPI di daerah bersangkutan sebagai kekuatan menentang kembalinya Belanda.

Untuk melakukan gerakan di bawah tanah, maka sejak akhir Agustus 1945 telah dibentuk di Manado suatu organisasi pemuda nasionalis yang dinamakan Barisan Pemuda Nasional Indonesia (BPNI). Untuk memunculkan dan memperkenalkan diri kepada rakyat, sekaligus secara terbuka menentang Belanda, maka BPNI menerbitkan surat kabar "Catapult" (berbahasa Belanda) dan "Suara Indonesia Muda" (berbahasa Indonesia). Kedua surat kabar itu bersama-sama dipimpin oleh John Rahasia dan Ch. D. Pontoh. Penggandaan dan penstensilan surat kabar kebanyakan mempergunakan fasilitas dari instansi NICA tanpa diketahui Belanda.

Di daerah Gorontalo setelah tersiar berita tentang kekalahan Jepang, maka hal itu segera menimbulkan reaksi serta tanggapan di kalangan para tokoh nasionalis dan rakyat di daerah tersebut. Ada yang merasa gembira, terutama pemuda, tetapi ada pula yang masih ragu-ragu karena belum ada pemberitahuan resmi dari pemerintah pendudukan. Tetapi kaum nasionalis yang pernah merebut kekuasaan Belanda (23 Januari 1942), menanggapi hal itu sebagai suatu kesempatan yang baik untuk sekali lagi merebut kekuasaan, kali ini dari tangan Jepang.

Namun hal itu diperhadapkan dengan suatu masalah, yaitu tidak adanya persenjataan di pihak kaum nasionalis, sehingga walaupun mereka memiliki semangat yang berapi-api, tetapi bayangan kegagalan menghambat mereka untuk menyerang pasukan-pasukan Jepang yang masih lengkap persenjataannya. Dalam situasi seperti itu Kenkanrikan Kinosita memanggil Nani

Wartabone untuk membicarakan soal penyerahan kekuasaan pemerintahan di sini. Kemudian pada tanggal 9 September 1945 dilakukan upacara penyerahan pemerintahan kepada rakyat yang diterima oleh Nani Wartabone, yang sterusnya bertindak selaku Kepala Daerah Gorontalo dalam pemerintahan nasional. Bendera Merah Putih berkibar menggantikan bendera Hinomaru sejak tanggal itu. Kesemua peristiwa ini akhirnya meredakan tekad pemuda untuk menyerang Jepang, dan sebaliknya semangat diarahkan bagi mendukung kelangsungan hidup pemerintahan nasional di bawah pimpinan Nani Wartabone waktu itu. Pada waktu semangat pemuda sedang bernyala-nyala, para tokoh nasionalis setempat menasehatkan bahwa menyerang Jepang berarti akan membawa korban yang tidak diinginkan di pihak rakyat berhubung tidak adanya senjata. Tindakan Jepang dengan menyerahkan kekuasaan ke tangan rakyat menunjukkan bahwa perhitungan kaum nasionalis di daerah ini tepat (Daiton H. Wantogia, wawancara 6 September 1979).

Selain pemberontakan rakyat yang pernah dilakukan oleh rakyat Makalehi terhadap Jepang (Maret 1945) perebutan kekuasaan dari tangan Jepang di daerah Sangir Talaud dapat dikatakan tidak pernah terjadi (Manus dkk, 1978 : 201–202; Elias, 1973 : 147–150). Mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain bergerak secara sembunyi-sembunyi saja berupa gerakan di bawah tanah. Hal ini ternyata, ketika diketahui Jepang, telah mengakibatkan jatuhnya korban di pihak para pemimpin dan pengikut-pengikutnya, seperti misalnya yang dialami oleh Raja Koagouw dari Kerajaan Talaud.

Di daerah Bolaang Mongondow, menyusul berita yang sifatnya dirahasiakan tentang kekalahan Jepang yang disampaikan oleh Komandan Tokeitai bernama Takamoto kepada Fukugunco Lolayan, J.F.K. Damopolii, awal September 1945, maka pada pertengahan bulan itu, Damopolii didatangi oleh dua orang utusan dari Markas Besar PPI di Tondano (Minasa). Misi kedua utusan PPI itu berhasil yakni dengan terbentuknya PPI Komisariat Bolaang Mongondow pada 17 September 1945 dengan ketuanya J.F.K. Damopolii. Polisi Jepang segera menyatakan diri sebagai polisi Belanda sehingga usaha PPI untuk merebut kekuasaan digagalkan. Hal itu terjadi pada tanggal 17 September itu juga, dan dengan demikian maka mulai saat itu PPI Laskar Banteng mengintensipkan latihan-latihan dan mulai menjalankan perang gerilya

ketika Belanda dengan NICA-nya mulai memerintah daerah Bo-
laang Mongondow.

2. TIMBULNYA ORGANISASI KEMILITERAN DAN PER- JUANGAN (BKR KELASKARAN)

Di atas telah dijelaskan bahwa Pasukan PTA dimaksudkan sebagai organisasi militer yang sediany akan menunjang jalannya pemerintahan Keresidenan Manado di bawah Residen E.H.W. Pelengkahu. Namun diakui bahwa Jepang bertindak cukup hati-hati dengan tidak segera menyerahkan persenjataan yang dibutuhkan Pasukan PTA untuk mengamankan jalannya pemerin-
tahan waktu itu. Dengan tidak adanya senjata dimaksud maka Pasukan PTA dapat dianggap sebagai wadah tanpa isi. Hanyalah dengan modal semangat nasionalisme yang tinggi maka para pe-
mimpinnya menempuh kebijaksanaan dengan menginstruksikan kepada para anggotanya untuk melanjutkan perjuangan melawan Belanda dan bukannya berusaha merebut senjata dari tangan Jepang waktu itu.

Jadi dapatlah dikatakan bahwa Pasukan PTA dengan sendiri-
nya bubar. Namun demikian para tokoh nasionalis tidak berputus
asa karena mereka segera mengaktifkan kembali PPI (Pasukan
Pemuda INdonesia) yang dahulunya, yakni 15 Pebruari 1945,
pernah dibentuk Jepang. Oleh para tokoh PPI yang bermarkas
di Tondano (Minahasa) ini dibentuklah staf komando yang ber-
kedudukan di Markas Besar, dilengkapi dengan sektor-sektor
di seluruh Minahasa bahkan ke seluruh daerah yang lain di Sula-
wesi Utara, Sulawesi Tengah, bahkan sampai ke luar wilayah ini.
Kalau BPNI berpusat di Manado dan dikatakan bergerak secara
legal dengan menerbitkan dua surat kabar "Catapult" dan "Suara
Indonesia Muda" maka PPI bergerak secara ilegal dan bertujuan
melaksanakan perang gerilya terhadap kekuasaan NICA. Keang-
gotaan rangkap dalam PPI maupun BPNI tidak merupakan ha-
langan, bahkan semakin memperkuat kedua organisasi pemuda
pejuang itu.

Tingkat Markas Besar PPI di Tondano dipimpin oleh E.D.
Johannes SH, H.M.L. Legoh, Alex Pakasi, J.M.L. Supit, Wim
Pangalila, N.P. Somba, Engel A. Parengkuan, G.A. Maengkom,
Kayang Gosal, Andi Masengi, Victor Adam, J. Kumaunang, Rach-
mat Pulukadang, dan lain-lain. Staf perlengkapan Markas Besar
dipimpin oleh Wim Pangalila, N. Kumaunang, J. Karinda, J. Runtu

dan kawan-kawannya. Para penghubung/Kordinator Pemuda di sana ialah E. Matulandi, E. Runturambi, L.J. Mewengkang, B. Wowor, J. Musu, J. Worek dan lain-lain (Legoh, 1973 : 18-19; dilengkapi keterangan Nurtina Gonibala di depan).

Untuk menyusun kekuatan maka PPI membentuk Sektor-sektor baik di tempat kedudukan Markas Besar (di Tondano) maupun di tempat-tempat lainnya di Minahasa, bahkan dipersiapkan juga untuk daerah-daerah lainnya di luar Minahasa. Sektor-sektor di Minahasa, berikut Komandan Sektor, Kordinator Sektor dan para pembantunya adalah sebagai berikut (Legoh, 1973 : 19-20) :

1. Kota Tondano, terbagi atas empat sektor yaitu :
 - a. Tondano Kota : Alex Pakasi, Jo Lumanauw, Gaston Rampen, J. Kolondam, A. Umar, Jan Lumanauw dkk;
 - b. Kampung Jawa Tondano : Rachmat Pulukadang, Usman Pulukadang, dkk;
 - c. Tondano Barat/Koya/Tataaran : J. Pangemanan, V. Lewu, M. Lewu, J. Parengkuan, dkk;
 - d. Tondano Timur/Tondano Pante : Kayang Gosal, H.M.L. Legoh, V. Lumingkewas, R. Tairas, V. Mamengko, D. Sumele, A.S. Lengkong, J. Pakasi, J. Angkouw, T. Hermanus, J. Kindangen, dkk;
2. Kota Manado, terbagi atas tiga sektor :
 - a. Mandao Utara : John Rahasia, Chris D. Pontoh, J. Mailangkay, Tjoku, M. Mamansage, Boan Adji, Jerit Kansil, dkk;
 - b. Manado Tengah : M. Canon, Njong Lombang, Jo Damopolii, Abdul Madjoka, Hamzah Darise, dkk;
 - c. Manado Selatan : No Tooy, Leo Taroreh, J. Warbung, W. Mongan, Max Roringkon, dkk;
3. Kakas : W.H. Maleke, John Malonda, F. Rondonuwu, N. Manapa, W. Malonda, W. Kusoy, dkk;
4. Tomohon : F.H.L.W. Mondong, F. Wongkar, Karel Wondal, Gus Warouw, S. Montolalu, G. Pangkerego, M. Rumarjar, H.D. Kowaas, G. Wowor, dkk;
5. Airmadidi : V. Mandey, B. Wenas, Albert Tanod, David Sompie, Jong Mandey, Nona Gusta Ngantung, Paulus Coen de Breving, dkk;
6. Dimembe-Likupang: Frans Korah, S. Manangka, B. Mamahit, C.I. Pondaag, Kaunang, Manus, A.R. Rotty, P. Tangku-

dung, W.S. Bolang;

7. Minawerot : Boas Karamoy, Wim Kotambunan Bonny Lengkong, Emor Sumampouw, Lewan Wowor, A.K. Maidangkay, A. Pangemanan, dkk;
8. Girian-Bitung : Butje Sumampouw, H. Watuna, A. Pangau, Abdullah Hamid Assegaf, W.A. Tangkudung, Supu Saridin, dkk;
9. Paso : H.S. Kaeng, A.W. Kaeng, E. Sanger, dkk;
10. Remboken : Jus Mamusung, Constantijn Mamahit, Jan Rombot, F. Wowor, D. Tangkowit, J. Kairupan, J. Lisangan dkk;
11. Langowan : W. Saerang, R.C. Massie, D. Mumu, S. Sirang, Djim Gobel, Ali Aldjahani, dkk;
12. Tompasso : Gerzon Tewu, Pieter Kembuan, J.V. Dajoh, B. Supit, dkk;
13. Tompasso Baru : H.B. Estefanus, Jootje Liogu, Jan Rey, dkk;
14. Kawangkoan : Wevin Taulu, G. Mendur, Gertje Supit, Ton Lumentah, E.R.S. Bujung, A.I. Monintja, H. Sondakh, dkk;
15. Leilem : M.W. Pelealu, W. Kusoy, A. Kairupan, M. Pelenkayu, dkk;
16. Sonder : A. Linu, A.L. Tambuwun, J. Komalig, B. Rawung, dkk;
17. Amurang : Hengky Kaligis, J. Sariowan, Junus Oflagi, Wim Tamburian;
18. Motoling : Jan Piay, W. Paath, F. Nander, W. Makaliwe, E. Bujung, Eddy Rambli;
19. Ratahan-Tombatu : Jan M. Methusala, Hans Lengkoan, Piet Salasa, Goan Sangkaen, J. Parengkuan, W. Josep, dkk;
20. Belang : H Safar, F. Kindangen, J. Sumilat, dkk.

Di luar daerah Minahasa sampai ke Sulawesi Tengah, dipersiapkan pula pembentukan sektor-sektor lengkap dengan komandan sektor dan koordinator sektor sebagai berikut (Legoh, 1973 : 20-21; ditambah keterangan dari Nurtina-Gonibala untuk Bolaang Mongondow) :

1. Kotamobagu : Saleh Mokobombang, H. Pandelaki, I. Pinontoan, J.F.K. Damopolii, Nurtina Gonibala, Abdurachman Mokobombang, dkk;
2. Molibagu : Ibrahim Mooduto, R. van Gobel, Husein Tanta;

- dan di Pinolosian : M. Gonibala;
3. Gorontalo : Nani Wartabone, Hasan Usman, J.A. Pendang Kalengkongan, R.M. Koesno Dhanupojo, Abdul Tangahu, Lotulong Mantiri, dkk;
 4. Tahuna-Sangir Talaud : F. Sanger, P. Tamrindang, Anthon Liotohe, dkk;
 5. Tabuhan-Sangir Talaud : F.D.R. Andaria, dkk;
 6. Tamako-Sangir Talaud : E. Rampisala, F. Lahengko, A. Kantor, dkk;
 7. Poso : Wangko, L. Tolosa, J.K. Janis, Abdul Latif, Mangitung, Sinus Pangemanan, R. Mangolo, Abdul Muis Rengga, B. Kawadi, J.S. Pangkey, Abubakar Baginda, Holidu Dando, Niode, A.A. Rawung, J. Panguru, E. Lagaronde, Sesuri, Olikinsol, dkk;
 8. Toli-toli : Jules Makalew, Paul Sigar, dkk;
 9. Luwuk-Banggai : Azis Larekeng, W. Pedju, Radja Sukuran Amir, J. Monoarfa, dr. Sutarjo, P. Maluegha;
 10. Bunta : Amin Larekeng, Tees Bula, dkk;
 11. Pagimana : Jusuf Monoarfa, S. Kardiati, dkk;
 12. Tentena : A. Sanger, L. Bandola, A.D. Taulu, dkk;
 13. Palu-Donggala : Abdullah Amu, Abdul Gani, Suwondo, Gerard Solang, dkk.

Dengan demikian maka ternyata untuk daerah Minahasa saja, PPI telah menyusun kekuatan pada 25 Sektor di mana Tondano dan Manado turut diperhitungkan pula dengan menggunakan orang-orang yang kebanyakan berasal dari wilayah ini. Daerah-daerah yang termasuk rencana perluasan perjuangan dari PPI pada waktu itu ialah Sulawesi Selatan, Irian Barat (sekarang Irian Jaya) dan Kalimantan. Mereka yang ditunjuk sebagai Koordinator/Penghubung di daerah tersebut adalah sebagai berikut (Legoh, 1973 : 21) :

1. Sulawesi Selatan : Donggeng, Daeng Ngasa, Abdurasjid Daeng Lurang, Djumarang, Daeng Ngaro, Sjamsuddin Basa Daeng Rambo, Djamaudin Daeng Tunru, Malombasang Daeng Tawang, Andi Bahrudin, Dinar Daeng Sila, Marthin Rondonuwu, Wim Langoy, P. Jacob P, G. Sumarauw, R.W. Mongisidi, dkk;
2. Irian Barat : Tololiu, A. Sumanti, Mardi, Jouwe, Wursaye, F. Gumalang, Taliwongso, Rumengan, J. Tepi, W. Pakasi, Silas Papare, F. Kaisopo, Jootje Kaligis, A. Koromat, M.

Indey, L. Rumkorem, Eljuso, Abraham Bouw, J.A. Limara, dkk;

3. Kalimantan : H. Runturambi, dkk;

Sementara tahap konsolidasi dijalankan oleh PPI, maka salah seorang pemiminnnya dari Markas Besar di Tondano diutus untuk menemui seorang bintanga KNIL di Manado, yakni Sersan Ch.Ch. Taulu yang mempunyai banyak pengaruh di kalangan para anggota KNIL yang ditempatkan di Minahasa pada waktu itu, terutama dalam Kompi 7 yang bermarkas di Teling. Pertemuan itu dilakukan di rumah kediaman Ch.Ch. Taulu di Titiwungen, Manado, pada tanggal 5 Nopember 1945, dan dilakukan secara rahasia. Dalam pertemuan itu dibentangkan tentang kekuatan yang dimiliki PPI untuk melawan Belanda sejalan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Yang menjadi masalah pada pertemuan itu yakni siapakah yang harus memulai perjuangan dan bagaimanakah untuk melaksanakannya. Pertemuan itu berkesimpulan bahwa perebutan kekuasaan adalah sesuatu yang mutlak yang harus dilakukan dan untuk itu diperlukan senjata yang pada waktu itu dimiliki oleh Belanda (Legoh, 1973 : 14).

Walaupun Sersan KNIL Ch.Ch. Taulu bekerja dalam dinas militer Belanda namun ia menyatakan kesanggupannya untuk turut terjun dalam perjuangan. Dikatakannya, bahwa, walaupun ia dan Sersan S.D. Wuisan dan kawan-kawan lainnya sementara itu memakai uniform Belanda, namun mereka tetap memiliki jiwa patriotisme yang cinta kepada tanah air Indonesia. H.M.L. Legoh juga mengemukakan bahwa jumlah kekuatan PPI waktu itu sekitar 20.000 anggota yang siap memegang senjata di mana sebagian besar di antaranya sudah pernah menerima latihan militer dari Jepang (Legoh, 1973 : 14).

Dengan demikian maka pembentukan dan tujuan perjuangan organisasi kelaskaran PPI, diimbangi dan diperkuat dengan adanya gerakan penentang dalam tubuh militer Belanda sendiri di bawah pimpinan Sersan Ch.Ch. Taulu dan Sersan S.D. Wuisan. Untuk itu maka Taulu menyusun rencana perjuangan sebagai berikut (Taulu, 1956 : 2) :

1. Haruslah dipergunakan anggota-anggota tentara untuk mengadakan aksi berhubung mereka memiliki fasilitas persenjataan yang diperlukan;
2. Aksi harus bertujuan untuk :
 - a. mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agus-

tus 1945;

- b. melemahkan kedudukan NICA;
 - c. menunjukkan bahwa orang Minahasa yang biasanya diejek sebagai pendukung Twaalfde Province, sesungguhnya tidak mau ketinggalan dan menyadari kewajibannya terhadap Ibu Pertiwi;
 - d. memberikan teladan dan dorongan kepada para anggota KNIL berkebangsaan Indonesia, terutama yang berasal dari Minahasa yang tersebar di seluruh Indonesia, untuk bertindak mengikuti jejak di Minahasa;
3. Pelaksanaan aksi itu harus dijalankan dengan lisan, rahasia dan bertingkat-tingkat, sebagai berikut :
- a. bahwa janji Ratu Wilhelmina dalam pidato radio 8 Desember 1942 tidak ditepati, ternyata bahwa NICA masih tetap menjalankan perbedaan perlakuan berdasarkan perbedaan kebangsaan dalam soal gaji dan jaminan-jaminan lainnya seperti pada masa sebelum perang;
 - b. mengajak perasaan tentang Proklamasi Kemerdekaan RI di bawah bendera Merah Putih bilamana ayat a. memuaskan;
 - c. mengajak perasaan tentang revolusi di Jawa bilamana ayat b. memuaskan;
 - d. mengajak perasaan jika di Minahasa diadakan perebutan kekuasaan bilamana ayat c. memuaskan.

Rencana kegiatan di atas dijalankan oleh Sersan Ch.Ch. Taulu dan rekannya Sersan S.D. Wuisan. Sebagai hasilnya maka mereka berhasil merangkul kawan-kawan dalam KNIL sebagai berikut : Sersan Wim Waney, Kopral W.F. Sumanti, Sersan F. Bisman, Kopral A.S. Rombot, Kopral S. Mende, Kopral J. Runtukahu, Kopral J. Sambuaga serta beberapa anggota KNIL lainnya seperti : No Korompis, Gustaaf Sumarauw, Jus Kotambunan, Mas Sifam, Gerzon Andries, L. Item, N. Anes, P. Malonda, A.A. Sigarlaki, S. Kumaunang, O. Rumambi, M. Rotinsulu, F. Korah, Suparmin dan sebagainya. Langkah berikutnya yaitu Sersan W. Waney ditugaskan sebagai penghubung dengan PPI di Sektor Amurang. Kopral W.F. Sumanti sebagai penghubung dengan PPI sektor-sektor di Manado dan Tondano. No Korompis sebagai penghubung untuk PPI sektor Tondano, Langowan, Kawangkoan dan Tomohon. Kopral J. Sambuaga sebagai penghubung untuk PPI

sektor-sektor di Manado dan Tonsea. No Tooy, seorang pegawai sipil dalam dinas telepon militer, ditunjuk sebagai penghubung untuk PPI sektor-sektor di Manado. Dapat ditambahkan bahwa selain bergiat di kalangan militer, Taulu dan rekan-rekannya aktif juga mengadakan hubungan dengan para pejabat sipil dalam dinas CONICA. Di antaranya diadakan kontak terus menerus dengan B.W. Lopian yang waktu itu adalah Hukum Besar (Kepala Distrik) Manado (Desember 1945–Pebruari 1946), juga dengan Mauritus Tangkilisan yang waktu itu sebagai Hukum Kedua (Camat) Kauditan, Minahasa (Taulu, 1956 : 3–4; Watuseke, 1968 : 61).

Sejalan dengan perkembangan di Minahasa, di daerah Bolaang Mongondow juga dibentuk organisasi kemiliteran/perjuangan yang disebut PPI Laskar Banteng Bolaang Mongondow. Organisasi ini adalah perluasan organisasi perjuangan serupa dari Minahasa, yaitu PPI yang bermarkas besar di Tondano. Komandan PPI Laskar Banteng Bolaang Mongondow ialah Abdurrachman Mokobombang. Organisasi ini dibentuk 17 September 1945 di Motobai Kecil, Kotamobagu. Sejak tanggal pembentukannya, PPI Laskar Banteng memperluas keanggotaannya sampai ke desa-desa di seluruh daerah Bolaang Mongondow. Untuk tiap wilayah setingkat kecamatan, dibentuk pasukan di bawah seorang Komandan Sektor. Sedangkan tingkat markas di Motobai Kecil terdiri dari beberapa pasukan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Komandan Kelompok. Pasukan wanita hanya terdiri atas satu kelompok dengan Komandan Kelompok Nurtina Gonibala. Baik para komandan sektor, komandan kelompok (pria) maupun komandan kelompok wanita, taktis organisatoris berada di bawah Komandan PPI Laskar Banteng Abdurrachman Mokobombang.

Jabatan sebagai Komandan PPI Laskar Banteng itu dipegang oleh Abdurrachman Mokobombang atas penunjukkan dari Ketua Komisariat PPI daerah Bolaang Mongondow, J.F.K. Damopolii, yang ditunjuk/dihubungi oleh dua pemuda utusan dari Markas Besar PPI di Tondano Minahasa. J.F.K. Damopolii ini waktu itu menjabat sebagai Fukugunco (setingkat Camat) yang diangkat sejak Jepang berkuasa di sana. Karena jabatannya itu maka ia bersahabat dengan Komandan Tokeitai Takamoto. Ketika sudah jelas bahwa Jepang sudah menyerah pada Sekutu, maka Takamoto menyerahkan sejumlah senjata ringan seperti LE, pistol, amunisi dan sejumlah granat kepada Damopolii yang langsung menyerahkannya kepada PPI Laskar Banteng untuk digunakan dalam

dalam perang gerilya melawan Belanda.

Sejak September 1945, PPI Laskar Banteng menyelenggarakan latihan-latihan militer di sekitar desa Molinow di Kotamobagu. Para pemuda dan wanita dilatih memegang dan mempergunakan senjata di bawah para pelatih yang dahulunya pernah dilatih Jepang dalam Heiho, Keibodan, dan sebagainya. Lapangan olah raga yang terletak dekat mesjid di desa itu dijadikan sebagai pusat latihan. Kegiatan latihan itu berlangsung terus menerus sampai bulan Nopember 1945.

Pada bulan itu sepasukan KNIL berkekuatan satu kompi didatangkan dari Minahasa atas permintaan Komandan Polisi Belanda, Herry Harun Manoppo (yang memegang jabatan itu oleh pengangkatan Jepang). Kompi KNIL itu dipimpin oleh Komandan Kapten Latuperissa. Bersamaan dengan datangnya pasukan itu maka NICA menempatkan seorang Controleur, yaitu Langendon untuk Bolaang Mongondow yang berarti status Onderafdeeling seperti sebelum perang dijalankan kembali di daerah ini.

Sebagaimana sudah dikemukakan di depan, Ketua Komisariat PPI merangkap Ketua PSII Cabang Bolaang Mongondow J.F.K. Damopolii ditangkap oleh polisi Belanda pada 27 September 1945 dan sejak saat itu dibentuk pimpinan darurat di bawah isterinya, Nurtina Gonibala. Di bawah pimpinannya maka PPI Laskar Banteng meneruskan latihan-latihan militer dengan sasaran jangka pendeknya, yakni merebut kekuasaan Belanda di daerah Bolaang Mongondow, sedangkan tujuan untuk jangka panjang adalah mendirikan pemerintahan sesuai dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 di daerah itu. Dengan ditangkapnya Damopolii yang dipenjarakan di Manado maka rupanya rencana PPI Laskar Banteng dibocorkan oleh Belanda. Dengan demikian maka pasukan KNIL datang dan segera membantu polisi Belanda mengadakan penangkapan-penangkapan.

Hal ini dijalankan Belanda mengingat bahwa anggota-anggota PPI Laskar Banteng aktif mengadakan penghadangan-penghadangan serta pemutusan kawat-kawat telepon di daerah itu, selain aktif mengadakan latihan-latihan, dengan mempergunakan senjata-senjata yang pernah diserahkan oleh Jepang itu. Yang ditangkap pada waktu itu ialah (Nurtina Gonibala, wawancara 17 September 1979) :

1. Nurtina Gonibala, pimpinan darurat PPI Laskar Banteng

dan PSII Cabang Bolaang Mongondow, di samping jabatannya sebagai Komandan Kelompok Wanita PPI Laskar Banteng;

2. P.U. Kombo, aktivis PSII dan Kepala Desa Poyowa Kecil;
3. L. Mokobombang, Kepala Desa Molinow;
4. Abdurrachman Mikobombang, aktivis PSII dan Komandan PPI Laskar Banteng seluruh Bolaang Mongondow;
5. Saleh A. Mokobombang, salah seorang Komandan Kelompok PPI Laskar Bateng dan Penghubung dengan PPI Laskar Banteng wilayah Kerajaan Bolaang Uki yang berpusat di Kotamobagu;
6. Saridin Daun, salah seorang Komandan Kelompok di Markas PPI Laskar Banteng merangkap Penghubung dengan PPI Laskar Banteng yang berpusat di Molibagu;
7. A.H. Raupu, salah seorang Komandan Kelompok di Markas PPI Laskar Banteng;
8. Harun Mamonto, Ketua PMI-PSII Kecamatan Lolayan;
9. Agust Sukarni, salah seorang Pelati PPI Laskar Banteng di Markas PPI Laskar Banteng;
10. Hatidah Mokobombang, Ketua Onder Departemen Wanita PSII daerah Bolaang Mongondow.

Semua mereka ditahan dalam penjara Kotamobagu selama tiga bulan, kecuali Nurtina Gonibala yang kemudian dikirim ke Manado dan sempat dipenjarakan bersama-sama dengan para pelopor pemberontakan 14 Pebruari 1946 setelah berhasil digagalkan Belanda 11 Maret 1946 (Nurtina Gonibala, wawancara 17 September 1979). Dengan ditangkapnya sebagian pimpinan inti oleh Belanda, maka para pemimpin lainnya segera memindahkan markas PPI Laskar Banteng ke perkebunan Tanoyan. Dari sana mereka terus menerus melancarkan perang gerilya melawan Belanda.

Di daerah Gorontalo sejak diserahkan pemerintah daerah itu oleh Jepang pada tanggal 9 September 1945, maka pemerintahan nasional setempat di bawah pimpinan Nani Wartabone selaku Kepala Daerah yang diangkat dan disetujui oleh Dewan Nasional segera mengaktifkan organisasi-organisasi kelaskaran untuk mengamankan jalannya pemerintahan daerah itu. Di daerah tersebut dibentuk beberapa organisasi kelaskaran dengan nama berbeda-beda. Di antaranya muncul Pasukan Keamanan Rakyat (PKR), Tentara Indonesia Merdeka (TIM), dan sebagainya. Semua organisasi kelaskaran itu berada di bawah Komandan A.J. Usman

yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah Nani Wartabone (Usman, 1972 : 8).

Pusat latihan kelaskaran terletak di Suwawa. Senjata-senjata yang berasal atau diperoleh dari Jepang disimpan di Tabuliti (Suwawa) dan tempat itu dijadikan pusat latihan bagi para pemuda yang dengan sukarela menjadi anggota pasukan keamanan. Pada waktu itu terdapat sekitar 100 pemuda terlatih yang siap sedia menghadapi segala kemungkinan gangguan keamanan, baik dari pihak Jepang maupun dari pihak Belanda yang dikabarkan akan datang bersama-sama dengan tentara Sekutu. Selain mereka, maka seluruh rakyat, tua muda, lelaki wanita, siap sedia dengan lembing, keris, pedang, bambu runcing, dan sebagainya, dan aktif menjaga keamanan lingkungannya masing-masing dan lingkungan kota Gorontalo.

Berbeda dengan di ketiga daerah lainnya di daerah Sangir Talaud, tidak pernah dibentuk organisasi-organisasi kelaskaran selain organisasi-organisasi semi militer yang pernah dibentuk oleh Jepang. Namun para anggota organisasi semi militer bentukan Jepang itu tidak mengadakan kegiatan apa-apa untuk mengorganisir diri membentuk organisasi kelaskaran. Barulah kemudian, setelah Belanda berkuasa, suatu organisasi politik bernama Barisan Pemuda Republik Indonesia (BAPRI) membentuk Barisan Keamanan di Siau, khususnya untuk menunjang tuntutan agar daerah itu keluar dari NIT yang dibentuk oleh Belanda (Elias, 1973 : 159-160).

3. PARTISIPASI MASYARAKAT

Sejak dimulainya kegiatan oleh Sersan Ch.Ch. Taulu untuk memberontak terhadap Belanda, maka ia bersama rekan-rekannya aktif secara rahasia mengadakan perundingan-perundingan dengan para pemimpin pemuda yang tergabung di dalam PPI (bermarkas di Tondano) dan BPNI (bermarkas di Manado). Hal ini dimulai tanggal 5 Nopember 1945 ketika H.M.L. Legoh dari Markas Besar PPI menjumpai Taulu dan mengadakan pertemuan rahasia di rumahnya di Titiwungen, Manado.

Dalam setiap pertemuan rahasia itu, selalu mereka usahakan agar jangan sampai diketahui Belanda, dengan melakukan berbagai cara. Antara lain dapat disebutkan ketika diadakan rapat rahasia di rumahnya Sersan S.D. Wuisan di Titiwungen Manado. Resminya pertemuan mereka adalah dalam bentuk perayaan ulang

tahun. Untuk itu maka isteri Wuisan bernama Maas Tangkilisan menyediakan macam-macam kue dan hidangan lainnya di ruangan depan di mana banyak orang berkumpul dan bersuka ria. Sedangkan di ruanga lain di bagian belakang, dilangsungkan rapat rahasia tersebut. Dengan demikian maka NEFIS dan PID tidak curiga berkumpulnya begitu banyak orang di rumah itu.

Di daerah Gorontalo dalam usaha untuk menunjang jalannya pemerintahan pimpinan Nani Wartabone di sana, rakyat ketika Jepang masih berkuasa (sebelum datangnya Sekutu) tetap merahasiakan tempat-tempat kedudukan pasukan pemuda dan tempat latihan mereka. Demikian juga ketika Belanda datang dengan membonceng kepada tentara Sekutu. Pasukan-pasukan pemuda dalam bentuk organisasi kelaskaran, seperti PKR dan TIM, mendapat bantuan berupa obat-obatan dari anggota-anggota masyarakat, baik yang berdinasi di lembaga-lembaga kesehatan, dari dokter Indonesia setempat, bantuan kelompok maupun perorangan, yang kesemuanya diberikan dengan ikhlas dan rela demi untuk kelangsungan perjuangan menegakkan pemerintahan RI di daerah itu. Bantuan masyarakat berupa beras senantiasa diberikan kepada para anggota pasukan yang berdatangan dari tiap desa. Juga pasukan yang datang atau yang bertugas menjaga keamanan desa memperoleh jaminan perbekalan dari rakyat berupa beras dan lauk pauk lainnya.

Di daerah Bolaang Mongondow sementara berlangsungnya latihan-latihan kelaskaran dari PPI Laskar Banteng, maka oleh rakyat setempat selalu disediakan bantuan berupa makanan kepada para anggota laskar itu. Ketika para pimpinan laskar ditangkap oleh Belanda, maka markas dipindahkan ke perkebunan Tano-yan. Dengan masuk hutannya para anggota laskar itu, maka rakyat tidak memutuskan bantuan perbekalan mereka untuk pasukan yang melaksanakan perang gerilya di sana. Tetapi akhirnya partisipasi mereka dapat diketahui oleh Belanda. Mulai pada saat itu rakyat yang tidak memiliki surat izin ke kebun oleh komandan polisi/tentara setempat, tidak lagi diperkenankan pergi ke kebunnya sendiri. Barangsiapa yang melanggar peraturan Belanda itu akan ditangkap dan diperlakukan secara kejam oleh Belanda. Rakyat bertambah sulit untuk membantu pasukan gerilya dengan perbekalan makanan disebabkan banyaknya mata-mata musuh yang tidak segan-segan melaporkan hal itu kepada polisi atau tentara. Namun hal itu tidak mampu menghalangi berlang-

sungnya dukungan rakyat terhadap gerilya dengan mencari berbagai macam cara untuk tetap membantu pasukan-pasukan gerilya dengan mencari berbagai macam cara untuk tetap membantu pasukan-pasukan gerilya Laskar Banteng yang berada di hutan-hutan. Juga rakyat selalu memberikan informasi tentang kekuatan dan kedudukan pasukan musuh kepada PPI Laskar Rakyat yang melancarkan perang gerilya di daerah ini.

Markas mereka terletak kira-kira 15 Km dari Kotamobagu, di tempat bernama Tanoyan. Ketika rakyat tidak diperkenankan membawa makanan ke kebun maka mereka mengizinkan kepada anggota-anggota laskar untuk mengambil bahan makanan berupa padi dan jagung yang ada di kebun-kebun mereka sebagai bekal bergerilya. Anggota-anggota laskar yang tidak bertugas sering datang membantu petani yang sedang mengerjakan kebun ladang atau sawahnya tanpa setahu Belanda. Dalam kesempatan itu maka rakyat memberikan bantuan berupa garam dan obat-obatan kepada pasukan gerilya itu.

Untuk kebutuhan markas di Tanoyan, maka di tempat ini didirikan dapur umum yang khusus untuk anggota gerilya yang bertugas di markas atau bagi pasukan yang datang ke sana dari sektor-sektor lainnya. Dapur umum itu menyediakan makanan atau bekal bagi pasukan yang ditugaskan mengadakan penghadangan-penghadangan mobil atau pasukan Belanda yang sedang mengadakan patroli di jalan-jalan. Pengurus dapur umum di markas Tanoyan itu ialah Hatidah Mokobombang dan Gilly Mokobombang. Setelah suksesnya perebutan kekuasaan di Minahasa pada tanggal 14 Februari 1946, maka tidak lama kemudian datanglah Residen B.W. Lopian dan Komandan Sersan F. Bisman ke Bolaang Mongondow. Sejak saat itu maka markas Tanoyan ditinggalkan dan pindah ke Kotamobagu. Tanoyan hanya dijadikan sebagai tempat latihan anggota PPI Laskar Banteng.

D. KEDATANGAN TENTARA SEKUTU DAN TENTARA NICA

Tanggal 14 Agustus 1945 Kaisar Hirohito di Tokyo menyatakan penyerahan tanpa syarat kepada Sekutu. Berita itu diteruskan dari Jakarta ke Minahasa tanggal 17 Agustus 1945 kepada markas tentara pendudukan di Tonsealama yang diterima oleh markonis-telegrafis A.S. Rombot. Tanggal 28 Agustus 1945 Jepang mengumumkan di semua tempat tawanan perang di Manado, Tomohon,

Airmadidi, bahwa keadaan sudah aman kembali dan para tawanan mulai saat itu sudah bebas pergi ke mana saja. Bagi yang memerlukan perawatan intensip dapat segera diberangkatkan ke Morotai (Maluku Utara) sebagai basis Sekutu (Wowor, 1977 : 31; Palit, 1978 : 93-94).

Awal September 1945, kepala pemerintahan pendudukan, Suciji Laksamana Muda K. Hamanaka, dipanggil menghadap ke Morotai untuk melaporkan diri kepada Sekutu. Tanggal 5 September ia berada kembali di Tondano (Minahasa) dan mengumumkan bahwa pemerintahan sipil yang sudah diserahkan kepada orang-orang Indonesia tanggal 21 Agustus 1945 diambil alihnya kembali, sedangkan pasukan yang dibentuknya (Pasukan PTA) dinyatakan bubar. Sejak saat itu maka konsinyasi pasukan Jepang dan penjagaan terhadap pos-pos dan markas-markas mereka diperkeras dan diperketat. Di Manado sudah ditempatkan oleh Sekutu sebuah delegasi kecil yang ditinggalkan oleh Letnan Kolonel Muir (Australia) untuk mengawasi ketentuan-ketentuan penyerahan Jepang terhadap Sekutu, termasuk inventarisasi perlengkapan perang dan soal tawanan perang (Wowor, 1977 : 25; Sompie, 1979 : 4)'

Kalau di Jakarta pasukan Sekutu mendarat pada tanggal 29 September 1945, maka di Minahasa mereka mendarat berangsur-angsur mulai 8 Oktober 1945 melalui pelabuhan Manado di bawah pimpinannya terdiri dari unsur tentara Australia dan tentara Belanda di mana turut membonceng aparat pemerintah sipil Belanda dalam jajaran (slagorde) SONICA. Pada tanggal 8 Oktober itu diadakan serah terima militer di kota Manado dari tangan Laksamana Muda K. Hamanaka selaku Panglima dari tentara pendudukan Jepang wilayah Sulawesi Utara/Tengah kepada Letnan Kolonel Muir mewakili Sekutu. Pemerintahan sipil untuk wilayah tersebut yang berkedudukan di Ibukota Tondano, diserahterimakan tanggal 10 Oktober 1945 oleh Suciji Laksamana Muda K. Hamanaka kepada Letnan Kolonel Coomans de Ruyter (Belanda) selaku pimpinan pemerintahan SONICA (Staff of Netherlands Indies Civil Administration). Akhir Oktober 1945 SONICA diganti dengan istilah CONICA (Command of Netherlands Indies Civil Administration) sampai medio 1946, sejak itu istilah CONICA diganti dengan Residen yang menandakan bahwa pemerintahan Hindia Belanda seperti sebelum perang dipulihkan kembali (Wowor, 1977 : 25; Watuseke, 1968 : 60).

Ketika Manado dihancurkan oleh serangan Sekutu (mulai 7 September 1944), pusat pemerintahan Jepang dipindahkan ke Tondano bulan itu juga. Dengan datangnya Sekutu dan CONICA maka mereka tidak mendirikan pusanya di Manado atau Tondano, melainkan di Tomohon. Di kota itu Sekutu mendirikan markasnya (Headquarters) dan pemerintahan SONICA mendirikan sebuah Hoofdkwartier. Pelucutan dan penawanan bagi tentara Jepang dilakukan oleh tentara Australia dibantu oleh tentara KNIL yang dibawa serta oleh SONICA. Usaha menjalankan kembali pemerintahan sipil dilakukan oleh orang-orang Belanda dipimpin SONICA, Letnan Kolonel Coomans de Ruyter. Pasukan Australia yang ditempatkan di Tomohon berjumlah 60 anggota dan menempati bekas gedung sekolah Cugakko, yakni SMP Gonzaga sekarang ini. Dapur umumnya menggunakan dapur susteran Walterus Tomohon di mana dipekerjakan wanita-wanita setempat sebagai petugas dapur umum itu (Wowor, 1977 : 33; Palit, 1978 : 95).

Ketika melihat bahwa Jepang sudah menyerah dan mulai melepaskan para tawanan mereka, maka timbullah rasa lega di kalangan masyarakat karena menganggap bahwa mereka sudah lepas dari kekejaman dan penindasan serta penderitaan yang hampir tak tertanggungkan selama diduduki Jepang. Dengan demikian maka kedatangan tentara Sekutu bagi rakyat dipandang sebagai lambang kemenangan atas kelaliman yang selama itu dilakukan oleh Jepang. Pasukan-pasukan Australia menunjukkan sikap yang ramah tamah terhadap penduduk, sedangkan orang-orang Jepang yang dilaporkan oleh rakyat sebagai terlalu kejam, segera dihukum tembak mati oleh tentara Australia itu. Bagi bekas pejabat-pejabat Jepang penyelesaian hukuman dilakukan melalui proses pengadilan militer.

Berbeda dengan pandangan masyarakat terhadap tentara Sekutu, maka terhadap aparaturnya SONICA dengan tentara KNIL-nya, rakyat mulai menunjukkan sikap yang curiga. Apalagi ketika dua hari setelah penyerahan pemerintahan sipil (12 Oktober 1945), SONICA mengeluarkan peraturan soal moneter di mana satu rupiah Jepang hanya dinilai dua setengah sen uang NICA yang sangat mengejutkan rakyat. Surat kabar "Pelita" diterbitkan mereka dan berfungsi sebagai terompet Belanda.

Dalam bidang pemerintahan sipil, Distrik Tonsea Utara dan Distrik Tonsea Selatan yang dibentuk pada masa Jepang, disatukan kembali menjadi Distrik Tonsea oleh NICA. Larangan untuk

mengibarkan bendera Merah Putih yang sudah dicabut oleh Jepang, diberlakukan kembali oleh NICA. Di bidang kemiliteran, NICA membentuk LOC (Leger Organisatie Centraal) yang tugasnya ialah mendaftarkan kembali semua orang yang pernah bertugas dalam dinas militer Belanda sebelum pendudukan Jepang, seperti bekas anggota Kortverbanders, Langeverbanders, Reserve Corps, milisi (pribumi dan Eropah), termasuk anggota pasukan polisi (veld en algemene politie). Dari yang datang mendaftarkan diri, dipilihlah di antara mereka yang dianggap masih tetap setia kepada Belanda lalu diaktifkan kembali sesuai bidang tugasnya dahulu (Wowor, 1977 : 25).

Di bidang teritorial NICA menghimpun kembali semua kekuatan lama yang pro Belanda, seperti para pamongpraja, guru dan pegawai lainnya, termasuk mereka yang pernah ditawan Jepang karena pernah membantu Belanda. Rehabilitasi bagi yang diterima oleh LOC dan para pamongpraja dan pegawai lainnya dilakukan secara menyolok sekali, antara lain dengan diberikannya jaminan sosial yang baik sekali. Diperhadapkan dengan kenyataan bahwa rakyat biasa pada umumnya masih sangat menderita akibat kekejaman Jepang, maka rehabilitasi tersebut menciptakan kontras di kalangan masyarakat. Hal ini semakin membentuk nasionalis yang berjuang demi kemerdekaan dan keadilan untuk seluruh rakyat. Tingkat perekonomian rakyat masih sangat rendah akibat musnahnya rumah-rumah dan sumber mata pencaharian, merajalelanya penyakit, ketiadaan pakaian dan sebagainya yang dialami sejak Jepang masih berkuasa (Wowor, 1977 : 25).

Di pihak lain kaum nasionalis yang menghendaki kemerdekaan melakukan tiga macam cara untuk melawan Belanda. Ada yang langsung masuk hutan untuk melancarkan gerilya dan ada pula yang diam-diam melakukan gerakan di bawah tanah di kota-kota dan desa-desa. PPI diaktifkan kembali dan memelopori perlawanan gerilya terhadap Belanda. BPNI dibentuk pada akhir Agustus 1945 dan bergerak di bawah tanah dengan pusatnya di kota Manado di mana diterbitkan dua surat kabar untuk mengimbangi surat kabar "Pelita". Di samping itu banyak pula kaum nasionalis yang tanpa setahu NICA berhasil menyusup ke dalam tubuh pemerintahan mereka. Ada yang masuk menjadi anggota pamongpraja dalam dinas sipil NICA dan ada pula yang mendaftarkan diri masuk anggota dinas militer NICA dengan KNIL-nya. Orang-orang asal daerah ini yang menjadi anggota tentara Sekutu melalui

keanggotaan mereka di dalam tentara NICA, ternyata memiliki jiwa patriotisme yang tidak kalah hebatnya dibandingkan dengan kaum nasionalis yang ada di kalangan masyarakat. Ketika mereka dihubungi oleh para tokoh nasionalis, dalam hal ini dari PPI, pada awal bulan Nopember 1945, dengan serta merta mereka menyediakan diri untuk berbakti bagi tanah air Indonesia, mengingkari sumpah setia mereka terhadap Belanda yang pada waktu itu masih termasuk dalam jajaran Sekutu.

Kedatangan tentara Sekutu dan tentara NICA di daerah Gorontalo dianggap oleh rakyat setempat sebagai usaha untuk menjajah kembali daerah itu yang sudah menyatakan diri lepas dari penjajahan dan merupakan bagian dari pemerintahan RI. Karena itu maka kedatangan tentara Sekutu dan tentara NICA harus ditantang, sebab tentulah maksud mereka ialah hendak menjajah, dan penjajahan bagaimanapun juga bentuknya, tetap akan menyebabkan penderitaan bagi seluruh rakyat (A. Tangahu, wawancara 9 September 1979).

Untuk itu maka Kepala Daerah Nani Wartabone dan Komandan Pasukan A.J. Usman, berusaha mengumpulkan senjata-senjata Jepang yang ditampung di Tabuliti (Suwawa). Tempat itu merupakan depot latihan para pemuda dalam bidang kemiliteran, di mana sudah terdapat 100 pemuda terlatih yang siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Di samping itu maka seluruh rakyat juga siap sedia dengan senjata apa saja yang dapat dipakai menghadapi musuh, seperti lembing, keris, bambu runcing, pedang, dan sebagainya. Para pemuda diorganisir sebagai pasukan penjaga kota dan desa. Menghadapi situasi seperti itu maka mereka yang masih pro Belanda diam-diam lari meninggalkan Gorontalo pergi ke Manado yang diketahuinya sudah diduduki tentara Sekutu dan tentara Belanda.

Pada tanggal 26 Oktober 1945 pasukan Sekutu di bawah pimpinan Kapten Mac Donald (mewakili Letnan Kolonel Muir) tiba dari Manado di pelabuhan Kwandang (pantai utara, sedang pelabuhan Gorontalo terletak di pantai selatan). Ia disertai oleh seorang Belanda bekas Controleur bernama Felix yang juga membawa sepasukan tentara NICA. Sehubungan dengan kedatangan tentara Sekutu dan tentara Belanda itu, maka para pemimpin dan seluruh rakyat, terutama pemuda, di Gorontalo bersikap waspada. Nani Wartabone dikawal oleh sepasukan laskar segera berangkat dari kota Gorontalo ke kota Kwandang. Ia pergi mene-

mui Kapten Mac Donald untuk menanyakan maksud kedatangan pasukan-pasukan itu. Mac Donald menjawab bahwa kedatangannya adalah untuk melucuti dan memulangkan tentara Jepang di daerah itu (Mimbar Indonesia No. 22, 3 Juni 1950). Karena melihat kesiapsiagaan rakyat, maka Kapten Mac Donald rupanya merasa takut untuk pergi ke kota Gorontalo. Sebaliknya, ia berangkat kembali ke Manado untuk menambah pasukan Sekutu.

Menghadapi perkembangan itu maka Dewan Nasional Gorontalo yang beranggotakan semua pamongpraja (Jogugu, Marsa-oleh, dan para tokoh masyarakat lainnya) segera mengadakan rapat. Dalam rapat itu dipertegas lagi keputusan untuk tetap setia kepada pemerintah RI. Pada tanggal 30 Oktober 1945 sepasukan tentara Sekutu di bawah pimpinan Mayor Wilson tiba di pelabuhan Gorontalo (tidak lagi di pelabuhan Kwandang di pantai utara). Ia mengatakan bahwa Sekutu bersedia membuka perundingan dengan pihak pemerintahan nasional yang berkuasa di Gorontalo.

Dengan demikian maka diadakanlah perundingan antara delegasi Sekutu pimpinan Mayor Wilson dan delegasi Indonesia pimpinan Nani Wartabone. Perundingan itu berlangsung di kota Gorontalo sebagai ibukota daerah itu. Perundingan tersebut menghasilkan persetujuan sebagai berikut :

1. Pihak Sekutu mengakui pemerintahan nasional dan menyerahkan pemerintahan kepada Nani Wartabone;
2. Pertanggungjawaban soal keamanan dan kemiliteran serta tugas melucuti tentara Jepang diserahkan kepada tentara Australia yang melakukannya atas nama Sekutu.

Namun rupanya hasil perundingan di atas tidak cukup memuaskan sebagian pemimpin daerah karena menganggap bahwa peranan dan kedudukan mereka terancam oleh diberlakukannya persetujuan tersebut. Mulailah timbul berbagai issue, cemoohan dan ejekan ke alamat Nani Wartabone selaku Kepala Daerah Gorontalo waktu itu. Hal ini ditimbulkan dan dipelopori oleh orang-orang atau golongan-golongan yang tidak senang dengan pemerintahan nasional pimpinan Nani Wartabone, dan lebih menyukai pemerintahan yang pro Belanda.

Sekitar jam 08.00 pagi tanggal 26 Nopember 1945, sebuah kapal perang Sekutu (Australia) berlabuh di pelabuhan Gorontalo. Kapal itu membawa aparaturnya NICA dipimpin oleh bekas Residen

bernama Korn dan bekas Controleur Felix (yang terakhir pernah datang di Kwandang bersama Kapten Mac Donald pada 26 Oktober 1945). Kedua orang Belanda itu membawa serta sepasukan Algemene Politie untuk menduduki kota Gorontalo (Kodam XIII/Merdeka, 1977 : 149). Untuk Mayor Wilson kedatangannya ini merupakan kali yang kedua (yang pertama kali tanggal 30 Oktober 1945).

Pada tanggal 30 Nopember 1945 Mayor Wilson mengundang para pemerintahan nasional untuk datang berunding di atas kapal perang Australia yang sedang berlabuh di pelabuhan Gorontalo. Yang datang memenuhi undangan berunding waktu itu ialah Nani Wartabone, H.U. Katili, A. Wartabone, A. Uno, dr. J. Sabu, Ismail Datau, Djafar Arbie, Idrak Jasin, Umar Basalama, Mohammad Ali, Abubakar Usman, H. Anis, dr. Wardoyo, dan Sun Bone. Dengan tidak merasa curiga semua mereka pergi ke kapal memenuhi undangan itu.

Dalam perundingan itu Mayor Wilson menawarkan penempatan pasukan Sekutu di daerah Gorontalo dengan alasan katanya untuk menjaga keamanan menghadapi kemungkinan-kemungkinan di mana sebagian tentara Jepang masih bersembunyi di hutan-hutan. Nani Wartabone menjawab bahwa semua tentara Jepang dan aparat sipilnya tidak berada lagi di daerah Gorontalo, sehingga ia menolak penempatan pasukan Sekutu, apalagi daerah Gorontalo dikatakannya sudah aman. Perundingan tanpa hasil itu ditutup, kemudian semua anggota delegasi Indonesia dipersilakan turun ke darat, kecuali Nani Wartabone yang dinyatakan sebagai tawanan. Hari itu juga ia dibawa dengan kapal perang oleh Mayor Wilson ke Manado, kemudian ditahan di Tomohon, dan dari sana dikirim ke penjara Cipinang dan baru dibebaskan setelah pengakuan kedaulatan (Desember 1949).

Mendengar bahwa Kepala Daerah Nani Wartabone telah ditangkap dan ditawan Sekutu, maka seluruh rakyat di Gorontalo merasa kecewa. Mereka mengirimkan pernyataan kepada Dewan Nasional agar segera bertindak. Tetapi Dewan Nasional mengatakan bahwa Nani Wartabone akan segera dilepaskan kembali dan karena itu dianjurkan supaya tidak melakukan tindakan apa-apa. Penangkapan Nani Wartabone 30 Nopember 1945 itu dilakukan oleh Sekutu atas tipu muslihat NICA dan merupakan suatu pengkhianatan dan pelanggaran aturan perundingan. Hal ini telah menyebabkan gagalnya persiapan-persiapan rakyat, terutama

pemuda-pemuda untuk melawan Belanda karena kehilangan pimpinan yang akan memberikan komando untuk bertindak.

Tanggal 1 Desember 1945 sekali lagi diadakan perundingan antara Mayor Wilson dengan pihak Dewan Nasional. Perundingan diadakan di darat, di gedung bekas rumah kediaman Asisten Residen - Gorontalo. Perundingan berjalan secara informal antara Ajuba Wartabone selaku Ketua Dewan Nasional dan delegasi Sekutu (dimana turut orang-orang Belanda) pimpinan Mayor Wilson. Hasil perundingan itu adalah sebagai berikut :

1. Ajuba Wartabone dilantik menjadi Kepala Daerah untuk daerah Gorontalo yang berstatus Onderafdeeling;
2. Bendera Merah Putih tidak boleh dikibarkan di semua tempat, kecuali di kantor-kantor pemerintahan atau pada waktu ada perayaan yang layak untuk itu;
3. Lambang kebangsaan sama sekali tidak boleh dipakai;
4. Semua persenjataan termasuk senjata api, amunisi, granat tangan, dan sebagainya, selambat-lambatnya tanggal 3 Desember 1945, sudah harus diserahkan kepada pemerintah yang akan diteruskan kepada Sekutu;
5. Keamanan dan ketentraman umum ditugaskan kepada tentara NICA, demikian pula tugas penawanan dan perlucutan senjata tentara Jepang yang masih berkeliaran (Sun Bone, 1972 : 10).

Keputusan-keputusan tersebut di atas diumumkan pada hari itu juga di lapangan kota Gorontalo di hadapan seluruh rakyat yang sedang menunggu-nunggu di sana. Hasil perundingan di atas nampaknya sangat mengecewakan hati rakyat dan para pemuda yang sedang berjuang waktu itu. Menurut pendapat mereka Dewan Nasional kurang jujur terhadap sumpah dan janjinya, yaitu akan tetap setia kepada pemerintah RI sesuai Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Lain halnya pula dengan di daerah Bolaang Mongondow, di mana sebelum tentara Sekutu dan tentara NICA datang, pasukan polisi Jepang yang terdiri dari orang-orang Indonesia segera menyatakan diri sebagai polisi Belanda. Hal ini terjadi sekitar bulan September 1945. PPI Laskar Rakyat yang terbentuk 17 September 1945 segera menyerang polisi Jepang yang sudah membelot menjadi polisi Belanda itu, namun sayang sekali gagal karena persenjataan yang kurang dan juga karena kurang terlatih dalam pertempuran.

Karena menyadari kekurangan-kekurangan di atas maka PPI Laskar Rakyat memusatkan latihan kemiliteran di desa Molinow, tidak jauh dari Kotamobagu sebagai tempat kedudukan polisi Belanda. Tanggal 27 September 1945, Ketua Komisariat PPI Bolaang Mongondow J.F.K. Damopolii (yang juga sementara menjabat selaku Fukugunco atau Camat Lolayan) ditangkap oleh sekelompok polisi rahasia yang datang dari Manado, pimpinan J. van Boychen. Sejak saat itu maka isterinya Nurtina Gonibala memegang pimpinan darurat atas Komisariat PPI dan pimpinan Laskar Rakyat Bolaang Mongondow.

Di bawah pimpinannya latihan-latihan pemuda yang dilakukan oleh para pelatih PPI Laskar Rakyat tetap dilangsungkan di pusat latihan desa Molinow. Walaupun pusat latihan itu hanya dua kilometer letaknya dengan Kotamobagu sebagai tempat kedudukan polisi Belanda yang merangkap tugas untuk menjalankan pemerintahan sementara atas daerah itu, namun mereka tidak menghiraukannya dan latihan tetap dilangsungkan seperti biasa. Direncanakan bahwa medio Nopember 1945, selesai latihan terakhir, akan dilanjutkan pada malamnya dengan penyerangan terhadap polisi Belanda untuk mendirikan pemerintahan RI setempat.

Rupanya rencana PPI Laskar Rakyat dapat diketahui oleh mata-mata atau polisi Belanda di sana. Hari latihan terakhir dilakukan medio Nopember 1945. Pada hari itu sejak jam 07.00 pagi, telah berkumpul sekitar 400 pemuda yang akan diikuti serta dalam penyerangan dan perebutan kekuasaan. Sekitar jam 10.00, datanglah satu regu polisi Belanda yang langsung menyerbu dan menembaki markas PPI Laskar Rakyat di sekitar lapangan tempat latihan diadakan. Segera terjadi tembak menembak di mana seorang anggota polisi bernama Kambey tertembak dan pahunya luka. Di pihak pemuda tidak ada yang jatuh korban jiwa atau luka-luka. Serangan polisi dilanjutkan terhadap para pemuda yang sedang mengadakan latihan di lapangan desa itu. Akibat serangan polisi itu, maka para anggota PPI Laskar Rakyat mengundurkan diri ke luar desa untuk menghindarkan jatuhnya korban di kalangan rakyat.

Selesai mengadakan serangan, pasukan polisi juga mengundurkan diri ke Kotamobagu. Komandan Polisi Herry Harun Manoppo mengirimkan berita dan meminta bantuan pasukan dari Manado. Atas permintaannya maka datanglah satu kompi pasukan KNIL

itu datanglah Controleur Langendon yang diangkat oleh Residen Coomans de Ruyter untuk menjalankan pemerintahan Onderafdeeling Bolaang Mongondow atas nama NICA.

Controleur Langendon langsung menjalankan pemerintahan NICA di Bolaang Mongondow dengan pusatnya di Kotamobagu. Ia segera memerintahkan Komandan Polisi Herry Harun Manoppo dan Kapten Latuperissa untuk mengerahkan pasukan masing-masing dalam penangkapan yang dilakukan oleh pasukan polisi dan tentara NICA itu maka beberapa pimpinan inti PPI Laskar Rakyat berhasil ditangkap (lihat kembali halaman 96-97, di depan). PPI Laskar Rakyat mengundurkan diri ke hutan-hutan dan mendirikan markasnya di perkebunan Tanoyan. Dari rentetan kejadian di atas jelas bahwa rakyat daerah Bolaang Mongondow bersikap menolak kehadiran tentara NICA di daerahnya, sedangkan tentara Sekutu lainnya tidak ditempatkan di daerah ini.

Di daerah Sangir Talaud, tentara Sekutu yang datang dari Manado dipimpin oleh Letnan Ponto sebagai salah seorang putera daerah itu. Letnan Ponto ini juga membawahi tentara NICA yang datang bersama tentara Sekutu. Para anak buah pasukan pimpinan Letnan Ponto itu kebanyakan terdiri dari putera daerah Sangir Talaud yang dahulunya dibawa oleh Jepang ke Morotai sebagai romusya. Di Morotai mereka lari dari tugasnya dan membentuk "Pasukan Gerilya Morotai" untuk melawan Jepang. Ketika Sekutu menguasai Morotai, mereka dialihkan menjadi tentara Sekutu, dan setelah Jepang menyerah mereka ditugaskan ke Minahasa sebagai pasukan Sekutu. Dari Minahasa mereka ditugaskan kembali ke daerah Sangir Talaud untuk melaksanakan tugas-tugas Sekutu di sini.

Karena tentara Sekutu dan tentara NICA terdiri dari para putera daerah sendiri, maka rakyat Sangir Talaud tidak menunjukkan sikap yang membenci mereka karena sama-sama pernah mengalami kekejaman di bawah telapak kaki pendudukan Jepang sebelumnya. Tentara Sekutu dan tentara NICA yang datang mendarat menurunkan dan membagi-bagikan makanan, pakaian dan obat-obatan untuk membantu rakyat yang serba kekurangan, hal mana tidak pernah rakyat alami selama masa pendudukan Jepang. Semua sekolah dipersiapkan untuk dibuka kembali, walaupun baru dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 1946 di Tahuna. Namun semua hal yang dilakukan oleh tentara Sekutu

dan tentara NICA berhasil menimbulkan sikap yang tidak menentang di kalangan rakyat (Manatar, wawancara 16 September 1979; Binilang, wawancara 20 September 1979; Yuda, wawancara 15 September 1979).

AKIBAT-AKIBATNYA

Untuk Keresidenan Manado akibat dari pada kedatangan tentara Sekutu dan tentara NICA ialah dilikwidasiannya pemerintahan sipil pimpinan Residen E.H.W. Pelengkahu yang memerintah sejak diserahkannya pemerintahan itu oleh Jepang, 21 Agustus 1945. Dengan tidak mengakui E.H.W. Pelengkahu sebagai Residen maka NICA mengangkat Letnan Kolonel Coomans de Ruyter selaku SONICA, kemudian menjadi CONICA dan sejak pertengahan tahun 1946 jabatannya menjadi Residen seperti sebelum perang. Upacara penyerahan militer diterima kepada Letnan Kolonel Muir 8 Oktober 1945 dan 10 Oktober 1945 dilangsungkan serah terima pemerintahan sipil kepada SONICA Coomans de Ruyter.

Tanggal 21 Oktober 1945, SONICA Coomans de Ruyter mengeluarkan peraturan moneter di mana uang Jepang dinilai hanya seperempat puluh uang NICA yang mulai diberlakukan waktu itu. Diberlakukannya peraturan moneter di atas sangat mengejutkan rakyat dan mengacaukan perekonomian yang sama sekali belum pulih setelah Jepang menyerah. Hal ini mengakibatkan kesengsaraan rakyat semakin meningkat. Di pihak lain tanpa menghiraukan kesengsaraan rakyat banyak, pemerintah NICA memberikan jaminan sosial yang sangat baik kepada aparaturnya sendiri, baik dalam hal pangan, sandang dan sebagainya, di samping memperoleh penghargaan dan kedudukan yang baik bagi yang menyatakan diri setia kepada Belanda.

Menghadapi kenyataan ini maka sebagai akibatnya, para tokoh nasionalis mulai bergerak baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Para pemuda mengaktifkan kembali PPI yang pernah dibentuk Jepang 15 Pebruari 1945 yang kali ini mendirikan markas besarnya di Tondano. Di Manado para pemuda mendirikan BPNI akhir Agustus 1945. Dengan dibubarkannya Pasukan PTA 6 September 1945, maka PPI dan BPNI menampung para anggotanya dan melanjutkan perjuangan melawan Belanda bersama-sama para pemuda lainnya. Para pemuda yang pernah mendapat latihan militer dari Jepang masuk menjadi anggota

dinas militer dan sipil NICA, tanpa setahu Belanda bahwa mereka punya hubungan yang erat sekali dengan kaum nasionalis di daerah ini.

Dengan mulai mantapnya pemerintahan NICA maka Belanda mulai menjalankan kembali diskriminasi, khususnya bagi anggota militernya berbangsa Indonesia yang jaminan sosialnya dibedakan dengan yang berkebangsaan Belanda. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para anggota KNIL, namun mereka belum dapat bertindak karena sedang mencari dukungan dari rakyat. Ketika para anggota KNIL itu dihubungi oleh pimpinan pemuda nasionalis dari PPI maka disusunlah rencana untuk memberontak terhadap Belanda. Keyakinan itu diperteguh lagi ketika orang pemuda yang berhasil menyusup ke dalam dinas militer NICA (Kopral A.S. Rombot dan Kopral W.F. Sumanti) menghubungi Sersan Ch.Ch. Taulu tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan usaha untuk merebut kekuasaan NICA waktu itu (Wowor, 1977 : 33).

Di daerah Gorontalo kedatangan tentara Sekutu dan tentara Belanda serta hasil keputusan perundingan antara Delegasi Nasional dengan mereka, mengakibatkan kekecewaan di kalangan rakyat di sana. Sebagai tindak lanjutnya maka mulai 1 Desember 1945 daerah Gorontalo diperintah oleh Belanda yang dijalankan oleh CONICA dipimpin oleh Felix selaku Asisten Residen, sedangkan Ajuba Wartabone yang menggantikan Nani Wartabone (yang sudah ditangkap) hanya sebagai Controleur dan landrechter saja.

Dengan demikian maka roda pemerintahan sipil dijalankan kembali seperti sebelum perang dunia II. Pasukan polisi dan tentara NICA ditugaskan masuk keluar kampung untuk memata-matai rakyat yang ingin melawan pemerintahan NICA. Yang dicurigai ditangkap, ada yang langsung dianiaya dan ada pula yang dijejloskan ke dalam penjara. Ada yang dianiaya dan disuruh memakan sobekan-sobekan bendera Merah Putih. Walaupun tindakan polisi dan tentara NICA itu sangat kejam terhadap rakyat, namun semangat juang mereka tidak dapat dipatahkan begitu saja. Rakyat yang menginginkan kemerdekaan sangat besar jumlahnya dan sama sekali tidak dapat dipengaruhi untuk memihak Belanda ataupun berkompromi.

Rakyat di daerah Gorontalo waktu itu tetap yakin bahwa kemerdekaan adalah haknya dan suatu waktu pasti akan terwujud

walaupun tanpa pimpinan sekalipun. Hal ini dapat dilihat ketika suatu waktu para pemuda di bawah pimpinan Junus menyerbu tangsi NICA di Gorontalo. Namun rencana penyerbuan rupanya sudah bocor ke tangan NICA oleh mata-mata yang banyak disebarkan di desa-desa. Dalam penyerbuan tersebut seorang pemuda bernama Haruna gugur terkena tembakan Belanda. Sejak saat itu maka penjagaan di setiap kompleks polisi dan militer NICA semakin diperkuat dengan mempergunakan senjata-senjata yang dapat dikatakan jauh lebih modern yang sama sekali belum dimiliki oleh para pejuang setempat.

Akibat serangan polisi dan tentara NICA terhadap kedudukan-kedudukan PPI Laskar Rakyat di Bolaang Mongondow maka mereka mengundurkan diri ke hutan-hutan dan mendirikan markasnya di perkebunan Tanoyan. Dari markas itu dilancarkanlah serangan-serangan gerilya terhadap patroli-patroli yang dilakukan oleh polisi dan tentara NICA di daerah itu. Tempat-tempat penghadangan gerilya yakni jalan-jalan antara Inobonto-Kotamobagu, Kotamobagu-Molibagu, serta jalan-jalan di pantai utara, mulai Inobonto, Bintauna, Bolaang Itang sampai ke Boroko di Kaidipang Besar.

Pasukan-pasukan dari PPI Laskar Rakyat memutuskan jaringan kawat telepon di seluruh daerah Bolaang Mongondow dan obyek-obyek vital dan militer tidak luput dari serangan granat tangan oleh anggota-anggotanya. Hal ini dilakukan atas instruksi Nurtina Gonibala sebelum ia ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Manado. Walaupun kehilangan sejumlah pemimpinnya, namun PPI Laskar Rakyat tetap meneruskan perjuangan gerilya melawan kekuasaan NICA di daerah Bolaang Mongondow sampai Pebruari 1946. Pada waktu itu kekuasaan berhasil direbut oleh para pejuang kita di Manado sehingga anggota-anggota gerilya PPI Laskar Rakyat turun dari hutan-hutan lalu menduduki seluruh daerah Bolaang Mongondow dan membantu mendirikan pemerintahan RI untuk daerah itu.

IV. PERJUANGAN DI DAERAH

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, kota Tomohon merupakan ibukota sementara untuk Keresidenan Manado berhubung kota Manado sedang mengalami kerusakan berat akibat pemboman Sekutu pada waktu itu. Kepala pemerintahan NICA, Letnan Kolonel Coomans de Ruyter, dan Troepencommandant KNIL, Letnan Kolonel de Vries, serta Markas Tentara Sekutu pimpinan Letnan Kolonel Muir, berkedudukan di Tomohon. Markas tentara KNIL sekompleks dengan markas tentara Sekutu karena KNIL sekaligus merupakan unsur tentara Sekutu waktu itu. Dinas telekomunikasi militer berpusat di kota ini di mana seorang pemuda nasionalis, A.S. Rombot, berhasil menyusup dan dipangkatkan Kopral berhubung pengalamannya bekerja dalam dinas itu sewaktu Jepang berkuasa. Kantor pemerintahan NICA letaknya terpisah dengan markas tentara Sekutu dan KNIL, yaitu di Kakaskasen, Tomohon. Tomohon adalah pusat kegiatan Zending (GMIM) dan Misi (Gereja RK) dan sekaligus sebagai pusat urusan persekolahan untuk kedua badan kegerejaan itu.

Para pemimpin pemuda nasionalis di Tomohon, antara lain Sam Manangka, Hasan Usman, Gerrit Wowor, Karel Wondal, Gustaaf Warouw dan M. Rumajar, mengadakan kegiatan untuk mengorganisir para pemuda di kota itu untuk berjuang melawan NICA. Seorang tokoh pemuda nasionalis dari Sulawesi Tengah (Luwuk Banggai) bernama F.H.L.W. Mondong dipenjarakan di kota ini, demikian pula dengan Nani Wartabone dari Gorontalo (Wowor, 1977 : 27-28).

Di Manado ada pemusatan tentara KNIL dan Polisi Belanda. Tentara Sekutu dari unsur tentara Australia mulanya berkedudukan di Tomohon berkekuatan 60 anggota, tetapi kemudian dipindahkan ke Manado dan dalam bulan Desember 1945 dipindahkan ke lain tempat. Asrama tentara yang terkenal dengan nama "Tangsi Hitam" dan "Tangsi Putih" berada di bukit Teling di kota Manado. Komandan Garnizun Manado ialah Kapten (KNIL) Blom. Juga terdapat markas NEFIS, PID, CPM, serta Mahkamah Militer. Unsur-unsur pemuda nasionalis yang berhasil menyusup ke kalangan tentara dan polisi, aktif membina persatuan untuk kepentingan perjuangan.

Di kota ini berpusat organisasi pemuda nasionalis, yaitu BPNI

di bawah pimpinan John Rahasia, Chris D. Pontoh, dan Mohamad Canon, markasnya berada di desa Sindulang (Manado Utara), dan dari tempat ini mereka mengorganisir para pemuda nasionalis di kota Manado untuk melawan Belanda. BPNI menerbitkan dua surat kabar, yakni "Catapult" berbahasa Belanda dan "Suara Indonesia Muda" berbahasa Indonesia. Kedua surat kabar itu hanya distensil dan sering mempergunakan fasilitas perkantoran NICA tanpa diketahui mereka (Wowor, 1977 : 28, 30).

Kota Tondano pernah menjadi ibukota Keresidenan Manado sejak September 1944 sampai penyerahan Jepang. Panglima dari tentara Jepang merangkap Suciji, Laksamana Muda K. Hamanaka, yang pernah berkedudukan di kota itu telah berada dalam tawanan tentara Sekutu di Morotai untuk diadili. Pemerintah NICA tidak menempatkan pasukan KNIL, kecuali satu detasemen polisi Belanda, di Tondano.

Para pemuda nasionalis di Tondano sekitar bulan Oktober 1945 mengaktifkan kembali PPI yang bermarkas besar di sini. Selain itu mereka juga aktif menjadi anggota BPNI yang berpusat di Manado. Para tokoh nasionalis setempat antaranya A.H.A.A. Kawilarang, Engel A. Parengkuan, J. Kumaunang, E. Matulandi, J. Wantalangi, Wim Pangalila, H.M.L. Legoh, Rachmat Pulukadang dan lain-lain. Sebagian di antara mereka aktif bergerak di bidang pendidikan untuk mendidik kader bagi perjuangan melawan Belanda, yaitu dengan mendirikan Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan (SMRK) kira-kira setingkat dengan SMP sekarang ini (Legoh, 1973 : 18; Wowor, 1977 : 28-29).

Di kota Girian, di pantai timur Minahasa, Sekutu mendirikan kamp tawanan untuk menampung 8.000 tawanan perang Jepang. Semua senjata mereka dilucuti tanggal 13 Oktober 1945 oleh tentara Australia lalu ditenggelamkan di teluk Manado. Yang menjaga kamp tawanan itu ialah satu kompi KNIL pimpinan Letnan van Emden. Para pemimpin pemuda nasionalis di Girian dan sekitarnya antara lain Nona Gusta Ngantung, Victor Mandey, Emor Sumampouw, Butje Mamahit dan lain-lain (Wowor, 1977 : 29; Kempen, 1953 : 216).

BPNI dan PPI bekerja erat sekali bahu membahu menyusun kekuatan untuk melawan Belanda, disokong oleh sejumlah anggota militer berkebangsaan Indonesia yang berdinastikan dalam tentara KNIL dan pamongpraja tanpa setahu Belanda waktu itu. Mereka merencanakan mengadakan pemberontakan pada tanggal 10

Desember 1945, tetapi sayang sekali membangkitkan kecurigaan NICA sehingga gerakan itu dibatalkan. Namun NICA tetap mencari alasan kuat untuk menangkap para pemimpin pemuda di Manado.

Tanggal 15 Desember 1945 para pemimpin BPNI-PPI mengadakan rapat rahasia di desa Sindulang. Sesudahnya, sementara meninggalkan tempat rapat itu, dua pemuda Ch. D. Pontoh dan Sam Manangka, diserang oleh segerombolan pemuda yang bersenjatakan alat-alat tajam dan alat pemukul dari besi. Serentak para pemuda PPI-BPNI datang membantu. Seperti sudah diatur lebih dahulu, tidak lama kemudian lewatlah sebuah kendaraan patroli NEFIS yang mulai melakukan penangkapan terhadap para pemuda yang membela diri itu. Penangkapan itu mengawali serentetan penangkapan yang dilakukan Belanda terhadap setiap pemuda nasionalis yang dicurigai di kota Manado dan sekitarnya. Hampir semua pemimpin pemuda ditangkap dan dua surat kabar BPNI diberangus, sedangkan John Rahasia dan Ch.D. Pontoh diajukan ke pengadilan dengan tuduhan "mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerusuhan" (Wowor, 1977 : 30-31; Legoh, 1973 : 15).

Sementara itu di kota Tondano para tokoh nasionalis membentuk "Yayasan Pendidikan Kebangsaan" atas prakarsa Engel A. Parengkuan yang dimulainya sejak bulan Nopember 1945, Ketua Yayasan itu ialah A.H.A.A. Kawilarang, seorang pensiunan konsulen pertanian yang berjiwa nasionalis. Yayasan ini mendirikan "Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan" (SMRK) dengan Direktur Engel A. Parengkuan, sekaligus sebagai pengajarnya. Para pengajar lain antaranya Ny. Senduk-Kaligis, Andi Masengi, E.V. Kaseger, Ny. A. Muntu Modjo, Ny. Adam, Hidajat, E.D. Johannes SH, E. Katoppo dan lain-lain. Guru-gurunya harus berijazah Hoofd dan Hulp-Akte sesuai persyaratan yang diberikan oleh Inspeksi Pengajaran NICA yang berkedudukan di Tomohon pada waktu itu.

Gedung sekolah dari SMRK sementara menggunakan bekas sekolah MULO sebelum perang. SMRK ini resmi berdiri tanggal 6 Januari 1946 di Tondano. Dalam upacara pembukaannya dinaikkan bendera Merah Putih, diiringi lagu Indonesia Raya yang diikuti 200 siswa dan undangan dari segala golongan dan lapisan masyarakat yang menghadiri upacara itu. Walaupun Belanda sama sekali tidak setuju dengan pengibaran bendera Merah Putih dan

menyanyikan lagu Indonesia Raya, namun para pendirinya tidak menghiraukannya. Malahan pada setiap hari Senin diadakan upacara bendera di halaman sekolah di mana selalu dikibarkan bendera Merah Putih dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti oleh wejangan-wejangan direktur untuk memantapkan semangat kebangsaan di kalangan para siswanya. Suatu ketika setelah resmi berdiri, para siswa SMRK itu berpawai dari Tondano ke Tomohon sambil melambai-lambaikan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan melewati Markas Besar KNIL dan Kantor CONICA di mana Coomans de Ruyter berada. Hal ini sangat mengejutkan pihak Belanda namun mereka tidak bertindak apa-apa terhadap para siswa dan guru SMRK itu (Wowor, 1977 : 35).

Penangkapan yang dilakukan NICA di Manado dan sekitarnya dapat melumpuhkan kegiatan BPNI-PPI untuk sementara saja. Karena tidak mempunyai cukup bukti, mereka yang ditangkap sejak 15 Desember 1945 mulai dilepaskan lagi sehingga dapat aktif lagi bergiat melalui BPNI-PPI. John Rahasia dan rekannya Ch.D. Pontoh walaupun keduanya sudah dilepaskan dari tahanan NICA tetap akan diajukan ke pengadilan karena tuduhan yang ditimpakan kepada mereka.

Commite van Initiatief

Belanda menyadari bahwa walaupun BPNI-PPI untuk sementara waktu dapat dilumpuhkan, namun mereka tidak mungkin mematikan sama sekali semangat rakyat, terutama para pemuda untuk mengejar cita-cita kemerdekaan diri. Oleh karena itu Belanda berganti siasat dengan mendekati beberapa tokoh nasionalis yang lebih moderat. Sebagai misalnya maka terbentuklah organisasi yang dinamakan "Commite van Initiatief" pada akhir Desember 1945. Para tokoh nasionalis yang duduk dalam badan itu antaranya D.A.Th. Gerungan, E. Katoppo. R.C.L. Lasut, B.W. Lopian, A.B.H. Waworuntu, dan lain-lain. Komite ini diharapkan Belanda dapat menjadi tempat menyalurkan inspirasi dan aspirasi para pemuda radikal yang akan dipimpin oleh tokoh-tokoh moderat di atas. Kegiatan komite ini sejak pembentukannya tidak pernah diumumkan, bahkan maksud didirikannya juga belum dilaksanakan. Hal ini nanti terjadi pada bulan Januari 1945 (Wowor, 1977 : 36).

Para pemuda nasionalis tidak menghiraukan adanya Commite

van Initiatief bentukan Belanda itu. Sebelum perang di Minahasa setiap 10 Januari diadakan upacara peringatan persahabatan Nederland—Minahasa yang berlaku sejak 10 Januari 1679, saat ditandatanganinya piagam persahabatan antara para pemimpin rakyat Minahasa waktu itu dengan Belanda. Para pemuda merencanakan menghalang-halangi upacara peringatan 10 Januari 1946 dilanjutkan dengan perebutan kekuasaan dari tangan NICA. Upacara itu selalu dilakukan di depan tugu yang terletak di suatu lapangan kecil di tengah-tengah kota Manado yang dinamakan "Tugu Persahabatan Nederland — Minahasa" yang di masa pendudukan Jepang diruntuhkan tetapi dibangun kembali ketika NICA berkuasa. Upacara itu dilakukan berdasarkan semboyan usang "de innige lotsverbondenheid tussen Minahasa en Nederland" yang sangat dibenci pemuda.

Untuk melaksanakan aksi itu maka para pemuda mengadakan rapat rahasia berturut-turut di mana rapat terakhir diadakan 7 Januari 1946 di desa Sindulang di kebun milik pemuda Maurits Mamansage. Rapat rahasia itu menghasilkan suatu Ikrar Pemuda yang pada pokoknya menetapkan bahwa aksi perlawanan terbuka terhadap kekuasaan Belanda harus diadakan 10 Januari 1946 pada saat upacara peringatan di atas. Dibentuklah regu-regu penyerbu yang akan bergerak di bawah lindungan para pemuda yang menyudup ke dalam KNIL yang akan diikutsertakan dalam upacara itu. John Rahasia akan memakai pakaian seragam putih dan bersama adiknya akan mengibarkan bendera Merah Putih di tiang bendera yang sedianya akan dikibarkan bendera Belanda. Jika ia ditembak dan tewas maka bajunya yang berlumuran darah yang berubah menjadi warna Merah Putih akan menjadi lambang perjuangan bagi para pemuda selanjutnya (Wowor, 1977 : 37; Legoh, 1973 : 16).

Karena sifat kerahasiaannya maka hanya beberapa cabang BPNI—PPI yang diberitahukan. Gerzon W. Bawengan diutus ke Airmadidi, Willy Pantouw diutus ke Tondano, dan Sam Manangka ke Tomohon untuk memberitahu dan mempersiapkan para pemuda di sana. Namun rencana mereka bocor juga ke tangan NICA sehingga sejak 7 — 9 Januari 1946, Belanda melakukan penangkapan yang meluas dari Manado ke seluruh Minahasa. Pemuda Reyers Kansil tertembak dan luka parah, sementara para pemuda lain diperlakukan sangat kejam. Penjara-penjara di Manado, Tomohon dan Tondano penuh sesak dengan para pemuda BPNI—

PPI, antaranya John Rahasia, Ch.D. Pontoh, M. Canon, Jerrit Kansil, Maurits Mamansage, Wim Pangalila, Sukandar, Ben Wowor, Usman Pulukadang, Louis Paat, Jeppy Polii dan lain-lain. Semua anggota KNIL yang dicurigai dikonsinyir di Asrama Teling agar mereka tidak turut mendukung gerakan pemuda nasionalis itu. Dengan ditangkanya para pemuda BPNI dan PPI di atas, maka barulah upacara peringatan di atas dapat dilaksanakan Belanda, walaupun dengan suasana yang muram (Wowor, 1977 : 37; Legoh, 1973 : 16).

Setelah peristiwa di atas, maka Belanda mengaktifkan kembali Committee van Initiatief. Untuk meyakinkan pemuda bahwa Belanda bermaksud baik dengan komite itu, maka para tokoh yang ditangkap akibat peristiwa 15 Desember 1945 dan 7 – 9 Januari 1946 mulai dilepaskan satu persatu. Cabang-cabang Committee van Initiatief dibentuk, mulai tingkat distrik, onder-distrik, sampai ke desa-desa di seluruh Minahasa. Committee van Initiatief ini tidak beranggotakan pemuda perorangan tetapi organisasi-organisasi pemuda, seperti pemuda Kristen, pemuda Islam, pemuda Katolik, dan pemuda Nasionalis dengan pengurus pusatnya di Tomohon (Wowor, 1977 : 40–41).

Pembentukan komite ini sampai ke tingkat desa sangat dipercepat berhubung Belanda merencanakan mengadakan Kongres Pemuda pada tanggal 9 Pebruari 1946. Mengetahui hal ini maka para pemuda dalam BPNI–PPI bermaksud menggunakan kesempatan itu untuk menggunakan forum yang diakui Belanda sebagai tempat menyampaikan suara hati pemuda nasionalis yang menginginkan kemerdekaan penuh. Kegiatan mereka dipusatkan di Tondano dengan dibentuknya organisasi Persatuan Indonesia Muda (PIM) yang akan ikut dalam kongres tersebut. Mulanya Kepala Distrik Tondano tidak setuju adanya PIM karena ia ditugaskan membentuk Cabang Committee van Initiatif di Tondano sebagai wadah pemuda yang akan mengirimkan delegasinya ke Kongres. Namun karena desakan dan tekanan pemuda maka akhirnya ia merestui adanya PIM. Hal ini merupakan kemenangan bagi BPNI–PPI, sebab melalui PIM yang diakui itu, mereka dapat berperan dalam kongres tersebut.

PIM dibentuk 19 Januari 1946 sebagai taktik bagi pemuda BPNI–PPI agar dapat ikut dalam kongres. Dalam rapat pembentukannya dibacakan surat dari DR.G.S.S.J. Ratulangi, yang sementara menjabat sebagai Gubernur Sulawesi yang diangkat

pemerintah RI. Dengan adanya surat tersebut maka semangat pemuda semakin dipertebal untuk berjuang bagi kemerdekaan. Pimpinan PIM terdiri dari beberapa pemuda di antaranya Wim Pangalila, Rachmat Pulukadang, Ben Wowor, Chris D. Pontoh, Nona Wuli Supit, dan sebagainya. Sebagai penasehatnya ialah E.D. Johannes SH, seorang yuris dan nasionalis yang sebelumnya telah menyusun anggaran dasar PIM yang dapat diterima oleh NICA.

Dengan demikian maka Belanda mengadakan kongres pemuda pada tanggal 9 Februari 1946 di desa Kinilow, dekat kota Tomohon. Ketua Kongres Pemuda waktu itu ialah Ds.W.J. Rumambi. Ketika kongres sedang berjalan, pimpinan kongres mengajukan suatu konsep yakni menyatukan semua organisasi pemuda yang ada dengan menghilangkan segala identitas dan perbedaan di antara organisasi-organisasi itu, yang segera ditolak dengan keras oleh delegasi PIM. Bayangan kegagalan sebenarnya sudah terlihat sejak kongres dimulai, yakni ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, sebagian menyanyikan refrein "Indonees Indonees mulya mulya" tetapi sebagian besar menyanyikan "Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka" di mana kata "merdeka" diucapkan dengan suara penuh semangat dan gegap gempita. Pirapinan kongres mulai saat itu sampai berakhirnya kongres tidak mampu menguasai suasana dan dengan demikian maksud Belanda digagalkan oleh para pemuda nasionalis (Wowor, 1977 : 43).

Perebutan kekuasaan oleh beberapa anggota KNIL dan Pemuda

Sementara Belanda bergiat mengsucceskan Kongres Pemuda di atas, para pejuang dalam KNIL serta tokoh-tokoh pemuda dalam BPNI-PPI mengadakan kegiatan yang luar biasa. Kegiatan mereka kurang diperhatikan sebab pada waktu itu perhatian Belanda sedang ditujukan ke Kinilow di mana Kongres dilangsungkan. Ikut sertanya sebagian tokoh BPNI-PPI melalui delegasi PIM dalam kongres itu berhasil mengelabui mata Belanda sehingga kegiatan yang diadakan di Manado kurang diperhatikan oleh mereka.

Setelah unsur-unsur pemuda nasionalis berkali-kali gagal merebut kekuasaan NICA maka tampillah unsur-unsur militer yang berjiwa nasionalis yang sementara berada dalam dinas KNIL di Manado. Kedua unsur nasionalis itu mengadakan rapat tanggal 7 Februari 1946 di rumah kediaman Hukum Besar B.W. Lapien di

desa Singkil (Manado Utara). Rapat berikutnya diadakan tanggal 9 Pebruari 1946 di rumah Sersan KNIL S.D. Wuisan di desa Titiwungen (Manado Selatan) di mana di depan rumah diadakan acara hari ulang tahun, sedangkan di bagian belakang dilangsungkan rapat rahasia untuk mengelabui mata NICA. Rangkaian rapat rahasia dari kedua unsur di atas langsung dipimpin oleh Sersan Ch.Ch. Taulu dibantu oleh Sersan S.D. Wuisan (Legoh, 1973 : 17; Kempen, 1953 : 235). Hasil lengkap rangkaian rapat kedua unsur itu adalah sebagai berikut (Kaeng, 1971 : 29) :

1. Kode/isyarat yang digunakan :
 - a. Siang hari, dengan mengacungkan dua jari ke atas yang melambangkan bendera Merah Putih;
 - b. Malam hari, menegur dengan angka "dua" yang harus dijawab "delapan", maksudnya penambahan dua angka genap harus berjumlah sepuluh di mana kode teguran ini khusus untuk hari pertama gerakan;
 - c. Malam hari bilamana perlu, kode/isyarat dapat dirobah dengan "empat", dijawab "enam"; yang penting jumlahnya sepuluh;
2. Mengirimkan berita ke semua markas pemuda sampai ke sektor-sektor mengenai saat pelaksanaan gerakan;
3. Menetapkan tanggal 13 Pebruari 1946 lewat tengah malam, tepatnya jam 03.00 14 Pebruari 1946 sebagai saat pelaksanaan gerakan;
4. Apabila salah satu pimpinan tertangkap, maka gerakan dapat dipercepat jam pelaksanaannya;
5. Aksi harus dijalankan sangat rahasia dan sedapat mungkin tanpa menimbulkan keributan;
6. Menyergap rumah jaga Teling I dan Teling II dan diteruskan merebut gudang senjata dan amunisi, perlengkapan pakaian dan makanan;
7. Menangkap semua orang Belanda, Indo Belanda dan semua orang Indonesia yang dicurigai, serta menguasai semua pos militer dan polisi;
8. Menangkap semua orang yang dicurigai yang tinggal di luar asrama militer dengan menyiapkan terlebih dahulu daftar nama dan alamat mereka;
9. Menangkap semua orang Belanda yang berstatus partikular/sipil di seluruh wilayah Sulawesi Utara;
10. Diusahakan tidak melepaskan tembakan kalau tidak perlu,

kecuali untuk membela diri, membela kawan, atau jika memang terjadi tembak menembak dengan musuh.

Pada tanggal 10 Pebruari 1946, Sersan Ch.Ch. Taulu dan Sersan S.D. Wuisan ditangkap oleh CPM atas perintah Komandan Garnizun Manado, Kapten Blom. Semua peluru dan amunisi yang ada di tangan anggota Kompi 7 di Markas Teling dilucuti, kecuali senjata mereka. Beberapa pemimpin BPNI-PPI, antaranya John Rahasia dan M. Canon, ditangkap Belanda. Semua tindakan Belanda di atas menunjukkan bahwa rencana mereka telah diketahui. Namun sesuai rencana No. 4 di atas, maka pimpinan lainnya segera mengatur agar gerakan dapat dipercepat. Diadakan rapat rahasia sekali lagi pada tanggal 12 Pebruari 1946 yang dihadiri oleh B.W. Lopian, di mana diputuskan untuk mempercepat pelaksanaan gerakan mereka.

Selesai rapat maka terjadi kesibukan yang luar biasa, namun tidak sempat membangkitkan kecurigaan Belanda. Gerakan militer dimulai tepat jam 01.00 tanggal 14 Pebruari 1946 oleh delapan anggota Kompi 7 pimpinan Kopral J.M. Runtukahu. Mereka membawa senjata tanpa peluru, tetapi berhasil memperdaya regu piket jaga malam di asrama Teling I. Bintara piket dan anak buahnya dilucuti dan dilanjutkan dengan menguasai gudang senjata/amunisi, pakaian dan makanan yang berada di kompleks asrama itu. Sersan Ch.Ch. Taulu dan Sersan S.D. Wuisan dibebaskan dari tempat tahanan dan langsung keduanya mengambil alih pimpinan gerakan tersebut. Taulu sebagai pemimpin tertinggi dan Wuisan selaku komandan operasi. Semua tentara Belanda dan orang sipil di Manado, termasuk Komandan Garnizun Kapten Blom, ditawan oleh unsur-unsur militer dan BPNI-PPI yang dipersenjatai.

Para tawanan dibagi dua, yang perwira, termasuk Kapten Blom dan Letnan Verwajen, ditawan di asrama Teling I, sedangkan yang bintara dan tamtama dimasukkan dalam penjara Manado. Anggota keluarga mereka ditahanrumahkan di tempat masing-masing dan dijaga ketat oleh para pemuda BPNI-PPI yang sudah dipersenjatai untuk membantu tentara kita. Hanya dalam waktu delapan jam, saja yakin sampai jam 09.00 pada tanggal 14 Pebruari 1946 seluruh jajaran KNIL dan orang-orang sipil di kota Manado menyerah dan berhasil ditawan tanpa membuang peluru sebutirpun juga. Gerakan dilanjutkan ke Tomohon dipimpin oleh Sersan Frans Bisman yang membawa dua peleton tentara bersenjata lengkap untuk menangkap CONICA Letnan Kolonel Coomans de Ruyter

dan Troepencommandant KNIL Letnan Kolonel de Vries yang berkedudukan di kota itu.

Ketika pasukan tiba di batas kota, Sersan F. Bisman mengirim utusan menemui Kepala Kepolisian NICA Inspektur Polisi Samsoeri meminta agar ia mau menjadi perantara supaya para pemimpin NICA itu mau menyerah tanpa pertumpahan darah. Sementara Samsoeri melaksanakan tugasnya menemui para pimpinan NICA itu, lewatlah sebuah jeep militer yang dikendarai oleh seorang letnan Belanda. Letnan itu tidak mau berhenti setelah melihat bahwa pasukan yang menyetapnya memakai bendera Merah Putih, malahan ia langsung menembak dan menewaskan sopir pada kendaraan komandan Sersan F. Bisman. Tentara kita membalas tembakan itu dan berhasil menewaskan letnan KNIL tersebut.

Siasat yang dijalankan Sersan F. Bisman ternyata sukses ketika Inspektur Samsoeri membawa berita bahwa semua pemimpin NICA dan pasukan-pasukannya menyerahkan diri dan meminta agar tentara kita dapat datang menemuinya secara damai (Kempen, 1953 : 239). Dengan demikian pada hari itu juga (14 Pebruari 1946) seluruh aparat NICA baik sipil maupun militer menyerahkan diri. Kenyataan ini membuktikan kepada semua orang bahwa hanya dengan gerakan militer beberapa jam saja, seluruh kekuasaan sipil dan militer NICA dalam wilayah Sulawesi Utara/Tengah berhasil direbut dengan mudah oleh para pejuang kita di daerah ini.

Menyusul suksesnya gerakan itu, diadakan rapat yang dipimpin oleh unsur-unsur militer dan dihadiri oleh unsur-unsur pemuda BPNI-PPI serta dihadiri oleh unsur-unsur pamongpraja yang berjiwa nasionalis. Rapat itu diadakan di rumahnya Hukum Besar B.W. Lopian di Singkil. Dalam rapat itu dipilih untuk sementara B.W. Lopian selaku Residen, menggantikan CONICA Coommans de Ruyter yang sudah ditawan. Unsur-unsur militer yang melaksanakan gerakan ditetapkan sebagai Tentara Republik Indonesia Sulawesi Utara (TRISU) dipimpin oleh Ch.Ch. Taulu yang diangkat menjadi Letnan Kolonel, menggantikan Troepencommandant Letnan Kolonel de Vries yang juga sudah ditawan. Di bawah Letnan Kolonel Ch.Ch. Taulu ialah Kapten (KNIL) J. Kaseger yang sudah diangkat menjadi Komandan TRISU dengan pangkat Mayor, walaupun sebenarnya ia sama sekali tidak turut serta dalam gerakan tersebut. Kaseger ini adalah lulusan Akademi

Militer Breda dan memang sudah berpangkat Kapten ketika Taulu dan Wuisan melancarkan gerakan. Pengangkatan Kaseger dalam pangkat dan jabatannya dilakukan atas dorongan Taulu sendiri untuk merangkul perwira KNIL itu (Taulu, 1956 : 5). Seorang perwira KNIL lainnya, yakni Letnan Kolonel dr. R. Tumbelaka turut juga diajak, tetapi ia menolak karena telah menyatakan sumpah setia kepada Belanda (Kempen, 1953 : 239).

Hasil rapat malam 14 Pebruari 1946 itu dituangkan dalam Maklumat yang dikeluarkan pada tanggal 15 Pebruari 1946 sebagai berikut :

MAKLOEMAT NO. 1

1. Kemarin malam djam 01.00 tanggal 14 Pebroeari 1946 oleh pedjoeang2 KNIL dibantoe oleh pemoeda2 telah dapat mereboet dengan soekses sekali Pemerintah Belanda (NICA) Soelawesi Oetara dibawah pimpinan Fourier Ch.Ch. Taulu, dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Repoebliek Indonesia jang telah diproklamirkan oleh Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta.
2. Rakjat diminta membantoe sepenoeahnja perdjoeangan terseboet diatas dengan tenang-tenang sadja.
3. Kepada pedjoeang-pedjoeang diseloeroeh Soelawesi Oetara oemoemnja di Minahasa choesoesnja diperintahkan oentoek segera mengambil alih Pemerintahan Belanda diseloeroeh pelosok.
4. Keamanan diseloeroeh Soelawesi Oetara oemoemnja di Minahasa choesoesnja haroes didjamin oleh Tentara Republik Indonesia Soelawesi Oetara.
5. Kantor2 Pemerintahan haroes tetap djalan seperti biasa.
6. Kegiatan2 ekonomi haroes tetap djalan seperti biasa (pasar2, toko2, sekolah2, haroes tetap diboeka seperti biasa).
7. Barangsiapa jang berani mengadakan pengatjaoean beroepa penganiajaan, pentjoelikan, perampokan, pemboenoehan dsb. akan segera dihoekoem mati dimoeaka oemoem.
8. Selesai.

Manado, 15 Pebroeari 1946
Pemimpin tertinggi
Ch.Ch. Taulu

Dengan suksesnya gerakan itu maka pimpinan gerakan segera mengundang seluruh aparat pemerintah yang ada untuk mengadakan pertemuan di Manado, di gedung Minahasa Raad di mana hadir para pemimpin dari Minahasa, Bolaang Mongondow dan

Gorontalo, termasuk para tokoh pemuda pejuang. Pertemuan diadakan tanggal 16 Pebruari 1946 yang berhasil membentuk Dewan Musyawarah Rakyat Sulawesi Utara yang diketuai oleh Residen B.W. Lopian. Dewan ini bertugas untuk membentuk pemerintahan RI di Sulawesi Utara. Hasil musyawarah itu dituangkan dalam maklumat tanggal 17 Pebruari sebagai berikut :

MAKLOEMAT NO. 2

Dimakloemkan bahwa pada tgl. 16-2-1946 soedah diadakan rapat oemoem digedoeng Minahasa Raad jang dipimpin oleh Poetjoek Pimpinan Ketentaraan Indonesia Soelawesi Oetara, dihadiri oleh Kepala-2 Distrik dan Onderdistrik di Minahasa, Radja dari Bolaang Mongondow, Kepala Daerah Gorontalo, pemimpin2 Pemoeda Indonesia.

Rapat ini telah menetapkan B.W. Lopian mendjadi Kepala Pemerintahan Cipil Soelawesi Oetara.

Semoea perintahnya haroes ditoeroeti.

POETJOEK PIMPINAN KETENTARAAN SOELAWESI OETARA

Ch.Ch. Taulu	Letnan Kolonel	S. Wuisan	Major
J. Kaseger	Major	A.F. Nelwan	Kapten
F. Bisman	Kapten		

Musyawarah itu juga memutuskan memberikan kekuasaan kepada para pemuda melalui Letnan Kolonel Ch.Ch. Taulu untuk membantu menegakkan ketertiban dan keamanan khususnya di Minahasa sebagai berikut :

SOERAT KEKOEASAAN

Poetjoek Pimpinan Tentara Indonesia di Manado memberi kekoeasaan kepada Pasoekan Pemoeda Indonesia, bermarkas besar di Tondano mengatoer dan mengambil tindakan dalam pendjagaan ketenteraman dan kesedjahteraan rajat dan negeri diseloeroeh Minahasa, bersama-sama dengan pemerintahan Negeri dan Pasoekan Kepoelisan Indonesia, didalam lingkoengan kekoeasaan Tentara Indonesia.

Manado, 16 Boelan 2 1946

Poetjoek Pimpinan
Tentara Indonesia di Manado,
Ch.Ch. Taulu
Luit. Kolonel

Keluarnya surat kuasa tersebut merintis jalan terjadinya penggabungan seluruh organisasi pemuda pejuang menjadi satu wadah

perjuangan, yakni PPI atau Pasukan Pemuda Indonesia. Untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam tingkat perjuangan waktu itu maka PPI mengadakan konsolidasi mulai tingkat Markas Besar di Tondano sampai ke desa-desa di seluruh Minahasa, termasuk kota Manado. Seluruhnya disusun dalam bentuk komando yang untuk tingkat Markas besar dikepalai oleh Hulubalang Besar yang dijabat oleh E.D. Johannes SH yang dahulunya pernah menjadi penasehat PIM, BPNI dan PPI. Kepala Staf PPI ialah Wim Pangalila. Di Manado dibentuk pula Markas Besar yang merupakan bagian dari Markas Besar Tondano, dipimpin oleh Hulubalang John Rahasia dan Wakil Hulubalang Mohamad Canon (Wowor, 1977 : 62).

Sejumlah pemuda di Markas Besar PPI Tondano yang menangani urusan-urusan tertentu adalah :

Urusan Umum	: Rachmat Pulukadang
Urusan Keuangan	: Nona Wuli Supit
Urusan Perhubungan	: Ben Wowor
Urusan Penerangan	: Ch.D. Pontoh
Urusan Pendidikan/Pengajaran	: Engel A. Parengkuan
Urusan Perekonomian	: J. Kumaunang
Urusan Latihan	: E. Matulandi
Urusan Agama/Kebudayaan	: F. Dendeng
Urusan Kesehatan	: A. Tampi
Komandan Markas Besar	: J. Lumingkewas

Sebagaimana sudah dikemukakan di depan, sejak Oktober 1945 PPI sudah membentuk sektor-sektornya di Minahasa, Bolaang Mongondow, Sangir Talaud, Gorontalo, sampai ke Sulawesi Tengah dan daerah-daerah lainnya. Untuk Minahasa dan Manado telah dibentuk 25 Sektor. Pemimpin PPI tingkat Distrik kemudian disebut Hulubalang, sedangkan tingkat Onderdistrik disebut Hulubalang Muda yang masing-masing dibantu oleh staf tertentu dan membawahi anggota-anggota di sektor masing-masing (Wowor, 1977 : 62). Para guru dan siswa SMRK Tondano dialihkan menjadi Corps Pelajar (CP) di bawah komandan J.E. Sanger dibantu oleh Constantijn Warouw, J.L.S. Lelengobot, Frans Pangalila, Max Kamagi, R.E.S. Bujung, Tangkudung, Jolly Waworuntu, Masinambow, Ali Hulukati, W.H. Silangen dan lain-lain (Legoh, 1973 : 37-38). Para anggota PPI dan CP itu dilatih secara militer oleh instruktur-instruktur TRISU di Manado dan Tondano. Sesuai rencana, PPI dan CP akan memperoleh rencana yang akan diberi-

kan oleh TRISU sesuai tugasnya untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban umum, di samping sebagai kekuatan yang akan dipergunakan untuk menghadapi serangan balas dari pihak Belanda.

Sejak berhasilnya gerakan perebutan kekuasaan NICA di daerah ini maka terus dilanjutkan usaha untuk menghubungi pemerintah RI yang berpusat di Yogyakarta. Dinas perhubungan militer yang dipimpin oleh Kopral A.S. Rombot dan Kopral D. Kawilarang walaupun memiliki fasilitas komunikasi namun karena putusnya hubungan dengan dunia luar, meminta bantuan dari dinas perhubungan PTT yang berkedudukan di desa Kamasi di Tomohon, dipimpin oleh Tan Ing Hwa dibantu oleh A.J. Lalamentik. Kedua anggota TRISU itu membawa naskah berita kepada A.J. Lalamentik dan setelah disetujui oleh Tan Ing Hwa maka isi naskah tersebut disiarkan. Stasiun Pemancar PTT Tomohon memiliki empat pemancar, yaitu YFD, YFD2, YFD4, dan YFD3. Keempat pemancar itu diparalelkan masing-masing dengan gelombang 3, 5, 7 megacycles dan 6815 kcs, sehingga hanya dengan satu kunci pengetok (morse-key) saja, berkumandanglah di udara empat pemancar dengan gelombang yang berbeda-beda di mana diharapkan salah satu di antaranya akan dapat ditangkap oleh dunia luar (Lalamentik, 1979 : 1-2).

Keempat pemancar itu diparalelkan oleh Tan Ing Hwa dan yang mengirim berita adalah A.J. Lalamentik, disaksikan oleh Kopral A.S. Rombot dan Kopral D. Kawilarang dari Dinas PBH (Perhubungan) TRISU. Siaran itu dilakukan tanggal 15 Pebruari 1946 setelah lewat senja hari. Isi berita yang disiarkan pada waktu itu antara lain menyebutkan bahwa Pemerintah Belanda telah berhasil direbut oleh pejuang-pejuang KNIL dan Pemuda dan telah beralih kepada Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta; bahwa orang-orang Belanda tua dan muda semua telah dikumpul dan berada dalam keadaan baik di satu kamp di Sario, Manado; tawanan orang-orang Jepang tetap berada dalam kamp-kamp; pekerjaan-pekerjaan berjalan seperti biasa dan keadaan tetap tenang. Naskah berita itu ditandatangani oleh Pucuk Pimpinan Pemerintahan Sipil dan Militer setempat waktu itu.

Untuk menarik perhatian dunia internasional akan panggilan siaran radio PTT maka A.J. Lalamentik mempergunakan tata cara pemanggilan internasional yang berlaku waktu itu, yaitu

dengan mengetok "CQ (3x) de YFD/YFD2/YFD3/YFD4" beberapa kali diulang, sedikit-dikitnya lima kali, kemudian diawali dengan kata-kata "TO ALL WHOM IT MAY CONCERN" baru disusul dengan berita seperti disebutkan di atas. Panggilan ini menarik perhatian kapal SS Luna sebuah kapal barang (vrachtschip) Belanda. Markonis kapal itu adalah seorang Australia bernama Robert Ensleigh yang secara kebetulan adalah teman seprofesi dari A.J. Lalamentik. Berita itu segera diteruskan oleh Robert Ensleigh. Menurut berita, siaran itu telah ditangkap di Ujungpandang, Yogyakarta, Brisbane (Australia), San Francisco (Amerika Serikat), dan Nederland. Pada tanggal 16 Pebruari 1946 berita itu telah disiarkan oleh Radio Australia dan warta beritanya dapat ditangkap di Yogyakarta dan juga dimonitor oleh Dinas PHB TRISU di Manado (Lalamentik, 1979 : 2-3; Taulu, 1956 : 6; Wowor, 1977 : 55).

Beberapa hari setelah penyiaran tersebut di atas, Kopral A.S. Rombot dan Kopral D. Kawilarang datang menemui A.J. Lalamentik untuk meminta bantuannya menghubungi Markas Besar Sekutu di Ujungpandang dengan maksud untuk mengundang mereka datang ke Manado menyaksikan suksesnya perebutan kekuasaan, sekaligus pemberitahuan bahwa daerah ini sejak waktu itu adalah bagian tak terpisahkan dari RI. Lalamentik menyanggupi permintaan itu, lalu meminta kepada Tan Ing Hwa menghidupkan pemancar YFD3/6815 kcs untuk memanggil kapal-kapal di laut Dikumandangkannya panggilan sesuai tata cara waktu itu yakni "CQ (3x) de YFD3 QRK?" beberapa kali diulang, dan sekali lagi menarik perhatian rekan A.J. Lalamentik di kapal SS Luna bernama Robert Ensleigh. Menurut keterangan, panggilan itu dapat dipastikan diterima juga oleh kapal MV El Libertador, tetapi markonis di kapal itu enggan menyahut. Kedua markonis di kapal MV El Libertador masing-masing bernama Karel Westerbeek dan Nico Ceinola keduanya berkebangsaan Belanda, sehingga walaupun kedua markonis itu teman dekat A.J. Lalamentik ketika masih mengikuti pendidikan di Radiocursus PTT dan di Radio-Instituut voor Marconisten, namun mereka tidak bersimpati kepada Indonesia, berlainan dengan Robert Ensleigh yang berkebangsaan Australia di atas.

Mendengar panggilan rekannya di Tomohon itu, maka Robert Ensleigh menanyakan apa yang menjadi keperluannya. Dengan segera A.J. Lalamentik meminta agar SS Luna dapat menjadi

stasiun perantara untuk menghubungi Markas Sekutu di Ujungpandang. Permintaan itu disetujui dan terjalinlah hubungan dengan Ujungpandang melalui pemancar SS Luna atas jasa baik dari marconis Robert Ensleigh itu. Kalau ia tidak bersedia maka tentu saja tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh dan dengan begitu tidak mungkin mengundang datangnya Komisi Sekutu ke pelabuhan Manado (Lalamentik, 1979 : 3 – 4).

Sebagai hasil rentetan siaran radio yang disiarkan dari Tomohon maka berita perebutan kekuasaan di daerah ini mengisi siaran-siaran warta berita dan surat kabar di dalam dan di luar negeri. Berita itu ditampung dan disiarkan oleh United Press International (UPI), sehingga selain disiarkan Radio Australia, juga disiarkan oleh BBC London dan Radio San Fransisco. Juga dimuat dalam surat kabar dan unuk dalam negeri di antaranya oleh surat kabar Merdeka yang diterbitkan di Jakarta. Siaran pers yang dimuat oleh surat kabar Merdeka di Jakarta itu dimuat seminggu setelah perebutan kekuasaan, yakni (Wowor, 1977 : 55–56).

PEMBERONTAKAN BESAR DI MINAHASA

Djakarta, 21 Pebr.

Berita-berita yang diterima di Djakarta dari Soelawesi Oetara, dan belum dapat dibenarkan, menjatakan, bahwa di Manado terjadi pemberontakan dikalangan serdadoe Boemipoetra, jang tidak menjebabkan pertoempahan darah. Demikian dikabarkan oleh United Press.

"Kaoem Pemberontak" itu meminta perantaraan Australia, dan tidak maoe mendengar lain orang. Orang-orang Eropah didaerah itoe telah mengoendoerkan diri ke Manado iboe kota Minahasa. Kegelisahan didaerah tsb. mendjalar ke Gorontalo.

Kemarin telah tiba dengan pesawat terbang di Manado seorang opsir penghoeboeng Inggeris.

Pemerintahan sipil di bawah Residen B.W. Lapien mengadakan rapat raksasa tanggal 22 Pebruari 1946 bertempat di lapangan Sparta, Tikala, Manado, dihadiri oleh para pejabat sipil dan militer serta puluhan ribu rakyat di kota Manado. Rapat raksasa itu diadakan pada pagi hari dan pada malamnya di Tondano diadakan pesta rakyat. Acara pesta rakyat di Tondano ini turut dihadiri oleh para pejabat sipil dan militer di daerah ini. (Wowor, 1977 : 63 – 64).

Memenuhi undangan pemerintahan RI Keresidenan Manado pimpinan Residen B.W. Lapien dan Letkol Ch.Ch. Taulu, maka pada tanggal 23 Pebruari 1946 Komisi Sekutu dari Ujungpandang

tiba dengan kapal laut MV El Libertador di pelabuhan Manado. Kapal berbendera Belanda itu (4000 DWT) dipimpin oleh Letkol Colson (Inggris) yang membawahi sejumlah perwira Australia dan Belanda. Letkol Taulu melalui utusan mengadakan perundingan pendahuluan mengenai status kapal agar menjadi netral, yang berarti bahwa bendera Belanda di kapal itu harus diturunkan diganti dengan bendera Sekutu. Juga diminta agar keselamatan delegasi Indonesia dijamin sepenuhnya, mengingat pengalaman dari Nani Wartabone yang ditawan selesainya perundingan dengan Sekutu di kapal yang sedang berlabuh di pelabuhan Gorontalo 30 Nopember 1945. Semua usul itu disetujui oleh Delegasi Sekutu (Taulu, 1956 : 6).

Dari rangkaian perundingan pendahuluan, dicapai kata sepakat bahwa perundingan akan dibuka jam 09.00 sampai jam 20.00 tanggal 24 Pebruari 1946. Yang akan berunding yakni Delegasi Indonesia dan Delegasi Belanda dengan Delegasi Sekutu sebagai penengah perundingan. Delegasi Sekutu terdiri atas Letkol Colson (Inggris – Ketua), Mayor Wilson (Australia – Anggota), Kolonel Giebel (Belanda – Anggota), dan Kolonel de Rooy (Belanda – Anggota). Delegasi Belanda terdiri atas Coomans de Ruyter (Ketua) dengan anggotanya Letkol de Vries, A.I. Lutheyn dan de Leeuw. Keempat orang itu sementara berstatus tawanan yang disetujui pihak Indonesia untuk dibebaskan sebagai delegasi Belanda. Delegasi Indonesia terdiri dari Residen B.W. Lapien (Ketua) dengan para anggota Letkol Ch.Ch. Taulu, D.A. Th. Gerungan, E. Katoppo, Hakim Hidajat SH, Ch.D. Pontoh, W. Saerang, dan A. B.H. Waworuntu (Taulu, 1956 : 7; Wowor, 1977 : 67; Kaeng 1971 : 39; Taulu, 1950 : 93; Kempen, 1953 : 242).

Setelah perundingan dibuka maka Colson menawarkan usul Sekutu, yaitu supaya kekuasaan diserahkan kembali kepada NICA barulah kemudian dibicarakan syarat-syarat yang dikehendaki pihak Indonesia. Perubahan kekuasaan harus dilakukan berangsur-angsur, dimulai dengan larangan pengibaran bendera Merah Putih. Lapien menolak keras usul itu, di mana dikatakan bahwa penyerahan kekuasaan dan larangan pengibaran bendera adalah dua hal yang sama sekali tidak dapat diterima. Pontoh memperkuat jawaban Lapien dengan mengatakan bahwa kedua hal itu akan menyebabkan pertumpahan darah.

Colson melanjutkan usulnya dengan menuntut agar semua senjata di pihak Indonesia harus diserahkan kepada Sekutu sebagai

pemilikinya yang sah. Taulu menolak dengan mengatakan bahwa senjata adalah syarat mutlak untuk memelihara keamanan dan ketertiban, termasuk menjaga kamp tawanan 8.000 orang Jepang di Girian, Tonsea. Colson mengusulkan agar Delegasi Indonesia mau turut bersamanya ke Ujungpandang untuk melanjutkan pembicaraan, usul mana sama sekali ditolak oleh seluruh anggota delegasi kita.

Delegasi Belanda mengutarakan rasa tidak puasnyanya terhadap perebutan kekuasaan dengan kekerasan dari tangan mereka. Delegasi Belanda menuduh bahwa sebenarnya pemberontakan itu nanya berkisar pada soal tuntutan persamaan jaminan bagi tentara, menyangkut perbaikan gaji, makanan, rokok dan sebagainya. Delegasi kita membantahnya dengan mengatakan bahwa perebutan kekuasaan bukanlah menyangkut soal-soal di atas, bukan menyangkut kepentingan perorangan, dan tidak pula berdiri sendiri, karena itu adalah demi kepentingan seluruh rakyat yang ingin merdeka sepenuhnya, sesuai jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ditambahkan bahwa delegasi Indonesia tidak akan mempertimbangkan semua hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan kepentingan dari rakyat yang sudah dikemukakan di atas, dan akan tetap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan sampai tetes darah yang penghabisan.

Walaupun delegasi Sekutu tetap bersikeras agar kekuasaan harus dikembalikan kepada NICA, namun pihak kita dengan nada yang semakin keras tetap mempertahankan pendirian. Menanggapi nada keras pihak kita maka Giebel menggertak, bahwa kalau tidak mau menyerahkan kembali kekuasaan kepada NICA maka Minahasa akan dibom dengan bom atom. Taulu menjawab bahwa pihak kita sama sekali tidak takut, dan bahwa lebih baik Minahasa dihancurkan dengan bom atom daripada mengembalikan kekuasaan kepada Belanda; bendera Merah Putih telah berkibar dan harus tetap berkibar, demikian dikatakan Taulu.

Perlu ditambahkan bahwa perundingan berjalan lambat sekali, berhubung harus melalui juru bahasa karena tidak semua mengerti bahasa Inggris, bahasa Belanda maupun bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam perundingan tersebut. Pada pertengahan perundingan Colson dan Wilson mempersilakan kedua delegasi lainnya langsung berunding. Sepeninggal kedua orang itu maka terjadi perkembangan baru di mana sisa delegasi Sekutu yang terdiri dari dua perwira Belanda memihak delegasi Belanda yang

ada. Delegasi Belanda saat itu bersikap membujuk, di antaranya dengan mengatakan bahwa apabila kekuasaan diserahkan kembali, maka pihak mereka berjanji akan memperhatikan keinginan kita soal keselamatan dan keamanan diri masing-masing anggota delegasi kita. Minahasa akan disesuaikan statusnya menjadi propinsi ke 12 dari Nederland. Di Minahasa akan didirikan akademi militer untuk mendidik tentara pribumi sebagai kader pimpinan militer di kemudian hari. Bagi yang sekarang berstatus militer sekarang ini, akan dinaikkan pangkat tiga sampai empat tingkat ke atas. Para pemimpin kita akan diperkenankan ke Jakarta untuk langsung menyampaikan keinginan kepada pemerintah pusat karena mereka di sana. Bagi para anggota militer yang telah berkeluarga akan didirikan perumahan-perumahan yang layak. Namun delegasi Indonesia sama sekali tidak terbujuk dengan usul-usul lunak delegasi Belanda di atas.

Merasa gagal dengan bujukan, maka delegasi Belanda lalu mengulangi gertakan bahwa Minahasa akan dibom dengan bom atom sebagaimana sudah dikemukakan Ciebel sebelumnya. Tetapi pihak kita tidak mau kalah atau merasa gentar dengan gertakan itu. Melaporkan keseluruhan jalannya perundingan, maka Taulu menulis bahwa (Taulu, 1956 : 7-8).

Kami telah berunding dari djam 9.00 sampai pada djam 19.45. Kami telah merasa se-akan2 kami diperlakukan sebagai tawanan. Kami sama sekali tak mendapat makanan. Minuman hanya satu kali . . . overste Ingeris dan groot-majoor Australia itu tak turut berunding lagi. Mereka ini telah turut berunding sampai kira2 pada pertengahan djalannya perundingan.

Kira2 pada jam 19.00 setelah kami merasa bosan dan kuatir djangan-djangan Belanda2 ini telah mendjalankan siasat litjik, maka mulailah kami djuga mendjalankan siasat kami. Sebentar2 kami melihat lontjeng tangan kami, sehingga pada satu waktu salah satu Belanda menanja: "Apa sebab sdr Taulu sebentar2 melihat djam?" Kami djawab: "Saja rasa, orang diplomat sebagai tuan, tak perlu lagi menanja soal itu; sekarang lagi seperempat djam, djam delapan."

Menjelang berakhirnya perundingan, tercapailah semacam kompromi di antara ketiga pihak, di mana pihak Sekutu kembali menggabungkan diri. Satu-satunya kompromi waktu itu ialah bahwa delegasi Indonesia diserahkan tugas untuk menjalankan referendum dalam waktu 24 jam melalui suatu kongres rakyat untuk mengetahui pendapat dan jawaban rakyat akan semua usul Sekutu selama perundingan berlangsung. Jawaban rakyat

melalui kongres dimaksud sudah harus diterima oleh Sekutu besoknya yakni 25 Pebruari 1946. Delegasi Indonesia tiba kembali di pelabuhan Manado lima menit sebelum jam 20.000 sebagai batas waktu perundingan. Dapat ditambahkan bahwa kalau batas waktu itu lewat tanpa kabar maka pihak kita akan mengambil tindakan-tindakan militer yang perlu untuk menjamin keselamatan delegasi Indonesia (Taulu 1956 : 8; Wowor, 1977 : 69).

Pada tanggal 29 Pebruari pagi, delegasi Sekutu diundang turun ke darat untuk mengadakan tour keliling sementara delegasi Indonesia mempersiapkan pelaksanaan kongres rakyat tersebut. Mereka dijemput di pelabuhan dengan upacara kebesaran militer lalu dibawa dengan pengawalan oleh TRISU dan PPI ke Asrama Teling. Dari sana mereka diantar meninjau semua kamp tawanan, baik kamp tawanan Belanda di Sario (Manado), maupun kamp tawanan Jepang di Girian (Tonsea). Dalam perjalanan mengelilingi Minahasa, delegasi Sekutu melihat langsung keadaan masyarakat di mana TRISU dan PPI ternyata sanggup menjamin keamanan dan ketertiban (Wowor, 1977 : 69-70; Taulu, 1956 : 8).

Residen B.W. Lapien dan pembantu-pembantunya mengundang semua tokoh masyarakat dari seluruh lapisan yang ada untuk mengambil bagian dalam kongres rakyat. Pelaksanaan referendum itu dipimpin oleh B.W. Lapien dan Ch.D. Pontoh yang duduk dalam delegasi Indonesia sebelumnya. Tokoh-tokoh yang hadir di antaranya Nani Wartabone, G.E. Dauhan, M.B. Tumbel, O.N. Pakaja, A.H.A.A. Kawilarang, O.H. Pantouw, C.P. Hermanses, Ds.A.Z.R. Wenas, A.J. Mohede, J.I. Permata, dan sebagainya. Walaupun terdengar juga suara yang tidak puas, namun dengan dukungan seluruh pemuda yang telah tergabung dalam PPI, maka akhirnya kongres memutuskan untuk menolak semua usul Sekutu dan Belanda. Kongres waktu itu memutuskan untuk menghentikan semua perundingan dengan Belanda, dan bahwa Revolusi Kemerdekaan Indonesia harus berjalan terus (Wowor, 1977 : 70-71).

Delegasi Sekutu selesai mengadakan perjalanan keliling ke seluruh Minahasa, beristirahat di Markas Besar TRISU dan PPI di Asrama Teling Manado, untuk menantikan lengkapnya kembali delegasi Indonesia, karena sebagiannya sedang mengikuti Kongres Rakyat yang diadakan di Tomohon. Ketika Residen B.W. Lapien dan pimpinan lainnya tiba, maka Colson membuka kembali perundingan, bertempat di markas itu. Delegasi Belanda juga lengkap hadir setelah diundang turun dari kapal. Colson kemudian mem-

persilakan Ketua Delegasi, Residen B.W. Lapien membacakan hasil kongres yang oleh Lapien disampaikan sesuai keputusan di atas, lalu menyerahkan hasilnya kepada Colson.

Begitu mendengar penyampaian Lapien serta menerima hasil keputusan tertulis darinya, maka Colson mengeluarkan secarik kertas dari dalam saku bajunya yang rupanya sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Isi secarik kertas itu kemudian dibacanya dengan suara lantang sebagai berikut (Wowor 1977 : 71).

Mulai hari ini Sulawesi Utara berada dalam keadaan perang dengan Sekutu berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut :

- (1) Kekuasaan setempat bertanggung jawab atas penjagaan para tawanan Jepang di Grian. Pelanggaran terhadap sesuatu ketentuan Sekutu dalam soal ini berarti, bahwa para pemegang kekuasaan di daerah ini akan dituntut sebagai penjahat perang sesuai perjanjian internasional;
- (2) Kepada warga-warga Belanda di daerah ini atas kehendak mereka masing-masing harus diberikan kesempatan untuk dievakuasi ke Pulau Morotai dengan menggunakan kapal El Libertador, yang untuk maksud ini telah siap di pelabuhan Manado.

Atas nama Pimpinan Sekutu
Wilayah Indonesia Timur

Dibuat pada tanggal 25 Pebruari 1946

Tertanda : COLSON

Selesai Colson membacakannya maka B.W. Lapien atas nama delegasi Indonesia menyatakan menerima baik isi pernyataan di atas, lalu perundingan ditutup oleh Colson dan dinyatakan selesai. Delegasi Sekutu dan delegasi Belanda bersiap-siap untuk kembali ke kapal. Coomans de Ruyter yang mengetuai delegasi Belanda sambil duduk di atas batu menangis tersedu-sedu dan berkata :
”Hoe is het mogelijk dat dit volk, waarvan zijn innige verbondenheid met Nederland beken staat, toch tot een opstand is gekomen! Dit land dat ik altijd heb lief gehad . . . ” Artinya, mana mungkin rakyat daerah ini yang terkenal mempunyai hubungan akrab dengan Belanda, sampai hati mengadakan pemberontakan! Tanah ini yang saya cintai sejak dahulu . . . (Wowor, 1977 : 73; 1972 : 52).

Walaupun demikian, menurut Taulu, perundingan itu bukanlah yang terakhir, karena sudah disetujui untuk mengadakan perundingan lanjutan beberapa waktu kemudian. Dan sejalan dengan isi

perundingan, maka mulai tanggal 26 sampai 27 Pebruari 1946 semua orang Belanda dan Indo Belanda yang memilih status tawanan, diangkut ke kapal MV El Libertador untuk diungsikan ke Morotai. Para pendeta Kristen maupun pastor dan biarawan Katolik warga Belanda tidak mau ikut mengungsi karena lebih mengutamakan tugas kegerejaan mereka di daerah ini.

Menghadapi bahaya yang semakin besar, maka PPI meminta agar TRISU segera mempersenjatai para pemuda yang telah menerima latihan militer. Melalui nota resmi, Rachmat Pulukadang dari Markas Besar PPI di Tondano mengajukan permintaan 3300 pucuk senjata api yang terperinci penggunaannya untuk kubu-kubu pertahanan di Tondano, Tomohon, Remboken, Kakas, Eris, Langowan, Kawangkoan, Tumpaan, Amurang, Motoling, Ratahan, dan Tonsea. Komisaris-komisaris PPI untuk daerah Sangir Talaud, Bolaang Mongondow dan Gorontalo, sudah ditunjuk dan mulai bekerja membina pemuda di tempat-tempat tersebut.

Di balik semangat perjuangan itu, terlihat bahwa moral tentara umumnya menurun karena logistik yang sudah sangat mengkhawatirkan, di mana gaji dan pensiun hanya tersedia untuk dua bulan saja. Pembelanjaan kamp tawanan Jepang di Girian menghadapi kemacetan, sementara mulai timbul aksi perang urat syaraf yang dilancarkan oleh bekas Kapten KNIL J. Kaseger yang sudah diangkat menjadi Mayor TRISU serta pengikutnya. Sekitar 20.000 orang pensiunan yang tersebar di desa-desa merupakan potensi yang sesungguhnya menentang politik pemerintahan nasional pimpinan Lapihan dan Taulu. Kapal perang Belanda Piet Hein kelihatan mondar-mandir di perairan daerah ini, sementara Belanda mempersiapkan pasukan penyerbu di Morotai untuk menyerang Minahasa. Sekutu mengirim berita radio dari Ujungpandang bahwa delegasinya akan tiba dengan kapal terbang dan minta dijemput di pangkalan air Tasuka di danau Tondano tetapi pada waktu yang ditetapkan itu ternyata tidak muncul. Malahan pada tanggal 7 Maret 1946 sebuah pesawat Sekutu datang menyebarkan pamflet di Minahasa menghasut agar rakyat memberontak terhadap pemerintahan nasional pimpinan Lapihan dan Taulu di daerah ini (Wowor, 1977 : 74-75).

Ternyata pimpinan TRISU terlambat menyalurkan senjata sesuai permintaan Markas Besar PPI. Senjata untuk sektor-sektor PPI di Manado baru diserahkan awal Maret dan tanggal 10 Maret 1946 dikeluarkan order penyerahan senjata untuk Markas Besar

PPI Tondano. Hulubalang Besar PPI, E.D. Johannes SH, disertai Kepala Staf Wim Pangalila serta F.H.L.W. Mondong, Willy Pantouw dan A.H.A.A. Kawilarang, datang dengan sebuah truck besar yang mengangkut senjata tersebut. Sementara senjata-senjata dari Markas Besar TRISU di Teling, Manado, dimuat ke atas truck tersebut, tiba-tiba terdengar tembakan-tembakan gencar di kompleks markas. Mayor J. Kaseger yang membelot rupanya sudah memulakan aksi balasan untuk menjatuhkan kepemimpinan Taulu dan Lapien. Pada tanggal 11 Maret 1946 itu, Komandan TRISU Letkol Ch.Ch. Taulu dan stafnya, termasuk Hulubalang Besar E.D. Johannes SH dan staf yang mengiringinya ke Manado, ditangkap oleh pasukan lawan yang ternyata dipimpin oleh Sersan Kusoy dan Sersan Bolang.

Adapun pasukan musuh itu berasal dari kompi yang ditugaskan menjaga kamp tawanan Jepang di Girian. Mereka datang dengan mengendarai sebuah truck dan sebuah jeep militer dengan kekuatan yang diperkirakan satu peleton lengkap. Mengenai kisah penangkapan yang mereka jalankan, dapat diikuti dalam surat kabar "Pelita" (kolonial Belanda) yang terbit 13 April 1946 No. 42 dan 20 April 1946 No. 44. Tulisan itu dibuat oleh salah seorang anggota pemberontak pimpinan Kaseger, dan dimuat secara bersambung dalam surat kabar tersebut di atas. Secara garis besar diungkapkan tentang rencana mengadakan aksi balasan pimpinan Mayor J. Kaseger dan kawannya Mayor Latuperissa serta Sersan Mayor Mamahit dan Sersan Nes Lapien. Pelaksana aksi balasan adalah Sersan Kusoy dan Sersan Bolang. Bendera Merah Putih di kamp mereka diturunkan, lalu dinaikkan bendera Merah Putih Biru pada tanggal 10 Maret 1946. Inspeksi pasukan TRISU pimpinan Kopral J.M. Runtu-kahu dihancurkan oleh mereka di sekitar kamp Girian (Taulu, 1950 : 95-97).

Mengenai pengkhianatan Kaseger itu dikisahkan oleh Taulu, bahwa, setelah ia ditangkap oleh Sersan Kusoy, maka ia dibawa ke Tomohon untuk menemui Kaseger tetapi ternyata Kaseger berada di Manado, sehingga ia dibawa kembali ke Manado. Ketika tiba di Manado, ia ditipu dengan berita bahwa pihak Sekutu sedang menunggunya di kapal perang Piet Hein yang sedang berlabuh di pelabuhan. Selanjutnya Taulu mengatakan (Taulu, 1956 : 10):

Kami dihantarkan ke kapal dengan kawan2 kami sendiri, jang kemudian ternyata bahwa mereka adalah kaki tangan Belanda seperti Kaseger.

Setibanja di atas kapal, tiba2 kami dikepung oleh Marine2 Belanda dengan perkataan: "Eindelijk hebben wij de hoofdmuiter te pakken!"

Mendengar perkataan itu, kami terkejut lalu berkata: "Ik kom hier om te conferen!"

Mereka menjawab: "Kom maar, volg mij!", lalu kami turut kepada jang memanggil. Dimuka satu kamar dekat kamar mesin, ia tiba2 berhenti lalu membuka pintu kamar itu.

"Hier heb je je vrienden" berkata ia. Nampak pada kami dalam kamar itu sdr2 Lapien, Wuisan, Nelwan, Bisman, Warouw . . .

Lalu kamar dikuntji.

Disitu barulah kami mengerti, bahwa Kaseger cs telah menghinat terhadap bangsanja sendiri, bahwa kami telah ditangkap dengan tipu

Para anggota TRISU dan PPI yang tetap setia kepada pemerintah RI yang belum ditangkap, segera menyusun kekuatan untuk menghadapi musuh yang ternyata dipimpin seluruhnya oleh Kapten KNIL J. Kaseger selaku komandan operasi NICA. Segera setelah Markas Besar PPI di Tondano menerima berita bahwa pimpinan TRISU dan PPI sudah ditangkap, maka para pimpinan yang tinggal di antaranya Rachmat Pulukadang, E. Lewu, A. Pangemanan bersama seorang anggota TRISU bernama No Korompis, melakukan gerakan kilat dengan menyerbu markas detasemen polisi di Tondano. Senjata-senjata yang dirampas dari polisi Tondano dibagi-bagikan kepada para pemuda PPI yang dipimpin oleh Willy Kotambunan, Arie Muntu, dan Alex Pakasi. Pasukan CP dari SMRK pimpinan Johan Worek, Harry Siwy, Eddy Kumontoy dan J.P. Tooy, merebut satu kendaraan militer milik RAAF (Sekutu). Dengan beberapa pucuk senjata yang ada, anggota-anggota CP itu berangkat menuju Kakas, Langowan dan Kawangkoan untuk merebut senjata-senjata yang berada di tangan para anggota polisi NICA di sana (Wowor, 1977 : 76-77).

Hari itu juga Markas Besar PPI dipindahkan dari kota Tondano ke pinggiran kota, ke Kampung Jawa (Tondano), mempergunakan rumahnya Usman Pulukadang. Kubu pertahanan didirikan di sekitar markas besar dan dijaga oleh anggota-anggota yang bersenjata. Besoknya, pada tanggal 12 Maret 1946, sebuah mobil patroli KNIL lewat di situ dan terjadilah tembak menembak, sementara mobil berlari kencang di mana seorang anggota PPI bernama Raun

Sambouw tewas kena peluru otomatis KNIL. Masih beberapa hari lamanya PPI bertahan di Tondano di bawah pimpinan No Korompis dan kawan-kawannya anggota PPI. Kemudian mereka mengundurkan diri ke desa-desa di sekitar kota, di antaranya ke Tonsaru, Peleloan dan Papakelan.

Semua operasi pihak lawan dipimpin oleh Kapten Kaseger selaku Territoriaal Commandant KNIL. Karena ia melihat bahwa kota Tondano sangat tidak aman, ia menawarkan perundingan dengan TRISU dan PPI yang bertahan di sekitar kota itu. Pasukan TRISU dan PPI waktu itu di bawah komandan No Korompis, dibantu para pimpinan PPI di antaranya E.V. Kaseger (adik Kapten Kaseger sendiri) yang sebelumnya adalah guru dan instruktur militer bagi para siswa SMRK Tondano. Taktik Kapten Kaseger ternyata berhasil di mana dengan perantaraan dua anggota PPI, yakni Nona Wuli Supit dan Ben Wowor, semua pasukan pimpinan No Korompis menyerah setelah berusaha bertahan seminggu lamanya (Wowor, 1977 : 77).

Sejak saat itu maka dapat dikatakan seluruh pimpinan PPI sudah ditangkap, kecuali John Rahasia yang masih terus bergerilya di Minahasa Utara dan di pulau-pulau sekitarnya. Para anggota yang tertangkap memenuhi ruangan penjara-penjara di Manado dan Tomohon. Demikian juga dengan para anggota TRISU. John Rahasia akhirnya tertangkap setelah mencoba melarikan diri ke Sulawesi Selatan. Dari Mamuju ia dibawa ke Ujungpandang, akhirnya dibawa ke Manado. Dari sekian banyak anggota PPI dan TRISU, termasuk para pejabat sipil lainnya, 46 orang di antaranya diproses oleh Mahkamah Militer NICA, yakni Krijgsraad te Velde van Makassar, di Manado.

Bekas anggota militer dinyatakan dipecat tidak dengan hormat dari KNIL. Hukuman seluruhnya berjumlah 10 tahun penjara. Ada yang menjalaninya di Manado dan banyak pula yang di tempat lain, seperti di Morotai, Balikpapan, Cipinang, Sukamiskin, Struyswijk, Nusakambangan, Glodok, dipindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat lain (Wowor, 1977 : 80-81; Taulu, 1950 : 98). Baru setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, mereka dibebaskan oleh pemerintah RI. Demikianlah riwayat secara garis besar mengenai peristiwa perebutan kekuasaan di daerah ini yang disponsori oleh para anggota KNIL dan pemuda yang berjiwa nasionalis.

Sangir Talaud

Perjuangan di daerah Sangir Talaud pada masa ini dijalankan oleh para tokoh nasionalis setempat yang berusaha sekeras mungkin untuk membuka mata rakyat yang dikatakan "buta politik" supaya mengenal hakekat kemerdekaan sebagaimana sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dimulai ketika pada bulan Oktober 1945 terbentuk sebuah organisasi politik yang dinamakan Partai Rakyat Indonesia (PARI) yang pengurusnya adalah sebagai berikut :

K e t u a : L.M. Kansil
Wakil Ketua : H. Pasandaran
Panitera : R. Kansil

dan dilengkapi dengan beberapa anggota.

Pada tanggal 17 Nopember 1945, setelah upacara sederhana memperingati tiga bulan proklamasi kemerdekaan, PARI yang berpusat di Siau (Sangir Talaud) mengirim kawat kepada pemerintah RI di Jakarta. Setelah setahu menunggu tanpa balasan, maka pada tanggal 12 Desember 1946 dikirimkan surat yang agak panjang, disusul dengan kawat menyatakan dukungan terhadap pemerintah RI yang, baik surat maupun kawat-kawat itu dibalas oleh pemerintah RI dari Yogyakarta sebagai berikut (Elias, 1973 : 153-154).

2 batavia 97 74/69 13 12.45

= 1c = kansil ketoea partai rakjat indonesia peling sioe sangihe talaud

no k 73 komma pm telah terima kawat sdr tg 17/12/46 dan soerat tg 12/12/46 ttk oesaha rakjat sangihe talaud dalam mempertahankan kesatoean negara repoeblik indonesia sangat dihargai ttk segala oesoel-oesoel sdr telah diketahoei ttk kepertjajaan penoeh atas kesanggoepan sdr2 seloeroeh rakjat indonesia mengikoeti perdjoengan sdr2 ttk terima kasih komma merdeka ttk habis =

sekretaris perdana menteri

ontvangen te Taroena Radio
13-1-1947 ten 10.23 javatijd

Sementara menunggu jawaban di atas, untuk meningkatkan semangat perjuangan, maka PARI pimpinan L.M. Kansil di Siau mengadakan upacara penaikan bendera Merah Putih pada tanggal 1 Januari 1946. Akibatnya maka L.M. Kansil dan adiknya E. Kansil dipenjarakan. Ketika dibebaskan beberapa waktu kemudian, keduanya dipesankan NICA agar jangan mengulangi lagi ke-

giatan seperti itu, namun keduanya tidak menghiraukan tekanan tersebut.

Untuk menghimpun potensi perjuangan wanita maka PARI membentuk organisasi Persatuan Wanita Indonesia Siau atau PERWANIS yang susunan pengurusnya sebagai berikut (Elias, 1973 : 156, Sigarlaki dkk, 1977 : 242).

Pengawas Umum	: Ibu F. Pasandaran-Lalisang
K e t u a	: Ibu Nona Mohede
Panitera	: Ibu A. Elias-Pangulimang
Bendahara	: Ibu K. Paparang-Rindu
Anggota-anggota	: Ibu K. Bawoleh
	Nona Theodora Tamaka
	Nona Adelaide Sebentar.

Sedangkan untuk menghimpun potensi perjuangan pemuda, maka PARI membentuk organisasi Barisan Pemuda Republik Indonesia (BAPRI). PARI, PERWANIS dan BAPRI inilah yang menyelenggarakan penaikan bendera Merah Putih pada tanggal 1 Januari 1946 di Peling, Siau.

Ketika pada bulan Pebruari 1946 para pejuang kita berhasil merebut kekuasaan di Manado/Minahasa, maka BAPRI mengutus dua anggotanya untuk menemui Letkol Ch.Ch. Taulu serta pimpinan lainnya untuk mengetahui kemungkinan memperluas perjuangan itu ke Sangir Talaud. BAPRI memperoleh jawaban bahwa aksi lanjutan akan dilakukan dalam bulan Maret 1946 ke daerah Sangir Talaud dengan basis di pulau itu. Untuk itu maka BAPRI hendaknya mempersiapkan pasukan seperlunya. Namun pada saat yang direncanakan ternyata kekuasaan sudah direbut kembali oleh NICA dengan mempergunakan pasukan TRISU yang mengadakan pengkhianatan di Manado dipimpin oleh Kapten J. Kaseger. Dengan demikian maka persiapan itu gagal, namun BAPRI senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap usaha pecah belah dari pihak Belanda waktu itu (Elias, 1973 : 156-159).

Markas BAPRI terletak di Ondong, Siau, dan dalam periode perjuangan fisik, pimpinannya berganti-ganti, tetapi yang paling lama menjadi ketua ialah L.N. Paparan dari Hiung. Pada tahun 1947 seorang infiltran dari Yogyakarta tiba di Siau. Ia bernama Letnan Tribudhaja asal Solo, isterinya seorang wanita Siau. Letnan itu segera terjun melatih para pemuda BAPRI dalam bidang kemiliteran. Peranan BAPRI nanti akan menjadi lebih nyata setelah

pengakuan kedaulatan dalam perjuangannya mewujudkan Negara Kesatuan (Elias, 1973 : 159).

Partai BNI di Manado dipimpin J. Jocom mendirikan anak cabang di Siau yang dipimpin oleh L.M. Kansil. Sebagai penghubung antara anak cabang Siau dan pusat partai di Manado maka ditunjuk seorang anggota bernama J. Dauhan. Partai BNI juga menunjuk Hamzah Adariku sebagai pembantu untuk memimpin BNI di pulau Sangir Besar (Yuda dan Bentelu, wawancara 8 Januari 1978).

Gorontalo

Dalam periode ini perlawanan rakyat Gorontalo terhadap NICA semakin meningkat dengan terbentuknya Gerakan Kebangsaan Indonesia (GERKINDO) pada medio 1946 yang diprakarsai oleh beberapa pemuda, di antaranya :

- A. Uno, kepala kehutanan
- Ismail Datau, marsaoleh Kabila
- Sun Bone, kepala pertanian
- drh. Wardhojo, dokter kehewanran
- dr. J. Sabu, dokter pemerintah
- Dj. Arbie, pedagang
- M. Ali Wongsodojo, kepala douane
- A.J. Usman, dinas pekerjaan umum
- A. Amu, marsaoleh Bone Pante.

GERKINDO bergerak membina para pemuda Gorontalo untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Pecahan dari GERKINDO melahirkan organisasi kelaskaran Angkatan Pemuda Indonesia (API) di bawah pimpinan M.S. Ointu. API ini kemudian berubah menjadi Angkatan Pemuda Republik Indonesia (APRI). Di bawah pimpinan Djakaria dan rekannya Said Basumbul, maka APRI mengadakan sejumlah aksi sabotase terhadap Belanda, di antaranya pembakaran gudang-gudang kopra milik Koprafonds dan pelemparan granat di tangsi NICA (Kodam XIII/Merdeka, 1978 : 167). Setelah diketahui Belanda bahwa dalang sabotase APRI itu adalah kedua pimpinannya di atas, maka mereka menangkap Djakaria dan Said Basumbul, lalu dikirim ke Nusakambangan. Ketika agresi militer Belanda II berlangsung, keduanya berhasil melarikan diri dari Nusakambangan, lalu bergabung dengan TNI di pulau Jawa.

Pimpinan APRI beralih ke tangan dr. J. Sabu yang terus melan-

jutkan aksi sabotase terhadap NICA. Akibatnya dokter itu ditangkap dan dibuang ke Morotai. sejak itu maka GERKINDO mengintensipkan latihan-latihan militer secara rahasia di lapangan Merdeka, berdekatan dengan markas pemuda di jalan Merdeka di kota Gorontalo sekarang ini. Lapangan itu kebetulan terlindung oleh deretan rumah rakyat, dan pusat latihan terletak di belakang rumahnya Anwar Djaafara yang dijadikan markas pemuda. Untuk membakar semangat perjuangan maka diterbitkan surat kabar "Suara Pemuda" dengan penanggung jawab N.G. Ointu (Mimbar Indonesia No. 22, 1950).

Sejak ditangkapnya berturut-turut pimpinan pemuda maka dapat dikatakan organisasi kelaskaran menjadi lumpuh, namun tidak berarti bahwa perjuangan menjadi menurun. Kesatuan-kesatuan kelaskaran sejak saat itu bertindak sendiri-sendiri tanpa pimpinan pusat lagi. Namun sekaliannya mempunyai satu keyakinan dan satu sasaran perjuangan, yakni bahwa mereka membela proklamasi kemerdekaan negaranya dan untuk itu kaum penjajah harus diusir. Tidak dapat dilupakan pula peranan kaum wanita dalam perjuangan, antara lain dapat disebutkan Zus Wartabone (Boki), Eki Nesin, Fin Bijai, Ni Kok Tien, Kusnah Mangantje, Salama Djaafara, dan Saerah Abas.

Bolaang Mongondow

Di daerah Bolaang Mongondow dalam periode ini para anggota PPI Laskar Rakyat yang bermarkas di perkebunan Tanoyan melanjutkan perang gerilya melawan NICA. Penghadangan patroli-patroli maupun mobil-mobil Belanda serta pemutusan hubungan telepon seringkali dilakukan. Ketika di Manado TRISU dan PPI telah berhasil merebut kekuasaan dari tangan NICA, maka daerah Bolaang Mongondow dikunjungi Residen B.W. Lapien dikawal sepasukan TRISU pimpinan Kapten F. Bisman. Kunjungan ini mengakhiri untuk sementara masa tiga bulan perang gerilya melawan Belanda di daerah ini.

Mereka pergi mengunjungi markas KNIL di desa Molinow dan memerintahkan kepada komandannya, Kapten Latuperissa, agar menurunkan bendera Merah Putih Biru dan menaikkan bendera Merah Putih di markas itu. Diturunkannya bendera Belanda disaksikan oleh para anggota PPI Laskar Banteng yang semakin mengobarkan semangat mereka untuk segera turun dari hutan-hutan. Oleh pimpinan daerah di bawah Residen B.W. Lapien dan

Kapten F. Bisman, mereka diperintahkan agar kembali ke desa masing-masing dan memperkuat pertahanan lingkungannya. Markas PPI Laskar Rakyat di Tanoyan diperintahkan untuk ditinggalkan. Tempat itu dijadikan sebagai basis latihan para anggota PPI yang akan menerima latihan militer. Para pimpinan PPI Laskar Rakyat yang dipenjarakan oleh Belanda dilepaskan semuanya dan mereka segera kembali ke Bolaang Mongondow untuk mengibarkan bendera Merah Putih di semua instansi pemerintahan sipil dan kepolisian.

Tetapi dalam bulan Maret 1946 dengan ditangkapnya para pimpinan TRISU dan PPI serta pemerintahan sipil pro RI di daerah ini, maka Belanda kembali berkuasa dan mulai berusaha menegakkan kembali tertib hukum kolonial di sini. Bulan Maret 1946 Residen Coomans de Ruyter kembali memerintah dan kemudian diganti oleh Residen J. Oberman dengan Asisten Residen Minahasa, A.I. Lutheyn (1946–1947). Pemerintah NICA waktu itu menjalankan politik "hak menentukan nasib sendiri" yang membuka jalan aktipnya kembali kaum politisi di daerah ini (Wowor, 1977 : 82–83). Di Sulawesi Utara banyak organisasi sosial dan politik baik yang pro Belanda maupun yang pro RI telah muncul selama periode sebelum dilancarkannya aksi militer Belanda I di mana beberapa di antaranya akan dikemukakan berikut ini.

Pada tanggal 25 Maret 1946 muncul organisasi politik bernama Twaalfde Provincie (TWAPRO) diketuai oleh Jan Mawikere dengan pusatnya di desa Matani (Tomohon), di rumahnya Jan Mawikere sendiri. Para anggota kebanyakan adalah pensiunan dinas militer KNIL, guru dan pegawai lainnya yang puluhan ribu banyaknya, tersebar di seluruh desa di Minahasa. TWAPRO dengan cepat tanpa susah payah berhasil mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Tujuan TWAPRO yakni memperjuangkan terwujudnya Minahasa sebagai propinsi ke 12 dari negeri Belanda (Posumah, 1978 : 18). Trompet TWAPRO ialah surat kabar mingguan "Kesatuan Kerajaan" yang terbit di Manado (Taulu, 1950 : 100).

Bulan Juni 1946 berdiri Gerakan Pembangunan Indonesia Serikat (GEPNIS) yang resmi berdiri pada tanggal 28 Agustus 1946. Para pendirinya ialah E. Katoppo, G.A. Maengkom, A.C. Manoppo, A.B.H. Waworuntu, J.M.L. Supit dan lain-lain. Ikut sertanya beberapa anggota pamongpraja NICA memberikan penga-

ruh positif bagi GEPNIS. Ketika GEPNIS mulai kehilangan pengaruhnya maka beberapa pemimpinnya mendirikan Gerakan Indonesia Merdeka (GIM) dipelopori M. Sondakh, J.M.L. Spit, F. Gerungan, J. Pandelaki dan lain-lain. Cabang GIM didirikan di Tomohon, Manado dan Tondano dengan pendukungnya sekitar 1.500 anggota. Suara GIM ialah surat kabar "Gerakan" (Taulu, 1950 : 98-99); Kempen, 1953 : 511-512). Tujuan GIM sejalan dengan GEPNIS, yakni berjuang menuju terbentuknya Negara Indonesia Merdeka yang berbentuk federal (Wowor, 1977 : 83). Dibukukannya GEPNIS dan dibentuknya GIM pada tanggal 1 Juni 1947 merubah sifatnya dari pro Belanda menjadi pro RI, terutama sejak Desember 1947 (Posumah, 1978 : 51).

Bulan Juli 1946, beberapa tokoh pemuda nasionalis yang pernah aktif dalam BPNI dan PPI mendirikan Partai Indonesia Raya (PIR). Mereka itu antaranya J.A. Dengah, Nona Gusta Ngantung, V. Mandey, A.S. Tanod dan kawan-kawannya. PIR sempat mendirikan cabangnya di Airmadidi dan Minawerot sebelum dilarang oleh Belanda (Taulu, 1950 : 100; Posumah 1978 : 54).

Pada tanggal 28 September 1946 didirikan di Manado organisasi politik Barisan Nasional Indonesia (BNI) dengan pelopornya G.E. Dauhan, M.B. Tumbel, J. Jocom, J.I. Permata, H.M. Taulu, A. Mangindaan, S. Mamesah, J. Sarijowan, J. Walewangko, Ch. Wala, O. Wensen, M.D. Kartawinata dan lain-lain. Jumlah pendukungnya sekitar 7.500 anggota. Azas BNI yakni membangkitkan dan memperkokoh perasaan kesatuan Negara Republik Indonesia. Jalan mencapai tujuannya yakni berjuang di kalangan rakyat dan dengan rakyat. Usaha-usahanya adalah menentang dan menolak semua tindakan dan pola-pola kebudayaan yang sifatnya merusak atau menghambat terwujudnya kedaulatan Negara Republik Indonesia; menginsafkan rakyat akan perlunya memperjuangkan terwujudnya Negara Republik Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat (Taulu, 1950 : 99; Posumah, 1978 : 43-44, Kempen, 1953 : 511).

Dalam Kongres BNI tanggal 12-14 Nopember 1946 di Manado dibicarakan tentang usaha mempersenjatai rakyat melawan Belanda untuk mewujudkan pemerintahan RI di daerah ini. Organisasi ini mendirikan cabang di seluruh Minahasa, di Sangir Talaud, dan di Poso (Sulawesi Tengah). Jumlah cabang tercatat 37 buah dan jumlah anggota meningkat menjadi 12.000 orang. Lambang BNI adalah "Banteng" sedangkan trompetnya adalah

mingguan "Menara" (Taulu, 1950 : 99-100).

Pada tanggal 10 Nopember 1946 terbentuk di Manado organisasi pemuda nasionalis bernama Pemoeda Indonesia Soelawesi Oetara (PISO) dipelopori oleh F.H.L.W. Mondong, Ch.D. Pontoh, Nona Gusta Ngantung, Ben Wowor, H.J. Runtu, Usman Pulu-kaang, J. Karamoy, B. Supit, W. Warouw, A. Buchary, P.M. Simangunsong, J. Of lagi, L. Anes, L. Wongkar dan lain-lain. PISO sebenarnya sudah dirintis sejak Maret 1946. PISO dalam program-nya dapat dianggap merupakan kelanjutan dari PPI, BPNI, dan PIM yang sudah dilarang oleh NICA. Beberapa di antara para pendiri di atas adalah bekas tokoh dari ketiga organisasi pemuda terdahulu. Penasehat PISO waktu itu ialah drh. W.J. Ratulangi. PISO menerbitkan surat kabar yang dinamakan "Suara Piso", di bawah asuhan Ch.D. Pontoh. Karena PISO memperjuangkan penumbangan kekuasaan NICA sesuai jiwa dan semangat proklamasi 17 Agustus 1945, maka NICA berusaha menyusupkan infiltran ke dalanya dan akibatnya dua orang pemimpinnya, yakni F.H.L.W. Mondong dan Gusta Ngantung ditangkap NICA.

Dengan ditangkapnya kedua pemimpin PISO itu maka pusat organisasi dipindahkan dari Manado ke Tondano dan selanjutnya dipimpin oleh H.J. Runtu, P.M. Simangunsong dan Usman Pulukadang. PISO mendirikan cabangnya di Manado, Tomohon, Tondano, Sonder dan Tompaso di mana para anggotanya memperoleh kartu anggota yang bergambar "Pisau belati" (Wowor, 1977 : 84; Taulu, 1950 : 100; Posumah, 1978 : 63).

Dalam periode ini walaupun PPI dinyatakan terlarang akibat keterlibatannya selama perebutan kekuasaan NICA yang lalu, namun keyakinan untuk melanjutkan perjuangan menentang Belanda menjiwai seluruh anggotanya. Perjuangan bersenjata dilanjutkan secara gerilya dengan nama yang berbeda-beda baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok. Semangat mereka dipertebal lagi dengan masuknya beberapa perwira TRI yang dikirim dari Yogyakarta (Jawa Tengah) untuk menggerakkan dan membantu perlawanan di daerah ini. Dengan demikian muncullah beberapa organisasi pelanjut perjuangan PPI secara gerilya baik di hutan-hutan maupun di dalam kota-kota.

Sejak menyerahnya No Korompis yang memimpin TRISU dan PPI di Tondano dalam bulan Maret 1946, maka perlawanan dilanjutkan oleh beberapa pemimpin lain, di antaranya R. Pulukadang

yang segera mendirikan organisasi kelaskaran Indonesia Muda di sekitar Tondano. Perjuangan IM lebih meningkat dengan tibanya Letnan R. Lumingas dari Jawa. Letnan TRI itu sebelumnya pernah turut berjuang dalam pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya melawan Sekutu. Selain Letnan R. Lumingas, selama tahun 1947 tiba sejumlah perwira TRI dari Jawa. Mereka adalah orang-orang Minahasa yang resminya sebagai orang yang ingin pulang ke daerah yang memperoleh fasilitas pengangkutan kapal laut dari NICA. Setibanya di Minahasa semua mereka menyebar dan membantu perjuangan kelaskaran untuk melawan kekuasaan NICA. Di antaranya ialah Kapten Alex E. Rotty dan Kapten Constantijn Mamahit (A.E. Rotty, wawancara 7 September 1979; Wowor, 1977 : 85).

Kelanjutan PPI di Remboken ialah terbentuknya organisasi kelaskaran Corps Kebangsaan Sukarela (CKS) pimpinan Bus Tombeng dibantu Kapten C. Mamahit tersebut di atas. Di Kakas dibentuk Pasukan Pemuda Kakas (PPK) pimpinan Willy Malonda dan kawan-kawannya. Di Tondano di samping IM ada lagi organisasi pelanjut PPI pimpinan Sam Mangindaan dan Rens Kindangen. Di Tompaso dibentuk organisasi kelaskaran P-3 pimpinan V. Rorimpandey dan Gerson Tewu. Di Minahasa Tengah - Minahasa Selatan ada pasukan P-7 pimpinan Junus Oflagi, F. Runtunuwu dan Jo Rey dibantu seorang perwira TRI yang bernama Jootje Kaligis yang berhasil menyusup dari Samarinda (Kalimantan Timur). Selain itu Kaligis membentuk organisasi pemuda pelajar bernama Kepanduan Indonesia Merdeka (KIM) yang antara 1947- 1948 digembleng dalam latihan-latihan kemiliteran dengan mempergunakan tanda pangkat dan disiplin militer. Ketika Kaligis pulang ke Jawa, usahanya diteruskan oleh E.R.S. Bujung yang berhasil memperluas perjuangan KIM sampai ke Amurang, Kawangkoan dan Tomohon (Wowor, 1977 : 84-85).

Pada tahun 1946 muncul pula organisasi politik Perkumpulan Masyarakat Katolik (PEMAKAT) pimpinan J.B. Terok, F. Th. Kambey dan F. Wowor. Programnya nampak agak pro Belanda sebab menyokong terbentuknya negara federal. Oleh karena itu pada tahun itu juga sebagian pemimpinnya mendirikan Partai Katolik yang pro RI. Mereka itu ialah F.Th. Kambey dan A. Rompis (Taulu, 1950 : 100; Wowor, 1977 : 88; 1972 : 66; Posumah, 1978 : 49-50).

B. MASA AKSI MILITER BELANDA I

Sesudah persetujuan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1946, suasana politik di Indonesia bukan semakin cerah malah sebaliknya semakin keruh. Belanda menjalankan aksi sesuai tafsirannya sendiri akan sisi persetujuan itu. Mereka menuntut agar RI menghapuskan blokade ekonomi terhadap kota-kota di Jawa dan Sumatera. RI harus menerima langkah-langkah ke arah pembentukan Negara Indonesia Serikat (NIS) sesuai kehendak Belanda. Karena RI tidak mau menuruti semua tuntutan di atas maka Belanda memberikan ultimatum pada tanggal 27 Mei 1947 di mana RI harus memberikan jawaban yang memuaskan terhadap Belanda. Kalau tidak, maka mereka tidak mau lagi mengakui isi persetujuan di atas. Pada tanggal 21 Juli 1947 aksi militer Belanda dilancarkan terhadap semua kedudukan RI di Jawa dan Sumatera.

Daerah Sulawesi Utara memang secara geografis letaknya jauh terpisah dari Jawa dan Sumatera, tetapi daerah ini secara tidak langsung turut menderita akibat tindakan-tindakan Belanda dalam rangka aksi militernya. Hal ini mengingat bahwa daerah Sulawesi Utara pernah menyatakan diri tidak dapat dipisahkan dari RI selama 14 Pebruari sampai 11 Maret 1946, sebagaimana sudah dikemukakan di depan. Dengan demikian maka untuk menjaga jangan sampai hal itu terulang lagi sementara mereka menjalankan aksi militer di Jawa dan Sumatera, maka NICA mendatangkan satu divisi KL yang dinamakan "Divisi 7 Desember" pimpinan Letkol J. van Marle. Divisi ini memperkuat pertahanan Belanda sebelum dilancarkan aksi militer I. Para pensiunan KNIL yang besar jumlahnya di daerah ini sewaktu-waktu dapat diaktifkan kembali menjadi Reserve Corps Belanda. Pasukan polisi, terutama PID, besar sekali peranannya dalam usaha menindas gerakan di bawah tanah dalam periode ini. Di kota Tonjohon didirikan satu Depot Latihan, dipimpin oleh Letkol van Baarsel untuk mendidik anggota-anggota militer yang kemudian ditugaskan baik di daerah ini maupun ke daerah-daerah lainnya (Wowor, 1977 : 82; 1972 : 60).

Di pihak lain, menghadapi tekanan yang semakin berat dari pihak Belanda, para pejuang RI di daerah ini membentuk organisasi kelaskaran bernama Laskar Rakyat Republik Indonesia (LRRI) pada tanggal 10 Pebruari 1947, dipelopori oleh F.H.L.W. Mondong, Nona Gusta Ngantung, P.M. Simangunsong, R. Longdong, Arsjad Buchary, Junus Oflagi, H.M. Taulu dan kawan-

kawannya. Dinyatakan bahwa dengan terbentuknya LRRI maka organisasi PPI secara resmi serentak dilebur ke dalam LRRI. Dengan demikian maka secara otomatis semua bekas pimpinan PPI menjadi pimpinan LRRI di sektor masing-masing untuk melanjutkan perlawanan gerilya terhadap Belanda (Posumah, 1978 : 68-69).

Markas Komando LRRI berada di rumahnya F.H.L.W. Mondong di desa Talete (Tomohon). Staf markas komando yang dipimpin F.H.L.W. Mondong itu terdiri dari B Wowor, K. Wondal, N.Th. Rumajar, Alex Pua, S.B. Wangkay, Paul Rumajar, J. Kaindeh, Boy Potu, Piet Ngantung, Lexy Anes, Alex Liogu, B. Liogu, J.H. Tular, J. Potu, Jonky Kumontoy, S.I. Rumajar, Wong Pai Sau, G. Warouw, A. Achmad dan lain-lain (Posumah, 1978 : 70).

Wilayah perjuangan gerilya dari LRRI disebut "Komando Wilayah Daerah" yang terdiri atas tujuh "wilayah sedang" dan satu "wilayah besar" sebagai berikut (Posumah, 1978 : 69) :

1. Komando Wilayah Daerah I (Tomohon dan sekitarnya) di bawah Komandan F. Wongkar;
2. Komando Wilayah Daerah II (Tondano dan sekitarnya) di bawah Komandan F. Runtunuwu dibantu J. Talumikir;
3. Komando Wilayah Daerah III (Airmadidi dan seluruh Tonsea) di bawah Komandan V. Mandey dibantu oleh Nona Custa Ngantung;
4. Komando Wilayah Daerah IV (Kawangkoan dan sekitarnya) di bawah Komandan H.M. Taulu dibantu Ton Lumentah;
5. Komando Wilayah Daerah V (Kakas-Remboken dan sekitarnya) di bawah Komandan C. Mamahit;
6. Wilayah Daerah VI (Ratahan, Tombatu, Belang dan sekitarnya) di bawah Komandan J. Methusala dibantu oleh Palassa;
7. Komando Wilayah Daerah VII (Amurang dan sekitarnya) di bawah Komandan Henky A. Kaligis;
8. Komando Wilayah Besar (Manado dan sekitarnya) di bawah Komandan Chris D. Pontoh dibantu Mat Pulukadang.

LRRI sebagai satu organisasi kelaskaran dalam masa ini berkekuatan sekitar 3.550 anggota yang terdaftar dalam setiap wilayah komando yang ada.

Untuk memperoleh senjata maka LRRI berusaha mengadakan

hubungan dengan pihak luar, di antaranya dengan seorang pelaut Australia bernama O'Malley. Dalam hal itu ditugaskan kepada Nona Gusta Ngantung untuk menghubunginya di mana senjata akan ditukarkan dengan emas dan tempat penukarannya ditentukan di pantai Tondano. Hubungan itu terjadi dalam bulan Juni 1947, yakni sebulan sebelum dilancarkan aksi militer pihak Belanda yang pertama. Karena kesalahan waktu, tambahan lagi Belanda mengadakan pengawasan yang ketat, maka pertukaran itu gagal, malahan Gusta Ngantung ditangkap dan dipenjarakan (Wowor, 1977 : 86).

Kemudian LRRI berusaha membuat senjata sendiri dengan bahan dasar berasal dari senjata rusak peninggalan tentara Jepang. Bengkel senjata didirikan secara rahasia di sebuah gua di puncak gunung yang dinamakan "Mata Tombak" di sekitar Remboken. Bengkel senjata LRRI ini dipimpin oleh Frits Mamahit dan menghasilkan senjata ringan seperti Colt, Sten, FN dan senapan ringan. Bengkel senjata ini telah menghasilkan senjata untuk kebutuhan satu kompi yang dibagi-bagikan untuk sektor Tondano, Eris, Kakas dan Remboken (Wowor, 1977 : 86).

Dewan Minahasa

Pada masa pemerintahan Asisten Residen Minahasa A.I. Lutheyn (1947–1948) maka NICA mengaktifkan kembali Dewan Minahasa yang intinya adalah para anggota yang pernah duduk dalam dewan itu sebelum masa pendudukan Jepang. Dewan ini sebenarnya mulai dipulihkan kembali pada tahun 1946 yang tugasnya antara lain (Watuseke, 1968 : 61) :

1. menyalurkan hasrat rakyat serta memperhatikan usul-usul rakyat dalam soal ketataprajaan serta pemerintahan Minahasa sebagai daerah otonom;
2. memperjuangkan kepentingan-kepentingan Minahasa kepada pejabat-pejabat yang berwenang;
3. memberikan pertimbangannya dalam segala urusan pemerintahan yang memerlukan pertimbangan dewan.

Hasil diaktifkannya dewan itu ialah dijadikannya Minahasa sebagai daerah otonom pada tahun 1947. Untuk itu pejabatnya bukan lagi Asisten Residen tetapi mulai tahun 1948 disebut Kepala Daerah, di mana Kepala Daerah Minahasa yang memerintah waktu itu ialah D.A.Th. Gerungan (1947–1949) menggantikan Asisten Residen A.I. Lutheyn. Dewan Minahasa Sementara (di-

bentuk 1946) dibubarkan setelah terpilihnya 22 anggota Dewan Minahasa hasil pemilihan umum bulan Maret 1948. Kepala Daerah bertugas merangkap sebagai Ketua Dewan Minahasa pada waktu itu (Watuseke, 1968 : 61–62; Posumah, 1978 : 9–10, 72, 74).

Perjuangan parlementer dari organisasi-organisasi yang pro RI untuk merebut kursi di dewan itu tidak kalah sengitnya dibandingkan dengan perjuangan kemerdekaan bawah tanah. Hal ini karena unsur-unsur yang pro Belanda sangat aktif dan didukung dengan kuatnya oleh Belanda sendiri. Kekuatan politik di dewan itu terbagi atas tiga kelompok, yakni yang menghendaki bentuk federal (GIM, Hoofdenbond, PEMAkat), yang ingin bergabung dengan Belanda (TWAPRO), dan yang pro RI (KRIS, BNI, Partai Katolik). Sayang sekali komposisi kekuatan dalam dewan tidak jelas (Wowor, 1977 : 88; Posumah, 1978 : 73–74).

Dewan minahasa ini berkedudukan di Manado yang kembali telah menjadi ibukota Minahasa sejak 1947 setelah dipindahkan dari Tomohon. Sebagai ibukota maka Manado berstatus Kotapraja Gaya Baru yang langsung berada di bawah Kepala Daerah Minahasa. Walaupun sejak 1949 memiliki Walikota sendiri, yakni Ny. A.M. Waworuntu (akhir 1949–1951), namun kedudukan itu masih berada di bawah Kepala Daerah Minahasa (Posumah, 1978 : 8–9).

Presiden NIT melalui surat keputusan 20 Maret 1948 No. 2/Pr.4/48 (LN–NIT 1948/22) yang dilaksanakan dengan surat keputusan Residen Manado 25 Maret 1948 No. R/12/2/15 berlaku mulai 22 Maret 1948, membagi daerah Minahasa atas enam distrik, yakni Manado, Tonsea, Kawangkoan, Ratahan, Tondano dan Amurang (GKDH, 1974 : 45). Selanjutnya mengenai pembagian distrik atas onderdistrik (distrik bawahan) adalah sebagai berikut (Watuseke, 1968 : Lamp.X.B. : Posumah, 1978 : 10–11) :

1. Kota Manado
2. Distrik Manado, terdiri atas :
 - a. Distrik Bawahan Manado Utara
 - b. Distrik Bawahan Manado Selatan
3. Distrik Tomohon, terdiri atas :
 - a. Distrik Bawahan Tomohon
 - b. Distrik Bawahan Tombariri
4. Distrik Tonsea, terdiri atas :
 - a. Distrik Bawahan Airmadidi
 - b. Distrik Bawahan Kauditan

- c. Distrik Bawahan Girian
- d. Distrik Bawahan Tatetu
- 5. Distrik Toulour, terdiri atas :
 - a. Distrik Bawahan Tondano
 - b. Distrik Bawahan Eris
 - c. Distrik Bawahan Kakas
- 6. Distrik Kawangkoan, terdiri atas :
 - a. Distrik Bawahan Kawangkoan
 - b. Distrik Bawahan Tumpaan
 - c. Distrik Bawahan Langowan
- 7. Distrik Amurang, terdiri atas :
 - a. Distrik Bawahan Amurang
 - b. Distrik Bawahan Tenga'
 - c. Distrik Bawahan Tompasobaru
- 8. Distrik Ratahan, terdiri atas :
 - a. Distrik Bawahan Ratahan
 - b. Distrik Bawahan Tombatu.

Dalam periode ini muncul lagi satu organisasi pro RI dan satu pro Belanda. Yang pro Belanda ialah Komite Ketatanegaraan Minahasa (KTM), dipimpin dr. V.L. Ratumbusang yang baru saja datang dari Yogyakarta. Tujuan KTM ialah hendak mendirikan sebuah Negara Minahasa lepas dari NIT, dari RI, maupun dari Nederland, dan merupakan salah satu negara di dunia, jadi jauh lebih ekstrim dari TWAPRO yang hanya menghendaki status propinsi ke 12 (dari Belanda) untuk Minahasa. Saat KTM didirikan tidaklah jelas tetapi dipastikan antara 1947–1948. Selain dr. V.L. Ratumbusang, pemimpin lainnya yakni E.D. Dengah, O. Mawuntu dan Dimpudus (Posumah, 1978 : 20–21).

Organisasi pro RI yang didirikan dalam periode ini ialah suatu organisasi pemuda nasionalis yang dinamakan Kebaktian Rakyat Indonesia Sosialis atau KRIS (perlu dibedakan dari KRIS yang merupakan organisasi kelaskaran di pulau Jawa yang merupakan singkatan dari Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi). PISO yang didirikan pada tanggal 10 Nopember 1946 di Manado dirasakan perlu dibubarkan berhubung banyaknya kaki tangan NICA yang berhasil menyusup dan untuk itu dibentuklah KRIS ini. Para pendirinya yakni G.A. Maengkom, F.H.L.W. Mondong, Karel Supit, Nona Gusta Ngantung, P.M. Simangunsong dan L. Anes. KRIS ini didirikan pada tanggal 12 Januari 1948 yang azasnya adalah sosialisme sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan kesatuan Indonesia sepenuhnya serta tersusunnya masyarakat yang sosialis (Posumah, 1978 : 44; Taulu 1950 : 100–101).

Dengan demikian kalau untuk perjuangan gerilya ada LRRI, maka untuk perjuangan pemuda dalam bidang politik ada KRIS. KRIS berhasil mendirikan cabang-cabangnya di Manado, Tomohon, Tondano, Sonder, Tompaso, Amurang, Airmadidi dan tempat-tempat lainnya di Minahasa. Sebagai suara KRIS maka diterbitkan "Gelora Masa" sebagai pengganti "Suara Piso" yang dahulunya diterbitkan PISO. KRIS ikut dalam pemilihan anggota Dewan Minahasa dalam bulan Maret 1948, memperoleh 1.758 suara dan mempunyai wakilnya di dewan itu (Taulu, 1950 : 101; Posumah, 1978 : 45-46).

Para pemuda pejuang pada waktu itu memiliki keanggotaan rangkap dalam LRRI dan KRIS sehingga kedua organisasi itu dalam tindakan-tindakannya melawan Belanda senantiasa bahu membahu. Seorang pimpinan LRRI merangkap anggota KRIS bernama Jonky Kumontoy berhasil mengambil dokumen rahasia di kantor NICA yang merupakan laporan rahasia Residen Manado DR. Morison yang sedianya akan dikirimkan ke Jakarta. Laporan itu diserahkan dan dimuat dalam surat kabar Gelora Masa milik KRIS. Sebagai akibatnya maka penanggung jawab surat kabar, Ch.D. Pontoh bersama G.A. Maengkom dan F.H.L.W. Mondong, ditangkap Belanda. Kedua pemimpin KRIS itu sekaligus merangkap pimpinan LRRI, di mana Maengkom adalah Ketua Umum KRIS dan Mondong adalah Komandan LRRI seluruhnya.

Sejak saat itu surat kabar Gelora Masa diberangus oleh Belanda dan kedua pimpinan di atas dipenjarakan, di antaranya G.A. Maengkom dipenjarakan dua tahun di Manado. Karena ditangkapnya F.H.L.W. Mondong maka KRIS membentuk Pimpinan Pusat Darurat Badan Perjuangan KRIS yang susunannya sebagai berikut (Posumah, 1978 : 45-46) :

Ketua	: L. Anes
Sekretaris	: A. Liogu, dan Gusta Ngantung
Anggota-anggota	: A. Pua, N.Th. Rumajar, J.H. Tular, Karel Wondal, S.I. Rumajar dan J. Kumontoy.

Pimpinan Pusat Darurat ini tetap bertugas (walaupun kemudian F.H.L.W. Mondong selesai menjalankan hukuman penjara) dan memiliki peranan yang besar dalam menghadapi pasukan KNIL dan polisi NIT dalam periode sesudah 1949 di Minahasa.

C. MASA AKSI MILITER BELANDA II DAN PERIODE PERANG GERILYA

Pada tanggal 9 Maret 1948 pemerintah kolonial menghapuskan status pemerintahan NICA dan didirikan Pemerintah Federal Sementara yang dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal, DR. H.J. van Mook. Pemerintah Federal Sementara ini mengakui dan mengikutsertakan semua negara bagian yang terbentuk sebelumnya, kecuali RI. Dari sudut pandangan pemerintah federal ini maka RI diakui hanya berkuasa *de facto* atas Jawa dan Sumatera sesuai persetujuan Linggarjati yang ditegaskan lagi dalam perjanjian Renville kemudian, di mana RI hanya diakui sederajat dengan NIT, NST dan lain-lain yang dibentuk Belanda. Hal ini ditentang mati-matian oleh RI baik melalui perundingan maupun dengan kekuatan militer, karena sama sekali tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

Pemerintah NIT waktu itu dipimpin oleh Perdana Menteri Ide Anak Agung Gde Agung merangkap Menteri Dalam Negeri yang memimpin 15 anggota kabinet lainnya (Kempen, 1953 : 137). Keresidenan Manado berada di bawah Residen DR. Morrison, sedangkan Minahasa di bawah Kepala Daerah D.A. Th. Gerungan yang juga merangkap Ketua Dewan Minahasa. Kekuatan politik sudah terbagi atas dua bagian, yaitu yang pro Belanda (TWAPRO, Hoofdenbond, PEMAKAT, GIM) dan yang pro RI (BNI, KRIS, LRRI, Partai Katolik). Kecuali LRRI, maka semua organisasi tersebut di atas diwakili dalam Dewan Minahasa bentukan Belanda.

Dalam periode ini kegiatan kelaskaran seluruhnya dilakukan atas nama LRRI untuk melawan Belanda dengan sistem gerilya. LRRI di Tompaso membentuk satu pasukan kecil yang dinamakan Tentara Rela Mati (TRM) dipimpin Gerson Tewu, A. Tujuwale, R. Rorimpandey, D. Wondal, J. Momongan, J. Kumontoy dan lainnya. Mereka bermaksud melancarkan pemberontakan bersenjata dalam periode ini. Namun pada bulan Oktober 1948 sebelum sempat menjalankan aksinya, para pemimpin TRM itu ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh Belanda (Taulu, 1950 : 101). CKS di Remboken pimpinan Bus Tombeng dan Kapten TNI C. Mamahit (yang menyusup dari Jawa) melakukan perjuangan gerilya melawan Belanda atas nama LRRI. Mereka aktif mengganggu kedudukan-kedudukan Belanda di Remboken

sampai ke Kakas. Kapten TNI ini lebih dikenal dengan nama Tien Mamahit yang tewas dalam suatu serangan di Kakas pada tanggal 25 Oktober 1949. Oleh karena itu maka Komandan LRRI F.H.L.W. Mondong menunjuk Letnan AURI Ch. Talumikir untuk menggantikan kedudukan Mamahit selaku Komandan LRRI Komando Wilayah Daerah V, yakni daerah Kakas-Remboken dan sekitarnya. (Pasumah, 1978 : 69, 82-83; Wowor, 1977 : 85).

Perlawanan gerilya di Minahasa berlangsung terus sejalan dengan yang terjadi di Jawa dan Sumatera serta di daerah-daerah lain dalam periode ini. Dengan ditandatanganinya Persetujuan Roem-Royen 7 Mei 1949, maka untuk sementara perlawanan gerilya mereda sesuai perintah gencatan senjata yang dikeluarkan kedua belah pihak. Namun Belanda tetap berusaha memperkuat dirinya, sehingga di Minahasa perlawanan terus dilanjutkan oleh LRRI dibantu oleh sejumlah perwira TNI yang sebelumnya disekundupkan membantu perlawanan gerilya di daerah ini terhadap Belanda.

Hal ini nyata ketika pada tanggal 10 Oktober 1949 para anggota KRIS mengadakan penyerbuan ke Markas Polisi Tondano dan berhasil merebut sejumlah senjata tanpa mengalami kerugian jiwa. Sebelumnya pada tanggal 8 Oktober 1949, mereka sedang mengadakan perayaan organisasi KRIS yang turut dihadiri oleh J. Wajong yang baru datang dari Yogyakarta dan menjabat selaku Wakil Komisaris/Sekretaris Jenderal Pemerintahan Propinsi Sulawesi yang berkedudukan di Yogyakarta (berhubung propinsi Sulawesi masih dikuasai Belanda).

Perayaan 8 Oktober 1949 itu dihadiri oleh sejumlah tokoh KRIS, di antaranya Bert Supit, Sj. Taulu, Ompi, Moningga, L. Anes, N.Th. Rumajar, Ch. Talumikir, F. Runtunuwu, J. Watuseke, F. Tuju dan sebagainya, kebanyakan di antara mereka menjabat sebagai pimpinan LRRI yang sedang menjalankan perang gerilya melawan Belanda. Hal ini diketahui dengan jelas oleh pihak Belanda yang merencanakan untuk menangkap para pemimpin tersebut. Rencana Belanda ini dapat diketahui pula oleh para pemimpin di atas sehingga mereka memutuskan untuk mendahului gerakan musuh. Dengan pimpinan Ch. Talumikir, F. Runtunuwu, J. Watuseke dan kawan-kawannya, maka KRIS menyerbu markas polisi di Tondano pada tanggal 10 Oktober 1949 di mana semua senjata polisi yang berdinam pada waktu itu berhasil jatuh ke tangan KRIS.

Setelah berhasil merampas senjata maka mereka kemudian melarikan diri ke arah pantai Tondano untuk menyusun kekuatan menghadapi tindak balasan Belanda. Dengan segera Belanda mengerahkan pasukan polisi dan KNIL untuk melakukan pengejaran, tetapi sia-sia saja. Kemudian Belanda memperkuat markas polisi dengan kekuatan satu peleton dibantu satu regu anggota KNIL (Posumah, 1978 : 80-82).

Pada tanggal 25 Oktober 1949 sepasukan LRRI dari Remboken, di bawah pimpinan Kapten TNI C. Mamahit, menyerbu polisi Kakas untuk merebut senjata-senjata mereka. Dalam serangan yang dipersiapkan terlalu tergesa-gesa itu, polisi di Kakas dibantu oleh seorang pensiunan kopral KNIL berhasil menangkap Mamahit, sehingga Mamahit luka parah dan tewas tanpa perawatan seperlunya. Namun gerakan LRRI dan KRIS ini berhasil merebut senjata polisi di Tondano dan Kakas sebanyak 35 pucuk dengan korban seorang saja, yakni Kapten TNI C. Mamahit. Untuk itu maka Komandan LRRI F.H.L.W. Mondong menunjuk Letnan AURI Ch. Talumikir menggantikan kedudukan Mamahit selaku pimpinan Komando Wilayah Daerah V sebagaimana sudah disebutkan di atas.

Sementara itu para pemimpin LRRI memutuskan untuk meningkatkan perjuangannya dengan mengadakan pembagian tugas organisasi di mana LRRI membentuk Laskar Front Pemuda (LFP) di bawah Komandan L. Anes (yang sedang menjabat Ketua Pimpinan Pusat Darurat LRRI). LRRI akan meneruskan perjuangan gerilya, khusus untuk melucuti senjata polisi Belanda, sedangkan LFP ditugaskan untuk mendekati para anggota tentara Belanda (KNIL) agar menyeberang ke pihak RI. Untuk itu maka L. Anes dibantu oleh sejumlah pejuang, yakni A. Liogu, Piet Ngantung, Ales Pua, J.H. Tular, Gusta Ngantung, V. Mandey, V. Saerang, Karel Wondal, U. Pangkerego. Untuk tetap memelihara koordinasi antara LRRI dan LFP maka ditunjuk dua anggota, yakni J. Kumontoy dan N.Th. Rumajar. Beberapa anggota KNIL dengan segera menggabungkan diri ke dalam LFP tanpa sepengetahuan Belanda, di antaranya A.H. Mengko, Mamengko, Angkouw, L. Saerang, J. Pusung, F. Bolang, Tumonggor, Pontoh, S. Mondong dan Tuturoong. Kepada mereka selanjutnya ditugaskan oleh LFP untuk mempengaruhi para anggota KNIL lainnya yang berada di markas Teling (Manado) dan menyusun kekuatan untuk menggabungkan diri dengan LFP. Berkat kegiatan para anggota KNIL

yang diam-diam menjadi anggota LFP itu, maka perlahan-lahan sejumlah senjata milik KNIL diserahkan kepada LFP sehingga LFP semakin kuat kedudukannya (Posumah, 1978 : 70-71). Dengan demikian maka perlawanan gerilya terhadap Belanda semakin meningkat di Minahasa.

Di daerah Gorontalo dalam periode ini terus dilakukn gerakan-gerakan di bawah tanah yang dipelopori oleh para pemuda nasionalis di daerah tersebut. Walaupun sebagaimana sudah dikatakan di depan, para pemimpinnya banyak yang telah ditangkap Belanda dan dipenjarakan, namun anggota-anggotanya tetap aktif bergerak dalam perjuangan gerilya. Bahkan perjuangan mereka ternyata memperoleh simpati di kalangan para anggota militer Belanda. Seorang anggota KNIL bernama A.J. Aniesz berusaha mempengaruhi rekan-rekannya agar mau membantu perjuangan gerilya di sana. Namun sebelum pengaruhnya meluas, ia ditangkap dan dipenjarakan (Mimbar Indonesia No. 22, 3 Juni 1950). Kaum gerilya di Gorontalo suatu ketika menyerang iring-iringan mobil yang membawa para anggota KL dan KNIL yang menuju ke Marisa. Jembatan-jembatan yang akan dilalui dirusak atau dibakar. Tetapi kemudian Belanda dapat menangkap para pemimpinnya, sehingga Adam Pade, Abas DoE dan H.M. Bokings dimasukkan ke dalam penjara.

Di Bolaang Mongondow perjuangan ditandai pula oleh dibentuknya cabang BNI yang berpusat di Manado. Rapat pembentukan cabang BNI Bolaang Mongondow diadakan di gedung SMP Cokroaminoto dipimpin oleh pimpinan BNI dari Manado, yakni G.E. Dauhan, Abdul Ma'djid, M.D. Kartawinata. Dalam rapat ini maka M.D. Kartawinata ditunjuk selaku ketua cabang, dibantu oleh C.S. Gobel, A.U. Mokoginta dan lain-lain.

Organisasi Barisan Rakyat Revolusioner Indonesia (BRRI) yang terbentuk di Tondano (Minahasa) pada tanggal 17 Juni 1946 yang dipimpin oleh H.H. Waworuntu Labaika (Ketua Umum), Masloman (Ketua I), Laurens Kindangen (Ketua II), Constantijn Mamahit (Sekretaris Umum) dan beberapa pembantu yakni J. Kindangen, Frits Mamahit dan I. Kindangen, diperluas pula sampai ke Bolaang Mongondow.

Di Minahasa BRRI membentuk Wilayah Pertahanan I, sedangkan Bolaang Mongondow menjadi Wilayah Pertahanan II. Untuk wilayah pertahanan I ada empat sektor, yakni :

1. Sektor pertahanan Tondano pimpinan Komandan G.A.

Maengkom;

2. Sektor Pertahanan Tateli pimpinan Komandan H.R. Ticoalu;
3. Sektor Pertahanan Tomohon pimpinan Komandan J.P. Pitoy dibantu Jan Rombot;
4. Sektor Pertahanan Remboken dipimpin Komandan H.H. Waworuntu Labaika, J. Mamahit, L. Mamusung, Alex Kairupan.

Wilayah Pertahanan II Bolaang Mongondow dipimpin oleh A.C. Manoppo dibantu oleh Johan Pontoh, R. Mokoginta (H.H. Waworuntu Labaika, wawancara 17 Oktober 1979).

Selain memimpin BRRI Bolaang Mongondow, maka A.C. Manoppo juga memimpin Gerakan Indonesia Merdeka (GIM) yang sejak tahun 1946 telah terbentuk di daerah ini. Susunan pengurus GIM setempat waktu itu ialah :

K e t u a	: A.C. Manoppo
Wakil Ketua	: Johan Pontoh
Sekretaris	: R. Mokoginta
Seksi Pemuda	: J.C. Mokoginta, H.D. Manoppo, U.S.A. Mokoagow, Rumondor.
Seksi Organisasi	: Frans A. Mokoginta, Frits Mokoginta B. Pandelaki.
Seksi Keuangan	: R. Mokoginta.

GIM membentuk ranting di hampir semua desa di Bolaang Mongondow, di mana sebagian besar kepala desa (Sangadi) menjadi pimpinan ranting GIM. Cabang-cabang didirikan di tingkat kerajaan antaranya untuk :

Kerajaan Kaidipang Besar	: Donggala Korompot
Kerajaan Bintauna	: A.M. Datunsolong
Kerajaan Bolaang Uki	: Muhammad Kadulla, dan B.J. Kadulla.

Rakyat daerah Sangir Talaud dalam periode ini tidak mampu berbuat apa-apa karena tekanan yang keras yang dilakukan Belanda terhadap daerah itu. Peristiwa dan perkembangan yang terjadi di daerah lain, terutama di Jawa, dapat dikatakan kurang sekali diketahui oleh rakyat daerah ini akibat pengawasan yang keras. Pasukan KNIL di bawah Letnan Ponto berhasil digunakan Belanda untuk mengawas-awasi sesama bangsanya di daerah ini.

Ketika Belanda mengadakan aksi militernya yang kedua, maka beberapa tokoh nasionalis setempat yang tergabung dalam

BNI dipanggil menghadap. Para pemimpin itu, yakni Hamzah Adariku, Ahmad Tompo, Wellem Aer, Abdul Hamid Mustir, A.H. Tarib, dan lain-lain. Ketika menghadap mereka ditanyai apakah mereka tahu bahwa Yogya sudah diduduki dan bahwa pemerintah RI sudah ditawan. Ini merupakan salah satu tindakan intimidasi yang dialami oleh kaum nasionalis di daerah Sangir Talaud. Sebagian di antara para pemimpin BNI itu, yakni Ahmad Tompo, Hamzah Adariku dan Wellem Aer, memang sudah ditahan sejak Belanda melancarkan aksi militer I. Sedangkan Abdul Hamid Mustir, A.H. Tarib dan rekan mereka lainnya baru ditangkap pada masa aksi militer Belanda II. Mereka ditahan di Tahuna, lalu dibawa ke Manado, dan baru dibebaskan ketika Belanda mengakui kedaulatan kita (Yuda, wawancara 15 September 1979; Tomp, wawancara 14 dan 18 September 1979; Madonsa, wawancara 18 September 1979).

D. INTERAKSI DENGAN BERBAGAI KEJADIAN TINGKAT NASIONAL

Sebagaimana sudah dikemukakan di depan, sistem kepartaian terutama muncul di tahun 1946, yakni sesudah perebutan kekuasaan NICA oleh para pejuang yang pro RI pada tanggal 14 Februari 1946 sampai 11 Maret 1946. Memang sebelum Perang Dunia II sudah banyak partai politik yang berdiri di Jawa yang mendirikan cabangnya di daerah ini, misalnya PSII, PKI, PNI, PARTINDO, PARINDRA, Persatuan Minahasa, dan sebagainya. Semua partai politik itu lenyap di masa pendudukan Jepang antara 1942–1945, tetapi kemudian muncul lagi sesudah itu. Di antara 1946–1950 didirikan pula banyak organisasi politik yang bukan merupakan cabang dari daerah lain, kebanyakan berpusat di Manado dan Minahasa. Beberapa di antaranya pro RI dan ada pula yang pro Belanda, atau setidaknya-tidaknya pro bentuk federal untuk negara Indonesia sesuai yang direncanakan oleh Belanda. Terutama di Minahasa, hal ini nyata sekali ketika diadakan pemilihan anggota Dewan Minahasa. Yang pro RI adalah BNI, KRIS, LRRI, dan Partai Katolik; yang pro Belanda adalah TWAPRO; dan yang pro bentuk federal adalah GIM, Hoofdenbond dan PEMAKAT.

Di daerah Sangir Talaud pada bulan Oktober 1945 muncul organisasi politik Partai Rakyat Indonesia (PARI) pimpinan L.M. Kansil. PARI ini kemudian melahirkan PERWANIS dan BAPRI.

Di daerah itu didirikan juga cabang BNI dari Manado. Di daerah Bolaang Mongondow sejak 1946 telah terbentuk GIM pimpinan A.C. Manoppo (lihat di depan).

Selain itu di Minahasa menjelang pengakuan kedaulatan, telah dibentuk satu organisasi politik pro Belanda yang dinamakan Gerakan Republik Indonesia Timur (GRIT). GRIT ini diperkirakan berdiri antara Juli–Agustus 1949 atas anjuran DR. Soumokil kepada Ketua TWAPRO Jan Mawikere (Posumah, 1978 : 18–20). Dalam periode ini pula para aktivis PNI bergabung dengan para pemimpin Persatuan Pemuda Indonesia, mendirikan Front Kesatuan Republik Indonesia (FKRI) yang bergerak di luar Dewan Minahasa. FKRI ini menuntut agar Dewan yang dibentuk sesuai hasil pemilihan Maret 1948 itu segera dibubarkan dan diganti dengan "Komite Nasional Daerah" (Posumah 1978 : 54–55).

Perjanjian Linggajati

Perjanjian Linggajati ditandatangani oleh pihak Belanda dan pihak Indonesia pada tanggal 25 Maret 1946. Tetapi karena Belanda tidak puas atas sikap Indonesia maka mereka melancarkan aksi militer I mulai tanggal 21 Juli 1947. NIT yang telah didirikan pada tanggal 24 Desember 1946, ketika aksi itu dilancarkan berada di bawah Perdana Menteri Nadjamuddin Daeng Malewa yang mengemukakan pendirian menyetujui dilancarkannya aksi oleh Belanda terhadap RI pada saat itu. Terhadap pendirian Perdana Menteri NIT itu maka seluruh partai politik yang pro RI menyatakan kekecewaan dan penyesalannya.

Di Minahasa BNI segera mengadakan pertemuan di Manado yang membicarakan tentang aksi militer itu serta persetujuan Linggajati dan masalah-masalah tingkat nasional lainnya. Pertemuan BNI itu diadakan pada tanggal 8 Agustus 1947 yang menghasilkan sebuah pernyataan ditandatangani oleh J. Jocom dan J.I. Permata selaku pimpinan BNI pada waktu itu. Isi pernyataan adalah sebagai berikut (Kempen, 1953 : 134–135) :

Berhubung dengan suasana politik Indonesia pada dewasa ini, maka Barisan Nasional Indonesia, Pusat Manado, memaklumkan pendiriannya, sebagai ternyata dibawah ini :

A. MENGENAI REPUBLIK INDONESIA.

Menegaskan sekali lagi keputusan Kongres Barisan Nasional Indonesia di Sonder pada tgl. 27/28 Djuni 1947, yang menjatakan bahwa :

1. Tetap mengakui Republik Indonesia sebagai bentukan Negara Indonesia yang sah.
2. Tetap mengakui Pemerintah Republik Indonesia sebagai wakil dari seluruh Bangsa Indonesia.
3. Tetap mempunyai kepertajaan sepenuhnya kepada Pemerintah Republik Indonesia.

B. TENTANG NASKAH LINGGARDJATI

Sampai saat penghabisan kami pertjaja, bahwa naskah Linggardjati ialah dasar yang utama dalam hal penyelesaian soal Indonesia — Belanda.

Tetapi berhubung dengan adanya tindakan Belanda, yang kami anggap sebagai "Agressie Militair" yang tidak mengindahkan serta yang telah melanggar dan membatalkan Naskah Linggardjati, maka kami yakin bahwa satu-satunya jalan sekarang untuk menyelesaikan masalah Indonesia—Belanda dengan tjara damai, ialah :

Pertjampuran tangan Internasional dengan tjara mengadakan Komisi yang terdiri dari wakil-wakil beberapa Negara, yang ditentukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa.

C. MENGENAI NEGARA INDONESIA TIMUR.

1. Kami tetap memegang kepada keputusan Kongres Barisan Nasional Indonesia di Sonder pada tgl. 27/28 Djuni 1947, jaitu :
"Terpaksa menjetudjui adanya N.I.T. yang lahirnya tidak setjara demokratis".
2. Setelah mendengar pidato dari Perdana Menteri N.I.T. Nadjamuddin Dg. Malewa dimuka tjorong radio Djakarta pada tgl. 22 Djuli 1947, yang menjatakan persetudjuannya atas tindakan Belanda terhadap Republik Indonesia, maka Barisan Nasional Indonesia menjatakan :
 - a. bahwa Barisan Nasional Indonesia sama sekali tidak setudju dengan isi pidato P.M. Nadjamuddin Dg. Malewa, yang mengandung persetudjuan atas tindakan Belanda yang dimulai pada tgl. 21 Djuli 1947 itu.
 - b. bahwa berhubung dengan yang tersebut diatas itu, maka kami menjatakan tidak kepertjajaan kami atas beleid Pemerintah Negara Indonesia Timur.

D. PENUTUP

Sebagai penutup, Barisan Nasional Indonesia sekali lagi menjatakan, bahwa Barisan Nasional Indonesia tetap mempunyai kejakinan, supaya soal Indonesia diselesaikan dengan tjara damai.

Demikianlah sikap masyarakat yang pro RI di Minahasa terhadap situasi politik tingkat nasional pada waktu itu. Dari pernyataan BNI di atas maka jelas terlihat bahwa rakyat di Minahasa terus menerus mengikuti perkembangan politik, baik di daerah sendiri sampai ke tingkat nasional bahkan turut menyumbang-

kan pendapatnya untuk tingkat internasional. Khusus mengenai Perjanjian Linggajati, maka BNI konsekwen dengan persetujuan delegasi dan Pemerintah RI akan isi persetujuan dengan Belanda itu. Dalam hal ini BNI yakin bahwa naskah Linggajati ialah dasar yang utama dalam hal penyelesaian soal Indonesia – Belanda.

Di kalangan rakyat daerah Sangir Talaud sebenarnya mulai timbul harapan bahwa akan segera tercipta perdamaian dengan ditandatanganinya perjanjian Linggarjati di atas. Dengan adanya perjanjian ini maka pastilah pertentangan antara Indonesia dan Belanda diselesaikan (Yuda, wawancara, 15 September 1979). Namun disayangkan bahwa sebelum isi perjanjian itu benar-benar dapat dilaksanakan, sudah dilancarkan aksi militer oleh Belanda.

Hal serupa dialami sekali lagi ketika ditandatanganinya perjanjian di atas, ada yang bersikap menerima dan ada yang menentangnya. Mereka yang pro RI turut pula menentang dengan mengadakan aksi berupa demonstrasi dan menyatakan sikapnya dalam surat kabar Menara milik BNI yang berpusat di Manado. Akibatnya maka beberapa di antara mereka yang pro RI itu dipanggil menghadap untuk diperiksa, kemudian ditahan (lihat halaman 155 – 156).

Politik DR. H.J. van Mook

DR. H.J. van Mook memegang jabatan selaku Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda sejak tanggal 14 Desember 1944 sampai tahun 1948, kemudian diganti oleh DR. L.J.M. Beel selaku Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda untuk Indonesia. Sejak menyerahnya Jepang, van Mook memindahkan pusat pemerintahan NICA dengan maksud untuk mendirikan kembali pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintahan van Mook ini menghadapi perlawanan yang gigih dari rakyat Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 di dalam wadah Negara Republik Indonesia.

Menghadapi kenyataan ini maka van Mook menjalankan politik memecah belah untuk menghancurkan RI. Sebagai langkah pertama diadakan Konperensi Malino pada tanggal 15–25 Juli 1946, disusul Konperensi Denpasar tanggal 8–24 Desember 1946 yang melahirkan Negara Indonesia Timur pada tanggal 24 Desember 1946. Sesudah NIT bertutur-turut didirikan Negara Pasundan (4 Mei 1947, disempurnakan 23 Pebruari 1948), Negara Madura (20 Pebruari 1948), Negara Sumatera Selatan (30

Agustus 1948), dan sebagainya. Selain itu Belanda membentuk sejumlah daerah otonom di luar negara-negara boneka tersebut di atas dan di luar wilayah RI antaranya Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur dan Banjar, di samping menentukan status Irian Barat sebagai daerah tersendiri (DPR-GR, 1970 : 92; Kempen, 1953 : 131).

Menghadapi sikap memecah belah yang dijalankan oleh van Mook itu maka rakyat di daerah Sulawesi Utara yang pro RI tetap berwaspada. Di daerah ini Belanda sempat mendirikan pemerintahan NICA di bawah Coomans de Ruyter yang kemudian diganti oleh Residen DR. Morison. Dalam masa pemerintahan Coomans de Ruyter, rakyat berhasil merebut kekuasaan di bawah pimpinan Letkol Ch.Ch. Taulu dan B.W. Lapien yang segera mengirimkan berita ke Yogyakarta di mana dinyatakan bahwa Daerah Sulawesi Utara adalah bagian yang tak terpisahkan dari RI. Hanya-lah atas pengkhianatan dari beberapa gelintir orang pro Belanda dalam tubuh KNIL maka Belanda dapat kembali berkuasa di sini. Namun gerakan-gerakan yang menentang kekuasaan mereka tetap dijalankan.

Hal ini nyata dengan dikeluarkannya pernyataan oleh Barisan Nasional Indonesia (BNI) sesuai hasil kongresnya di Sonder pada tanggal 27-28 Juni 1947 yang ditandaskan sekali lagi melalui pernyataannya tanggal 8 Agustus 1947 sebagai hasil pertemuan BNI di Manado sekitar tanggal itu. Dalam hal ini BNI tetap mengakui pemerintahan RI yang berkedudukan di Yogyakarta dan hanya dengan terpaksa mengakui adanya NIT sebagai suatu kenyataan. Belanda menunjang terbentuknya beberapa organisasi politik seperti Hoofdebond, TWAPRO, KKM dan sebagainya di Minahasa untuk memecah belah kekuatan rakyat Indonesia di Minahasa. Terhadap tindakan Belanda itu maka kekuatan yang pro RI membentuk beberapa organisasi pula untuk menghimpun kekuatan melawan Belanda, seperti BNI, LRRI, KRIS, Partai Katolik dan kemudian FKRI.

Rakyat di daerah Sangir Talaud, khususnya di Siau, membentuk PARI pimpinan L.M. Kansil bulan Oktober 1945 (lihat halaman 137). Sadar akan bahaya dilakukannya politik memecah belah, maka PARI mengirimkan surat dan kawat ke Yogyakarta menyatakan dukungan kepada pemerintah RI. Surat dan kawat PARI itu kemudian dibalas oleh pemerintah RI di mana

dinyatakan rasa terima kasih pemerintah atas usaha PARI di Peling (Siau), Sangir Talaud itu.

Rakyat di daerah Sangir Talaud pada masa itu terbagi atas dua golongan, yakni :

1. Golongan/aliran yang pro Belanda yang dipelopori oleh para raja yang berkuasa di sana waktu itu;
2. Golongan/aliran yang pro RI yang tergabung dalam BNI.

Mengenai kegiatan yang pro Belanda dan yang pro RI sudah cukup dikemukakan di depan di mana yang pro Belanda bersikap menerima daerah itu tergabung ke dalam NIT, sedang yang pro RI, bersama-sama yang berada di Minahasa, dengan dipelopori oleh BNI, menyatakan terpaksa mengakui NIT dan berusaha berjuang menghapuskan NIT.

Menjelang pembentukan NIT, wilayah pemerintahan Keresidenan Manado terdiri dari :

1. Daerah Minahasa (termasuk Manado)
2. Daerah Sangir Talaud
3. Daerah Sulawesi Utara (gabungan dari daerah Gorontalo, Bolaang Mongondow dan Buol).
4. Daerah Sulawesi Tengah.

Sesuai pembagian daerah di atas, maka van Mook meminta dikirimkan wakil-wakil daerah untuk menghadiri Konferensi Malino pada tanggal 15—25 Juli 1946. Mereka yang dikirim ke konferensi itu yakni :

1. Dari Minahasa : E.D. Dengah dan J.P. Mongula
2. Dari Sangir Talaud : Raja W.A. Sarapil.
3. Dari Daerah Sulawesi Utara : H. Katili.

Kemudian ketika van Mook mengadakan Konferensi Denpasar 8—24 Desember 1946, diutus dari :

1. Daerah Minahasa :
 1. Achmad Sechan Bachmid
 2. E.D. Dengah
 3. Th.M.H. Janssens
 4. E. Katoppo
 5. F.A.P. Pitoy
 6. The Sing Hoo SH
 7. H.J. Wenas
2. Daerah Sangir Talaud :
 1. Raja W.A. Sarapil
 2. J.E. Tatekeng

3. Daerah Sulawesi Utara :

1. A.C. Manoppo
2. Tom Olii
3. Ajuba Wartabone.

Dengan terbentuknya NIT 24 Desember 1946, maka beberapa peserta konferensi tersebut di atas duduk sebagai anggota DPR Sementara NIT yakni :

1. Wakil dari Minahasa :

1. E.D. Dengah
2. E. Katoppo
3. H.J. Wenas

2. Wakil dari Sulawesi Utara :

1. Tom Olii
2. Ajuba Wartabone

3. Wakil dari Sangir Talaud :

1. Raja W.A. Sarapil
2. J.E. Tatengkeng

Walaupun beberapa orang dari daerah ini aktif mengikuti Konferensi Malino, Konferensi Denpasar dan kemudian duduk dalam parlemen NIT bahkan ada pula yang menjadi Menteri (Kempen, 1953 : 76, 89-90, 122-124), namun di antara mereka seringkali melontarkan suara yang tidak menyetujui dibentuknya NIT yang terpisah dari RI sebagai negara kesatuan. Di antaranya adalah Ajuba Wartabone yang mengatakan dalam konferensi bahwa Rakyat Sulawesi Utara tidak mau menyetujui adanya negara federasi dari van Mook dan tetap berpendirian mengakui pemerintah RI yang berkedudukan di Yogyakarta (Usman, 1972 : 11).

Adapun sistem yang dijalankan untuk mengirimkan wakil ke konferensi-konferensi di atas, khusus di daerah Sangir Talaud dilakukan melalui sistem perwakilan. Sistem itu dimulai dari tingkat desa di mana setiap desa harus mengirimkan dua orang wakil yang disebut "kiesman". Kemudian para kiesman yang terpilih itu mengadakan rapat untuk memilih dua orang yang akan mewakili daerah Sangir Talaud, di mana telah terpilih Raja W.A. Sarapil yang mewakili golongan raja-raja, dan J.E. Tatengkeng yang mewakili golongan rakyat biasa. Kebetulan Raja W.A. Sarapil waktu itu menjabat selaku Ketua Dewan Raja-raja Sangir Talaud dan karena ia terpilih menjadi anggota parlemen sementara NIT maka kedudukannya itu diganti oleh B.J. Medellu. Kelak B.J.

Medellu ini menjadi Kepala Daerah Sangir Talaud yang kedua. Baik Raja W.A. Sarapil maupun J.E. Tatengkeng kemudian duduk selaku utusan BFO dalam KMB di Den Haag 1949 (Yuda, wawancara 15 September 1979; Tompo, wawancara 14 dan 18 September 1979).

E. PERJUANGAN MASYARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG KEGIATAN

1. Tata Pemerintahan

Dalam uraian-uriana terdahulu sudah dikemukakan mengenai ikut sertanya para tokoh nasionalis di Minahasa dalam kegiatan menjalankan pemerintahan di Minahasa. Para tokoh nasionalis itu dapat dibagi atas mereka yang bersikap moderat dan mereka yang sangat anti penjajahan. Mereka yang bersikap moderat menjalankan taktik dengan bekerja baik dalam instansi-instansi Jepang maupun NICA/Belanda. Namun hubungan antara mereka yang moderat dan yang terus-menerus menentang penjajahan itu tidak pernah meruncing atau terputus, bahkan bagaikan telah terjalin saling pengertian antara kedua golongan itu.

Untuk dapat bersuara dalam lembaga pemerintahan bentukan Belanda, maka BNI, KRIS dan Partai Katilok sebagai organisasi-organisasi yang pro RI, sebagai taktik ikut dalam pemilihan anggota Dewan Minahasa bulan Maret 1948. KRIS berhasil memperoleh 1.758 suara dan BNI 28.038 suara, sehingga organisasi-organisasi itu mempunyai wakilnya dalam dewan itu. Namun dalam sidang-sidang Dewan Minahasa ketiga organisasi di atas aktif menyerang kebijaksanaan politik pemerintah Belanda di daerah ini.

Di luar Dewan Minahasa, para aktivis PNI dan Persatuan Pemuda Indonesia membentuk FKRI yang kemudian menuntut dibubarkannya dewan tersebut. Walaupun KFRI tidak turut duduk dalam dewan, namun fraksi yang pro RI dalam dewan itu, antaranya anggota M. Sondakh, R.M.A. Dahlan, O.F. Pua dan juru bicara M.B. Tumbel, mendesak agar Dewan menyatakan bahwa Minahasa adalah bagian dari wilayah RI (Posumah, 1978 : 55, 76). Hal serupa sudah lebih dahulu dikemukakan oleh BNI pada tahun 1947 sebelum terbentuknya Dewan Minahasa hasil pemilihan umum Maret 1948 (lihat halaman 157-158).

Dalam periode ini, pemerintah di Sangir Talaud dipimpin oleh Dewan Raja-raja dengan seorang Ketua, yaitu Raja Tabukan W.A. Sarapil, dengan lima orang anggota, yakni Raja Kendhar/Tahuna F. Adriaan, Raja Manganitu Ambon Darondo, Raja Siau Ch. David, Raja Tagulandang Paul Tindas dan Raja Talaud Th. Binilang (Yuda, wawancara 15 September 1979; Binilang, wawancara 20 September 1979; Elias, 1973: 122; Adrian, 1968 : 49, 58). Di samping pemerintahan oleh Dewan Raja-raja maka Belanda menempatkan seorang Controleur di Tahunan sebagai Kepala Onderafdeeling Sangir Talaud, seorang Controleur di Ulu Siau selaku Hoofd van Platselijk Bestuur (HPB), dan seorang Adspirant Controleur di Beo (Talaud) selaku HPB (Ponto, wawancara 13 September 1979; Sigarlaki dkk, 1977 : 167). Hal ini hanya berlangsung sampai terbentuknya NIT 24 Desember 1946 (Manatar, 16 September 1979).

Dapat dikemukakan bahwa dari wawancara yang diadakan belum dapat dipastikan mengenai pejabat-pejabat Belanda dan Indonesia yang memegang jabatan pemerintahan di Sangir Talaud, terutama sesudah tahun 1946. Ada yang menyebutkan seorang Belanda bernama Bertsch sebagai Sekretaris Dewan Raja-raja dengan pembantunya B.J. Medellu yang pernah menjadi jaksa sebelum pendaratan Jepang. Dikatakan bahwa Controleur Belanda pertama sesudah perang adalah Burger yang ditempatkan NICA pada tahun 1947 (Rompas, wawancara 17 September 1979). Ada yang mengatakan bahwa Burger sudah memerintah sejak 1946 mendampingi Dewan Raja-raja di atas (H.C.H. Mahakanap, wawancara 18 September 1979).

Sumber lain mengatakan Krams sebagai Controleur yang pertama dalam pemerintahan NICA yang membawahi raja-raja di atas (Yuda, wawancara 15 September 1979). Yang lain mengatakan Raja W.A. Sarapil sebagai pejabat pertama yang memerintah atas nama NICA, kemudian setelah pejabat NICA datang raja tersebut diturunkan menjadi Raja Tabukan. Dengan dibentuknya Dewan Raja-raja dalam masa NIT, Sarapil diangkat selaku Ketua-nya dan dalam jabatan itu ia dianggap selaku Kepala Daerah Sangir Talaud yang pertama. Ketika Sarapil terpilih menjadi anggota Senat NIT, maka ia diganti oleh B.J. Medellu yang dianggap sebagai Kepala Daerah yang kedua (Sarapil, wawancara 18 September 1979; Tompo, wawancara 14 September 1979).

Namun sejak terbentuknya NIT maka sesuai Denpasar Rege-

ling 1946, daerah ini menjadi salah satu daerah NIT tingkat Onderafdeeling. Keenam swapraja yang ada digabungkan berdasarkan Daerah Statuut 1948 dengan ketentuan bahwa swapraja harus menandatangani acte van verbond dengan pemerintah NIT (namun yang terlaksana hanya dengan Th. Binilang). Sesuai Daerah Statuut 1948 maka di Sangir Talaud dibentuk : Dewan Raja-raja dan Dewan Sangir Talaud. Ketua Dewan Raja-raja otomatis diangkat oleh pemerintah NIT selaku Kepala Daerah, dan atas dasar itu maka W.A. Sarapil dianggap sebagai Kepala Daerah yang pertama.

Dewan Sangir Talaud dipilih dengan sistem bertingkat, dengan enam distrik pemilihan sesuai jumlah swapraja yang ada. Peraturannya dibuat oleh Dewan Raja-raja yang disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri NIT. Tugas/wewenang Dewan Sangir Talaud ini terbatas sekali yaitu hanya menyusun anggaran belanja daerah (medebegroting) dan memberi nasehat (adviseurend) (Ponto, 1979 : 3; Monografi Daerah, 1979 : 130).

Di daerah Bolaang Mongondow para pejabat Belanda selaku Controleur sesudah penyerahan Jepang adalah berturut-turut :

1. Mr. Wolrabbe (1945–1946)
2. Mr. Verhagen (1946–1947)
3. Mr. Veldkamp (1947–1948)
4. Mr. Langendonk (1948–1949)
5. Mr. A.C. van der Vlugt (1949–1950)

Sejak 8 Maret 1948 status Onderafdeeling dihapuskan lalu dibentuk daerah "Gabungan Bolaang Mongondow" dalam lingkungan NIT. Gabungan Bolaang Mongondow itu dibentuk berdasarkan Zelfbestuursregeling 1938 dan Staatsblad NIT N. 18 dan 27 tahun 1946, yang dilaksanakan oleh Residen Manado pada tanggal 20 Agustus 1948 No. B 17/1/8 mulai 8 Maret 1948. Gabungan Bolaang Mongondow ini berstatus sebagai Kabupaten otonom. Gabungan Bolaang Mongondow ini kemudian digabungkan dengan Gorontalo dan Buol, dan ketiga daerah itu membentuk "Daerah Sulawesi Utara" yang beribukotakan Gorontalo (untuk tidak mengacaukan dengan wilayah Sulawesi utara yang sekarang ini, periksa kembali halaman 161 – 162 di depan).

Sebagaimana diketahui, daerah Bolaang Mongondow terdiri atas empat kerajaan, yakni Kerajaan Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, Bintauna dan Kaidipang Besar. Masing-masing kerajaan dipimpin oleh seorang raja dan semua raja berada di bawah

Controleur yang berkedudukan di Kotamobagu (Ibukota daerah Bolaang Mongondow). Pada tahun 1948, dibentuklah Dewan Raja-raja Bolaang Mongondow yang susunanya adalah sebagai berikut (Manus dkk, 1979 : 36) :

1. Raja Bolaang Mongondow H.J.C. Manoppo selaku Ketua;
2. Raja Bolaang Uki A.H. Gobol selaku anggota;
3. Raja Bintauna M.T. Datunsolang selaku anggota; dan
4. Raja Kaidipang Besar R.S. Ponto selaku anggota.

Di samping Dewan Raja-raja di atas yang menjalankan pemerintahan maka ada Dewan Gabungan Bolaang Mongondow yang diketuai oleh A.C. Manoppo. Sama dengan di daerah Sangir Talaud, tugas Dewan Gabungan ini adalah dalam soal penyusunan anggaran belanja dan memberi nasehat kepada Ketua Dewan Raja-raja Gabungan Bolaang Mongondow saja.

Dalam periode sampai tahun 1950, terjadi kegiatan-kegiatan politik pro RI yang menentang pemerintahan NIT dan menuntut dibubarkannya pemerintahan Dewan Raja-raja serta Dewan Gabungan di atas. Sejumlah organisasi politik di Bolaang Mongondow itu menuntut segera dibentuknya pemerintahan daerah yang pro RI dan memperjuangkan terwujudnya Komite Nasional Daerah (KNI) Bolaang Mongondow. Tuntutan perjuang mereka nanti dapat terwujud berkat bantuan Laskar Republik Indonesia (LRRI) pimpinan H.L. Kaligis yang dikirimkan ke Bolaang Mongondow dari Amurang, Minahasa (Mengenai hal ini lihat Bab V.C.).

Daerah Gorontalo dalam lingkungan NIT terbentuk sejak 1947 dengan Peraturan Presiden NIT (Staatsblad NIT No. 12 tahun 1947) sebagai suatu *gemeenschap* (persekutuan hukum berdiri sendiri). Selanjutnya daerah Gorontalo ini digabungkan dalam bentuk federasi sehingga menjadi Daerah Sulawesi Utara sejak 19 Nopember 1948 yang disahkan oleh Residen Manado dalam penetapan tanggal 25 Januari 1949 No. R 22/1/11 yang berlaku mulai 7 Februari 1949. Dengan demikian maka federasi Daerah Sulawesi Utara terdiri dari :

- a. Daerah Gorontalo
- b. Gabungan Bolaang Mongondow (terdiri dari Kerajaan Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, Bintauna dan Kaidipang Besar).
- c. Swapraja Buol.

Ketiga daerah itu membentuk Daerah Sulawesi Utara yang Ibukotanya ialah kota Gorontalo (yang pada waktu itu berstatus

neo kotapraja = kotapraja gaya baru).

Daerah Sulawesi Utara ini adalah sesuai dengan penetapan dalam Staatsblad NIT No. 143/1946 yang mengatur tentang semua wilayah daerah dalam lingkungan NIT pada waktu itu dan berlaku sampai dibubarkannya NIT tahun 1950. Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Sulawesi Utara di atas dijalankan sesuai Zelfbestuurs-regeling (ZBR) 1938, di mana khusus untuk Daerah Gorontalo dibentuk :

- a. Satu Dewan Gorontalo, dan
- b. Satu Majelis Dewan Gorontalo

yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua.

Di kemudian hari terjadi pergolakan politik di Gorontalo yang menuntut pembubaran dewan-dewan yang ada untuk disesuaikan dengan Komite Nasional Daerah (KNI), sesuai UU No. 22 tahun 1948 dari pemerintah RI. Kelak peranan dan tugas dewan-dewan di atas diambil alih oleh Komite Nasional Daerah Gorontalo (KNI Gorontalo).

Susunan pemerintahan dari tingkat Daerah Sulawesi Utara sampai ke tingkat kecamatan (marsaoleh) dipimpin oleh Kepala Daerah Sulawesi Utara (pada waktu itu dijabat oleh Ajuba Wartabone). Kemudian tingkat ketiga daerah yang ada dipimpin oleh masing-masing Kepala Daerah (Gorontalo, Gabungan Bolaang Mongondow, Swapraja Buol). Selanjutnya di bawah tingkat Kepala Daerah ada Kepala Pemerintahan Negara (KPN), di bawah KPN ada Jogugu (Wedana), dan di bawah Wedana ini Marsaoleh (Asisten Wedana = setingkat camat sekarang ini).

Khusus daerah Gorontalo yang berstatus neo swapraja, terdiri dari lima distrik dan 15 onderdistrik sebagai berikut :

1. Distrik Gorontalo meliputi :
 - a. Onderdistrik Kota
 - b. Onderdistrik Kabila
 - c. Onderdistrik Bolango (Tapa)
 - d. Onderdistrik Telaga;
2. Distrik Suwawa meliputi :
 - a. Onderdistrik Suwawa
 - b. Onderdistrik Bonepante;
3. Distrik Limboto meliputi :
 - a. Onderdistrik Limboto
 - b. Onderdistrik Isimu
 - c. Onderdistrik Batudaa;

4. Distrik Kwandang meliputi :
 - a. Onderdistrik Kwandang
 - b. Onderdistrik Atinggola
 - c. Onderdistrik Sumalata;
5. Distrik Bualemo meliputi :
 - a. Onderdistrik Tilamuta
 - b. Onderdistrik Paguyaman
 - c. Onderdistrik Bumbulan (Paguat).

Distrik dikepalai oleh Wedana dan Onderdistrik oleh Asisten Wedana yang di daerah itu disebut Jogugu dan Marsaoleh. Kelima distrik tersebut di atas sekarang ini menjelma menjadi Kabupaten Gorontalo.

Selanjutnya dalam periode ini, di samping Kepala Daerah yang memimpin Daerah Sulawesi Utara, ada badan yang disebut Dewan Sulawesi Utara yang para anggotanya diutus dari daerah Gorontalo, Gabungan Bolaang Mongondow dan Swapraja Buol. Jadi di tingkat daerah itu sendiri ada badan yang disebut Dewan Gorontalo, Dewan Gabungan Bolaang Mongondow, dan Dewan Swapraja Buol. Para pemimpin politik yang pro RI di daerah Gorontalo berjuang menuntut dibubarkannya pemerintahan daerah Gorontalo termasuk Dewan Gorontalo, yang akhirnya mengakibatkan Dewan Gorontalo bubar dan diganti oleh KNI Gorontalo. KNI Gorontalo ini menyatakan bahwa Daerah Gorontalo terlepas dari NIT dan menggabungkan diri dengan pemerintahan RI yang berpusat di Yogyakarta dalam periode sebelum tahun 1950.

2. Sosial Ekonomi

Perhubungan laut dan udara yang lumpuh selama masa dikuasai Jepang, diaktifkan kembali sejak masa pemerintah NICA di daerah Sulawesi Utara ini. Prasarana perhubungan darat seperti jalan dan jembatan, direhabilitir kembali untuk melancarkan urat nadi lalu lintas darat dan perekonomian dari satu tempat ke tempat lainnya. Maskapai pelayaran KPM mulai mengoperasikan kapal-kapalnya ke dan dari Minahasa yang menghubungkan daerah ini dengan daerah-daerah lain di Indonesia, terutama dengan pulau Jawa. Pelabuhan yang utama dalam masa ini ialah pelabuhan Manado, di mana terjadi kegiatan ekspor dan impor. Komoditi ekspor yang utama ialah kopra, cengkih dan pala yang didatangkan dari beberapa pelabuhan kecil dalam wilayah Keresidenan

Manado (Sulawesi Utara sampai Sulawesi Tengah). Barang-barang impor dimasukkan melalui Manado lalu disitribusikan ke daerah-daerah lain.

Dalam sektor pertanian, rakyat di Minahasa mulai lagi mengolah tanah-tanah pertaniannya seperti keadaan sebelum perang. Di Tomohon dalam masa pendudukan Jepang, rakyat di desa Paslaten dan Matani menjual tanah-tanah mereka kepada pemerintah pendudukan Jepang di mana di tanah-tanah itu didirikan Markas tentara Jepang yang menduduki wilayah Sulawesi Utara/Tengah. Setelah Belanda kembali berkuasa, tanah-tanah itu diolah kembali oleh para pemilik sebelumnya. Di kemudian hari timbul banyak perselisihan mengenai status tanah-tanah itu. Hal ini diakhiri oleh pemerintah RI, yaitu dengan menentukan bahwa tanah-tanah yang dahulunya telah dijual kepada Jepang berstatus sebagai milik musuh dan karena itu harus dikuasai oleh pemerintah yang dalam pengawasannya diserahkan kepada TNI-AD (Palit, 1978 : 78).

Di daerah Sangir Talaud, sejak masuknya kembali pemerintahan Belanda/NICA sampai masa pemerintahan NIT, keadaan ekonomi mulai disusun kembali di mana perdagangan sudah mulai lancar. Rakyat mulai merasakan ketenteraman karena perang dengan Jepang telah berakhir, yang memberi kesempatan untuk bergiat lagi dalam bidang ekonomi. Hasil-hasil seperti kopra dan pala mulai diperdagangkan. Sejak masuknya NICA, mereka mengaktifkan kembali Het Koprafonds yang mengadakan pembelian kopra rakyat. Harga kopra pada waktu itu relatif murah dan untuk merangsang agar petani mau menjual kepada Koprafonds milik Belanda, maka selain dibayar dalam bentuk uang, diberikan pula pembagian bahan-bahan lain seperti kain, sabun dan lain-lain. Kopra yang dibeli itu kemudian dibawa ke Manado atau diteruskan ke Jawa untuk diekspor ke luar negeri.

Tanaman pala yang terutama terdapat di pulau Siau kemudian meluas ke pulau Sangir Besar. Hasilnya terutama dibeli oleh para pedagang Cina, juga dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan harga sebelum perang. Perdagangan pala ini meningkat lancar apabila ada kapal laut, terutama ikan-ikan, hanyalah dipakai untuk mencukupkan kebutuhan sendiri, tidak dibawa ke luar daerah.

Di daerah Gorontalo seperti di daerah lainnya, uang Jepang yang berlaku selama Jepang menduduki daerah itu dinyatakan

tidak berlaku lagi mulai 6 Maret 1946 untuk diganti dengan uang NICA. Dengan demikian maka uang NICA ini diberlakukan sampai saatnya dilakukan pengakuan kedaulatan terhadap RI oleh pihak Belanda. Dalam masa pemerintahan NICA, mereka telah mengusahakan distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok, tetapi hanya khusus untuk para anggota pemerintahan NICA, dalam hal ini pegawai pamongpraja termasuk guru-guru. Langkah ini dimaksud agar para pegawai tersebut senantiasa mau memihak Belanda dan tidak terpengaruh dengan perjuangan kemerdekaan yang dilancarkan di daerah ini.

Walaupun rakyat mulai lagi mengusahakan tanah-tanah pertanian seperti sebelum perang, namun hasil-hasil pertanian rakyat tidak dapat dibawa ke luar daerah itu. Dengan begitu maka pendapatan masyarakat tetap rendah. Para pengusaha swasta pribumi tidak dapat mengembangkan usahanya karena kekurangan modal dibandingkan dengan pengusaha Cina dan Arab yang ada di sini. Beberapa pemuka masyarakat menganjurkan dibentuknya usaha-usaha koperasi untuk membangun ekonomi rakyat untuk menyediakan kredit, karena melihat adanya kenyataan bahwa kaum pengusaha pribumi tidak mampu bersaing dengan kaum pengusaha lainnya.

Rakyat daerah Bolaang Mongondow melanjutkan lagi usahanya di sektor pertanian sejak perginya orang-orang Jepang dari daerah itu. Dalam usaha pemerintahan NICA dan NITA maka tanah-tanah pertanian dibuka kembali dan kehidupan ekonomi mulai dilancarkan kembali. Hasil-hasil pertanian memenuhi pasar-pasar di Kotamobagu, Inobonto dan tempat-tempat lainnya. Tanah-tanah perkebunan yang mengantarai desa-desa yang membentuk Ibukota Kotamobagu mulai dibuka orang untuk dihuni, misalnya perkebunan kelapa di belakang kantor pemerintahan daerah yang sejak 1948 dijadikan kompleks pemukiman rakyat (Manus dkk, 1979 : 46).

3. Sosial Budaya

Jepang selama menduduki Minahasa, sama sekali tidak memperhatikan soal kesehatan masyarakat. Pada waktu itu apabila ada anggota keluarga yang sakit, maka hanya dicarikan obat-obat tradisional untuk sekedar meringankan penderitaan tetapi seringkali dapat menolong menyelamatkan jiwa anggota keluarga yang sakit itu. Mereka yang dikerahkan untuk bekerja "giliran"

(semacam romusya) kesehatannya kurang diperhatikan. Hal ini menyebabkan banyak yang sampai meninggal dunia di tempat bekerja.

Melihat hal itu maka timbul perhatian sementara anggota masyarakat, terutama kepada para anak yatim piatu korban kekejaman Jepang di atas. Perhatian itu lebih diperkuat berkat anjuran Ds. A.Z.R. Wenas, seorang pendeta pribumi yang memimpin GMIM pada waktu itu dan menjabat selaku Ketua Sinode GMIM dan Ketua Klasis Tomohon masa Jepang sampai sesudahnya. Ia menganjurkan agar anggota-anggota jemaat GMIM memperhatikan dan menolong mereka yang tubuhnya lemah atau sakit, memberikan tumpangan bagi yang telah kehilangan tempat tinggal dan menolong mereka yang telah kehilangan mata pencahariannya. Gedung gereja yang ada dapat saja dipakai sebagai rumah sakit darurat (Lintong, 1978 : 56).

Sesudah pendudukan Jepang maka anjuran Wenas di atas, dilembagakan oleh GMIM dengan membentuk Lembaga Kesehatan GMIM yang melakukan program-program kesehatan bagi masyarakat di Minahasa. Tahun 1948 Lembaga itu membuka Balai Keselamatan di Tomohon dan di tahun itu juga Wenas mulai mengusahakan didirikannya sebuah rumah sakit BMIM. Menteri Kesehatan NIT DR. Med. S.J. Warouw memberikan izin kepada Lembaga Kesehatan GMIM tahun 1948 untuk mendirikan rumah sakit tersebut. Setelah dua tahun, pada tanggal 5 Agustus 1950 maka berdirilah dengan resmi Rumah Sakit Bethesda Tomohon dengan Ds. A.Z.R. Wenas selaku kepalanya (untuk sementara) di samping jabatannya selaku Ketua Sinode GMIM (Lintong, 1978 : 55—56).

Sejak sebelum perang dengan Jepang, di daerah Minahasa hidup berbagai ragam kesenian, khususnya seni musik, seni tari dan sebagainya. Dalam masa Jepang, kegiatan kebudayaan ini terhenti, kecuali di tahun 1942—1943 (lihat dalam Bab II.C.). Adapun jenis-jenis seni tari antaranya tari maengket, tari marambak dan sebagainya. Jenis-jenis seni musik antaranya musik bambu, musik bambu klarinet, kolintang dan sebagainya. Seni sastra seperti sumisil (berceritera), pantun dan sebagainya. Kesemuanya ini tetap ada walaupun tidak pernah digiatkan dalam periode ini, dan barulah mulai aktif pada tahun lima puluhan.

Di daerah Gorontalo, kegiatan sosial budaya yang ada sebelumnya tetap berlaku di kalangan masyarakat sampai pada periode

ini. Yang terutama ialah kegiatan gotong royong seperti motu-tulungiya, artinya kegiatan tolong menolong sesama manusia. Dembulo artinya kegiatan memberikan sumbangan atau bantuan kepada keluarga yang ditimpa duka, baik dalam bentuk uang maupun bahan makanan yang diperlukan oleh yang bersangkutan.

Dalam bidang seni budaya dikenal adanya kesenian mobarajanji, yaitu suatu syair memuji dan memuliakan Nabi Muhammad s.a.w. (masyarakat Gorontalo hampir seluruhnya beragama Islam). Kesenian mobarajanji ini dan juga yang sejenis dengan itu, tetap dipelihara oleh masyarakat dan dibawakan dalam setiap upacara keagamaan. Momalebohu yakni memberikan petuah atau nasehat kepada pengantin yang dilakukan dalam upacara perkawinan setempat.

Di daerah Sangir Talaud, khususnya dalam bidang seni budaya, tari ampa wayer yang timbul di masa Jepang mulai dipopulerkan dalam periode ini, karena semakin menarik banyak penggemar di mana-mana, terutama di desa-desa. Begitu populernya sehingga mulai dianggap sebagai tarian asli daerah Sangir Talaud, di samping adanya tari gunde, tari ransa sahabe, tari alabadiri dan sebagainya. Seni musik juga muncul, di antaranya musik bambu dan menyanyi (koor). Baik seni tari maupun seni musik sering dipertandingkan di daerah ini sampai sekarang.

Kegiatan masyarakat lainnya dalam bidang sosial budaya dapat dikemukakan misalnya dalam soal gotong royong menyelesaikan rumah, membersihkan kebun dan sebagainya. Namun kegiatan seperti ini tidak memiliki organisasi yang teratur atau permanen (tetap) sebab hanya dilakukan sewaktu-waktu saja bilamana ada keperluan untuk itu.

Di daerah Bolaang Mongondow, kegiatan sosial budaya (yang telah ada sebelumnya) di kalangan masyarakat dalam periode ini tetap dipertahankan, misalnya kegiatan bergotong royong misalnya pogogutat, posad dan mododuluan. Pogogutat ialah kegiatan tolong menolong khusus di lingkungan keluarga tertentu dalam hal perkawinan, kematian dan sebagainya. Posad adalah kegiatan tolong menolong antar warga sedesa untuk membuka kebun, mendirikan rumah dan sebagainya. Mododuluan adalah kegiatan tolong menolong yang sejenis dengan posad di atas.

Jenis-jenis kesenian di daerah Bolaang Mongondow adalah sama dengan yang sudah ada sebelumnya. Seni tari antaranya tari dangisah, tari joke, tari saurongko, tari husaro dan sebagai-

nya. Seni sastra antara lain diungkapkan dalam bentuk mite, legenda dan dongeng.

4. Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan

Dalam masa pendudukan Jepang, semua sekolah tingkat sekolah rendah baik milik pemerintah maupun yang diusahakan swasta, diambil alih menjadi sekolah pemerintah pendudukan dengan mata pelajaran wajib, antaranya bahasa dan kebudayaan Jepang. Dengan menyerahnya Jepang, maka semua sekolah dikembalikan ke statusnya yang semula.

Dalam periode antara 1945–1946, pemerintah NICA di Minahasa mendirikan kembali sejumlah sekolah rendah yang dinamakan Algemene Lagere School (Sekolah Rendah Umum) di Manado, Tondano, Airmadidi, Amurang dan Langowan. Hal ini diikuti oleh badan-badan pendidikan GMIM dan RK. Semua sekolah di atas dibuka dengan masa pelajaran tujuh tahun. Para lulusannya dapat melanjutkan studi ke MULO di Tondano (milik pemerintah Belanda), Tomohon (milik GMIM) atau ke Manado (milik RK). Para lulusan MULO dapat melanjutkan ke AMS-B di Tomohon (dibuka 1946), ke HBS-A (dibuka 1947), atau ke sekolah guru (Staatsweekschool dibuka 1947). Semua sekolah di atas menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar.

Selain itu, semua sekolah rendah berbahasa Melayu yang ada sebelum perang yang memakai sistem 4, 5 dan 6 tahun, dijadikan Sekolah Rendah berbahasa Indonesia enam tahun. Untuk kelanjutan studi dari sekolah-sekolah seperti itu maka di beberapa tempat didirikan sekolah lanjutan yang setingkat dengan SMP sekarang ini dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Misalnya Sekolah Guru di Kuranga, Tomohon (milik GMIM), atau di Paslaten, Tomohon (milik RK), dan Sekolah Normal Normaalschool) di Tondano (Sigarlaki dkk, 1977 : 286–287).

Para pejuang nasionalis di Minahasa mendirikan Yayasan Pendidikan Kebangsaan di Tondano, diketuai oleh A.H.A.A. Kawilarang. Yayasan ini mendirikan Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan (SMRK) yang diresmikan 6 Januari 1946 di Tondano, kira-kira setingkat dengan MULO Belanda. Melalui SMRK ini para pejuang nasionalis mengadakan penggemblengan semangat perjuangan kemerdekaan kepada para siswanya (mengenai hal itu dapat dilihat kembali di halaman 115–116)

Di daerah Bolaang Mongondow yang mengelola pendidikan

rakyat sebelum perang adalah pemerintah Onderafdeeling, pemerintah kerajaan dan distrik, Zending, PSII, serta beberapa usaha perorangan. Yang terbanyak dibuka ialah Sekolah Rendah berbahasa Indonesia. Zending mendirikan HIS di Kotamobagu (sejak 1911), dan PSII melalui BPPI mendirikan HIS di Molinow (1931). HIS Zending kemudian diambil alih oleh Kerajaan Bolaang Mongondow menjelang masuknya Jepang menjadi HIS Landschap. Ketika Jepang masuk maka semua sekolah di atas diambil alih menjadi sekolah pemerintah pendudukan. Kegiatan pendidikan tumbuh kembali mulai tahun 1948 di mana tercatat pada tahun itu 58 Sekolah Rendah, 1 ALS, 2 Volkschool dan 1 sekolah tingkat menengah.

Sejak menyerahnya Jepang di daerah Sangir Talaud mulai lagi timbul usaha untuk mengaktifkan bidang pendidikan rakyat. Semua sekolah rendah yang pernah ada sampai kedatangan Jepang, dibuka kembali. Selain itu dibuka pula Algemene Lagere School (ALS) yakni tingkat sekolah rendah dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di samping bahasa Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Nopember 1946 dibuka Normaalschool di Tahuna dan sebuah sekolah lanjutan lainnya di kota itu. Pemimpin sekolah menengah ini ialah J.E. Tatengkeng. Ketika Tatengkeng menjadi anggota Senat NIT dan kemudian Menteri Pengajaran NIT maka pimpinan sekolah menengah itu diserahkan kepada seorang asing bernama Nona Luckey. Semua sekolah yang ada mempergunakan bahasa Belanda di samping bahasa Indonesia.

Di daerah Gorontalo, semua sekolah diaktifkan kembali sejak Belanda kembali berkuasa. Tahun 1946 didirikan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri yang kira-kira setingkat SMP sekarang, dipimpin oleh Idrak Jasin. Didirikan pula Normaalschool 4 tahun dan sebuah sekolah guru (Volks Onderwijs). Badan swasta mendirikan Sekolah Menengah Islam (SMI) di tahun 1946 pimpinan Antu Harun, Maniko Ali dan M.T. Iamu. Tahun 1947 didirikan sebuah SMP Muhammadiyah pimpinan Ibrahim Muhammad.

5. Pers

Kehidupan pers terutama di Minahasa sudah dimulai sejak September 1868 dengan terbitnya nomor pengenalan dari surat kabar Cahaya Siang sebagai surat kabar yang pertama di Minahasa khususnya dan di Sulawesi Utara pada umumnya. Cahaya Siang tidak muncul lagi sekitar 1927 (Lapian, 1977 : 2). Dengan dipelo-

pori oleh surat kabar itu maka bermunculanlah banyak surat kabar dan majalah sampai sebelum masa pendudukan Jepang.

Sesudah masa pendudukan Jepang maka diterbitkan beberapa surat kabar dan majalah. Antaranya dapat digolong-golongkan atas yang netral, yang pro Belanda, yang pro RI dan juga ada yang tidak diketahui orientasinya. Berikut ini akan disampaikan beberapa surat kabar dan majalah sesuai orientasinya masing-masing :

Penerbitan yang netral adalah :

1. "Berita Gereja" (1935–1955) yang dikeluarkan oleh Sinode GMIM;
2. "Rangkaian Pemuda" (1946–1958) majalah untuk pembinaan pemuda Katolik pimpinan Ny. Qoman;
3. "Guru" (1948) majalah pendidikan pimpinan A. Matulandi;

Penerbitan yang pro Belanda yakni :

1. "Pelita" (1945–1949) surat kabar harian yang diterbitkan oleh Kantor Penerangan NIT di Manado pimpinan J.E. Sondakh;
2. "Singa Minahasa" (1946–1949) majalah TWAPRO pimpinan Jan Mawikere;
3. "Pemakat" (1946–1958) mingguan pimpinan Ch. Dimpudus;
4. "Suara Minahasa" (1948–1949) mingguan KKM pimpinan S.A. Saerang;

Penerbitan yang pro RI adalah :

1. "Catapult" (1945–1946) diterbitkan di Manado sebagai harian berbahasa Belanda pimpinan John Rahasia dan Ch. D. Pontoh dari BPNI;
2. "Suara Indonesia Muda" (1945–1946) harian di bawah pimpinan John Rahasia dan Chris D. Pontoh di Manado, dari BPNI;
3. "Gerakan" (1946–1950?) harian GEPNIS kemudian GIM pimpinan E. Katoppo dkk.;
4. "Menara" (1946–1954) harian di bawah redaktur G.E. Dauhan, J. Sarijowan, A. Madjid, J.I. Permata, dari BNI;
5. "Persatuan" (1946–1951) mingguan pimpinan O.F. Pua dan H.M. Taulu;
6. "Suara PISO" (1946–1947) harian PISO pimpinan Ch.D. Pontoh di Manado;

7. "Gelora Masa" (1948–1950?) sebagai suara KRIS di Manado pimpinan redaktur Ch.D. Pontoh dkk., yang merupakan pengganti "Suara PISO";
8. "Sinar" (1947–1949?) pimpinan M. Tambahani.

Selain itu ada juga penerbitan yang tidak jelas identitasnya misalnya bulanan "Gerakan" (1947–1958) yang dipimpin oleh D.A. Kumenit, F.J. Gerungan dan A.B.H. Waworuntu (LPPU Cabang Manado, 1977 : 3–6; Manus dkk, 1978 : 133; Taulu, 1950 : 99–102; Wowor, 1977 : 30, 84, 86).

Di daerah Sangir Talaud, tidak diterbitkan surat kabar atau majalah sehingga yang beredar adalah yang dikirimkan dari Minahasa. Selain itu beberapa surat kabar atau majalah tersebut di atas dikirimkan juga ke Bolaang Mongondow dan ke Gorontalo, bahkan ke beberapa tempat dalam wilayah Keresidenan Manado waktu itu.

Selain yang terbit di Minahasa dan Manado, banyak pula yang diterbitkan di Gorontalo, di antaranya (Kempen, 1953 : 548–550) :

1. "Suara Nasional" pimpinan Ismail Datau dkk, yang berhaluan pro RI dengan alamat Dewan Pemerintah Nasional Gorontalo;
2. "Cahaya Merdeka" pimpinan A.R. Onge dkk, mingguan dicetak 500 eksemplar dengan harga langganan Rp. 2,50 sebulan oleh Badan Penerbit Nasional Gorontalo;
3. "Sinar Merdeka" pimpinan Ismail Datau dkk yaitu mingguan di Gorontalo;
4. "Suara Rakyat" pimpinan Usman Monoarfa, tengah bulanan harga Rp. 3,— satu eksemplar diterbitkan oleh Tata Usaha Bakti, Tanggilaa Gorontalo;
5. "Kilat", mingguan pimpinan Abdullah Tumu Rp. 3,— sebulan d/a Toko Syardi Gorontalo;
6. "Kesatuan", mingguan pimpinan Sjarifuddin Panigoro, 1.500 eksemplar sekali terbit harga Rp. 3,— sebulan dengan alamat PO Box 16 Gorontalo;
7. "Suara Pemuda", mingguan pimpinan M.S. Ointu, George Bokings dan H. Hippy, langganan Rp. 3,50 sebulan d/a Drukkerij Asri Gorontalo;
8. "Lukisan Masyarakat" pimpinan S. Musa dkk, merupakan bulanan yang terbit di Limboto Gorontalo;

9. "Kebenaran" mingguan pimpinan M. Amin Larekeng dkk, 1.000 eksemplar sekali terbit Rp. 3,— sebulan, d/a Tata Usaha Bakti Tanggidaa Gorontalo;
10. "Kita" mingguan pimpinan R. Sjuuib dkk diterbitkan oleh Yayasan Penerbitan Rakyat di Gorontalo;
11. "Adil" tengah bulanan pimpinan M. Imran dkk, d/a kampung Limba B di Gorontalo;
12. "Insyaf" tengah bulanan pimpinan M. Imran dkk, d/a Kampung Limba B di Gorontalo.

Menurut keterangan, tuntutan dan keinginan rakyat yang pro RI di Gorontalo yang disalurkan melalui surat-kabar di atas, dilakukan dengan gigihnya, sehingga Belanda dengan tidak henti-hentinya senantiasa mengadakan penekanan dan intimidasi (Anwar Haras, wawancara 6 September 1979). Demikian pula dengan di Minahasa, sebagaimana sudah dikemukakan di depan.

Melanjutkan keterangan tentang kegiatan pers di daerah Sangir Talaud, maka sebagaimana diketahui, di daerah ini tidak pernah diterbitkan surat kabar atau majalah. Yang masuk ke sana adalah surat kabar milik BNI yakni harian "Menara" pimpinan G.E. Dauhan dkk. Melalui harian ini maka tahun 1946 rakyat setempat mengetahui tentang berita Proklamasi Kemerdekaan dan teks "Pancasila" yang juga dimuat dalam harian itu. Pengirimannya ke Sangir Talaud dilakukan secara rahasia, yakni melalui anggota-anggota BNI dengan memakai motor laut dari Manado (LPPU Cabang Manado, 1977 : 5; Tompo, wawancara 14 September 1979).

Selain itu Belanda memasukkan majalah mingguan "Pandji Negara" yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan NIT di Ujungpandang. Pandji Negara waktu itu di bawah redaktur Parada Harahap sebagai pimpinan umum. Sebagai redaktur harian ialah R. Imam Sajono dan Sjarief Saleh dengan bantuan beberapa orang seperti H. Dg. Mangemba serta beberapa pembantu tetap, yakni H. Kamaluddin, Soh Lian Tjie, M.R. Dajoh, dan lain-lain. Di samping memuat berita-berita tentang NIT maka Panji Negara juga memuat ajaran-ajaran Bung Karno tentang nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

6. Kepemudaan

Dalam uraian-uraian terdahulu sudah dikemukakan bahwa para pejuang nasinalis di daerah Sulawesi Utara terutama berintikan para pemuda. Peranan pemuda dalam perjuangan menegakkan

kemerdekaan di daerah yang berada di bawah penilikan yang keras dari Belanda tidak dapat diragukan lagi. Hal ini nyata dari banyaknya organisasi pemuda yang berjuang bersama unsur-unsur kekuatan pro RI lainnya dalam menghimpun kekuatan melawan Belanda.

Menghadapi kembalinya Belanda, maka para pemuda nasionalis pada akhir Agustus 1945 segera membentuk Barisan Pemuda Nasional Indonesia (BPNI) di Manado pimpinan John Rahasia dan Chris D. Pontoh. Pada bulan berikutnya yakni sekitar September–Oktober 1946, para pemuda yang pernah dilatih militer oleh Jepang, mengaktifkan kembali Pasukan Pemuda Indonesia (PPI) di Tondano, di bawah pimpinan E.D. Johannes SH dan kawan-kawannya. Mereka mendirikan Markas Besar di Tondano dan segera mengatur sektor-sektor pertahanan di Minahasa sampai ke daerah-daerah lainnya. BPNI dan PPI ini kemudian merencanakan perebutan kekuasaan antara Desember 1945 sampai Januari 1946 tetapi dapat diggalkan Belanda. Kemudian setelah bekerja sama dengan unsur-unsur bersenjata dalam dinas KNIL yang pro RI, BPNI dan PPI bersama-sama Ch.Ch. Taulu dan S.D. Wuisan, berhasil merebut kekuasaan NICA dan mendirikan pemerintahan yang pro RI untuk Keresidenan Manado. Mengetahui jalannya peristiwa itu telah diuraikan di depan (halaman 151–173, 175–178 dan seterusnya). Menyadari potensi perjuangan pemuda maka mulai 16 Pebruari 1946, pimpinan TRISU menyatukan seluruh kekuatan dari pemuda melalui organisasi PPI dan kepada PPI disertai tanggungjawab memelihara keamanan dan ketertiban umum di Minahasa, sebagai bagian tugas yang sebenarnya tugas TRISU dan kepolisian waktu itu.

Pembinaan dan perjuangan pemuda tidak saja dilakukan di Minahasa, tetapi juga di daerah-daerah lain. Di Gorontalo, para pejuang nasionalis membentuk kelompok-kelompok pemuda untuk membantu mempertahankan daerah itu terhadap kembalinya Belanda dengan membonceng tentara Sekutu. Para pemuda di sana dipersenjatai dan di bawah komando dari A.J. Usman, bertahun-tahun lamanya melancarkan perjuangan gerilya di hutan-hutan melawan Belanda. Demikian juga halnya di daerah Bolaang Mongondow di mana perjuangan pemuda PPI Laskar Banteng merupakan inti kekuatan yang bersama-sama beberapa organisasi perjuangan lainnya, melancarkan perang gerilya melawan Belanda.

Pembinaan kepemudaan tidak saja dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis tetapi aktif juga dilakukan oleh para pemimpin keagamaan dan kemasyarakatan. Pimpinan kegerejaan baik dari Kristen maupun dari Katolik terus menerus menyusun program pembinaan pemuda dalam soal-soal kerohanian untuk menjaga agar jangan sampai para pemuda dari masing-masing organisasi itu terseret atau hanyt oleh kemelut perobahan dan peristiwa politik yang ada pada waktu itu.

Selain itu beberapa pemimpin masyarakat aktif membina pemuda melalui organisasi-organisasi kepanduan, antaranya yang diselenggarakan oleh organisasi/aliran keagamaan, sehingga organisasi kepanduan yang pernah ada sebelum perang dimunculkan kembali. Muncullah kembali kepanduan Hizbul Wathon, Kepanduan SIAP (milik PSII), kepanduan Kristen, Kepanduan Katolik dan sebagainya.

Belanda juga menyadari poensi pemuda sehingga mereka juga berusaha menghimpun kekuatan pemuda agar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan NICA. Untuk itu antara lain dapat disebutkan usaha NICA membentuk "Commite van Initiatief" akhir Desember 1945. Maksud dari Komite ini adalah untuk menghimpun potensi pemuda agar dapat bekerja sama dengan Belanda. (lihat halaman 116–119)..

8. Kewanitaan

Peranan wanita dalam perjuangan kemerdekaan, khususnya dalam periode antara 1945–1950 cukup besar, bahkan dirasakan bahwa tanpa keikutsertaan kaum wanita, perjuangan tidaklah lengkap. Mengenai peranan wanita sudah banyak dikemukakan di depan dalam berbagai organissi antaranya dalam BPNI, PPI, PIR, LRRI, BNI dan sebagainya. Bahkan mereka juga karena menyadari peranan yang dapat disumbangkan dalam perjuangan aktif membentuk organisasi tersendiri, misalnya PERWANIS di Siau, yang bersama-sama PARI dan BAPRI, bahu membahu menyusun tenaga melawan Belanda.

Para pemimpin wanita nasionalis di daerah ini antaranya dapat disebutkan beberapa nama yakni Ibu Maas Tangkilisan (isteri Mayor TRISU S.D. Wuisan), Nona Gusta Ngantung, Loes Supit, Dina Korompis, Mies Mangowal, dan sebagainya. Di Sangir Talaud antaranya Ibu F. Pasandaran Lalisang, Ibu Nona Mohede, Ibu Elias-Pangulimang dan sebagainya. Di Bolaang Mongondow

antaranya Nurtina Gonibala (isteri Ketua Komisariat PPI J.F.K. Damopolii) yang aktif memimpin pasukan wanita PPI Laskar Banteng. Banyak di antara para pemimpin wanita di seluruh daerah Sulaewsi Utara yang namanya belum tercatat di sini namun peranan serta perjuangan mereka amatlah besar untuk tegaknya kemerdekaan (Wanita dalam DPRD, dan sebagainya).

V. KEADAAN MENJELANG AKHIR REVOLUSI

A. MASA MENJELANG PERSETUJUAN KMB

Menjelang diadakannya Konperensi Meja Bundar, maka Belanda secara diam-diam berusaha membentuk kekuatan untuk mewujudkan pemisahan NIT dan NIS yang akan dibentuk. Hal ini nyata dari kegiatan Komisaris Belanda untuk NIT Mendelaar bersama DR. Soumokil untuk mendirikan suatu organisasi politik untuk memperjuangkan pemisahan NIT dari NIS dan berdiri sendiri sebagai suatu negara merdeka. Usaha bersama antara Komisaris Mendelaar dan Menteri Kehakiman NIT DR. Soumokil itu menghasilkan terbentuknya suatu organisasi politik yang bernama Gerakan Republik Indonesia Timur (GRIT), antara bulan Juni—Agustus 1949.

Salah satu basis dari GRIT ialah Mahasiswa yang bersama-sama Ambon dan Timor (Indonesia) merupakan tiga basis kekuatan dan pertahanan politik untuk memperjuangkan cita-cita tersebut. Pimpinan GRIT seluruhnya berada di tangan Soumokil, sedangkan untuk Minahasa dipimpin oleh Jan Mawikere (yang juga menjabat selaku Ketua TWAPRO). Kekuatan militer untuk menunjang GRIT diatur oleh Mendelaar yang secara rahasia menginstruksikan kepada KNIL dan Polisi NIT, agar mendukung usaha Soumokil mendirikan Republik Indonesia Timur sesuai program GRIT. Sesuai rencana mereka, proklamasi RIT akan diadakan pada tanggal 17 Agustus 1949, yaitu sebagai kontra proklamasi RI 17 Agustus 1945. Pada hari itu akan diproklamasikan berdirinya RIT yang terlepas sepenuhnya dari NIS (Wowor, 1972 : 67).

Di Minahasa, GRIT ini mendapat sokongan sepenuhnya dari TWAPRO dan KKM yang masing-masing dipimpin oleh Jan Mawikere dan dr. V.L. Ratumbusang. Direncanakan bahwa begitu Soumokil memproklamasikan berdirinya RIT, maka segera TWAPRO, KKM dan GRIT di Minahasa, mengeluarkan suatu pernyataan untuk melepaskan diri dari NIT dan masuk dalam RIT yang diproklamasikan 17 Agustus 1949 itu. Untuk itu maka TWAPRO mempersiapkan rencananya agar pada tanggal tersebut pernyataan sudah dapat diumumkan dengan dukungan massa dari ketiga organisasi yang ada di Minahasa. Tetapi perkembangan politik tingkat nasional menggagalkan seluruh rencana Mendelaar—Soumokil itu, di mana pihak RI dan BFO berhasil mengadakan Kongres

rensi Antar Indonesia. Apalagi rencana dari GRIT, TWAPRO dan KKM di Minahasa berhasil diketahui oleh unsur-unsur yang pro RI, sehingga mereka mengacaukan dan pada akhirnya menggagalkan rencana gerakan separatis di atas. (Wowor, 1972 : 67–68, Posumah, 1978 : 18–20).

• Pada tanggal 17 Agustus 1949 itu, pimpinan GRIT, TWAPRO dan KKM memanggil seluruh anggotanya untuk datang ke kompleks kantor pusat TWAPRO di Tomohon. Para anggota LRRI dan KRIS yang sudah mengetahui rencana itu, turut menghadiri undangan itu walaupun tidak dimaksudkan untuk mereka, sehingga membangkitkan kecurigaan pimpinan ketiga organisasi separatis itu. Kepada para anggota TWAPRO, KKM dan GRIT ditanyakan oleh para anggota KRIS dan LRRI mengapa mereka datang berkumpul di tempat itu. Tetapi jawaban yang diterima yakni bahwa mereka hanya diminta datang berkumpul untuk sesuatu keperluan yang tidak jelas. Menyadari bahwa rencana mereka sudah diketahui kekuatan yang pro RI, maka pimpinan TWAPRO, GRIT dan KKM tidak memunculkan diri pada waktu itu. Dengan demikian maka massa yang sudah terkumpul satu demi satu kembali ke rumahnya masing-masing. Kekuatan KNIL dan Polisi NIT yang sedianya akan menunjang proklamasi TWAPRO, GRIT dan KKM waktu itu, juga tidak dapat berbuat apa-apa karena hal itu tidak terlaksana. Juga apabila dapat dilaksanakan, segera mereka yang pro RI akan menghalang-halangi para anggota KNIL dan polisi lainnya. Sebagaimana diketahui, dalam KNIL dan polisi NIT sudah banyak yang secara diam-diam menjadi pro RI berkat penggalangan dari para anggota LRRI untuk polisi dan LFP untuk KNIL (lihat halaman 153–154).

Dengan ditandatanganinya Persetujuan Roem-Royen 7 Mei 1949, maka perlawanan gerilya terhadap Belanda agak mereda, tetapi hal itu tidak berlaku untuk daerah Sulawesi Utara. Hal ini karena Belanda merasa bahwa gencatan senjata dengan unsur gerilya di daerah ini (bersama-sama dengan lingkungan NIT lainnya), tidak turut termasuk dalam persetujuan itu. Dengan demikian maka bagi Belanda, tindakan mereka terhadap gerilya kita adalah dengan dalih menjaga keamanan terhadap kaum pengacau. Sebaliknya para anggota gerilya kita menganggap bahwa Belanda tidak menjalankan sepenuhnya isi persetujuan Roem-Royen di atas karena masih tetap menjalankan tindakan militer terhadap kaum gerilya kita.

Hal ini nyata dari terjadinya beberapa peristiwa, khususnya di Minahasa, yang terjadi pada tanggal 10 dan 25 Oktober 1949. Sebelumnya pada tanggal 8 Oktober 1949, para anggota KRIS Minahasa (Kebaktian Rakyat Indonesia Sosialis) mengadakan pertemuan di Tondano untuk memperingati hari lahirnya KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) di Jawa. Para pemimpin pro RI yang hadir waktu itu ialah Bert Supit, Sj. Taulu, Ompi, Moningka, L. Anes, N.Th. Rumajar, Ch. Talumikir (Letnan AURI yang menyusup), F. Runtunuwu, J. Watuseke, F. Tuju dan lain-lain. Pada waktu itu hadir pula J. Wajong yang baru saja datang dari Yogyakarta yang menjabat selaku Wakil Sekretaris/Sekretaris Jenderal Pemerintahan Propinsi Sulawesi dari pemerintah RI yang berkedudukan di Yogyakarta (berhubung Sulawesi masih dikuasai NIT).

Acara peringatan itu menandakan rasa solidaritas dari KRIS di Minahasa terhadap KRIS di Jawa yang sama-sama sebagai barisan perjuangan melawan kekuatan Belanda. Juga peristiwa ini dirasakan sebagai tempat konsolidasi keanggotaan dan perjuangan KRIS di Minahasa. Apalagi dihadiri oleh tokoh KRIS J. Wajong yang dalam kata-kata sambutannya, membakar semangat perjuangan KRIS khususnya dan semua organisasi pro RI pada umumnya yang ada di Minahasa pada waktu itu.

Pertemuan KRIS 8 Oktober 1949 di Tondano itu dapat diketahui oleh mereka yang pro Belanda di Minahasa. Untuk itu maka polisi NIT merencanakan melakukan penangkapan terhadap para pejuang yang pro RI di Minahasa. Rencana penangkapan ini, diketahui oleh KRIS yang sebaliknya memutuskan untuk mendahului tindakan polisi NIT terhadap mereka. Karena itu maka KRIS di bawah pimpinan Letnan AURI Ch. Talumikir mendahului dan berhasil melucuti para anggota polisi NIT yang ada di Tondano pada tanggal 10 Oktober 1949. (lihat halaman 192-193).

Selanjutnya perlu dikemukakan bahwa di Minahasa pada masa revolusi fisik ini banyak terdapat anggota TNI yang dikirimkan dari Yogyakarta untuk membantu perjuangan kaum gerilya pro RI di daerah ini. Beberapa di antara mereka sudah disebutkan di depan. Peranan mereka amatlah besar dalam menunjang perjuangan gerilya melawan Belanda di daerah ini. Antaranya dapat disebutkan Kapten C. Mamahit yang lebih dikenal sebagai Tein Mamahit yang ditugaskan oleh pimpinan LRRRI F.H.L.W. Mondong untuk menjabat selaku Komandan Wilayah V LRRRI Kakas-Rembo-

ken. Pada tanggal 25 Oktober 1949, bersama sepasukan LRRI dari Remboken, ia pergi menyerang kedudukan polisi NIT di Kakas. Dalam serangan itu Mamahit tertembak dan akhirnya meninggal dunia tanpa perawatan seperlunya di Kakas.

Di daerah Sangir Talaud, sebagaimana sudah dikemukakan di depan, rakyat terbagi atas dua golongan besar yakni yang pro Belanda dan yang pro RI. Dalam menghadapi Konperensi Meja Bundar, sebagaimana juga menghadapi persetujuan-persetujuan sebelumnya, golongan yang pro Belanda bersikap menyetujui sepenuhnya akan isi persetujuan tersebut, sedang yang pro RI bersikap menentangnya. Namun kemudian setelah ditandatangani Persetujuan KMB, maka kedua golongan itu menganggap bahwa pelaksanaan isi persetujuan berarti kemerdekaan 100% yang telah lama dicita-citakan bersama. Hal ini berarti kegagalan politik *divide et impera* van Mook sebagaimana direncanakan Belanda.

Dengan demikian maka jelaslah kedua golongan itu menganggap bahwa apabila KMB diadakan maka hal itu akan berarti lenyapnya pertentangan di kalangan masyarakat yang terjadi selama ini. Hal itupun dimaklumi oleh lembaga-lembaga institusional yang ada di daerah itu, di mana semuanya mengharapkan terciptanya keadaan yang aman sebagai hasil dilaksanakannya konperensi itu.

Rakyat di daerah Gorontalo pada tahun 1948 mengirimkan utusan/wakilnya ke Ujungpandang untuk menghadiri Konperensi Gerakan Kemerdekaan yang disponsori oleh Arnold Mononutu. Yang pergi ke konperensi itu adalah tiga orang, yaitu A.J. Usman, Kobus Laya dan Aba Rapi. Ketiganya pergi bersama-sama utusan-utusan lainnya dari daerah Sulawesi Utara. Selain Arnold Mononutu, konperensi itu disponsori juga oleh Burhanuddin dan G.E. Dauhan (Usman, 1972 : 10).

Di Ujungpandang, terbentuklah Gabungan Persatuan-persatuan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia (GAPKI). GAPKI ini beranggotakan beberapa organisasi di antaranya BNI di Manado, Gerakan Kebangsaan Indonesia (GKI) dan Persatuan Kedaulatan Rakyat (PKR) di Ujungpandang. Pemrakarsa pembentukan GAPKI ialah Sukardjo Wirjopranoto yang menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPKI itu. Kemudian diangkat menjadi Ketua GAPKI, sedangkan para anggotanya adalah Anton C. Manoppo (dari BNI), A.J. Usman dari GERKINDO dan Andi Burhanuddin dari PKR.

Dalam pada itu, untuk menunjang kegiatan-kegiatan politik di atas, kaum gerilya kita senantiasa melancarkan operasi-operasi perlawanan terhadap Belanda di daerah ini. Para pemuda nasionalis di Gorontalo terus menerus melancarkan perlawanan bersenjata antra lain mengadakan sabotase, penghadangan konvooi Belanda dan sebagainya sehingga pasukan KNIL dan polisi NIT setempat menjadi kewalahan. Untuk menindas gerakan gerilya itu maka pasukan KNIL di bawah pimpinan Kapten Schiphuys melakukan tindakan-tindakan yang membabi buta tanpa mengenal peri kemanusiaan. Misalnya, ketika perwira KNIL itu mengerahkan pasukannya untuk beraksi di pasar kota Gorontalo dengan mengadakan penembakan secara membabi buta terhadap rakyat yang berada di pasar tersebut. Pada sernagan tanpa mengenal peri kemanusiaan itu, sekurang-kurangnya delapan orang sipil menjadi korban.

Organisasi perjuangan melawan Belanda dimantapkan dengan dibentuknya Batalyon X05 dari Komando Groep Seberang Brigade XVI yang dibentuk berdasarkan surat keputusan dari Panglima Besar Jenderal Soedirman No. A 1949/17/kgs/PH/49. Pimpinan Batalyon X05 ini ialah Kapten Ibrahim Mohammad selaku Komandan, Letnan Satu G.M. Bokings selaku Kepala Staf dan Letnan Satu Azis Hippy selaku Wakil Kepala Staf. Batalyon ini bertugas di Gorontalo. Para perwira bawahan antaranya A. Junus, R. Bidja, M.S. Ointu dan kira-kira 42 pemuda lainnya selaku bintara. Batalyon ini dibentuk pada kira-kira medio Desember 1949 (Mimbar Indonesia No. 22 3 Juni 1950).

B. KONPERENSI ANTAR INDONESIA

Menjelang KMB para wakil RI dan BFO sepakat mengadakan Konperensi Antar Indonesia dengan maksud untuk membentuk satu delegasi menghadapi delegasi Belanda. Perkembangan politik tingkat nasional ini turut berpengaruh di daerah-daerah lain termasuk di daerah Sulawesi Utara. Konperensi Antar Indonesia itu berturut-turut diadakan di Yogyakarta dan Jakarta. Delegasi RI diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta dan delegasi BFO diketuai oleh Sultan Sjarif Hamid Alkadrie II. Kelak Hatta dan Hamid mengetuai delegasi Indonesia dalam KMB menghadapi delegasi Belanda yang diketuai oleh Mr. van Maarseveen.

Kekuatan-kekuatan yang pro RI di daerah Sulaewsi Utara

menghadapi perkembangan politik tingkat nasional, khususnya tentang dilangsungkannya Konferensi Antar Indonesia itu, dan menyambutnya dengan gembira berhubung cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin dekat menjadi kenyataan. Wakil-wakil dari daerah Sulawesi Utara yang walaupun tergabung dalam delegasi NIT, menyambut hangat terlaksananya konferensi itu, sebab dianggap telah mencerminkan hal-hal yang positif menuju terwujudnya kesatuan bangsa Indonesia menghadapi konferensi dengan pihak Belanda. Hal ini karena sesuai hasil konferensi itu, RI dan BFO bersama-sama membentuk delegasi untuk menghadapi delegasi Belanda. Juga konferensi itu memutuskan untuk mengakui Ir. Soekarno, sebagai Presiden dari NIS yang akan dibentuk sebentar di samping menentukan bahwa perlu pembentukan suatu angkatan perang yang berintikan TNI sebagai pasukan APRIS.

Terhadap hal-hal tersebut di atas, masyarakat di daerah Sulawesi Utara bersikap menerima hasil-hasil positif yang diputuskan dalam konferensi itu. Dengan demikian maka baik menjelang sampai selesainya konferensi itu, baik kekuatan yang pro RI maupun yang tidak, semuanya menaruh harapan agar konferensi itu dapat membuahkan hasil-hasil yang dapat menciptakan ketenteraman di kalangan rakyat, dan antara rakyat dengan pemerintahan daerah yang masih dikuasai Belanda walaupun secara tidak langsung (yakni melalui pemerintahan yang dipimpin oleh putera-putera daerah sendiri yang memihak Belanda).

C. CITA-CITA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Menjelang persetujuan KMB maka kekuatan-kekuatan politik di daerah Sulawesi Utara, berpolarisasi menjadi dua kekuatan besar. Kalau dahulunya terdiri atas tiga kekuatan yakni yang pro RI, yang pro Belanda dan yang menghendaki adanya bentuk federasi bagi NIS, maka sekarang hanya terdiri atas dua kekuatan saja, yakni yang pro RI dan yang tetap pro Belanda. Mereka yang dulunya menghendaki bentuk federasi bagi NIS, setelah melihat bahwa harapan untuk itu semakin tipis, berbalik menjadi pro Belanda, bahkan menjurus menghendaki pemisahan dari NIS yang akan dibentuk dan mau berdiri sendiri sebagai suatu negara yang merdeka. Hal ini nyata sekali sekitar bulan Juni – Agustus 1949 pada waktu dibentuknya GRIT oleh Mendelaar dan Soumokil yang di Minahasa dipimpin oleh Jan Mawikeree.

Sikap masyarakat yang menghendaki terwujudnya Indonesia sebagai suatu Negara Kesatuan sudah dinyatakan sejak tahun-tahun pertama RI yang di daerah ini dipelopori oleh BPNI, PPI, dan yang bersama-sama dengan para pejuang nasionalis yang bergerak dalam tubuh KNIL di Minahasa, berhasil merebut kekuasaan selama 24 hari (14 Februari sampai 11 Maret 1946) dan menyatakan sebagai bagian dari wilayah RI yang berpusat di Yogyakarta. Direbutnya kembali kekuasaan oleh Belanda tidak berarti bahwa cita-cita menjadi padam, tetapi harus digelorakan oleh rakyat di mana para pemudanya senantiasa menjalankan perang gerilya melawan Belanda dan merupakan ancaman yang amat berat bagi NIT bentukan Belanda itu.

Dalam kancah perjuangan politik, BNI memelopori aksi yang menghendaki terwujudnya Indonesia sebagai suatu Negara Kesatuan yang berdaulat. BNI dalam pernyataannya di tahun 1947, mengatakan bahwa hanya dengan terpaksa mau mengakui NIT sebagai suatu kenyataan historis, tetapi BNI dengan penuh keyakinan tetap memperjuangkan cita-cita Negara Kesatuan bagi Indonesia.

Dalam sidang-sidang DPR Daerah Minahasa yang terbentuk atas usaha Belanda bulan Maret 1948 sampai tahun 1950, kekuatan-kekuatan yang pro RI (yang menghendaki adanya Negara Kesatuan) seperti BNI, KRIS dan lain-lain, senantiasa mendesak agar dewan bentukan Belanda itu menyatakan diri lepas dari NIT dan bergabung dengan RI yang berpusat di Yogyakarta. Hal itu disuarakan melalui jurubicara mereka, antaranya M.B. Tumbel. Tuntutan ini semakin keras sehingga kelak dalam tahun 1950, menjadi acara tuggal dalam sidang dewan itu yang akhirnya menyetujui adanya pernyataan keluar dari NIT untuk bergabung dengan RI.

Pada tahu 1947, organisasi-organisasi pemuda pejuang pro RI yakni BPNI, PPI, PISO, serentak dilebur ke dalam suatu organisasi baru yang merupakan kelanjutan dari semua organisasi di atas yaitu LRRI di bawah Komandan F.H.L.W. Mondong. Laskar Rakyat Republik Indonesia ini, melihat namanya saja, adalah jelas suatu organisasi gerilya yang berjuang demi terwujudnya Negara Kesatuan RI. Sikap masyarakat di Minahasa terhadap cita-cita Negara Kesatuan, menyatakan diri dalam aktipnya para pemuda memperjuangkan cita-cita mewujudkan Negara Kesatuan melalui perjuangan LRRI melawan politik memecah belah yang

dijalankan Belanda.

Walaupun Belanda berkali-kali mengadakan konperensi dengan RI tetapi sesungguhnya mereka hanya bermaksud memecah belah persatuan dan kesatuan rakyat dan negara Indonesia. Di balik itu terdapat kesadaran yang tinggi pada rakyat Indonesia yang menghendaki terciptanya Indonesia sebagai satu Republik Kesatuan yang meliputi seluruh tanah air. Hal ini dibuktikan misalnya dengan berangkatnya Ajuba Wartabone dari Gorontalo ke Yogyakarta yang membawa pernyataan mendukung dan bergabung dengan RI. Para anggota pemerintahan setempat juga sudah menyatakan memutuskan hubungan dengan NIT.

Menurut pendapat para tokoh pejuang dan tokoh masyarakat di Gorontalo, tercapainya cita-cita Indonesia sebagai satu Negara Kesatuan berarti bahwa wilayah RI akan meliputi seluruh tanah air dan tumpah darah Indonesia sebagai suatu kesatuan yang kuat dan utuh. Dengan begitu maka tidak akan ada satu kekuatan yang mampu mematahkan semangat perjuangan menuju cita-cita tersebut. Walaupun kemudian telah terbentuk RIS, tetapi wadah itu masih mengandung adanya perpecahan berhubung adanya negara bagian yang sesungguhnya tidak dikehendaki rakyat Indonesia.

Rakyat di daerah Bolaang Mongondow membentuk sejumlah organisasi politik dan perjuangan untuk mengejar cita-cita Indonesia sebagai satu Negara Kesatuan. Hal itu diperjuangkan oleh PSII, PNI, GIM, KERWANI (Kerukunan Wanita Indonesia), PERGINDO (Persatuan Guru Indonesia), PERPIBOM (Persatuan Pegawai Indonesia Bolaang Mongondow), SERBIBOM (Serikat Buruh Indonesia Bolaang Mongondow), SIAP Kaum Tukang (SIKAT), PPI (Pasukan Pemuda Indonesia) Laskar Rakyat Bolaang Mongondow, SPK (Serikat Pegawai Kesehatan), KPM (Kesatuan Pemuda Masehi) dan sebagainya. Kegiatan mereka yang memperjuangkan Negara Kesatuan, nyata sekali terutama pada tahun 1950 untuk melikuidir NIT dan bergabung dengan RI.

Rakyat di daerah Sangir Talaud tahun 1947 membentuk satu organisasi politik yakni Persatuan Rakyat Sangir Talaud (PIRA-SAT). Organisasi ini dipimpin oleh J.E. Tatengkeng. Ketika di daerah ini dibentuk cabang BNI dari Manado, maka para anggota PIRASAT semuanya meleburkan diri ke dalam BNI, yang pada waktu itu di Siau dipimpin oleh L.M. Kansil, dan di Sangir Besar (Tahuna) dipimpin oleh Hamzah Adariku. L.M. Kansil ini selain

memimpin BNI di Siau, juga menjadi Ketua PARI (Partai Republik Indonesia) dan mendirikan PERWANIS serta BAPRI di Siau. Dalam jabatannya selaku Ketua PARI, pada tahun 1945 dan 1946, ia mengirimkan kawat dan disusul surat kepada pemerintah RI di Yogyakarta, yang isinya menyatakan mendukung sepenuhnya pemerintah RI Yogyakarta. Surat serta kawatnya itu dibalas oleh pemerintah RI dalam hal ini oleh Sekretaris Perdana Menteri (lihat halaman 137–138).

Sekitar tahun 1949 muncul beberapa cabang organisasi politik, ada yang sebelumnya sudah pernah didirikan di sini, ada yang baru saja dibentuk cabangnya, di antaranya PNI di bawah Wellem Mer, PARKINDO di bawah pimpinan Hebingabil, PSII pimpinan L. Wuaten, Ahmad Tompo, Hamzah Adariku dan lain-lain. Partai-partai itu turut berjuang untuk cita-cita Indonesia sebagai Negara Kesatuan (Tompo, wawancara 14 dan 18 September 1979).

D. KEGIATAN PADA BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN

1. Ekonomi

Daerah Minahasa sebagai tempat kedudukan pusat pemerintahan Keresidenan Manado dalam periode ini, merupakan pula pusat kegiatan sosial ekonomi untuk daerah itu. Semenjak NICA mulai berkuasa, kegiatan ekonomi ditujukan kepada usaha mencukupkan bahan-bahan keperluan masyarakat. Ekspor-impor direhabilitasi untuk menggiatkan perekonomian daerah. Untuk menampung dan menjual hasil kopra, pemerintah NICA dan kemudian pemerintah NIT mengaktifkan kembali Het Copra Fonds, seperti keadaan sebelum perang dengan Jepang (1939). Pelayaran partai digiatkan kembali sedangkan untuk pelayaran interinsuler dan pelayaran yang menghubungkan daerah ini dengan pulau Jawa, ditangani oleh kapal-kapal milik KPM. Khusus untuk menangani pelayaran antar pulau dalam wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah didirikan NV NOCEMO (Noord-Celebes en Molukken Kustvaart Maatschappij) berkedudukan di Manado (kelak NV ini diambil alih tahun 1950-an dan menjadi PT PERINDO = Pelayaran Rakyat Indonesia). Jaringan pelayaran kapal-kapal NOCEMO meliputi perairan Sulawesi Utara sampai Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.

Dalam bidang lainnya, pemerintah NIT melanjutkan usaha

merampungkan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) di Tonsealama (dekat Tondano, Minahasa) yakni penggalian pipa untuk saluran airnya. Listrik air Tonsealama ini disalurkan ke seluruh Minahasa, terutama ke Manado. Pengangkutan antar kota di Minahasa diselenggarakan oleh Swasta, dalam hal ini oleh rakyat dengan mempergunakan bis-bis yang dibentuk dari sisa-sisa truck peninggalan perang. Hanya sebagian kecil jaringan perhubungan darat di Minahasa yang dapat dikatakan dalam keadaan cukup baik, sedang selebihnya masih rusak berat, sehingga sangat mengganggu kelancaran komunikasi antar kota dan desa.

Perhubungan udara dengan daerah lain, terutama dengan pulau Jawa diaktifkan kembali mulai tahun 1948. Kegiatan ini ditangani oleh KLM dengan rute udara antara Manado – Makasar (sekarang Ujungpandang) ke Jakarta. Penerbangan dari KLM ini mulanya sekali seminggu, kemudian meningkat terus. Sebagai pangkalan atau lapangan udara ialah lapangan udara "Mapanget" (yang sekarang ini dinamakan LANU Sam Ratulangi).

Sistem distribusi yang diterapkan semenjak NICA mulai berkuasa semakin dimantapkan yang disebarakan sampai ke desa-desa oleh badan-badan distribusi NICA. Pemasukan barang-barang distribusi untuk rakyat ditangani oleh beberapa perusahaan yang didirikan Belanda, antaranya NV NIGEO di Manado (Sigarlaki dkk, 1977 : 263–264; Watuseke, 1968 : 62).

Kegiatan sosial ekonomi di daerah Sangir Talaud dalam Periode ini semakin menunjukkan adanya kegairahan masyarakat, berhubung semakin terbukanya kesempatan berusaha bagi mereka dalam bidang pertanian, perikanan, perdagangan, dan sebagainya. Barang-barang yang keluar masuk pelabuhan-pelabuhan Sangir Talaud semakin ramai dilakukan karena semakin lancar. Yang dimasukkan di antaranya beras dan lain-lain kebutuhan pokok masyarakat, yang kalau dahulunya hanya dapat diperoleh melalui distribusi NICA, sekarang dapat dimasukkan oleh kaum pedagang dari Manado. Beras dan semua keperluan masyarakat itu diperjual belikan di pasar bebas. (Yuda, wawancara 18 September 1979). Di kemudian hari, Het Copra Fonds yang menangani soal-soal perkopraan di daerah ini dibubarkan, dan diganti dengan Yayasan Kelapa Rakyat Sangir Talaud (YKRST tahun 1956), kemudian Pusat Koperasi Kopra Sangir Talaud (PKKST tahun 1958).

Di daerah Gorontalo kegiatan berusaha tumbuh sejalan dengan semangat perjuangan menegakkan kemerdekaan. Namun satu hal

yang sangat kurang menguntungkan, yakni kurangnya modal dan rendahnya tingkat ketrampilan rakyat untuk berusaha dalam bidang perekonomian diperhadapkan dengan orang-orang Cina dan Arab yang semenjak dahulu memiliki modal yang kuat dan pengalaman yang lama dalam soal ekonomi. Oleh karenanya maka timbul kesadaran untuk mempergunakan sarana koperasi bagi rakyat setempat dengan maksud membentuk modal dan mempersatukan usaha dalam bidang ekonomi.

2. Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya dari rakyat Minahasa pada waktu itu tidak mengalami perubahan apa-apa selain merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya. Kegiatan sosial budaya mengiringi usaha-usaha pertanian, misalnya dalam soal-soal gotong royong di sektor pertanian seperti mapalus. Mapalus adalah usaha kerjasama tolong menolong, misalnya untuk mengerjakan kebun (sawah atau ladang), mendirikan rumah, dan kemudian tidak terbatas dalam soal pengerahan tenaga saja, tetapi meningkat dalam soal keuangan (sejenis arisan).

Kerjasama tolong menolong juga berlaku dalam daur hidup (life cycle) misalnya dalam mempersiapkan perkawinan, di mana keluarga yang berhajat dibantu oleh para anggota keluarganya sendiri atau para tetangga sedesa. Dalam soal kematian, maka keluarga yang berduka dibantu oleh sanak keluarganya dalam menyediakan bahan-bahan keperluan. Juga dibantu oleh para warga sedesa. Bantuan pada dasarnya diberikan secara sukarela, tetapi ada juga yang kemudian terikat secara moral untuk membalas apabila keluarga yang membantu mendapat kesulitan dalam soal kematian atau membalas bantuan yang diberikan ketika mengadakan pesta perkawinan. Dalam hubungan dengan kematian keluarga, muncul istilah merur, maerur-erur, kumawus dan sebagainya, yang pada dasarnya ialah berkumpul untuk makan bersama menghibur keluarga yang berduka (Manus, dkk, 1978 : 106-107).

Kehidupan sosial budaya di daerah Gorontalo juga merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya. Masyarakat di daerah ini hampir seluruhnya beragama Islam, kecuali para pendatang yang terdiri dari orang Minahasa, Sangir Talaud dan lain-lain yang kebanyakan beragama Kristen, tetapi jumlah mereka sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah penduduk asli. Kegiatan sosial

budaya banyak sekali dipengaruhi atau bersumber pada ajaran Islam, dengan mempergunakan pranata-pranata sosial sebagai bagian dari adat istiadat setempat. Misalnya kerjasama tolong menolong dalam upacara perkawinan, kematian dan sebagainya. Dalam upacara perkawinan dikenal istilah *mohuyula* dalam lingkungan suatu keluarga luas (*extended family* = *ungalaa*) di mana keluarga yang berhajat memperoleh bantuan dari kaum keluarganya sendiri. Demikian pula dalam soal kematian, di mana bila ada seorang yang meninggal dunia (*ilopateya*) semua kerabatnya datang berkumpul ke rumah duka untuk membantu atau menghibur yang kena duka (Tumenggung Sis dkk, 1977 : 60).

Di daerah Sangir Talaud, kegiatan sosial budaya khususnya dalam soal-soal kekeluargaan yang berdasarkan adat dalam hal ini berdasarkan kelahiran atau keturunan, digantikan dengan perkumpulan-perkumpulan berdasarkan lingkungan *ethnic-groups* tertentu (lingkungan pulau/kepulauan, sub suku dan sebagainya). Lahirlah organisasi-organisasi sosial dalam bidang kematian dan sebagainya dari orang asal Tagulandang, Talaud, Tamako dan sebagainya. Di samping itu ada pula organisasi-organisasi sosial dalam soal-soal kepemudaan, kewanitaan, pendidikan, keagamaan dan lain-lain (Yuda, wawancara 18 September 1979).

Mengenai kehidupan sosial budaya di daerah Bolaang Mongondow, dianggap merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya sehingga tidak pula dikemukakan lagi di sini.

3. Pendidikan

Di Minahasa sejak 1 Nopember 1946 sudah didirikan satu sekolah lanjutan menengah, yakni AMS-B (setingkat SMA sekarang ini) dengan mempergunakan bahasa Belanda selaku bahasa pengantar di samping bahasa Indonesia. Tahun 1947 dibuka satu sekolah negeri untuk pendidikan guru, yakni *Staatsweekschool* dan HBS-A (lima tahun) yang memberikan pelajaran sastra Barat dan Ekonomi. Kesemua sekolah ini didirikan sebagai persiapan untuk dilanjutkan ke perguruan tinggi (Watuseke, 1968 : 62). Semua sekolah yang ada, mulai dari tingkat SR sampai SLTP, berjalan seperti biasa semenjak diambil alih kembali dan dikembalikan statusnya seperti sebelum perang dengan Jepang.

Di daerah Sangir Talaud terdapat perkembangan dalam jumlah SR maupun tingkat SLTP. Antaranya didirikan Sekolah Kepandaian Gadis (SKG) di Tamako dan SMP di Ulu Siau. Juga sudah ada

sebelumnya SGB di Tahuna dan di Ulu Siau serta di Lirung (Talaud) ada VO. Tenaga guru kebanyakan tenaga asing, tetapi perlahan-lahan mereka ke luar dari daerah ini, lalu digantikan oleh tenaga-tenaga guru asal daerah Sangir Talaud sendiri, baik sebagai guru tetap maupun sebagai guru tidak tetap (tenaga pembantu). Kurikulum mulai disesuaikan dengan dipergunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan bahasa Belanda dikeluarkan dari kurikulum yang ada. Sekolah menengah yang dahulunya empa tahun, sekarang masa pendidikannya menjadi tiga tahun. Para guru di daerah Sangir Talaud kemudian hari bersatu dalam organisasi profesi PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) tahun 1950 yang ketua pertamanya ialah Sem Kamudi.

Di daerah Gorontalo pemerintah NIT memperluas pendidikan rakyat dengan membuka sekolah-sekolah di kecamatan atau desa yang belum ada sekolah (SR). Selain itu diperkenankan juga swasta mengusahakan pendirian sekolah-sekolah, misalnya kepada lembaga-lembaga perguruan Islam. Didirikanlah Sekolah Menengah Islam (SMI) pimpinan Antu Harun dan SMP Muhammadiyah pimpinan Ibrahim Mohammad di samping adanya SR Kristen di Gorontalo. Tingkat SLTA, yakni SMA dan SGA, baru didirikan di tahun 1951. Tokoh-tokoh pendidikan di sini antaranya Ibu Lamadilalo, Mari Suleman, Nain Mooduto, Nusi Kedju, Ari Monorfa (Polontalo, wawancara 11 September 1979). Pendidikan diarahkan pada pembinaan para murid agar memiliki tanggung jawab dasar pendidikan, yakni keadilan sosial di mana semua sekolah terbuka untuk setiap orang. Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar diganti oleh bahasa Indonesia.

4. Agama dan Kepercayaan

Mengenai kehidupan keagamaan dalam periode ini dapat dikatakan sama dengan periode sebelumnya. Tentang kepercayaan masyarakat dapat disampaikan bahwa walaupun agama-agama yang ada telah lama memegang peranan penting dalam masyarakat, namun rakyat belum sama sekali meninggalkan kepercayaan lama mereka dalam kehidupan nyata sehari-hari. Misalnya di Minahasa ada Tonaas, di Gorontalo ada talenga atau panggoba, di Bolaang Mongondow ada bolian dan di Sangir Talaud ada ampuang, yang kesemuanya merupakan dukun-dukun magis yang memiliki peranan besar dalam upacara pengobatan orang sakit atau upacara-upacara lainnya.

5. P e r s

Mengenai kehidupan pers sudah banyak disinggung di depan. Hanya masih dapat ditambahkan yaitu tentang beberapa surat kabar yang terbit di Minahasa yang pro RI sebagai berikut (Kempen, 1953 : 547—548) :

1. "Pemuda" pimpinan Ch.D. Pontoh, berbentuk bulanan yang diterbitkan oleh Badan Penerbit Pemuda di Manado;
2. "Kemudi" mingguan pimpinan M.B. Tumbel dkk dengan alamat Toko Rakyat Pasar Ikan Manado;
3. "Suara Rakyat", terbit tiga kali sebulan di bawah pimpinan F. Intama dkk, dengan alamat Tikala II Manado.

Selain itu di daerah Sangir Talaud telah diterbitkan sebuah majalah bulanan bernama "Trektor" pimpinan Adam, seorang yang banyak pengalamannya dalam bidang pers. Majalah ini diterbitkan di Tahuna (pusat pemerintahan daerah itu). Di samping itu pernah ada sebuah penerbitan lain yang dipimpin oleh Sapudi tetapi nama penerbitan itu sudah tidak diketahui lagi. Namun karena minat masyarakat kurang sekali maka kedua penerbitan itu tidak sanggup bertahan lama dan cepat sekali menghilang dari peredaran.

6. Kepemudaan

Di daerah Sangir Talaud kegiatan pembinaan pemuda sangat menonjol, khususnya dalam hal kepanduan. Pada waktu itu ada tiga organisasi kepanduan di Sangir Talaud, yaitu :

- a. Organisasi kepanduan Islam di bawah pimpinan Achmad Bachari;
- b. Organisasi kepanduan Kristen di bawah pimpinan Maki-kui;
- c. Organisasi kepanduan Nasional pimpinan Wellem Aer.

Kegiatan ketiga organisasi kepanduan ini terbatas pada aktivitas intern kepanduan, seperti mempelajari tata tertib kepanduan, menjaga keamanan dan lain-lain. Juga diaktifkan pada waktu pada pesta-pesta, keramaian, pertandingan olah raga, dan sebagainya.

Di daerah Minahasa, pembinaan kepemudaan banyak sekali dilakukan oleh organisasi-organisasi kegerejaan, seperti GMIM dan Gereja RK. Pada setiap organisasi itu diadakan usaha-usaha dalam bentuk program pembinaan pemuda, khususnya dalam

soal-soal kerohanian. Pendidikan kepemudaan diadakan juga di sekolah-sekolah, baik sekolah negeri maupun yang diusahakan oleh swasta, dalam arti kata mendidik para murid untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kampung menambang ilmu untuk bekal di masa depan.

Di daerah Gorontalo, pembinaan pemuda sejak lama dilakukan oleh, antara lain Kepanduan Muslimin Indonesia (KMI) pimpinan Ibrahim Mohammad. Juga diaktifkan kembali organisasi kepanduan Hizbul Wathon dan SIAP.

7. Kewanitaan

Di daerah Sangir Talaud pada masa itu muncul organisasi wanita yang dinamakan PEWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia), yaitu di Tahuna dan di Ulu Siau. Organisasi wanita ini dipimpin oleh Ibu Lalisang. Kegiatan PEWARI diketahui hanya khusus dalam soal-soal kerajinan wanita serta usaha-usaha pendidikan keagamaan/kerohanian. Di samping itu ada organisasi Kaum Wanita Masehi Sangir Talaud (KWAMST) pimpinan Ibu Salawati Makagiansar. KWAMST ini hanya khusus bergerak dalam soal kerohanian dengan struktur organisasinya mengikuti struktur organisasi GMIST. Pimpinan pusatnya berkedudukan di Tahuna (pusat GMIST) dan para anggotanya tersebar di semua desa di Sangir Talaud.

E. PELAKSANAAN HASIL KMB

Daerah Sulawesi Utara pada periode ini tetap termasuk dalam lingkungan NIT. Negara bagian ini adalah yang tertua di antara semua negara bagian yang dibentuk Belanda. Sejak terbentuknya NIT pada tanggal 24 Desember 1946, NIT telah menyatakan pendirian politiknya yang tegas mengenai bentuk Negara Indonesia yang akan datang, ialah menghendaki bentuk federasi. Hal ini telah ditegaskan pula di dalam "politik-manifest" pemerintah NIT yang telah diterima oleh Parlemen NIT bulan April 1947. Pada masa itu parlemen NIT terdiri dari dua golongan, yakni yang pro RI dan yang pro bentuk federalisme. Yang pro RI membentuk fraksi dengan nama GAPKI (Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia) dan bersikap oposisi terhadap semua kebijaksanaan pemerintah NIT yang merugikan kepentingan fraksi atau langsung merugikan perjuangan pro RI, (Kempen, 1953 : 139, 152).

Sebagai akibatnya maka terjadi pergantian kabinet yang silih berganti. Dalam periode 1949–1950, yang memerintah adalah Kabinet Anak Agung Kedua dipimpin oleh Perdana Menteri Ide Anak Agung Gde Agung mulai 12 Januari 1949. Pada 26 Desember 1949, yakni tiga hari sebelum tercapainya Persetujuan KMB, yang memerintah adalah perdana Menteri NIT J.E. Tatengkeng yang memimpin 10 menteri. Dalam masa pemerintahan Kabinet Anak Agung Kedua di atas, pemerintah NIT membagi wilayah NIT (kecuali Irian Barat) atas tiga Komisariat Negara (Staats-commissariaat). Status wilayah Komisariat Negara ini kira-kira sederajat dengan sebuah propinsi. Sebagai pemimpin setiap Komisariat Negara ialah seorang Komisaris Negara yang kedudukannya kira-kira setaraf dengan Gubernur. Salah satu di antara Komisariat Negara itu ialah Komisariat Negara Sulawesi Utara dan Maluku Utara (Komisariat Negara SUMU) di bawah Komisaris Negara Mr. Boon (Watuseke, 1968 : 63; Kempen, 1953 : 158).

Wilayah Komisariat Negara SUMU ini meliputi empat daerah yang berlaku mulai Desember 1949, sebagai berikut :

- a. Daerah Minahasa di bawah Kepala Daerah D.A.Th. Gerungan yang berkedudukan di kota Manado;
- b. Daerah Sangir Talaud di bawah Kepala Daerah B.J. Medellu yang berkedudukan di kota Tahun;
- c. Daerah Sulawesi Utara di bawah Kepala Daerah Ajuba Wartabone yang berkedudukan di kota Gorontalo yang membawahi tiga sub daerah yakni :
 - (1) Gabungan Bolaang Mongondow (sebagai federasi empat kerajaan yang ada, yakni Kerajaan Bolaang Mongondow, Kerajaan Bolaang Uki, Kerajaan Bintauna, Kerajaan Kaidipang Besar) di bawah Kepala Daerah Raja H.J.C. Manoppo (dari Kerajaan Bolaang Mongondow) yang juga selaku Ketua Dewan Raja-raja;
 - (2) Daerah Gorontalo di bawah Kepala Daerah Ajuba Wartabone yang berkedudukan di kota Gorontalo;
 - (3) Daerah Buol di bawah seorang Kepala Daerah yang berkedudukan di kota Buol;
- d. Daerah Maluku Utara di bawah seorang Kepala Daerah yang berkedudukan di kota Ternate.

Dengan terbentuknya Komisariat Negara SUMU di atas maka diadakan pemisahan wilayah pemerintahan sepenuhnya dengan Daerah Sulawesi Tengah yang dahulunya masih termasuk dalam

wilayah Keresidenan Manado. Sebelum itu Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan surat Penetapan Residen Manado tanggal 25 Januari 1949 No. R 21/1/4. Daerah ini merupakan federasi 15 wilayah Dewan Raja-raja dengan Kepala Daerah yang berkedudukan di Poso (Arsjad Moh. Ali, 1973 : 22). Di tahun 1960 kedua wilayah ini disatukan kembali sebagai propinsi Sulawesi Utara/Tengah dengan ibukotanya yakni Manado. Tahun 1964 dipisahkan lagi menjadi Propinsi Sulawesi Utara ibukota Manado dan Propinsi Sulawesi Tengah ibukota Palu, yang berlaku sampai sekarang ini.

Dengan dicapainya Persetujuan KMB pada tanggal 27 Desember 1949 maka terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri atas beberapa negara bagian, di antaranya NIT. Bagi yang pro RI, terbentuknya RIS dianggap merupakan suatu kemenangan karena hal itu dapat dijadikan salah satu langkah maju menuju terwujudnya cita-cita Negara Kesatuan RI. Hal inipun dimiliki oleh para pejuang pro RI di daerah Sulawesi Utara yang, walaupun RIS telah terbentuk, terus menerus berjuang untuk menghapuskan NIT dan menggabungkan daerah ini ke dalam RI. Dengan demikian maka sejalan dengan langkah-langkah pelaksanaan hasil-hasil KMB di daerah-daerah di seluruh Indonesia, maka di daerah Sulawesi Utara terjadi pergolakan politik untuk membubarkan NIT. Dalam pada itu kekuatan-kekuatan yang pro bentuk federal masih bercokol dengan kuatnya dalam lembaga-lembaga pemerintahan NIT didukung oleh pejabat-pejabat Belanda yang masih ada, ditambah kekuatan militer KNIL dan Barisan Polisi NIT.

Perjuangan rakyat yang ingin bergabung dengan RI didasarkan pada pasal 43 Konstitusi RIS 1949 yang menentukan aturan bahwa "dalam penyelesaian susunan federasi Republik Indonesia Serikat, maka berlakulah azas pedoman, bahwa kehendak rakyatlah di daerah-daerah bersangkutan yang dinyatakan dengan merdeka menurut jalan demokrasi, memutuskan status yang kesudahannya akan diduduki oleh daerah-daerah tersebut dalam federasi". Selanjutnya dalam pasal 44 ada peraturan bahwa "perubahan daerah sesuatu daerah-bagian, masuk ke dalam atau menggabungkan diri kepada suatu daerah-bagian yang telah ada, hanya boleh dilakukan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang federal". (DPR—GR, 1970 : 112—113).

Sejak terbentuknya RIS 1949, daerah demi daerah menyata-

kan penggabungannya dengan RI. Hal itu diterima oleh RIS dan RI dan diatur dalam Keputusan Presiden RIS No. 108 sampai 133 tanggal 9 Maret 1950 yo, UU Darurat RIS No. 11/1950 disusul Keputusan Presiden RIS No. 126 dan 127 tanggal 24 Maret 1950 serta Keputusan Presiden tanggal 4 April 1950. Dengan keluarnya semua peraturan di atas, maka pada tanggal 5 April 1950, RIS hanya terdiri dari tiga negara bagian saja, yaitu RI, NIT dan NST (Negara Sumatera Selatan) (DPR-GR, 1970 : 113).

Masih tetap bertahannya Pemerintah NIT yang belum sepenuhnya mau menggabungkan diri dengan RI sesuai Konstitusi RIS yang dihasilkan dalam Persetujuan KMB itu, semakin lama semakin membangkitkan keresahan di kalangan masyarakat. Pasukan-pasukan KL yang ada belum dipulangkan ke Negeri Belanda, sedangkan pasukan-pasukan KNIL belum segera dimasukkan ke dalam APRIS, sehingga mereka sering dipergunakan oleh Belanda untuk menekan hasrat rakyat untuk bergabung dengan RI.

Di daerah Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa, perjuangan rakyat untuk membubarkan NIT dijalankan melalui dua cara, yakni dalam forum resmi DPR Minahasa (dibentuk Maret 1948) serta melakukan terus perang gerilya melawan pasukan KNIL dan Polisi NIT yang ada di daerah ini. Dengan kata lain, dilakukan dengan perjuangan politik dan perjuangan militer. Dalam perjuangan politik, kekuatan-kekuatan pro RI membentuk fraksi dalam DPR Minahasa. Fraksi itu gabungan dari BNI, KRIS dan Partai Katolik, dengan juru bicaranya yakni M.B. Tumbel. Fraksi ini berhadapan dengan yang pro federalis yakni organisasi TWAPRO, PEMAKAT, KKM dan Hoofdenbond yang dipimpin oleh Jan Mawikere (dari TWAPRO). Di luar DPR Minahasa, tokoh-tokoh politik pro RI beroposisi dengan membentuk FKRI (Fraksi Kesatuan Republik Indonesia) yang merupakan gabungan dari dua organisasi, yakni PNI dan PPI (Persatuan Pemuda Indonesia). Secara diam-diam, para anggota fraksi pro RI dalam DPR Minahasa seperti M. Sondakh, R.M.A. Dahlan, O.F. Pua dan M.B. Tumbel, juga menjadi anggota FKRI yang beroposisi di luar dewan itu. Bahkan tuntutan agar DPR Minahasa menyatakan diri bergabung dengan RI Yogyakarta, sudah sejak Agustus 1949 dimajukan oleh para anggota fraksi pro RI jauh sebelum terbentuknya FKRI pada awal tahun 1950 (Posumah, 1978 : 54-55, 72-75).

Dalam pada itu, jabatan Kepala Daerah Minahasa dan Ketua DPR Minahasa diserahkan dari pejabat lama kepada P.M. Tangkilisan pada bulan Januari 1950. Pemimpin yang baru ini ternyata adalah seorang pro RI yang di bawah pimpinannya semakin kuatlah posisi fraksi yang pro RI dalam dewan itu. Pada masa itu DPR Minahasa terdiri dari 22 anggota, termasuk ketua. Dalam jabatannya itu maka Tangkilisan pergi menemui Komandan LRRI F.H.L.W. Mondong yang waktu itu bermarkas di Amurang. Ia pergi bersama seorang anggota MBP (Majelis Badan Pekerja, dewan yang mendampingi Kepala Daerah Minahasa dalam menjalankan pemerintahan) yang bernama E. Kandou. Selesai pertemuan dengan Mondong, maka Tangkilisan menugaskan E. Kandou untuk memimpin pemerintahan di Minahasa Utara.

Tindakan Tangkilisan di atas, semakin memperkuat keyakinan para pemimpin politik pro RI bahwa cita-cita perjuangan mereka akan segera menjadi kenyataan. Fraksi pro RI dalam DPR Minahasa bersama FKRI yang berposisi di luar dewan, mendesak agar segera diadakan sidang Dewan dengan acara tunggal, yakni membicarakan keluar dari NIT dan bergabung dengan RI. Walaupun tuntutan itu dihalang-halangi oleh yang pro bentuk federal dengan kerasnya, namun akhirnya 30 April 1950, diadakanlah sidang DPR Minahasa.

Kepala Daerah Minahasa P.M. Tangkilisan yang juga merangkap Ketua Dewan, setelah membuka acara resmi sidang hari itu, disusul dengan sambutan yang gegap gempita dari hadirin yang terdiri dari para anggota dewan serta para anggota FKRI yang hadir tanpa diundang. Sidang membicarakan acara pokok, yakni daerah Minahasa harus menyatakan diri keluar dari NIT dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari RI yang berpusat di Yogyakarta. Tuntutan, argumentasi dan pembelaan dilontarkan oleh M.B. Tumbel, dan ditentang dengan kerasnya oleh Jan Mawikere. Karena sama-sama bertahan tidak mau mengalah, maka diadakan pemungutan suara dan sebagai hasilnya ialah 19 suara setuju, satu menentang, serta tiga blanko. Atas dasar itu maka Ketua P.M. Tangkilisan segera menjatuhkan palu memutuskan bahwa Daerah Minahasa menyatakan diri ke luar dari NIT dan bergabung dengan RI. Dengan demikian maka Minahasa secara formal menjadi daerah RI sebelum hal itu dilakukan oleh NIT (Posumah, 1978 : 75-77; Kahin, 1961 : 460; Taulu, 1950 : 106, 120).

Jan Mawikere yang konsekwen dengan pendiriannya yang tidak setuju penggabungan dengan RI, dalam sidang itu mengatakan bahwa "Biar Dewan ini beberapa kali mengambil keputusan pro Negara Kesatuan, tapi saya tetap pada pendirian saya sampai ke liang kubur sekalipun saya bersama Belanda bila saya mati nanti, saya lebih berbahagia apabila jenazah saya dibungkus dengan bendera merah-putih-biru". Benarlah, tidak lama kemudian Jan Mawikere meninggal dunia, dan para pemimpin pro RI datang menjenguknya. Tidak ada seorangpun anggota fraksinya yang hadir pada waktu itu. Para anggota pro RI dipimpin oleh Abdul Madjid, datang melayat dengan membawa sehelai bendera Belanda. Ketika menyerahkan karangan bunga dan bendera Belanda yang mereka bawa, Abdul Madjid berkata bahwa "kain tiga warna itu dibuat dan diserahkan untuk menghormati orang yang tahu mempertahankan pendiriannya hingga akhir hayat" (Posumah, 1978 : 77-78).

Di pihak lain sebagaimana sudah dikemukakan di depan, terjadi pula perjuangan bersenjata untuk membubarkan NIT yang dilakukan oleh LRRI dan LFP. LRRI berada di bawah Komandan F.H.L.W. Mondong sedang LFP di bawah Komandan L. Anes. Sebenarnya kedua organisasi perjuangan gerilya itu adalah satu, yakni LRRI di bawah pimpinan Komandan F.H.L.W. Mondong. Tetapi sesuai strategi perjuangan yang diputuskan oleh para pemimpinnya maka LRRI dibagi dua, yakni sebagian tetap dinamakan LRRI dan sebagian dinamakan LFP. LRRI berjuang untuk melucuti senjata polisi NIT, sedangkan LFP berjuang agar para anggota KNIL mau bergabung dengan mereka (lihat halaman 153-154 dan 182-183).

Pada tanggal 14 April 1950, LRRI dan LFP menyusun rencana bersama untuk menyerang markas KNIL di Teling dan di Wanea (keduanya berkedudukan di kota Manado). Kalau penyerangan itu berhasil maka mereka akan memperoleh persenjataan yang lebih banyak untuk memperkuat perlengkapan persenjataan yang dirasakan sangat kurang. Tanggal 16 April 1950, di sekitar kedua markas itu terjadi gerakan-gerakan pasukan LRRI dan LFP. Markas komando khusus serangan itu ditempatkan di "gedung Kopak" (sekarang gedung Pingkan milik BNI 1946) di tengah kota. Pos depan ada di lapangan Sario yang pada waktu itu sementara dilangsungkan pertandingan pacuan kuda. Para anggota KNIL yang pro RI di kedua asrama itu sudah diberi tahu akan adanya

serangan dan mereka akan membantu dari dalam. Tetapi berhubung rencananya bocor, maka walaupun kedua markas itu sudah dikepung namun serangan dibatalkan untuk menghindarkan jatuhnya korban yang banyak. Pasukan LRRI yang telah datang untuk membantu LFP, pulang kembali ke daerah Minahasa.

Kebocoran rencana serangan itu disebabkan Sersan Rawung berkhianat dengan memberitahukan hal tersebut kepada KNIL dan Reserve Corps (KNIL di Teling dan RC di Wanea). Nama-nama para pemimpin LRRI dan LFP telah berada di tangan Kapten van Leur sebagai Wakil Komandan KNIL, termasuk para anggota KNIL dan RC yang memihak LRRI-LFP. Dengan demikian maka agar tidak didahului, para pimpinan LRRI merencanakan penyerangan kedudukan polisi NIT di Tomohon, Tondano, Airmadidi, Kawangkoan, Tumpaan dan Amurang. Rapat diadakan di Markas Besar LRRI di desa Talete (Tomohon) dipimpin langsung oleh Komandan F.H.L.W. Mondong. Serangan ke kota-kota di atas akan dilakukan serentak pada tanggal yang bersamaan, yakni 24 April 1950, dengan jam yang berbeda, yakni jam 22.00 menyerang Amurang, Tumpaan dan Airmadidi; jam 23.00 menyerang Tondano dan Kawangkoan; sedangkan untuk Tomohon, dilakukan jam 01.00 tanggal 25 April 1950. Sudah dibentuk enam pasukan untuk menyerang keenam kota itu.

Sesuai rencana maka pasukan diberangkatkan ke Amurang untuk melucuti polisi NIT di Amurang dan Tumpaan. Gerakan itu dipimpin oleh F. Wongkar, J. Kaindeh dan Boy Potu yang di Amurang diperkuat oleh Komandan LRRI Wilayah VII H.L. Kaligis yang juga sudah siap untuk itu. Dengan mudah pasukan LRRI itu melucuti semua senjata polisi NIT di Amurang dan Tumpaan tanpa pencegahan dari KNIL dan RC yang ada di tempat itu yang mungkin sekali tidak mengetahui adanya serangan. Pasukan LRRI itu karena tidak diperintahkan maka juga tidak mau menyerang pasukan KNIL dan RC sebab hal itu menjadi bagian tugas dari LFP. Setelah berhasil dalam tugasnya, pasukan LRRI itu tidak melanjutkan dengan menyerang/melucuti polisi NIT yang ada di Kawangkoan sesuai rencana berhubung harus cepat-cepat kembali ke Tomohon untuk membantu serangan di sini. Tiba di Tomohon, pimpinan pasukan diambil alih lagi oleh Komandan LRRI F.H.L. Mondong, yang bersama kekuatan-kekuatan LRRI yang siap siaga di sini menyerang markas polisi yang ada di kota itu. Beberapa anggota polisi NIT yang pro LRRI

antaranya Sem Mait ikut membantu, sehingga Komandan Polisi NIT yang ada di Tomohon (bernama Rusman), menyerah bersama seluruh anak buahnya (Posumah, 1978 : 95–99). Semua senjata mereka dirampas oleh LRRI.

Pasukan yang diperintahkan menyerang polisi NIT di Tondano dan Airmadidi gagal, sebab rencana serangan sudah diketahui musuh. Tanpa menunggu berita dari kedua tempat itu, pasukan LRRI pimpinan Mondong memindahkan Markas Besar dari Tomohon ke desa Pndos (kecamatan Motoling, Minahasa Selatan). Pemindahan itu dilakukan tanggal 25 April 1950 untuk menghindari serangan balasan dari polisi, KNIL dan RC di Minahasa, yang tentu saja tidak akan tinggal diam. Saat itu, daerah Minahasa Selatan sudah dibebaskan seluruhnya dari kekuasaan NIT. Kepala Daerah Minahasa P.M. Tangkilisan sebelum memimpin sidang DPR Minahasa (30 April 1950), pergi menemui Komandan LRRI F.H. L.W. Mondong untuk menyatukan perjuangan politik dan militer dalam membebaskan Minahasa dari NIT dan bergabung dengan RI yang berkedudukan di Yogyakarta (Posumah, 1978 : 75, 100–102).

Dalam periode perjuangan waktu itu lagu perjuangan LRRI menjadi populer. Adapun syairnya sebagai berikut (Posumah, 1978 : 102; Taulu, 1950 : 10) :

Laskar Rakyat, Pengawal Rakyat
Bertindak cepat, lagipun tepat
Kalau terlambat barang sesaat
Banyak terhambat lagi terlambat

Aksi Westerling menjadi bukti
Aksi Azis nyata munafik
Aksi 18 April bahaya mendekat
Laskar Rakyat terpaksa nekad

25 April tonggak sejarah
Laskar Rakyat membuang jejak
Menegak tonggak kesatuan
Agar lepas dari tipuan

Roda sejarah berpusing terus
Laskar Rakyat mengintai terus
Mengawal rakyat, tanah dan bangsa
Agar tanahnya makmur bahagia.

Sementara itu terjadi persiapan di kalangan KNIL dan RC untuk menyerang LRRI yang bermarkas di Minahasa Selatan.

Untuk mendahului serangan itu, maka LFP pimpinan Komandan L. Anes mengadakan dua kali rapat kilat di Tomohon, yakni 28 April dan 2 Mei 1950, untuk menyusun rencana penyerangan terhadap KNIL dan RC sebelum pasukan-pasukan itu digunakan oleh Belanda menghancurkan LRRI. Hasil-hasil rapat disampaikan pula kepada para anggota KNIL dan RC yang pro RI agar mereka dapat bersiap membantu jalannya serangan LFP. Kekuatan LFP dikerahkan dari Tomohon, Langowan dan Airmadidi untuk memperkuat pasukan yang ada di Manado. LFP Tomohon dipimpin oleh N.Th. Rumajar, LFP Langowan oleh W. Saerang, LFP Airmadidi oleh V. Mandey, dan LFP Manado oleh S.D. Wuisan. Pimpinan keempat kelompok pasukan LFP di atas langsung berada di tangan Komandan LFP L. Anes.

Rencana serangan LFP itu didahului oleh larinya Sersan Tuturoong dari markas KNIL Teling yang membawa 20 anggota, menyeberang ke pihak LFP tanpa sepengetahuan komandan mereka. Peristiwa itu hampir saja menggagalkan serangan LFP berhubung semua anggota KNIL yang diketahui memihak LFP segera ditangkap, antaranya Sersan A.H. Mengko, Sersan F. Bolang, Sersan Angkouw, Sersan Pontoh dan Sersan Mamengko. Mereka langsung diperiksa oleh Komandan KNIL Mayor Nues. Ketika ditanya mengapa mereka merencanakan pemberontakan, maka Mengko menjawab bahwa mereka sama sekali tidak berniat memberontak selain merasa sakit hati berhubungan kepangkatan mereka dirugikan kalau hendak dijadikan pasukan APRIS, sambil menyodorkan satu daftar tentang rencana Belanda untuk mengalihkan pasukan KNIL di Manado kepada APRIS. Ini hanya sebagai alasan saja dari Mengko dan kawan-kawannya di mana dokumen dimaksud secara kebetulan dilihat di meja komandan sebelumnya yang diambil oleh Mengko. Sesuai daftar tersebut, mereka yang dicurigai pro RI tidak dinaikkan, sedangkan yang lain dinaikkan, ada yang sampai dua-tiga tingkat ke atas. Umpamanya Sersan Rawung (yang berkhianat) dinaikkan jadi Letnan Dua, sedangkan Mengko dan Mamengko tidak.

Karena alasan ini maka luputlah mereka dari hukuman yang sedianya akan dijatuhkan Mayor Nues, karena mayor Belanda itu rupanya merasa lega bahwa apa yang disinyalir olehnya sebagai rencana pemberontakan, rupanya hanya soal kepangkatan biasa saja. Mengko dan kawan-kawannya juga merasa yakin bahwa hubungan rahasia mereka dengan LFP belum sampai diketahui

atasannya itu.

Sementara pemeriksaan mendekati akhir, telepon di rumah mayor itu berdering mengabarkan bahwa Sersan Tuturoong telah lari ke jurusan desa Kali (15 Km tenggara kota Manado) bersama 20 anak buahnya. Mayor Nues kemudian mengajak kelima sersan KNIL itu untuk membantu agar Sersan Tuturoong mau kembali dan kepada kelima sersan itu akan diperhatikan soal kepangkatan sebelum dimasukkan ke dalam APRIS sebentar. Mengko disertai tugas untuk itu, dibantu oleh Bolang yang akan memimpin pasukan untuk menemui Sersan Tuturoong. Sesudah itu dengan diantar oleh Kapten van Leur (Wakil Komandan) kelimanya dipulangkan ke asrama Teling.

Tiba di asrama Sersan Bolang mempersiapkan satu peleton KNIL lengkap dengan senjatanya. Kapten van Leur menelepon Mayor Nues bahwa pasukan sudah berangkat. Mengko dan ketiga sersan lainnya mempersiapkan diri berhubung pada malam harinya pasukan LFP akan menyerang markas Teling di mana mereka berada. Karena itu keempat mereka (Mengko, Angkouw, Pontok dan Mamengko) memberitahukan anggota KNIL yang pro RI agar bersiap-siap bergabung dengan LFP malam itu. Kemudian Mengko pergi ke rumahnya L.F. Saerang di Titiwungen, Manado (sekarang dijadikan markas Dewan Kekayaan Daerah "M" KODAM XIII/Merdeka). L.F. Saerang adalah salah seorang pemimpin LFP dan rumahnya dijadikan markas LFP, khusus dalam pelaksanaan serangan terhadap KNIL tanggal 3 Mei 1950, sedangkan Markas Besar LFP berkedudukan di Tomohon waktu itu.

Malam tanggal 2 Mei 1950, LFP dari Langowan, Tomohon dan Airmadidi, telah ada di Manado dengan persenjataan seadanya. LFP menerima informasi bahwa beberapa perwira APRIS secara rahasia telah ada di Manado untuk mengamati pelaksanaan pengadilan pasukan KNIL sesuai hasil KMB. Para perwira APRIS itu, adalah Letnan Kolonel H.N.V. Samual, Kapten A. Supit, Kapten Gagola, Kapten Idrus dan Letnan Satu Nanlohy. Mereka berada di RSU Gunung Wenang, Manado. Mengetahui hal itu maka Komandan LFP L. Anes disertai Piet Ngantung, pergi menemui para perwira APRIS di atas. Anes mengatakan bahwa LFP telah siap untuk merebut senjata KNIL. Samual berkata bahwa ia datang dalam rangka pengalihan semua pasukan KNIL menjadi APRIS sehingga sebenarnya mereka tidak usah diserang lagi. Tetapi ia tidak dapat menahan kemauan LFP karena memang kata-

nya adalah lebih baik kalau sebelum dimasukkan menjadi pasukan APRIS, mereka sebelumnya telah mengakui kepemimpinan kita. Anes menutup pertemuan rahasia itu dengan mengatakan bahwa LFP sudah siap untuk melaksanakannya karena rencana sudah matang, dan akan dilaporkan pelaksanaannya berhasil atau tidak berhasil (Posumah, 1978 : 107-112).

Tepat jam 24.00 (tanggal 2 menjelang 3 Mei 1950), LFP pimpinan N.Th. Rumajar telah berada di belakang markas Teling menunggu bergabungnya pasukan KNIL pimpinan Sersan Mamengko dan Sersan Angkouw. Pasukan itu memiliki senjata masing-masing lebih dari satu pucuk untuk diserahkan kepada LFP. Jumlah pasukan yang bergabung waktu itu 72 anggota yang kemudian berangkat dari Teling ke rumah L.F. Saerang di Titiwungen. Dari Titiwungen mereka menjemput pasukan pimpinan Sersan F. Bolang dan Sersan Tuturoong di Kali, lalu dengan tujuh truck militer mereka hendak ke Tomohon melalui Airmadidi dan Tondano. Di Airmadidi, pasukan KNIL yang sudah menjadi pasukan LFP bersama pasukan LFP lainnya melucuti pasukan RC yang ada di sana.

Rentetan kejadian di atas sangat menggemparkan anggota KNIL, RC, MP bahkan semua yang pro Belanda yang ada di daerah ini. Sersan Mengko yang tidak turut bergabung malam itu menjadi sasaran pertanyaan mengapa pasukan pimpinan Sersan Bolang tidak kembali dan mengapa 72 anggota lainnya pimpinan Mamengko dan Angkouw lari malam tadi. Kebetulan Mengko tidur di rumahnya Mayor Nues sehingga siasatnya itu tidak membangkitkan kecurigaan hubungannya dengan Mamengko dan kawan-kawan lainnya. Mayor Nues membangunkan Mengko dan menuduh Mengko sebagai yang bertanggung jawab atas rentetan peristiwa di atas. Mengko dan Pusung kemudian berhasil meyakinkan mayor Belanda itu bahwa mereka sanggup memanggil kembali anggota-anggota KNIL yang telah melarikan diri. Karena itu Mengko ditugaskan untuk mengusahakan agar pasukan tersebut pulang ke Manado dari tempat di mana mereka sekarang. Untuk itu Mengko didampingi oleh Sersan Emor, seorang petugas intel yang sangat dipercaya oleh Mayor Nues.

Keduanya berangkat ke Tomohon dengan memakai kendaraan militer (jeep) berbendera Belanda. Dekat Tomohon Mengko mengatakan kepada Emor bahwa kalau pakai bendera itu maka mereka tidak akan diterima oleh pasukan KNIL yang telah me-

memihak LFP. Karena itu maka bendera Belanda dirobek birunya, lalu berkibarlah bendera Merah Putih di depan kendaraan itu. Mengko diterima dengan penghormatan militer oleh pos LFP yang dijaga bekas anggota KNIL sehingga membangkitkan kecurigaan Emor. Dengan ancaman akhirnya Emor berjanji tidak akan membuka rahasia yang diketahuinya kepada Mayor Nues. Dengan janji itu maka keduanya kembali lagi ke Manado melaporkan kepada Nues bahwa misi mereka telah gagal.

Sebelum Mengko dan Emor ke Tomohon pada tanggal 4 Mei 1950, Mengko masih menghubungi Sersan Pusung. Akibatnya maka sementara Mengko berada di Tomohon, Sersan Pusung bersama anak buahnya melarikan diri dari Markas Teling ke Iloilo yang terletak antara desa Wori dan desa Bailang di Minahasa Utara. Di sana mereka mendirikan kubu pertahanan untuk menghadapi serangan sambil menunggu perkembangan atau komando dari Markas Besar LFP di Tomohon. Letnan Kolonel H.N.V. Sumual beserta stafnya yang telah datang secara rahasia itu, pergi ke Tomohon dan memberikan penerangan seperlunya kepada para bekas anggota KNIL (yang telah memihak LFP) soal status dan jaminan mereka dalam APRIS nanti sehingga melegakan para bekas anggota KNIL itu. Atas perintah Sumual maka kedudukan Markas Besar LFP dipindahkan dari Wakan (sekitar kota Tomohon) ke desa Kaaten dalam kota Tomohon (kompleks itu sekarang didirikan SPG Negeri Tomohon) (Posumah, 1978 : 120-122).

Setelah kehilangan ratusan anggota KNIL maka kekuatan militer Belanda di kota Manado sangat berkurang. Pasukan KNIL hanya tersisa dua peleton, RC di Wanea satu peleton, CPM satu peleton dan kira-kira 50 anggota polisi NIT. Sementara di Tomohon, para pimpinan LFP mengadakan rapat kilat yang berhasil membentuk satu batalyon pasukan yang dinamakan "Batalyon 3 Mei". Sebagai Komandan batalyon ialah A.H. Mengko, dan Wakil Komandan ialah L. Anes. Pasukan-pasukan KNIL dan RC dipersiapkan Belanda untuk menyerang Batalyon 3 Mei yang berkedudukan di Tomohon. Letnan Kolonel Sumual yang mengetahui hal itu memerintahkan kepada Kapten A. Supit untuk berangkat dari Manado ke Tomohon memberitahukan hal tersebut, dengan perintah dari Sumual agar batalyon segera mempersiapkan diri. Pasukan lawan langsung dipimpin oleh Mayor Nues dan Kapten van Leur.

Tetapi ternyata Nues dan van Leur dengan kawalan pasukan

baret merah KNIL setibanya di Tomohon malah menawarkan untuk berunding dengan pasukan LFP yang telah menjadi Batalyon 3 Mei. Nues dan van Leur tidak menyangka bahwasanya seorang bekas anggota KNIL, yakni A.H. Mengko, kini bertindak selaku komandan batalyon itu. Namun perundingan dilangsungkan juga. Sementara perundingan berlangsung, Sersan F. Bolang masuk dan melaporkan kepada A.H. Mengko dan L. Anes bahwa pasukannya telah berhasil melucuti RC yang ada di Wanea, Manado. Berita itu semakin melemahkan posisi Nues dan van Leur sehingga perundingan tanggal 5 Mei 1950 itu semakin dikuasai oleh pimpinan Batalyon 3 Mei. Nues dan van Leur langsung mendengkan laporan itu, sehingga mereka bersama pasukannya semakin sulit mengajukan tuntutan-tuntutan kepada Mengko dan Anes.

Mengko dan Anes menuntut agar Nues dan van Leur segera menyerahkan pasukannya lengkap dengan administrasinya kepada Batalyon 3 Mei. Tetapi Nues dan van Leur menolak dengan alasan bahwa sesuai berita, pasukan APRIS akan datang ke Manado untuk menerima pengalihan KNIL menjadi APRIS, sesuai persetujuan KMB. Akhirnya walaupun tidak ada kata sepakat kedua pihak setuju melakukan perundingan besoknya, yaitu tanggal 6 Mei 1950.

Menyadari kekuatan yang dimiliki maka Batalyon 3 Mei merubah rencana sesuai hasil perundingan, yakni bahwa mereka akan mendahului menyerang kota Manado. Persiapan-persiapan untuk itu telah diatur dengan teliti. Pimpinan serangan dipegang langsung oleh Komandan batalyon A.H. Mengko. Wakil Komandan L. Anes ditugaskan menangkap Mayor Nues dan semua perwira KNIL yang ada di Sario, Manado. Inti pasukan pimpinan Komandan A.H. Mengko mempersiapkan diri di sekitar Markas KNIL di Teling, Manado. Tugas Anes berhasil dengan baik, yakni dengan tertawannya Nues dan para perwira KNIL yang ada. Mereka dibawa ke Teling di mana Nues diminta untuk mengumumkan kepada pasukan KNIL setempat yang masih setia kepadanya bahwa ia telah menyerah dan memerintahkan agar seluruh pasukan KNIL yang ada, termasuk CPM, RC dan polisi NIT, agar mengikuti jejaknya.

Ketika melihat bahwa kendaraan-kendaraan LFP yang membawa Mayor Nues memasuki kompleks asrama Teling, maka pasukan pimpinan Komandan A.H. Mengko semakin mendekat dan mengepung kompleks markas itu. Mayor Nues turun dari kendar-

an diapit oleh Anes dan kawan-kawannya. Batalyon itu masih memakai tanda pengenal "LFP" di lengan masing-masing, sedang topi mereka bertuliskan "RI". Mayor Nues berdiri di tengah lapangan dan memerintahkan agar pasukan KNIL yang ada segera berbaris di depannya. Setelah seluruh anggota KNIL yang ada berbaris teratur, maka Nues berkata : "Anak-anak, mulai sekarang saya tidak pegang komando lagi. Sekarang komando saya serahkan kepada Laskar Front Pemuda". Suasana sangat hening di lapangan upacara itu. Pasukan KNIL terdiam kaku sedangkan para anggota LFP (Batalyon 3 Mei) yang ada yang mendampingi Mayor Nues juga turut terdiam. Kemudian ditujukan kepada para anggota KNIL yang telah menyerah L. Anes berkata : "Karena sekarang Saudara-saudara sudah berada dalam pimpinan kami, perlu kami jelaskan bahwa : gaji, pensiun serta semua hak Saudara-saudara, jalan seperti biasa dan Merdeka!" Pekikan Anes itu secara tidak disangka-sangka diikuti oleh para anggota KNIL yang telah menyerah itu, yang mungkin dilakukan secara tidak sadar (Posumah, 1978 : 113-133).

Pasukan lainnya pimpinan Komandan A.H. Mengko bergerak memasuki markas. Yang masuk dari arah depan langsung menuju ke tiang bendera, menurunkan bendera Belanda, merobek warna birunya, lalu digerek kembali menjadi Bendera Merah Putih. Pasukan KNIL masih tetap siap di barisan. Sersan Mondong dan Sersan Tumonggor (kawan-kawan A.H. Mengko) keluar dari barisan dan bergabung dengan pasukan yang baru saja datang. Mereka mengambil alih seluruh kekuasaan di Markas KNIL Teling pada tanggal 6 Mei 1950. Markas KNIL tersebut segera dijadikan Markas Batalyon 3 Mei. Tanggal 8 Mei dipindahkan kedudukan markas dari Teling (Manado) ke Tomohon seperti semula.

Tanggal 9 Mei, Kolonel Pereira (KNIL) dari Ujungpandang tiba di pelabuhan udara Mapanget disambut oleh L. Anes bersama pasukannya. Ia tidak curiga melihat pasukan penjemput memakai seragam KNIL. Pereira turun dari pesawat lalu mengatakan bahwa ia datang untuk menyelesaikan soal KNIL di Manado. Anes menimpali bahwa di Manado tidak ada lagi KNIL, dan yang berbaris sekarang adalah pasukan LFP. Kolonel Pereira terkejut lalu cepat-cepat naik pesawat dan langsung terbang kembali.

Pada tanggal 10 Mei 1950, tibalah pasukan APRIS, yakni "Batalyon Worang" dipimpin oleh Mayor H.V. Worang. Pasukan ini disambut dengan gembira oleh Batalyon 3 Mei pimpinan A.H.

Mengko dan L. Anes di Manado. Di Amurang pasukan APRIS ini disambut dengan sorak kemenangan oleh pasukan LRRI pimpinan Komandan F.H.L.W. Mondong. Berhubung semua anggota KNIL sudah dialihkan menjadi pasukan RI sebelum batalyon APRIS ini tiba, maka kedatangan pasukan itu hampir tidak menemui kesulitan.

Tanggal 20 Mei 1950, Letnan Kolonel J.F. Warouw secara resmi melantik LFP menjadi "Batalyon 3 Mei" dalam kedudukannya selaku Komandan Pasukan APRIS Wilayah SUMU (Sulawesi Utara dan Maluku Utara). Pelantikan dilakukan di lapangan Sparta, Tikala, Manado, sekaligus pengesahan formasi batalyon sebagai berikut (Posumah, 1978 : 138) :

Komandan Batalyon	: A. H. Mengko dengan pangkat Acting Mayor.
Wakil Komandan	: L. Anes dengan pangkat Kapten
Komandan Kompi I	: A. Angkouw dengan pangkat Letnan Satu
Komandan Kompi II	: Tumonggor dengan pangkat Letnan Satu
Komandan Kompi III	: Ch. Pontoh dengan pangkat Letnan Satu
Komandan Kompi IV	: Dirangkap L. Anes
Komandan Kompi V	: L.F. Saerang dengan pangkat Letnan Satu

Pelantikan dan pengesahan ini kemudian dituangkan dalam surat keputusan Penetapan No. Xs. 009309 tanggal 28 Mei 1950, yang dikeluarkan oleh Komandan Pasukan APRIS wilayah SUMU.

Menyusul pelantikan dan pengesahan ini para anggota Batalyon 3 Mei memperoleh latihan militer sekitar dua bulan lamanya. Usaha Mendelaar dan Soumokil mendirikan RIT melalui GRIT telah gagal, lalu Soumokil mendirikan Republik Maluku Selatan (RMS) 25 April 1950.. Misi perdamaian RIS dijalankan berturut-turut, tetapi gagal. Akhirnya RIS menumpas RMS dengan menggunakan pasukan APRIS. Di antara pasukan-pasukan yang dikerahkan adalah Batalyon 3 Mei di bawah Komandan Ac. Mayor A.H. Mengko dan Wakil Komandan Kapten L. Anes. Panglima Pasukan APRIS dalam penumpasan RMS ialah Kolonel A.E. Kawilarang dengan Kepala Staf, Letnan Kolonel Slamet Rijadi. Batalyon 3 Mei ini diberangkatkan ke medan pertempuran menumpas RMS dalam bulan Juli 1950.

Perjuangan politik di Minahasa tetap dilanjutkan, meskipun DPR Minahasa telah menyatakan diri keluar dari NIT untuk bergabung dengan RI 30 April 1950. FKRI tetap menuntut agar DPR dibubarkan untuk diganti dengan Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Minahasa. Tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan demikian Pasukan APRIS menjadi APRI, termasuk yang di daerah ini. Komandan Pasukan APRI Wilayah SUMU membubarkan DPR Minahasa bentukan NIT pada 15 September 1950 samail menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri RI. Tetapi kemudian pemerintah RI mengambil jalan tengah; dewan tidak langsung dibubarkan, hanya keanggotannya diperluas dengan FKRI yang selama ini berposisi di luar dewan, di mana PNI serta PPI (Persatuan Pemuda Indonesia) masing-masing mendapat satu kursi. Dewan ini tetap berfungsi sampai bulan Maret 1951 (Posumah, 1978 : 78-79); Taulu, 1950 : 114). Perlu ditambahkan bahwa setelah LFP menjadi Batalyon 3 Mei, maka pasukan LRRI pimpinan Komandan F.H.L.W. Mondong kemudian menjadi pasukan ABRI dengan nama "Pasukan Mondong".

Pergolakan politik di Minahasa sebagaimana sudah dikemukakan di atas terjadi pula di daerah-daerah lainnya di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Misalnya di Daerah Sulawesi Utara (Bolaang Mongondow, Gorontalo dan Buol) yang pusat pemerintahannya di kota Gorontalo, rakyat menuntut agar Dewan Sulawesi Utara dibubarkan untuk diganti dengan KNI Daerah Sulawesi Utara. Kemudian Dewan Gorontalo membubarkan dirinya untuk diganti dengan KNI Daerah Gorontalo. Olehnya maka Dewan Pemerintahan sub daerah Gorontalo diserahkan kepada para tokoh politik yang pro RI. Baik KNI Daerah Gorontalo, maupun Pemerintah Sub Daerah Gorontalo lalu menyatakan diri keluar dari NIT dan menggabungkan diri dengan RI pada tanggal 2 Mei 1950.

Di daerah Bolaang Mongondow, walaupun RIS telah terbentuk sesuai hasil KMB, namun rakyat tidak menghendaki tetap tergabung dalam NIT sebagai anggota RIS. Karena para pemimpin politik setempat yang pro RI mengetahui bahwa perjuangan mereka untuk bergabung dengan RI adalah sah sesuai Konstitusi yang ada, maka mereka menyusun tenaga dan strategi perjuangan untuk menuntut agar daerah itu melepaskan diri dari NIT dan

bergabung dengan RI. Juga mereka menuntut agar pemerintahan daerah yang masih bersifat feodalistis di bawah Dewan Raja-raja segera dibubarkan karena tidak sesuai dengan azas demokrasi.

Perjuangan politik di atas sebenarnya sudah sejak semula dijalankan, yakni dengan terbentuknya GAPRIBOM (Gabungan Perjuangan Republik Indonesia Bolaang Mongondow). GAPRIBOM ini adalah kesatuan aksi dari sejumlah organisasi politik yang ada di daerah ini, yakni BNI, GIM, PSII dan Muhammadiyah. Pimpinannya terdiri dari Ketua A.C. Manoppo (dari GIM) dan Sekretaris M.D. Kartawinata (dari PSII) (Kempen, 1953 : 512).

Dalam tingkat perjuangan berikutnya muncul pula banyak organisasi politik yang semakin memperkuat GAPRIBOM, yakni PPI Laskar Banteng, SPK dan KPM (lihat halaman 188). Perjuangan politik di atas dilakukan bersamaan dengan tunjang menunjang politik di atas dilakukan bersamaan dengan tunjang menunjang dengan perjuangan gerilya yang terus menerus dilancarkan sejak 1945 oleh PPI Laskar Banteng Bolaang Mongondow sampai tahun 1950. Sejalan dengan tuntutan GAPRIBOM agar pemerintahan Dewan Raja-raja dan NIT dibubarkan dan agar pemerintahan diserahkan kepada rakyat, maka semua organisasi yang tergabung di dalamnya mengadakan rapat di Kotamobagu. Rapat itu diadakan pada tanggal 4 Mei 1950 dengan tujuan untuk membentuk suatu panitia menuju terbentuknya KNI Daerah Bolaang Mongondow untuk mengambil alih pemerintahan daerah tersebut lalu digabungkan kepada RI. Alat-alat kekuasaan NIT yang ada tidak mampu menghalang-halangi diadakannya rapat tersebut sehingga dapat berlangsung tanpa adanya kesulitan, bahkan rapat diadakan dengan mempergunakan ruang sidang DPR Gabungan Bolaang Mongondow.

Hadir dalam rapat itu sejumlah tokoh politik yang berpengaruh di Bolaang Mongondow, antaranya Zakaria Imban, Johan Pontoh, C.S. Gobel, A.R. Gelu, R. Mokoginta, Nurtina Gonibala, B. Dodoali, A. Lumowa, F.P. Mokodompit, Pon Mokodongan, F. Salindeho dan lain-lain. Rapat memutuskan membentuk Panitia KNI yang susunannya sebagai berikut :

K e t u a	: Johan Pontoh (dari GIM)
Wakil Ketua	: Zakaria Imban (PSII)
Sekretaris	: Rubuu Mokoginta (Muhammadiyah)

- Anggota-anggota :
1. B. Dodoali (SPK)
 2. A.R. Gelu (Muhammadiyah)
 3. C.S. Gobel (PNI)
 4. Nurtina Gonibala (PSII/PPI)
 5. A. Lumowa (KPM)
 6. F.P. Mokodompit
 7. U. Mokodongan
 8. B.A.M. Pandelaki (KPM)

Kemudian Panitia KNI Bolaang Mongondow mengundang seluruh pimpinan organisasi sosial politik yang ada di daerah itu untuk mengadakan rapat pembentukan KNI. Rapat itu diadakan pada tanggal 7 Mei 1950 di tempat yang sama, di mana telah dipilih 51 orang sebagai anggota sementara bagi KNI Daerah Bolaang Mongondow. Ke 51 anggota KNI tersebut adalah sebagai berikut (H. Imban, wawancara 17 September 1979; R. Mokoginta, wawancara 18 September 1979) :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. M. Buhang | 25. M.R. Manoppo |
| 2. M.T. Daun | 26. A. Marada |
| 3. H.M. Djangko | 27. D. Massie |
| 4. B. Dodoali | 28. O. Mokoagow |
| 5. A.R. Gelu | 29. L. Mokobombang |
| 6. B. Gilalom | 30. A.A. Mokodompit |
| 7. C.S. Gobel | 31. P. Mokodompit |
| 8. B. Gumohung | 32. L. Mokodongan |
| 9. R.A. Hardjodiwirjo | 33. U. Mokodongan |
| 10. Hadjir Imban | 34. A. Mokoginta |
| 11. K. Imban | 35. A.U. Mokoginta |
| 12. Zakaria Imban | 36. R. Mokoginta |
| 13. P.M. Jacob | 37. A. Mustafa |
| 14. E. Jusuf | 38. B.A.M. Pandelaki |
| 15. W. Kadamong | 39. E. Pandelaki |
| 16. L. Kandou | 40. E. Patadjium |
| 17. A. Korompit | 41. J. Pattilima |
| 18. D. Korompot | 42. E.S. Pontoh |
| 19. K. Lakadjo | 43. Johan Pontoh |
| 20. J. Lumowa | 44. Karta Pua |
| 21. U.H. Mamonto | 45. E. Salindeho |
| 22. B.T. Manoppo | 46. F. Salindeho |
| 23. F.T. Manopoo | 47. M.A. Sugeha |
| 24. M.J. Manoppo | 48. J. Pampemawa |

49. H. Tanta
50. S.G. Tungkagi
51. S.U. Tungkagi

Setelah para anggota KNI tersebut disahkan pengangkatannya, maka hari itu juga dilanjutkan dengan rapat pembentukan Badan Pekerja KNI Bolaang Mongondow. Badan ini dipilih oleh para anggota KNI di atas di antara mereka sendiri, yang susunannya adalah :

- | | | |
|-----------------|---|-----------------------------|
| K e t u a | : | Zakaria Imban (PSII) |
| Wakil Ketua | : | Johan Pontoh (PSI) |
| Anggota-anggota | : | 1. M.T. Daun (PSII) |
| | | 2. B. Dodoali (SPK) |
| | | 3. A.R. Gelu (Muhammadiyah) |
| | | 4. C.S. Gobel (PNI) |
| | | 5. Hadjir Imban (PSII) |
| | | 6. F.T. Manoppo (PSII) |
| | | 7. A.A. Mokodompit (PSI) |
| | | 8. B.A.M. Pandelaki (PSI) |
| | | 9. H. Tanta (PSI) |

yang semuanya berjumlah 11 anggota.

Selesai pembentukan Badan Pekerja KNI, maka Badan itu langsung bersidang hari itu juga yang membicarakan tentang :

1. Sikap Pemerintah Daerah Gabungan, Dewan Raja-raja, dan DPR Gabungan Bolaang Mongondow yang tidak sesuai dengan tuntutan perjuangan ke arah Negara Kesatuan RI, sesuai Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Struktur dan keadaan pemerintahan yang masih tetap mengikuti susunan ketatanegaraan NIT, di mana Daerah Bolaang Mongondow termasuk dalam Daerah Sulawesi Utara (bersama Gorontalo dan Buol) sesuai Undang-undang Dasar Daerah Sulawesi Utara tanggal 19 Nopember 1948, yang disahkan oleh Residen Manado DR. Morison tanggal 25 Januari 1949 No. R 22/1/11 yang diberlakukan mulai 7 Pebruari 1949.

Sebagai hasil sidang Badan Pekerja di atas, maka dikeluarkan tiga resolusi yang pada dasarnya adalah :

1. Tuntutan membubarkan NIT dan segera menggabungkan diri dengan RI;
2. Tidak mengakui lagi adanya bentuk pemerintahan di bawah Dewan Raja-raja dan DPR Gabungan, di mana

DPR itu hanya memiliki hak memberi nasehat kepada pemerintah dan merencanakan anggaran belanja daerah tersebut;

3. Tuntutan menghapuskan pemerintahan swapraja di seluruh Bolaang Mongondow.

(Hadjir Imban, wawancara 17 September 1979).

Ketiga resolusi di atas disampaikan kepada Pemerintah Daerah Gabungan dan DPR Bolaang Mongondow.

Rentetan kesuksesan perjuangan politik di atas sesungguhnya dilatarbelakangi oleh kekuatan militer yang didatangkan dari Minahasa. Dalam hal ini adalah LRRI pimpinan Komandan F.H.L. W. Mondong yang menugaskan kepada H.L. Kaligis membawa satu detasemen LRRI ke Bolaang Mongondow untuk membantu perjuangan pro RI di sini. H.L. Kaligis ini sebelumnya adalah Komandan LRRI Wilayah Daerah VII (Amurang dan sekitarnya) sebelum ia ditugaskan Mondong sebagai Komandan Detasemen LRRI Bolaang Mongondow. Ia bersama pasukannya berangkat ke Kotamobagu pada tanggal 3 Mei 1950 jam 20.00 dan tiba tanggal 4 Mei jam 06.00 pagi harinya. Beberapa hari sebelum mereka tiba, di Bolaang Mongondow terjadi kekacauan di mana pemuda pejuang merampas kekuasaan NIT pada tanggal 1 Mei 1950, tetapi direbut kembali oleh Polisi NIT tanggal 4 Mei 1950. Para pemuda pejuang anggota SPERITBOM (Serikat Perjuangan Republik Indonesia Tanah Bolaang Mongondow) sebanyak 51 orang ditangkap polisi dan dipenjarakan di Kotamobagu. SPERITBOM ini dipimpin oleh Julian Pinontoan, Max Eman, Joost Sarundajang dan kawan-kawannya. Dengan tibanya pasukan LRRI pimpinan H.L. Kaligis maka semua mereka dibebaskan kembali (Taulu dan Sepang, 1961 : 39).

Sebagai komandan pasukan maka H.L. Kaligis menyusun laporan kejadian secara kronologis sejak 4 – 7 Mei 1950 untuk dilaporkan kepada atasnya di Minahasa. Dengan bahasanya sendiri, laporan itu dikutip selengkapnyanya sebagai berikut (Taulu dan Sepang, 1961 : 40–43) :

LAPURAN KEDJADIAN2 PADA 4 MEI 1950 DI KOTAMOBAGU

Tanggal 3 Mei 1950 djam 20.00 dengan surat kuasa berangkat dari Amurang.

Tanggal 4 Mei djam 06.00 pagi tiba di Kotamobagu. Keadaan katjau.

Chabar Pemerintah ribut, banjak orang sudah lari tjari perlindungan, begitu tjerita2 orang dirumahkopi2 dan toko2

Djam 07.00 pagi, Komandan Pasukan H.L. Kaligis dan F.S. Liogu, menemui Wakil Radja dan Kepala Daerah, menanjakan keadaan keamanan.

Dari kemarin katjau (3 Mei) terdjadi tembak-menembak, demikian kata Wakil Radja dan Kepala Daerah.

Kepala Daerah dan Wakil Radja menanjakan: apakah kedua mereka utusan APRIS, kedua anggota LRRI hanja mendjawab: Tuan2 mengertilah sendiri kenapa kami sampai datang ber-tanja2, tentang keadaan keamann.

Kepala Daerah lantas katakan: Mengerti, dan lapurkan terus bahwa oleh seorang bernama J. Pinontoan, sudah direbutnja kekuasaan polisi dan bertindak se-wenang2 sebagai suatu perampok.

Makanja Pemerintah sudah ambil tindakan membasminja, terdjadi tembak-menembak antara polisi dan pemuda, menimbulkan kekatajukan, dan Pinontoan beserta pemuda2 51 orang ditangkap, dan dimasukkan ke dalam pendjara. Status alat kekuasaan NIT masih ada djuga.

Pemuda2 itu dilepaskan pada tanggal 5 Mei djam 12 tengah hari, menurut keadaan.

Sesudah mendengar lapuran lisan dari Kepala Daerah dan Wakil Radja tentang tergangguja keamanan kemarin, dan persetudjuan2 jang dibuat sedjak 1 Mei, maka Pimpinan LRRI mempersalahkan setjara siasat kepada Pemerintah dan Polisi jang tak sanggup mendjaga keamanan itu.

Oleh karena Pemerintah dan Polisi merasa bersalah dan mesti menanggung djawab, maka disiasatkan :

1. Memanggil Kepala Polisituhan Davies dan Mantri Polisi tuan Hoellan menghadap, tuan2 mana segera menghadap.
2. Tuan tsb. lantas ditanjai, kenapa tidak djaga keamanan sepertinja, tuan Davies menjahut: lantaran sakit, dan tuan Hoellan dikasih beberapa peringatan jang tentu menimbulkan perasaan bersalah dan bertanggung djawab.

Lantaran begitu, maka oleh rakjat jang ada didesak mereka tidak mau lagi keamanan ditanggung oleh bekas polisi NIT.

Sebab itu, diichtiarkan untuk dapatkan satu kumpulan pemuda jang akan menerima sendjata dari Polisi jang tak akan dipakai lagi sebagai Polisi RI pendjaga keamanan.

Suatu Panitia diminta bentuk, dan Panitia mana diusulkan terdiri dari wakil2 Partai Politik dan Kumpulan2 Sosial jang ada.

Beberapa wakil Partai mengusulkan pertemuan partai2 sore djam 7. Sementara berbitjara untuk membentuk pemuda itu, maka disiasatkan memerintah itu tuan Davies untuk menjuruh semua sendjata di dalam gudang, dikumpul, dengan sendirinja Polisi dilutjuti sendjata dan alat kekuasaan NIT terlepas sendjata, terkumpul. Tidak ada jang pegang sendjata lagi.

Sementara dalam perundingan lagi seterusnya, tiba2 datang surat daftar pengakuan dari Polisi2 jang tak bersendjata lagi itu, untuk minta masuk Lasjkar Rakjat.

Penandatngannja surat daftar itu diusahakan oleh Saudara Pes Liogu dengan 3 orang bekas Polisi tempo hari jaitu:

J. Kotambunan, N.E. Kaligis dan M. Walalangi.

Pada mulanja kedjadian ini tidak diterima, tapi 2 detik kemudian diterima djuga pengakuan mereka, dan dikeluarkanlah proklamasi pada djam 11.25 bunjinja:

1. Mulai djam 11.17 alat kekuasaan Negara Indonesia Timur Daerah Kotamobagu telah mendjadi Lasjkar Rakjat.
2. Mulai djam jang tersebut pada pasal 1 maka keamanan itu ketenteraman didjaga dan didjamin oleh Lasjkar Rakjat.
3. Toko2 dibuka dan mendjual biasa.
4. Diserukan kepada Rakjat supaja tetap tenang dan tenteram.
5. Barang siapa melanggar pengumuman ini, diambil tindakan keras.

Dikeluarkan di Kotamobagu pada djam 11.25 pada tanggal 4 Mei 1950.

Komandan Putjuk Pimpinan LASJKAR
RAKJAT RI di Kotamobagu/Minahasa :
a.n.

(H.L. KALIGIS)

Sorenja dikeluarkan lagi suatu siaran kilat jang lain, berbunji :

Berhubung dengan peristiwa alat kekuasaan NIT sudah berada ditangan Lasjkar Rakjat, maka diumumkan, bahwa :

1. Pemerintah tetap berdjalan seperti biasa.
2. Rakjat lakukan kewadajiban sebagai biasa.
3. Lain2 ketentuan akan menjusul.

Kotamobagu, 4 Mei 1950
Putjuk Pimpinan Lasjkar Rakjat
a.n.

(H.L. KALIGIS)

Pada sorenja tgl. 4 Mei djam 7 malam (19.00), 12 Partai2 Politik dan Kumpulan2 Sosial berkumpul digedung pertemuan Kotamobagu dan berhasil membentuk satu panitia untuk memadjukan setjara berimbang pemuda2 jang akan diterima djadi Polisi RI diberi nama Polisi Rakjat, banjknja 41 orang, buat dilatih.

Setelah selesai pada djam 11 malam, Panitia jang terdiri dari wakil2 Rakjat memproklamirkan bahwa daerah Bolaang Mongondow itu, djadi bahagian dari RI Pusat Djokdja.

Segera sesudah proklamasi djatuhnja alat kekuasaan NIT, pada djam 12 tengah hari Kepanduan PSII dan Muhammadiyah dan banjak sekali rakjat suau Demonstrasi, ditaksir banjknja jang turut 1500 orang dimuka kantor pemerintahan.

..... Penerangan di Modajag dibuat sore tgl. 4 djam 4 sore
besok harinja tgl. 5 Mei 1950, Polisi mulai dilatih oleh Lasjkar Rak-
jat.

Tanggal 5 djam 7 didengar pemitjaraan Telepon Bung Damo-
polii bahwa Tentara dari Amurang jang terdiri dari Sdr. M. Eman dan
J. Sarundjang, seperti pemimpin berdjalan menuju Kotamobagu
dengan bersendjata, jang lebih dulu telah berbitjara dengan tuan
Mokodompit, Kepala Daerah t/b Bolaang Mongondow.

Mendengar berita itu saja lantas djalankan penjelidikan dengan 1
djip dengan 1 tentara nama Mokodompit bersendjaa 1 pistol mitra-
leur.

Ditengah djalan distop oleh 2 orang jang tak dikenal dan tak
mengenal saja Kaligis, sambil bertanja dimana saja berada.

Keduanja diizinkan naik sama2 dan menuju Inobonto
dua orang pengintip tadi Lumowa dan Sondakh tertahan.

..... Didjambatan Mogolaing (ditengah kota) bertemu dengan 2
djip dan 1 bus jang ditumpangi oleh tentara bersendjata 1 mitraleur
11 Karaben dan 4 pistol

Saja memerintah oto stop, lalu turun dan mengantjam orang
jang memegang mitraleur dengan pistol.

Sendjata dirampas lalu tiap2 orang jang memegang sendjata
dalam keadaan siap diantjam dan dirampas sendjatanja. Semua
tentara dan orang2 lain diantaranya Abo Anton, Kepala Daerah
Mokodompit dan Menteri Kehutanan, ditawan

Malamnja diadakan perondaan Kota sampai Modajag djam
10

Tanggal 7 Mei 1950, Rapat Muhammadiyah untuk penjelasan
tentang membentuk KNI jang terdiri dari wakil2 partai politik
dan kumpulan2 sosial akan membentuk Schaduwbestuur, pada djam
3 sore.

Malam djam 8, wakil2 partai untuk pembentukan KNI dengan
djalan tiap2 partai mengundjuk wakilnja setjara Radarn.

Wakil2 partai menjatakan kepertjajaan kepada Lasjkar Rakjat
untuk mendjamin keamanan. Setelah itu dibentuklah KNI Daerah
Kotamobagu 51 anggotanja, jang dimadjukan oleh tiap2 partai
politik dan kumpulan Sosial.

Kotamobagu, 7 Mei 1950
djam 11.30 malam
Jang melapurkan,
(H.L. KALIGIS)

Tuntutan yang datang dari semua partai politik dan organisasi
massa termasuk pemuda di daerah Bolaang Mongondow, yang
menuntut agar pemerintahan feodal dibubarkan dan agar dibentuk
pemerintahan yang pro RI, keluar dari NIT dan menggabungkan
diri dengan RI yang berpusat di Yogyakarta, semakin lama sema-

kin menghebat. Tuntutan dilakukan dalam bentuk demonstrasi berturut-turut oleh hampir setiap organisasi perjuangan yang ada, di samping ada yang mengirimkan surat pernyataan, resolusi, dan sebagainya.

Periode antara Mei sampai Juni 1950 di Bolaang Mongondow ditandai dengan perjuangan politik menuntut hal-hal yang disampaikan di atas. Alat-alat kekuasaan NIT yang lama tidak mampu berbuat apa-apa sebab disokong sepenuhnya oleh Detasemen LRRI pimpinan Komandan H.L. Kaligis yang berkedudukan di Kotamobagu. Sebagian besar bekas Polisi NIT sudah menyatakan diri menjadi Polisi Rakyat yang membantu perjuangan di atas sambil menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Salah satu di antara pernyataan tuntutan di atas dibuat oleh PSII yang mengadakan Rapat Umum di Matali 11 Juni 1950. Mosi rapat umum itu dikirimkan tanggal 12 Juni kepada Komandan Detasemen LRRI Bolaang Mongondow, H.L. Kaligis, sebagai berikut (Taulu dan Sepang, 1961 : 44—45) .

Molinow, 12 Djuni 1950

Kepada jang Terhormat,
Bapak Komandan Detasemen Lasjar Rakjat RI
Bolaang Mongondow
di Kotamobagu

SALAM MERDEKA !!!!

Dengan banjak hormat, bersama ini dikirim kepada Bapak 3 (tiga) lembar mosi yang telah dibuat dan disusun sebagai jang tersebut dalam mosi jang kami kirim sesama ini.

.....

M O S I

Rapat Umum Partai Sjarikat Islam Indonesia di Matali pada hari Ahad tanggal 11 Djuni 1950 dihadiri k.l. 1000 orang dengan seia-sekata telah menjusun seperti berikut :

- I. Mendengar uraian dan keterangan2 Wakil KPI perihal tuntutan seluruh barisan Pemuda jang tergabung didalam KPI dalam demonstrasinja tanggal 7 Djuni 1950 agar supaja bentuk susunanja dan sifat2nja pemerintahan ber-Radja (Landschap) didalam daerah ini segera harus dihapuskan dan dirobah dengan bentuk susunannja dan sifat2 pemerintahan sesuai dengan tuntutan zaman merdeka dan hasrat rakjat jang njata.
- II. Menaruh kira bahwa tjara2 pemerintahan ber-Radja (Landschap) jang memakai adat beraneka warna diluar undang2 jang tertulis, sudahlah didjadikan alat jang paling sakti oleh kaum pendjadjah

untuk meneguhkan dan mengekalkan djadjahannja, dan oleh karena aturan adat jang beraneka warna dan bersifat karet itu di-mana2 dalam tanahair kita telah menimbulkan korban jang tidak sedikit dari Pemimpin2 dan rakjat dalam menuntut kemerdekaan tanahair dan bangsa.

- III. Menimbang bahwa pemerintahan ber-Radja itu harus melalui perbelandjaan daerah se-besarnja itu, jang hanja memberatkan beban pikulan rakjat, jang kini dalam tugasnja hendak mengisi kemerdekaan kita jang masih muda itu.
- IV. Menimbang bahwa Pemerintahan ber-Radja jang berazas turun-temurun itu, amat bertentangan dengan azas2 demokrasi jang se-djati2nja.
- V. Menimbang lebih djauh bahwa radja2 dalam lingkungan daerah ini dalam masa perobahan dan peralihan daerah ini meleburkan diri ke RI sebagai pernyataan hasrat rakjat, tidak telah disesuaikan dirinja dan membuktikan sikap pendiriannja, sesuai dengan kehendak dan tuntutan rakjat.
- VI. Menjatakan:
Menjetudjui dan menundjang se-penuh2nja tuntutan KPI tersebut pada angka I diatas.
- VII. Memutuskan :
Mendesak kepada Komite Nasional Indonesia (KNI) Bolaang Mongondow se-lekas2nja bertindak menghapuskan susunan Pemerintahan ber-Radja (feodaal) didaerah ini, dan menggantinya dengan susunan Pemerintahan baru, sesuai dengan azas2 demokrasi alias hasrat keinginan rakjat.
- VIII. Mengirim mosi ini kepada :
 1. Bapak Ketua Komite Nasional Indonesia Bolaang Mongondow.
 2. Bapak Kepala Daerah Bolaang Mongondow
 3. Panitia Pusat Kesatuan Nasional Indonesia Makassar
 4. Perdana Menteri RI Djokjakarta
 5. Pers untuk disiarkan landjut
 6. Bapak Komandan Detasement Lasjkar Rakjat Kotamobagu

Matali, 11 Djuni 1950

Pimpinan Rapat Umum PSII
Pimpinan Ladjnah Afdeling PSII
Bolaang Mongondow.

Ketua muda,
(ttd)
L. MOKOBOMBANG

Panitera II,
(ttd)
M. BAMBELA

Dalam membanjirnya tuntutan serta demonstrasi, maka KNI Bolaang Mongondow mengadakan sidang tanggal 19 Juni 1950 di Kotamobagu. Sidang pleno KNI itu dihadiri 42 anggota, sedang-

kan 9 anggota tidak hadir. Acara sidang itu adalah :

1. Pembubaran Daerah Sulawesi Utara yang beribukota Gorontalo;
2. Membentuk Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow yang terpisah dari Daerah Sulawesi Utara di atas;
3. Memilih Kepala Daerah sebagai Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Sidang pleno KNI itu memutuskan penghapusan pemerintahan kerajaan (landschap) di seluruh daerah Bolaang Mongondow. Keputusan itu didasarkan pada pemungutan suara anggota, di mana 41 suara setuju hapus dan satu suara tidak setuju. Selain itu sidang memutuskan susunan pemerintahan daerah yang disebut Dewan Pemerintah Harian Daerah Bolaang Mongondow sebagai berikut :

K e t u a : F.P. Mokodompit, yang juga merangkap sebagai Kepala Daerah

Anggota-anggota : 1. M.J. Manoppo
2. M.R. Manoppo

Hasil-hasil keputusan sidang pleno KNI di atas segera disampaikan kepada Pemerintah Gabungan Bolaang Mongondow dan seluruh pemerintah swapraja (Landschap), yakni Kerajaan Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, Bintauna dan Kaidipang Besar yang mulai saat itu dibubarkan.

Berdasarkan hasil keputusan sidang pleno KNI itu, maka Raja H.J.C. Manoppo selaku Kepala Pemerintahan Gabungan Bolaang Mongondow mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 1 Juli 1950. Dalam pengunduran diri itu ia memberikan pernyataan, bahwa langkah ini diambilnya guna menjaga keselamatan rakyat dan demi menjaga ketertiban dan keamanan rakyat daerah Bolaang Mongondow.

Menteri Dalam Negeri NIT Lanto Daeng Pasewang yang tiba di pelabuhan Inobonto dalam rangka kunjungan kerja ke daerah Bolaang Mongondow waktu itu, mengeluarkan pernyataan, bahwa pemerintahnya mengakui pemerintahan di Bolaang Mongondow. Pernyataan itu dikeluarkan Pasewang pada tanggal 20 Juli 1950 di Inobonto.

Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 1950, KNI Bolaang Mongondow mengadakan sidang pleno di mana diputuskan untuk membubarkan diri, kecuali 11 anggota Badan Pekerjan KNI yang dipimpin oleh Zakaria Imban sebagai Ketua. Badan Pekerja KNI

yang beranggota 11 orang itu kemudian ditetapkan sebagai DPR Sementara untuk Daerah Bolaang Mongondow. Dengan demikian, maka sejak saat itu yang menjalankan pemerintahan setempat adalah Dewan Pemerintah Harian (3 orang) yang diketuai oleh F.P. Mokodompit selaku Kepala Daerah, dan DPR Sementara (11 orang) yang dipimpin oleh Zakaria Imban selaku Ketua.

Sumber lainnya menambahkan bahwa DPR Sementara itu kemudian diperluas pada tahun itu juga menjadi 13 orang, dan terdiri atas empat faksi, yakni PSII (4 anggota), PNI (2 anggota), PARKINDO (2 anggota) dan MASYUMI (5 anggota) (Taulu dan Sepang, 1961 : 46).

VI. PENUTUP

Penjajahan berabad-abad lamanya yang dialami oleh bangsa Indonesia akibat penguasaan kolonialis Belanda, hanya dalam waktu beberapa bulan saja diruntuhkan oleh Jepang di tahun 1942. Daerah Sulawesi Utara pada waktu itu dapat dikatakan sebagai yang pertama dilepaskan dari penjajahan Belanda, berhubung Jepang menguasai daerah ini mulai 11 Januari 1942, mendahului daerah-daerah lainnya di Indonesia. Resminya Penjajahan Belanda berakhir 8 Maret 1942 ketika Pemerintah Hindia Belanda menyerah dan berkapitulasi dengan Jepang. Sejak saat itu maka sampai tahun 1945, rakyat Indonesia telah mengalami masa yang paling berat di bawah telapak kaki pendudukan Jepang.

Dalam masa pendudukan Jepang daerah ini di bawah kekuasaan Angkatan Laut (Kaigun) bersama-sama seluruh Indonesia Timur, termasuk Kalimantan, sementara Indonesia Barat diduduki oleh Rikugun (Angkatan Darat). Pemerintah pendudukan menjalankan program-program mereka di bidang pemerintahan, pertahanan, perekonomian dan sebagainya, yang kesemuanya menuntut pengorbanan dan sebesar-besarnya dari rakyat. Di balik itu, rakyat memperoleh perlakuan yang tidak sewajarnya dari pihak pemerintah pendudukan, anpa adanya penghargaan akan hak-hak azasi sebagai manusia. Namun hal itu perlahan-lahan berubah, sejalan dengan perkembangan di medan perang melawan Sekutu.

Rakyat mulai diberikan kesempatan ikut serta dalam pemerintahan daerah, dan akhirnya diberi janji bahwa akan diberikan kemerdekaan sesuai keputusan pemerintah pusat mereka di Tokyo. Hal ini rupanya hanya sebagai taktik belaka karena mereka berharap, dengan adanya janji itu, maka rakyat akan dibangkitkan semangatnya membantu Jepang melawan Sekutu. Janji dan kesempatan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan di atas, dipergunakan sebaik-baiknya oleh para tokoh nasionalis yang kelihatannya saja mau bekerjasama dengan Jepang, tetapi pada hakekatnya dipergunakan untuk membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat, untuk suatu ketika merebut kekuasaan dari tangan Jepang.

Dengan kesadaran ini, maka rakyat terutama para pemudanya, aktif mengikuti barisan-barisan sukarela yang dibentuk. Semakin

mendekati kekalahannya, maka Jepang semakin berniat untuk mempergunakan pemuda-pemuda itu bagi kepentingan militer melawan Sekutu. Para pemuda mulai dipersenjatai serta diberikan latihan-latihan militer. Puncak segala maksud Jepang itu ialah dibentuknya pasukan yang di Minahasa disebut Boo Ei Teisintai di bawah seorang Komandan (Daidanco) orang Indonesia. Ketika terdengar berita bahwa pemerintah pusatnya sudah menyerah, maka tergesa-gesa orang-orang Jepang yang membenci Belanda itu masih mengadakan usaha untuk mengalihkan pemerintahan ke tangan orang Indonesia serta membentuk pasukan seperlunya. Terbentuklah pemerintahan Keresidenan Manado di bawah Residen E.H.W. Pelengkahu dan Pasukan PTA di bawah Hulubalang P.A. Tiendas, sebagai wadah yang akan mengambil alih tugas-tugas tersebut. Tetapi kedua badan itu dapat dianggap sebagai wadah tanpa isi, berhubung ketika Jepang mengambil alih kembali kekuasaan kedua badan itu belum mampu berlutik untuk melawan.

Tetapi kaum nasionalis di daerah Sulawesi Utara tidak berputus asa. Mereka mengorganisir rakyat bukan lagi untuk melawan Jepang yang sudah dikalahkan Sekutu, tetapi untuk melawan Belanda yang akan datang bersama tentara Sekutu sebagai pemenang perang. Merasa bahwa haknya dirampas secara paksa oleh Jepang, maka Belanda kembali lagi untuk mendirikan pemerintahan seperti sebelum pecahnya perang. Tetapi rakyat di daerah ini tidak sudi begitu saja mengakui pemerintahan penjajah Belanda itu, karena sejak 17 Agustus 1945 sudah memiliki pemerintahan sendiri, yakni Pemerintah Republik Indonesia.

Menghadapi kenyataan ini maka Belanda berusaha memecah-belah rakyat dan tanah air Indonesia untuk mengaburkan arti proklamasi kemerdekaannya. Dibentuklah sejumlah negara boneka untuk merongrong kesatuan dan persatuan yang telah dimiliki seluruh rakyat Indonesia di mana daerah Sulawesi Utara dimasukkan dalam wilayah NIT. Pergolakan dan pergulatan politik menghebat sebagai reaksi rakyat, ditunjang sepenuhnya oleh kekuatan senjata seadanya yang dimiliki tetapi dijiwai oleh semangat juang yang tinggi untuk menghancurkan Belanda, menghancurkan NIT serta mempersatukan diri dengan Republik Indonesia sesuai jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Pada akhirnya, walaupun dengan meminta pengorbanan yang amat besar, hasrat rakyat untuk bersatu dan memerintah sesuai

jiwa proklamasi di atas, dapat diwujudkan dan menjadi kenyataan. Belanda terpaksa mengakui keunggulan kita dan mau mengakui kedaulatan negara kita. Tetapi bagi rakyat di daerah Sulawesi Utara, perjuangan terus dilanjutkan untuk menghalau sisa-sisa kekuatan kolonial yang masih tetap mau bercokol di daerah ini. Perjuangan itupun akhirnya berhasil sehingga sejak 17 Agustus 1950, daerah ini bersama-sama dengan daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia, membentuk satu wadah kesatuan yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai cita-cita Proklamasi di atas.

Generasi yang sekarang perlu mengetahui jalan dan jalinan peristiwa di atas, untuk diwariskan jiwa dan semangatnya kepada generasi yang akan datang. Tepatlah kata salah seorang tokoh kita yakni Prof. Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, bahwa "sejarah revolusi Indonesia berdasarkan sumber-sumber Indonesia sendiri, masih harus ditulis".

G L O S S A R I U M

- alabadiri, salah satu jenis tarian di daerah Sangir Talaud.
- ampa wayer, salah satu jenis tarian di daerah Sangir Talaud
- ampuang, pemimpin upacara religis magis menurut kepercayaan lama orang Sangir Talaud
- balacae, sejenis tanaman jarak yang bijinya mengandung minyak dan dapat dibakar sebagai lampu
- bengko, salah satu jenis tarian rakyat yang terdapat di Sangir Talaud
- beto talaur, sejenis tanaman ubi talas yang banyak terdapat di daerah Sangir Talaud, di masa Jepang terpaksa dimakan berhubung kekurangan bahan pangan
- Bogodang, barisan pemuda di Minahasa yang diorganisir Jepang yang kemudian menjadi Keibodan
- bolian, pemimpin upacara religis magis menurut kepercayaan lama orang Bolaang Mongondow
- Dangisah, salah satu jenis tarian di daerah Bolaang Mongondow
- dembulo, salah satu bentuk kerja sama menurut adat di daerah Gorontalo dalam bentuk bantuan atau sumbangan bagi keluarga yang berduka
- giliran, istilah untuk pengerahan romusya di daerah Minahasa dan Bolaang Mongondow
- gunde, salah satu jenis tarian rakyat di daerah Sangir Talaud
- Hukum Besar, istilah untuk jabatan Wedana atau Kepala Distrik di Minahasa
- Hukum Kedua, istilah untuk jabatan Asisten Wedana di Minahasa yang sekarang ini setingkat Camat
- Hukum Tua, istilah jabatan Kepala Desa atau Lurah di Minahasa (sampai sekarang masih dipakai)
- hulobalangi, kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan gaib dan sakti menurut kepercayaan lama orang Gorontalo
- Hulubalang, istilah jabatan yang dipergunakan oleh PPI (Pasukan Pemuda Indonesia) di Minahasa
- Hulubalang Besar, istilah jabatan untuk pemimpin tertinggi PPI di Minahasa
- husaro, sejenis tarian di Bolaang Mongondow terutama di Kerajaan Bintauna
- ilopateya, istilah di Gorontalo untuk keluarga di mana ada seorang yang meninggal dunia

- Jaga, istilah pemerintahan desa di Minahasa yang merupakan wilayah administratif yang lebih kecil dari desa (sebuah desa terdiri atas beberapa Jaga)
- Jiyuu, istilah Jepang untuk "otonomi" yang ditawarkan kepada KTR dan BPPKI
- Jogugu, di Bolaang Mongondow khususnya untuk Kerajaan Bolaang Mongondow, merupakan jabatan tertinggi sesudah Raja
- di Gorontalo dahulu merupakan jabatan untuk Kepala Distrik yang kemudian dihapuskan dan diganti dengan istilah Marsaoleh (kira-kira setingkat Asisten Wedana, atau Camat sekarang ini)
 - di Sangir Talaud merupakan istilah jabatan untuk Kepala Distrik
- joke, sejenis tarian di daerah Bolaang Mongondow
- jumpe, barisan pemuda pembantu polisi masa Jepang di daerah Sangir Talaud
- Kapten Laut, istilah untuk jabatan Kepala Desa atau Lurah di daerah Sangir Talaud
- Kepala Jaga, istilah untuk jabatan kepala salah satu wilayah administratif pemerintahan desa di Minahasa (lihat Jaga di atas)
- kipas, salah satu jenis tarian rakyat yang merupakan tarian adat di Sangir Talaud khususnya di daerah Talaud
- Kishman, wakil pilihan rakyat perdesa dalam sistem bertingkat di daerah Sangir Talaud dalam rangka memilih dua orang wakil daerah itu untuk mengikuti konferensi-konferensi yang diselenggarakan oleh NIT dan seterusnya untuk duduk sebagai anggota Parlemen NIT mewakili daerah tersebut
- langika, sejenis pohon kayu yang kulitnya dipakai sebagai bahan pencuci (sabun) oleh rakyat di daerah Sangir Talaud di masa Jepang berhubungan sangat kekurangan bahan tersebut
- lenso, sejenis tarian adat di Sangir Talaud khususnya di daerah Talaud
- logantod, salah satu alat dan jenis semi musik di daerah Bolaang Mongondow
- lolibag, salah satu alat dan jenis seni musik di daerah Bolaang Mongondow
- lologga, pakaian adat di daerah Talaud yang ditenun dari serat manila (manila henep), serat daun nenas, serta benang

kapas, yang dibuat di masa Jepang yang merupakan salah satu hasil seni kriya rakyat daerah itu.
 londe, salah satu jenis perahu bercadik di daerah Sangir Talaud
 maengket, salah satu jenis tarian rakyat di Minahasa
 maeru-erur, salah satu bentuk kegiatan kerja sama tolong menolong di Minahasa pada waktu kematian
 mapalus, salah satu bentuk kegiatan kerja sama tolong menolong untuk mendirikan rumah, mengerjakan kebun, bahkan arisan uang dan sebagainya yang hidup di kalangan orang Minahasa
 marambak, salah satu bagian dari tarian maengket yang hidup di kalangan orang Minahasa
 Marsaoleh, di Bolang Mongondow merupakan istilah untuk jabatan kira-kira setingkat Asisten Wedana khususnya di Kerajaan Kaidipang Besar dan Kerajaan Bolaang Uki, yang kemudian diganti dengan istilah jabatan KPN (Kepala Pemerintahan Negeri) dan sekarang menjadi Camat
 di Gorontalo merupakan istilah untuk jabatan setingkat Asisten Wedana atau Camat sekarang ini
 masiroki, salah satu jenis tarian rakyat yang muncul dalam masa Jepang di daerah Sangir Talaud
 Mayor Kadato, istilah untuk jabatan setingkat Asisten Wedana di Bolaang Mongondow khususnya untuk Kerajaan Bolaang Mongondow
 Meweteng, istilah untuk jabatan pembantu Kepala Jaga di Minahasa dan termasuk pamong desa
 mobarajanji, salah satu bentuk seni budaya di Gorontalo
 mododuluan, salah satu bentuk kegiatan kerja sama tolong menolong di Bolaang Mongondow
 mohuyula, salah satu bentuk kegiatan kerja sama tolong menolong di Gorontalo
 mojongge, salah satu bentuk seni budaya di Gorontalo
 molinggolo, salah satu bentuk seni budaya di Gorontalo
 momalebohu, salah satu bentuk seni budaya di Gorontalo
 motolohuta, kepercayaan lama kepada adanya makhluk halus yang dianut oleh orang Gorontalo
 motutulungia, salah satu bentuk kegiatan kerja sama tolong menolong di Gorontalo
 pakadanga, salah satu bentuk seni budaya di Gorontalo

panggoba, istilah untuk pemimpin upacara religis magis di Gorontalo
 pelang, salah satu jenis perahu bercadik di Sangir Talaud
 Penghulu, istilah untuk jabatan Kepala Distrik di daerah Bolaang Mongondow
 pogogutat, salah satu bentuk kegiatan kerja sama tolong menolong di Bolaang Mongondow
 posad, salah satu bentuk kegiatan kerja sama tolong menolong di Bolaang Mongondow
 ransasahabe, salah satu jenis tarian rakyat di daerah Sangir Talaud
 Renrakuin, istilah Jepang untuk jabatan Wakil Raja yang dipergunakan selama masa pendudukan Jepang di daerah Bolaang Mongondow
 ronggeng, salah satu jenis tarian rakyat di daerah Sangir Talaud
 salo, salah satu jenis tarian rakyat di Sangir Talaud
 Sangadi, istilah untuk jabatan Kepala Desa atau Lurah di daerah Bolaang Mongondow
 sumisil, salah satu istilah di Minahasa dalam hal kesenian berceritera (ceritera rakyat)
 talenga, istilah untuk pemimpin upacara magis religis di daerah Gorontalo
 tanam padi, salah satu jenis tarian adat di Sangir Talaud khususnya di daerah Talaud
 Tawudaa, istilah untuk jabatan Kepala Desa atau Lurah di Gorontolo, yang sekarang diganti dengan istilah Ayahanda
 tolibag, salah satu jenis dan alat seni musik di daerah Bolaang Mongondow
 tonaas, istilah untuk dukun pemimpin upacara religis magis di Minahasa
 tonggobi, salah satu jenis seni budaya di Gorontalo
 totampit, salah satu jenis dan alat seni musik di daerah Bolaang Mongondow
 Uduluwo lou limo lo Pohalaa, istilah di daerah Gorontalo untuk menjelaskan tentang ikatan persaudaraan rakyat kerajaan-kerajaan mulai ketika masih dua kerajaan hingga jadi lima kerajaan yang berserikat; dua kerajaan pertama yang dimaksud adalah Kerajaan Suwawa-Bone dan Kerajaan Limboto, lalu menjadi lima yakni Kerajaan Suwawa, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Tapa, Kerajaan Limboto dan Kerajaan Atinggola

ungalaa, istilah di Gorontalo untuk lingkungan keluarga luas
(extended family)

upase, salah satu jenis tarian rakyat di Sangir Talaud

DAFTAR KATA

A

Abas, Saerah 143
 Abdul Madjid 142 145
 Achmad, A 143
 Adariku, Ali 86
 Hamzah 192
 Adventis 45
 Aer, Willem 197
 Akademi Militer Brenda
 Tondano 82
 Alabadiri, tari 50 55 217
 Algemeene Politie 105
 Alhasni, Sagaf 15
 Ali, Mohamad 16 80 108
 Maniko 177
 ALS 177
 AMI (Angkatan Muda
 Indonesia) 58
 Animan, Jafet 48
 A M S 176
 Amu, Abdullah 4
 Andu, dr. A.B. 159
 Anes, L 159
 An 46 231
 Anes N 96 120
 Aniesz A.J. 157
 API (Angkatan Pemuda
 Indonesia) 142
 APRI (Angkatan Pemuda
 Republik Indonesia) 142
 APRIS (Angkatan Perang
 Republik Indonesia
 Serikat) 189
 Arbie, Djafar 108
 Atom A 69
 Azakawa 13

Az Zakirat, Taman Pendidikan
 35

B

Baarsel 148
 Bachari, Ahmad 197
 Badan Proto Sinode 40
 Badjeber, Hasan 14
 Balacae 24
 Bala Keselamatan 37
 Bambela M 70
 Bambu, musik 174
 Bambu klarinet, musik 174
 BAPRI (Barisan Pemuda
 Republik Indonesia) 100
 Baramuli SH, 2
 Batalyon 231 264
 Batalyon, Worang 230
 Basalama, Umar 108
 Basumbal, Said 142
 Bawengan, G W 120
 Beikokubu 30
 Bengko, tari 39
 Beo 10
 Berita Gereja, bulanan 36
 Bidja R 188
 Bidja S 17
 Bijñai, Fin 143
 Bimoli, PT 7
 Binilang, Th 14
 Bisman, F 120 96
 Blom, Kapten 115
 BNI (Barisan Nasional
 Indonesia) 157
 Bogar 12
 Bogodang 65

Bokings, George 5
 Bokings H.M. 157
 Bolang F 137
 Bolian 196
 Bone, Sun 80
 Boo Ei Teisintai 54
 Boon, Mr 199
 BPNI (Barisan Pemuda
 Nasional Indonesia) 89
 145 153 237
 BPPI (Balai Pendidikan dan
 Pengajaran Islamiyah) 43
 BPPKI (Badan Persiapan
 Pemerintahan Kemerdeka-
 an Indonesia) Menado Syu
 75
 BRRI (Barisan Revolusioner
 Rakyat Indonesia) 158
 Buchary A 146
 Bujung R.E.S. 93
 Bukit, PT 7
 Buluati M H 14
 Bunga, Hasan 52
 Bunglawang 26
 Burger, Controleur 238

C

Cahaya Merdeka, harian 179
 Cahaya Siang, harian 177
 Canon M 92
 Catapult, harian 89
 Ceinola, Nico 129
 Cipinang 139
 CKS (Corps Kebangsaan
 Sukarela) 147
 Cogo Cugakko 52
 Colson, Letkol 130
 Komite van Initiatief 118
 CONICA 97

Couper, R 22
 CP (Corps Pelajar) 127
 Czesco, dr. G 12

D

Daerah Sulawesi Utara 2
 Dahlan, R.M.A. 166
 Damopolii, A.B. 20
 Damopolii J.F.K. 68
 Dancona, Controleur 15
 Dangisah, tari 175
 Darondo A
 Datau, A.I. 100
 K Ismail 80

 Datunsolang, A.M.
 J.A.M. 21
 Dauhan G.E. 56
 Daun
 Saridin 70
 Delegasi Belanda 131
 Delegasi Indonesia 131 165
 167
 Delegasi Sekutu 131
 Dembulo 175
 Dendeng F 127
 Dengah, E.D. 152
 J.A. 179
 Denpasar, Konperensi 165
 Detu, H 70
 M.S
 Dewan Gorongalo 211
 Minahasa 170
 Dewan Minahasa Sementara
 150
 Dewan Pemerintah Harian
 Bolaang Mongondow 223

Dewan Raja-raja 167 207
 Dewan Sangir Talaud 168
 Sulawesi Utara
 Dhanupojo, R.M. Kusno 14
 22
 Dhanuwatijo, R.M. 15
 Dilapanga, O 20
 Djaafara, Anwar 143
 Djafara, Salma 143
 Djakaria 142
 Dolot, M.A. 170
 Dotulong, Gunco 11

E

Elias, H.B. 12
 El Liberator, MV 129
 Eman, Max 217
 Emden, Letnan van 116
 Emor, Sersan 208
 Ensleigh, Robert 129
 Exile government 190

F

Felix, Controleur 106
 FKRI (Front Kesatuan
 Republik Indonesia)
 160
 Fujinkai 60
 Fukugun (Kecamatan) 10
 Fukugunco (Camat) 10

G

Gabungan Bolaang Mongon-
 dow 223
 Gagola, Kapten 258
 GAPI (Gabungan Politik
 Indonesia) 76

GAPKI (Gabungan Persatuan-
 Persatuan Kemerdekaan
 Republik Indonesia) 76
 GAPRIBOM (Gabungan Per-
 juangan Republik Indone-
 sia Bolaang Mongondow)
 214
 Gelora Masa, harian 179
 Gelu, A.R. 214
 GEPNIS (Gerakan Pembangun-
 an Indonesia Serikat) 144
 Gerakan, jarian 145
 Gerakan Tiga A 44
 GERKINDO (Gerakan Ke-
 bangsaan Indonesia) 142
 Gereja Pantekostan Indonesia
 6
 Gerungan, D.A. Th. 63
 Gerungan F 145
 Giebel, Kolonel 131
 Gilalong, B 70
 Giliran 31
 GIM (Gerakan Indonesia
 Merdeka) 145
 Girian 116
 GMIBM (Gereja Masehi Injili
 Bolaang Mongondow) 221
 GMIM (Gereja Masehi Injili
 Minahasa) 216
 GMIST (Gereja Masehi Injili
 Sangir Talaud) 198
 Gobel A.R. van 48
 C.S. 157
 Gobol A.H. 169
 Gonibala, Nurtina 69
 Gosal, Kajang 91
 GPI (Gereja Protestan Indone-
 sia) 220
 GRIT (Gerakan Republik
 Indonesia Timur) 184

Gun (Distrik) 10
Gunco (Kepala Distrik) 10
Gunde, tari 175
Guru, Majalah 178

H

Habibie, Kadir 16
Hadju B 17
 Usman 14
Hamanaka, K 74
Hamazaki, Ds 46
Harahap, Parada 180
Hara Si Seikan 52
Harirustaman, Erman 4
Harun, Antu 177
HBS 176
Hebingadil 192
Het Copra Fonds 192
Hidayat SH 131
Hippy Azis 188
 M 16
Hirano 75
Hirschman A 8
Hizbul Wathon 182
Hoofdenbond 201
Horinte, Letkol 8
Horiruchi, Letkol 8
Hulobalangi 55
Hulubalang 127
Hulubalang Besar 127
Hulukati, Ali 127
Humuro 13
Husaro, tari 175

I

Iamu, M.T. 177
Ibrahim Mohammad 198
Idrus, Kapten 207

Ikrar Pemuda 119
Ilahude A 16
 Abudi 17
 Ibrahim 16
 Hamzah 16

Iloilo 209
Ilopateya 195
Imban, Hadjir 71
 K 71
 Zakaria 70
Indische Kerk 220
Indonesia Muda 147
Inimexintra, PT 7
Insyaf, mingguan 180
Intama, F 197
Ipolo 14
Item L 96

J

Jacobs, W.Ph 14
Jaga 10
Jalaluddin 30
Jasin, Idrak 177
Jiyuu (otonomi) 73
Jocom, J 74
Jogugu 76
Johannes SH, E.D. 181
Joke, tari 75
Jumpe 50
Junus, A 188

K

Kabila 17
Kadulla, B.J. 158
 Muh. 158
Kaeng, H.S. 93
Kaigun Jeiho 53
Kai In Yoseiso 53

- Kaindeh, J 149
 Kairupan, F 63
 Kalawiran 8
 Kalengkongan, J.A.P. 15
 Kaligis, H.L. 93
 Kaligis, Jootje 147
 Kamagi, Max 127
 Kambey, F.Th. 147
 Kandow E 202
 Z 78
 Kansil E 140
 Jerit 92
 L.M. 140
 R. 140
 Reyers 119
 W.A. 12
 Kapten Laut 13
 Karamoy, Boas 93
 J 146
 Karinda, J 91
 Kartawinata, M.D. 145
 Kaseger, E.V. 117
 J. Kapten 124
 Katili, H 164
 H.U. 108
 Kato 57
 Katoppo E 144
 Kawilarang, D 129
 Letkol A.E. 212
 Kebenaran, Mingguan 245
 Ketju, Nusi 196
 Keibodan 50
 Keimin Bunka Syidosyo 46
 Kembali 94
 Kemudi, mingguan 197
 Keng Hoa Poo, harian 47
 Kenkanrikan 10
 KERWANI (Kerukunan
 Wanita Indonesia) 191
 Kesatuan, harian 55 234
 Kesatuan Kerajaan, mingguan
 144
 KGPM (Kerapatan Gereja
 Protestan Minahasa) 45
 Kilat, mingguan 179
 KIM (Kepanduan Indonesia
 Merdeka) 147
 KIM NV 16
 Kindagen, I 157
 J 157
 Rens 157
 Kinolotagan 20
 Kinosita 66
 Kinrohosi 46
 Kipas, tari 50
 Kishman 165
 Kita, mingguan 80
 KL 157
 KMB 165
 KNI (Komite Nasional Indo-
 nesia) 169
 KNIL 83
 KNS (Komite Nasional Siau)
 12
 Koagouw, P.G. 14
 Kodama 57
 Kodomo Shinbun 55
 Kolintang, musik 174
 Kolpita, Pendeta L 53
 Pendeta P 53 221
 Komando Wilayah Daerah 149
 Kombo, P.U., 99
 Komisariat Negara 55
 Komisariat Negara SUMU
 (Sulawesu Utara Maluku
 Utara) 2
 Komisaris Negara 2
 Komisi Sekutu 130
 Komite Dua Belas 14
 Nasional Daerah 160

Sembilan 56
 Kongres Pemuda 120
 Koo Gakko 58
 Korah, Frans 96
 Korompis, Dina 182
 No. 138
 Korompot, Donggala 158
 Kortverbanders 105
 Kotambunan, Jus 96
 Willy 138
 Kotamobagu 173
 KPM (Kesatuan Pemuda Mase-
 hi) 191
 KPN (Kepala Pemerintahan
 Negeri) 170
 Krijgsraad te Velde van Ma-
 kasser te Manado 136
 KRIS (Kebaktian Rakyat In-
 donesia Sosialis) 152
 KTR 72
 Kuco 10
 Kullit, G.B. 63
 Kumaunang, J 89
 N 91
 S 96
 Kumawus 194
 Kumendong H 222
 Kumico 10
 Kumontoy, Eddy 138
 F.W. 62
 J 154
 Jonky 153
 Kuno 11
 Kusoy, Sersan 137
 LWAMOST (Kaum Wanita Ma-
 sehi Sangir Talaud) 198
 Kwandang 108
 Kyooiin Kanri Yooseisyo 43

L

Labaeng, Salmon 26
 Labaika, H.H. Waworuntu 158
 Lahunduitan 53
 Lalamentik, A.J. 128
 Lalisang, Ibu F.Pasandaran
 141
 Lamadilalo, Ibu 196
 Langendonk, Mr 168
 Langeverbanders 165
 Langika 25
 Langowan 9
 Lapien, B.W. 3
 Lapien, Sersan 137
 Lasut, R.C.L. 11
 W.G.A. 4
 Larekeng, Amin 94
 Aziz 94
 Latuperissa, Kapten 98
 Leeuw, de 131
 Legoh, H.M.L. 53
 Lekangpondang 26
 Lelengboto, J.L.A. 127
 Lembaga Kesehatan GMIM
 174
 Lengkong, J 64
 Lenso, tari 50
 Leur, Kapten van 207
 Lewu, A.E. 51
 E. 138
 LFP (Laskar Front Pemuda)
 156
 Lie Beng Tiok 62
 Linu, A 94
 Liogu, Alex
 B 149
 F.S. 218
 Liotohe, Anton 11
 Nolus 11
 Locher, Ds 44 45 221
 Logantod 175

lolibag 175
 lologga 50
 Lolumbulan H 221 222
 Londe, perahu 51
 Longdong R 148
 LRRI (Laskar Rakyat Repu-
 blik Indonesia) 149
 Luckey, Nona 177
 Lukisan Masyarakat, bulanan
 179
 Lumentah, Ton 149
 Lumingas, Letnan R 147
 Lumingkewas, J 127
 Lumowa A 215
 Luna, SS 129
 Lutheyn, A.I. 131

M

Macpal, K.J.L. 14
 Madrasah Muhammadiyah 54
 Maengket, tari 174
 Maengkom, G.A. 158
 mae ru-mae ru 194
 Mait, Sem 205
 Majelis Dewan Gorontalo 211
 MAK (Majelis Agama-agama
 Kristen) 45 221
 Makagiansar, Ibu 198
 Makalehi 26
 Makasar 3
 Maleke, W.H. 92
 Malino, Konperensi 165
 Maluku Utara 3
 Mamahit, Butje 116
 C (Tein) 186
 F 157
 Frits 150
 J 148
 Mamansage, M 120

Mamusung Jus 93
 L 158
 Manangka, Sam 115
 Mandey V 256 116
 Mangindaan A 145
 Sam 147
 Mangowal J.U. 63
 Manoppo, A.C. 62
 H.D. 63
 H.H. 98
 J.W. 19
 L.C. 19
 M.J. 20
 M.R. 223
 Mapalus 194
 Mapanget 193
 marambak, tari 174
 Marle, letkol J. van 148
 Marsaoleh 170
 Masengi, Andi 91
 Masiroki, tari 50
 Massie, John L 69
 Masyumi 224
 Matahari Terbit, harian 47
 Matsuda 18
 Matulandi, Ben 117
 E 116
 Mawikere, Jan 144
 Mawuntu, O 152
 MBP (Majelis Badan Pekerja)
 202
 Menara, harian 162
 mingguan
 Mende, S 96
 Merdeka, harian 68
 Methusala, Jan M 93
 Mawengkang L.J. 92
 Maweteng 10
 Mi Hari In 53
 Minahassische Protestant de

Kerk 43
 Misi 115
 Mobarajanji 175
 Mododuluan 175
 Mogot, Gunco 17
 Mohade A.J. 134
 Ibu Nona 141
 mohuyula 195
 Mokobombang, A 99
 Golly 102
 Hatidah
 L
 S
 Mokodenseho C.P. 21
 Mokodompit F.P. 215
 M 19
 Mokodongan, Pon 214
 U 215
 Mokoginta, A.U. 157
 Frans A 158
 Frits 158
 J.C. 158
 R 158
 Molibagu 70
 molinggolo 54
 Molinow 98
 Momalebohu 175
 Momongan G 222
 J 154
 Mondong, F.H.L.W. 155
 Mondong S 156
 Mongula J.P. 164
 Moningka 186
 Monoarfa, Ari 196
 R 16
 Usman 14
 Mononutu, Arnold 46
 Mooduto, Nain 196
 Mook, DR.H.J.van 3
 Morison, DR 154

Morotai 136
 Motoboi Kecil 77
 motolohuta 54
 Motutulungiya 175
 Muhammad, Ibrahim 16
 Muhammadiyah 214
 Muir, letkol 115
 MULO 117
 Muntu, Arie 138
 Ny. Modjo 117
 Mustafa, H.M.S. 70
 Mustir, A.H. 159
 Musu J 92
 Myahara dr

 N

 Najoran F.A. 221
 Nakamura 49
 Nanlohy, Lettu 207
 Nantaibo 29
 Nantaku 28
 Nantoibo 29
 NEFIS 101
 Nento, A 24
 Nesin, Eki 143
 Ngantung, Gusta 145
 Piet 149
 Ngasa, Dongengeng 94
 NICA 89
 NIGEO 193
 NIS 189
 NIT 189
 Nippon Go Gakko 43
 NOCEMO, NV 192
 Noogyo Teinsintai 62
 Noomin Dooyoo 53 58
 Nues, Mayor 205
 Nusakambangan 142
 NZG (Nederland Zending

Genoot Schap) 221

O

Oberman, Residen J 144

Oflagi, Junus 146

Ointu A.R. 14

M.S. 142

N.G. 143

Olii, Junus 17

Omboog, harian 47

O'Malley 150

Ondong 141

Ontorael, Gotfried 47

P

Paat, Louis 120

Pade, Adam 157

Pakadanga 54

Pakaja O.N. 134

PAKSU (Persatuan Agama-
Agama Kristen Sulawesi
Utara) 46 221

Palamani J 74

Panamon, Karel 55

Pandegiroth J 52 53

Pakasi, Alex 138

Pandegiroth P 74

Pandelaki B.A.M. 158
J 145

Pandji Negara, mingguan 180

Pangalila, Wim 137

Pangemanan A 138
J 92

Panggoba 196

Pangulimang, Ibu A.Elias 141

Panigoro S 55

Panis, Uskup 44 45 221

Panitia Proto Sinode 221

Paparang, L.N. 141

Para 26

Pawengkuan E.A. 91
J 92

Raja P.F. 14

PARI (Partai Republik Indo-
nesia) 159

PARINDRA (Partai Indonesia
Raya) 159

PARKINDO (Partai Kristen
Indonesia) 192

Partai Katolik 201

Pasandaran, H 140

Pasukan Bakti Tani 62
Gerilya Morotai 111
Mondong 213

Pemuda Kakas 147

PTA 79

PDRA 190

Pedoman Tani, bulanan 47

Pelang, perahu 51

Pelealu M.W. 93

Pelengkahu E.H.E. 63

Pelita, harian 178

PELNI 16

PEMAKAT (Persatuan Masya-
rakat Katolik) 154

Pemakat, mingguan 178

Pereira, Kolonel 211

Pemuda, bulanan 197

PERGINDO (Persatuan Guru
Indonesia) 214

PERPIBOM (Persatuan Pega-
wai Indonesia Bolaang Mo-
ngondow) 191

PERINDO, PT 192

PERSIT KCK 6

PERTIWI 6

PERWANIS (Persatuan Wanita
Indonesia Siau) 141

PEWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia) 198
 Piay, Jan 194
 Piet Hein, kapal perang 137
 PIM (Persatuan Indonesia Muda) 146
 Pimpi 21
 Inkster Bewening 45
 Gemeente 45
 Pinontoan, Julian 17
 PIR (Persatuan Indonesia Raya) 145
 PIRASAT (Persatuan Rakyat Sangit Talaud) 191
 PISO (Pemuda Indonesia Soelawesi Oetara) 190
 Pitoy J.P. 158
 PKI 159
 PKR (Pasukan Keamanan Rakyat) 99
 PNI 159
 Pogogutat 175
 Polii, Jeppy 120
 Pondos 205
 Ponto, C 12
 Letnan 111
 R.S. 169
 Pontoh, Ch 212
 Ch.D. 93
 Johan 158
 R.S. 21
 S.M. 22
 Poo E, Ibrahim 16
 PPI (Pasukan Pemuda Indonesia) 69
 PPI Laskar Banteng 89 71
 PPI (Persatuan Pemuda Indonesia) 116
 PPK (Pasukan Pemuda Kakas) 182

PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Menado Syu 63
 PPP (Pasukan Pemuda Pejuang P-3) 145
 PPPG (Pucuk Pimpinan Pemerintahan Gorontalo) 16
 PPPPPPP (P-7 = Pasukan Pemuda Pemudi Pejuang Pemberantas Pergerakan Penjajahan) 147
 Prijosudarmo, Sunandar 4
 PSI (Partai Sosialis Indonesia) 216
 PSII 47
 PTT (Pos Telegrap Telepon) 128
 Pua, Alex 149
 O.F. 166
 PUSM (Pengurus Umum Sekolah Masehi) 48
 Pusung J 156
 PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) 45

R

RAAF (Royal Australian Air Force) 138
 Rahasia, Johm 111 89
 Rampisela E 94
 Rangkaian Pemuda, majalah 178
 ransasahabe, tari 175
 Rapi, Aba 187
 Ratulangi, DR.G.S.S.J. 3
 drh.W.J. 162
 Ratumbusang, dr.V.L. 152
 Raupu, A.H. 69
 Rawung, Sersan 205

RC (Reserve Corps) 206
 Rekso Suryo, Badan Pendidikan
 an 43
 Renrakuin 21
 Rensei Koosyuukai 46
 Rey, Jo 147
 Rikugun 225
 Rikugun Heiho 53
 RIS 212
 RIT (Republik Indonesia Ti-
 mur) 212
 RK (Roma Katolik) 15
 Rombot, A.S. 115
 Rombot J 158
 Rompis A 147
 Romusya 56
 Ronggeng, tari 50
 Rooy, Kolonel de 131
 Rorimpandey R 154
 V 147
 Rotinsulu M 6
 Rumajar N.Th. 149
 P 149
 S.I. 149
 Rumambi, Ds.W.J. 121
 J. 91
 Runtukahu J.M. 96
 Runtunuwu F 147
 Rusman 205
 Ruyter, Coomans 115
 Ryoomintai 62

S

Sabu, dr. John 80
 Sadikin, Djamaluddin 52
 Saerang, L. F. 207
 Wolter 207
 Safar, H 93
 Sahelangi, Arie 73

Salasa, Piet 93
 Salindeho, F 214
 S.K. 75
 Salo, tari 50
 Salola, Ishak 52
 Sambouw, Raun 136
 Sambouga, J 96
 Sangadi 158
 Sanger F (Eddy) 94
 Sangkaen, Goan 93
 Sarapil, W.A. 165
 Sarundajang J 217
 Saurongko, tari 175
 Sebentar, Adeleide 141
 Seinendan
 Kanji 48
 Senentao 47
 Sendenbu 62
 Senduk, Cons 49
 dr. R.C.L. 56
 Ny. Kaligis 117
 SERBIBOM (Serikat Buruh In-
 donesia Bolaang Mongon-
 dow) 191
 Seretan 85
 Siasat, harian 68
 Sigarlaki, A.A. 96
 SIKAT (Siap Kaum Tukang)
 191
 Silangen W.H. 127
 SKG (Sekolah Kepandaian
 Gadis) 195
 SMI (Sekolah Menengah Islam
 196
 SMRK (Sekolah Menengah
 Rendah Kebangsaan) 117
 SMU (Sekolah Menengah
 Umum) 177
 SPERITBOM (Serikat Per-
 juangan Republik Indone-

sia Tanah Bolaang Mongondow) 217
 SPK (Serikat Pegawai Kesehatan) 214
 Su 16
 Suara Indonesia Muda, harian 89
 Suara Minahasa, mingguan 245
 Nasional 179
 Pemuda, harian 143
 Pikat, bulanan 47
 PISO, harian 146
 Rakyat, mingguan 197
 Sudiro 3
 Sugondo, M 15
 R 16
 Sukamiskin 139
 Sukarni, Agust 87
 Sumampouw, B 93
 Emor 116
 Sumanti, W.F. 54
 Sumarauw, G. 96
 H 74
 Sumisil 174
 Suparmin 96
 Supit, A 207
 B 155
 Supit, J.M.L. 91
 Karel 152
 Lusje 182
 Wuli 121
 Suwawa 124 100

T

Tagulandang 83
 Tahuna 9
 Taico 13
 Takamoto 86 68

Takasaki, Letkol 70 54
 Talaud 9
 Talenga 196
 Talumikir Ch 155
 J 149
 Tamaka, Theodora 141
 Tamalawe A.L. 16
 Tangahu A.H. 17
 Tangkilisan, Maas 125 101
 P.M. 202
 Tangkudung 127
 Tangsi Hitam 115
 Putih 115
 Tan Ing Hwa 159 128
 Tanod, A.S. 145
 Tanoyan 124 99
 Tarib, A.H. 159
 Tatengkeng, G 25
 J.E. 204 165
 Taulu, Ch.Ch. 118
 H.M. 179 145
 Sj. 192 155
 Wevin 93
 Tawaang 57
 Ternate, keresidenan 1
 Terok, J.B. 147
 Tewu, Gerzon 154
 The Sing Hoo SH 164
 Tiendas, P.A. 55
 TIM (Tentara Indonesia Merdeka) 107 86
 Tinangon H.J.D. 74
 Tindas, P.A. 21 14
 TNI (Tentara Nasional Indonesia) 176 142
 Tokeitai 86 68
 Toleba, Daeng 21
 tolibag 176
 Tolotio 58
 Tomohon 115

tonaas 196
 Tondano 116
 Tonsealama 57
 Tooy J.P. 138
 No. 116 92
 totampit 176
 Toyobo 41 30
 TRI (Tentara Republik Indonesia) 146
 TRISU (Tentara Republik Indonesia Sulawesi Utara) 124
 TRM (Tentara Rela Mati) 154
 Tugu Persahabatan Nederland Minahasa) 119
 Tuju F 192 155
 Tujuwale A 154
 Tular J.H. 156
 Tumbel M.B. 62
 Tumbelaka F.J. 4
 Letkol dr. 125
 Tumonggor 194 156
 Tumu, A 107 86
 Usman 15
 Twaalfde Provincie 96
 TWAPRO 178 144

U

Ulu Siau 94 75
 Umar Muhammad 14
 Ungalaa 195
 Unicotin Ltd, PT 7
 Uno, A 24 16
 Singo 80 63
 UPI (United Press International) 130
 Usman, A.B. 16
 A.J. 48
 Hasan 115

I 16
 Usu, A.G. 15

V

VC (Vernieling Corps) 21 14
 Veldkamp, Mr 168
 Veld Politie 105
 Verhagen, Mr 168
 Verwajen, Letnan 123
 Vlucht, Mr. A.C.van der 168
 Volkschool 177
 Volkds Onderwijs 220 177
 Vries, Letkol de 143 115

W

Wajong, J 192 155
 Wala, Ch 145
 Walalangi A.J. 62
 R 80 63
 Walewangko J 145
 Waney, Wim 96
 Wngkay S.B. 149
 Wangko Remba Talasa 48
 Wantalangi J 145 116
 Wardojo, dr.R. 24 16
 Warouw, C 127
 E. R.S. 81 63
 Gustaaf 149
 Letkol. J.F. 212
 W 146
 Wartabone, Ajuba 24 16
 Wartabone, Nani 14
 Zus, 143
 Watuseke J 192 155
 Waworuntu, Jolli 127
 Ny.A.M. 151
 Weekblad Manguni
 Wenas, Ds.A.Z.R. 167 134

H.J. 204 164
 Wensen, O 145
 Westerbeek, Karel 129
 Wilayah Besar 124
 Sedang 149
 Wilson, Mayor 134 108
 Wirjopranoto, Subardjo 187
 Wondal, D 154
 Karel 189 153
 Wongkar F 184 149
 L 146
 Wong Pai Sau 149
 Worang, H.V. 54
 Worek J 115 92
 Wori 209
 Wowor, Ben 149 120
 F 147
 Gerrit 115
 Wuaten L 192
 Wuisan, S.D. 119

Wulauwan Tondano 92 73

Y

Yayasan Al Ikhsan
 Eben Haezer
 Pendidikan Kebangsaan
 146 117
 PIKAT
 Tabita
 YK RST (Yayasan Kelapa Rakyat Sangir Talaud) 193
 Yok Chae
 Yunomura 69 53

Z

Zending 143 115
 Zulhadji, W.A. 21

DAFTAR SUMBER

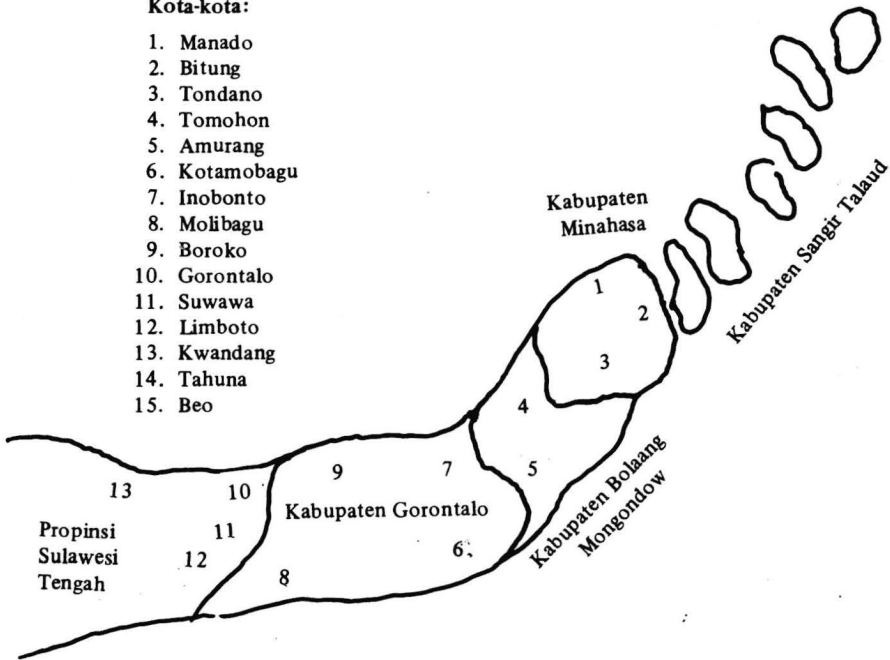
- * **Adriaan, D.B.**, *Renungan Kisah Kepulauan Sangihe Talaud*, Tabukan, 1968.
- * **Bone, Sun**, *Sedjarah Gorontalo*, Gorontalo, 1972.
- * **Brosur** "Payu Limo Wuudyo Bubalata Ito Moppopiyo Madala Ilangata, Gambaran singkat Tentang Adat, Kebudayaan dan Perjuangan Rakyat Gorontalo serta Masalah Pembangunan Kotamadya Gorontalo", Gorontalo, 15 Juli 1979.
- * **Buyung BA, R.E.S.**, *Peristiwa 14 Pebruari 1946 di Manado dalam rangka Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia*, Djawatan Penerangan RI Propinsi Sulut, Manado, 1971.
- * **Bupati KDH Bolaang Mongondow**, *Esensi Laporan Bupati KDH Dati II Bolaang Mongondow kepada Bapak Gubernur KDH Dati I SULUT pada Perkunjungan Pertama di Kabupaten Bolaang Mongondow 1 Agustus 1978*, Kotamobagu, 1978.
- * -----, *Monografi Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow*, Kotamobagu, 1978.
- * -----, *Selayang Pandang Tentang Perkembangan Tata Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Dati II Bolaang Mongondow Propinsi Dati I Sulawesi Utara*, Kotamobagu, 1977.
- * **Bupati KDH Gorontalo**, *Ikhtisar Pertumbuhan/Perkembangan Otonomi Dati II Gorontalo Dari Masa ke Masa*, Limboto, tanpa tahun.
- * **DGW Suluteng**, "Ds.A.Z.R. Wenas (1897-1967) Pelajan Gereja di Minahasa" dalam *Bulletin Dewan Geredja Geredja Sulawesi Utara/Tengah*, Tomohon, 1969.
- * **Dimyati, Muhammad**, *Sedjarah Perdjuangan Indonesia*, Widjaya, Djakarta, 1951.
- * **Elias, H.B.**, *Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia di Pulau Siau*, Markas Cabang LVRI Kotamadya Manado, Manado, 1973.
- * **Geredja Masehi Indjili Bolaang Mongondow**, *Pandangan Beberapa waktu Setjara Chronologies dari Sedjarah Geredja di Bolaang Mongondow*, Kotamobagu, 1967.

- * Kaeng SH, H.S., *Selajang Pandang Sedjarah Regional Perdjuaan Kemerdekaan Bangsa Indonesia di Sulawesi Utara: Menjongsong Hari Ulang Tahun ke XXV Peristiwa Merah Putih Sulawesi Utara*, Biro Penerangan Badan Perdjuaan 14 Pebruari 1946 Merah Putih, Djakarta, 1971.
- * KANDEP P dan K, *Monografi Daerah Kabupaten Sangir Talaud*, Kantor Departemen P dan K Kabupaten Sangir Talaud, Tahuna, 1979.
- * Kementerian Penerangan NIT, *Pandji Negara*, madjalah mingguan, No. 15 Thn. III, Makassar, 22 Oktober 1949.
- * Kementerian Penerangan RI, *Propinsi Sulawesi*, Makassar, 1953.
- * KODAM XIII/Merdeka, *Sejarah Perjuangan TNI-AD KODAM XIII Merdeka 1945-1977*, Dinas Sejarah Militer KODAM XIII/Merdeka, Manado, 1978.
- * Kruger, Th. Muller, *Sedjarah Geredja di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Djakarta, 1959.
- * Lalamentik, A.J., *Sekelumit Sejarah "Peristiwa Merah Putih" 14 Pebruari 1946 di Minahasa*, naskah ketikan, Manado, 1979.
- * Legoh, H.M.L., *14 Pebruari 1946 Mengisi Lembaran Sejarah Indonesia*, Manado, 1973.
- Lensa Utara*, harian, Manado, 19 April 1978.
- * Lintong Sm.Th., Pdt.D.M., Ds.A.Z.R. *Wenas Ketua Sinode GMIM (1942-1967)*. Tesis Sarjana, Fakultas Theologia Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Tomohon, 1978.
- * Liputo, M.H., *Sedjarah Gorontalo Dua Lima Pohalaa, Djilid XIII, Pertjetakan Rakjat, Gorontalo, 1950*.
- * LPPU Cabang Manado, *Sejarah Pers di Daerah Sulawesi Utara Percetakan Sejak Tahun 1835, Surat Kabar dan Majalah Sejak Tahun 1869*, Lembaga Pers dan Pendapat Umum, Manado, 1977.
- * Manoppo, Cornelles, *Sejarah Masuknya Agama Islam ke Bolaang Mongondow*, Skripsi Sarjana Muda, Fakultas Sastra Univ. Sam Ratulangi, Manado, 1979.
- * Manus, Drs. L.Th., Drs.F.E.W. Parengkuan, Drs.A.Sigarlaki, J.A. Pangkey BA, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara*, Dept. P dan K Pusat Penelitian Sejarah Budaya P3KD Sulawesi Utara 1978/

PETA SULAWESI UTARA
Skala 1 : 2.500.000

Kota-kota:

1. Manado
2. Bitung
3. Tondano
4. Tomohon
5. Amurang
6. Kotamobagu
7. Inobonto
8. Molibagu
9. Boroko
10. Gorontalo
11. Suwawa
12. Limboto
13. Kwandang
14. Tahuna
15. Beo



- Batas Kabupaten
 ++++++ Batas Propinsi
 ===== Batas Negara

- * Usman, A.J., *Keradjaan Suwawa-Gorontalo-Limboto Dalam Per-tjaturan Politik Pendjajahan (le Histoire se Repete)*, Djakarta, 1972.
- * Wartabone, Nani, *Sedjarah Singkat Perebutan Kekuasaan Terhadap Pemerintah Kolonial Belanda 23 Djanuari 1942*, Gorontalo, 1968.
- * -----, *Sejarah Singkat Latar Belakangnya Pe-rebutan Kekuasaan oleh Rakyat Gorontalo pada 23 Januari 1942*, Gorontalo, 1973.
- * Wowor, Ben, *Peristiwa Patriotik (Merah Putih) 14 Pebruari 1946 di Manado Dalam Rangka Revolusi Kemerde-kaan Bangsa Indonesia*, Djawatan Penerangan RI Propinsi Sulawesi Utara, Manado, 1972.
- * -----, *Sulawesi Utara Bergolak: Peristiwa Pa-triotik 14 Pebruari 1946*, ALDA, Jakarta, 1977.
- * Watuseke, F.S., *Sedjarah Minahasa*, Pertjetakan Negara, Ma-nado, 1968.
- * Yayasan 23 Januari 1942 Jakarta, Brosur Peringatan 35 Tahun Peristiwa Patriotisme 23 Januari 1942 di Gorontalo dan Dua Tahun Yayasan 23 Januari 1942, Jakarta, 1977.
- * Yuda, H.E., *Sejarah Keperintahan Sangir Talaud*, manuskrip, Tahuna, 1978.

DAFTAR INFORMAN

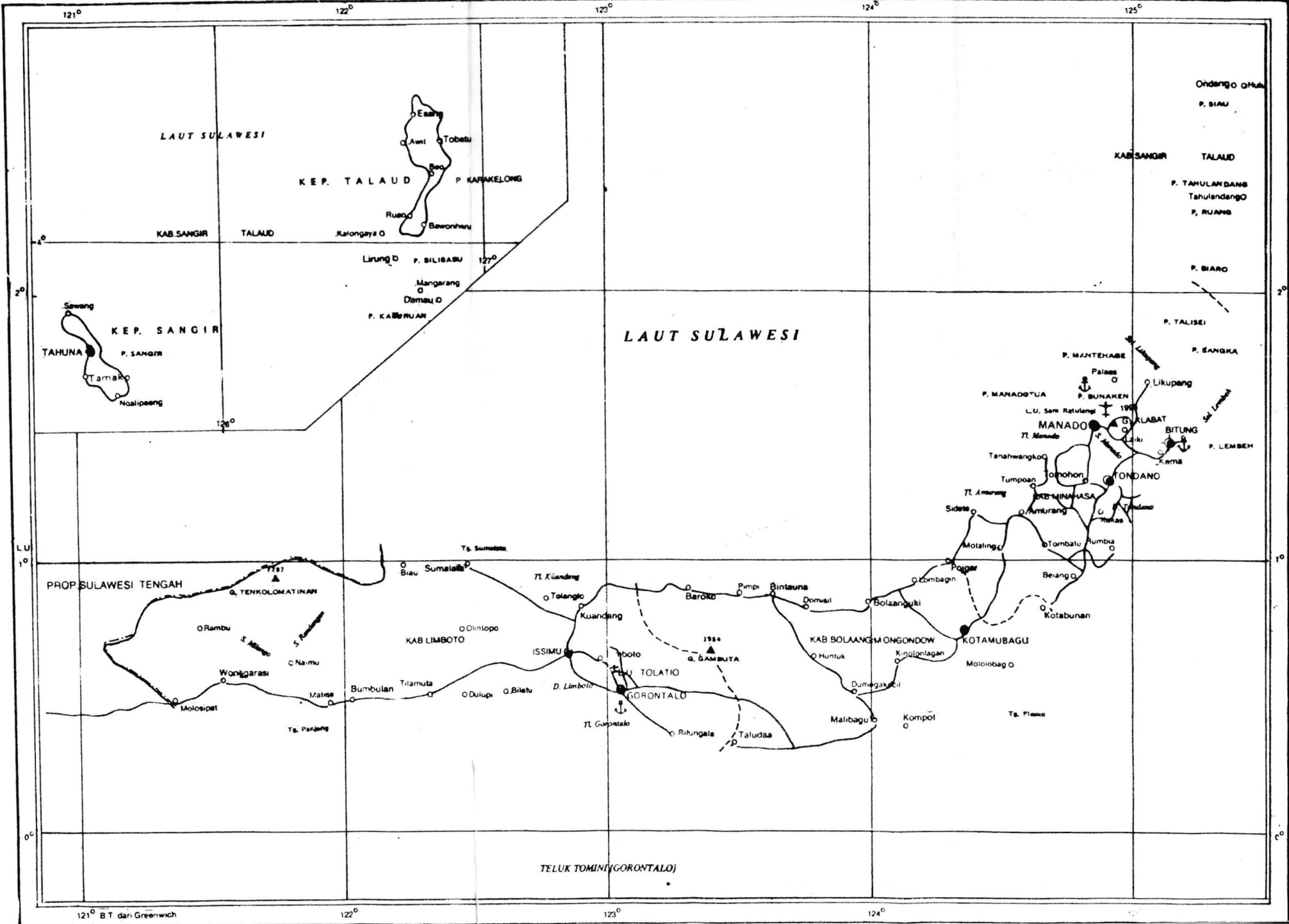
- Aminan, Jafet, Tahuna, 14 September 1979
- Binilang, Th., Lirung, 20-9-1979
- Bone, Sun, Siendeng, 10-0-1979
- Datunsolang, Abdul Murad, Mogolaing, 15-9-1979
- Datunsolang, R.M., Kotamobagu, 12-9-1979
- Djibrán, Muh., Gorontalo, 3-9-1979
- Gobel, Dupanggola, Telaga, 4-9-1979
- Gobol, Arie H., Kotobangon, 12-9-1979
- Gonibala, Nurtina, Kotamobagu, 17-9-1979
- Hamel, F., Manganitu, 13-9-1979
- Haras Ba, Anwar, Siendeng, 7-9-1979
- Imban, Hadjir, Kotamobagu, 17-dan 18-9-1979
- Jusuf, Husin K., Tapa, 10-9-1979
- Kartawinata, M.D., Winangun, 20-9-1979
- Karompot, Lau Donggala, Mogolaing, 14-9-1979
- Labaika, H.H. Waworuntu, Kotamobagu, 17-9-1979
- Lewu, A.E., Kotamobagu, 19-9-1979
- Lumeling, A.J., Mangaran, 20-(-1979
- Madonsa, Dominicus, Tahuna, 15 dan 18-9-1979
- Makahanap, H.C.H., Tahuna, 18-9-1979
- Manatar, Daniel, Tahuna, 16-9-1979
- Manoppo, Peit, Kotamobagu, 15-9-1979
- Mokoginta, R., Kotamobagu, 18-9-1979
- Monoarfa, A., Gorontalo, 11-9-1979
- Nadjamuddin, Hintulangi, Tingkohubu, 5-9-1979
- Ointu, A.R., Gorontalo, 9-9-1979
- Raroen MSC, Ps. Silvester, Tahuna, 17-9-1979
- Rompas, Ambrosius, Tahuna, 15, 16 dan 17-9-1979
- Rotty, Alex E., Manado, 14-9-1979
- Sarapil, G.M.T., Tahuna, 15 dan 18-9-1979
- Sugeha, Suit A., Kotobangon, 13-9-1979
- Tangahu, A., Kampung Bugis Gorontalo, 9-9-1979
- Tingginehe, Tahuna, 18-9-1979
- Tompo, Ahmad, Tahuna, 14 dan 18-9-1979
- Tunggal, H., Kotamobagu, 17-9-1979
- Wantogia, Daiton H., Tingkohubu, 6-9-1979
- Wantogia, Jusuf H., Suwawa, 8-9-1979
- Wartabone, Nani, Suwawa, 2-9-1979
- Yuda, H.E., Tahuna, 15, 16 dan 17 September 1979

1979, Manado, 1978.

- * -----, Drs. F.E.W. Parengkuan, Drs.A. Sigarlaki, Drs.A.E. Rompas, *Sejarah Perkembangan Kotamobagu Sebagai Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow*, PPPT UNSRAT 1978/1979, Manado, 1979.
- * Mawuntu, Grietje, *Awal Masa Pendudukan Jepang di Bolaang Mongondow*, Skripsi Sarjana Muda, Fakultas Sastra Univ. Sam Ratulangi, Manado, 1979.
- * Marunduh, S.U., *Pendaratan Jepang di Minahasa*, Tesis Sarjana, Fakultas Sastra Univ. Sam Ratulangi, Manado, 1978.
- Mimbar Indonesia*, No. 22, 3 Djuni 1950.
- * Moh.Ali, Arsjad, *Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi di Daerah Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah*, Skripsi Sarjana Muda, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, Manado, 1973.
- * Moo, Drs.Ina, *Sejarah 23 Januari 1942 di Gorontalo: Suatu Coup d'etat Yang Berhasil Menggulingkan Pemerintahan Belanda*, Yayasan 23 Januari 1942, Jakarta, 1977.
- * Palit, R.F.J., *Tomohon Dalam Lintasan Sejarah Perang Pasifik*, Tesis Sarjana, Fakultas Sastra Univ. Sam Ratulangi, Manado, 1978.
- * Panitia Seminar Adat Daerah Gorontalo, *Himpunan Bahan-bahan Seminar Adat Istiadat Daerah Gorontalo*, Limboto, 1971.
- * Parengkuan, Drs.F.E.W., *Sejarah Daerah Bolaang Mongondow 1900-1942*, naskah ketikan, Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi, Manado, 1978.
- * Polontalo, Drs.I., *Sejarah Peristiwa 23 Januari 1942*, Gorontalo, 1978.
- * Ponto, B., *Sejarah Pemerintahan Sangit Talaud*, menuskrip, Tahuna, 1979.
- * Posumah, J.P., *Perang Kemerdekaan di Minahasa dan Manado Sekitar Tahun 1950*, Tesis Sarjana, Fakultas Sastra Univ. Sam Ratulangi, Manado, 1978.
- * Rhijn, M.van, *Memorie van Overgave het Bestuur van den Afredenden Resident van Manado*, Manado, 1941.

- * Rumangit, Meike E.P., *Masuknya Agama Kristen di Bolaang Mongondow*, Skripsi Sarjana Muda, Fakultas Sastra Univ. Sam Ratulangi, Manado, 1979.
- * Sastrawiria, Tatang dan Haksan Wirasutisna, *Ensiklopedi Politik*, Perpustakaan Peruguruan Kem. PP dan K, Djakarta, 1954.
- * Sekretariat DPR-GR, *Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, tjet. pertama, Djakarta 1970.
- * Sigarlaki, Drs.A., Drs.L.Th. Manus, Drs.A.E. Rompas, F.S. Watuseke, M.F. Mottoh Sm.H., *Sejarah Daerah Sulawesi Utara*, P3KD Sulawesi Utara 1977/1978, Manado, 1977.
- * Sihombing, Drs. O.D.P., *Pemuda Indonesia Menantang Fasisme Djepang*, Sinar Djaya, Djakarta, 1962.
- * Soebekti, *Sketsa Revolusi Indonesia 1940-1945*, GRIP, Surabaya, 1966.
- * Sompie, K.H.E., "Riwayat Singkat Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Selama Pendudukan A.L. Jepang di Sulawesi Utara 1942-1945" dalam *Penerbitan Khusus No. 2, KANWIL DEPPEN RI Propinsi Sulawesi Utara, Manado, April 1978*.
- * -----, *Sekelumit Riwayat Perjuangan Kemerdekaan Indonesia 1942-1945 di Karesidenan Manado*, naskah stensilan, Manado, 1979.
- * Tatimu, Ef., *Kepulauan Sangihe Talaud*, KANDEP P dan K Kabupaten Sangir Talaud, Tahuna, 1975.
- * Taulu, Ch.Ch., "Peringatan Perajaan Peristiwa Perebutan Kuasaan di Sulawesi Utara 1946" dalam *Buku Peringatan Ulang Tahun ke-10 1956 di Djakarta*. hal. 8-17, ketikan reproduksi oleh H.M. Taulu, Manado, 1956.
- * Taulu, H.M., *Sejarah Minahasa*, Penerbit Jajasan Membangun, Tomohon, 1950.
- * ----- dan A.U. Sepang, *Sejarah Bolaang Mongondow*, Penerbit dan Toko Buku Rame, Manado, 1961.
- * Tumenggung Sis, Drs.M., Drs.A.J. Ulaeh, Drs.R. Tandi, Dra. Ny. E. Inkiriwang-Kalangie, N. Rondonuwu, *Adat Istiadat Daerah Sulawesi Utara*, P3KD Sulawesi Utara 1977/1978, Manado, 1977.

PROPINSI SULAWESI UTARA



SKALA 1 : 2.000.000

Tidak diperdagangkan untuk umum

Perpustakaan
Jenderal